



Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd
BUPATI PESISIR SELATAN

Apt. RUDI HARIANSYAH, S.Si
WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN

LPPD

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022**



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**

Kabupaten Pesisir Selatan

Provinsi Sumatera Barat

TAHUN 2022



Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd
BUPATI PESISIR SELATAN



Apt. RUDI HARIYANSYAH, S.Si
WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN



MAWARDI ROSKA, S.IP

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2010-2030

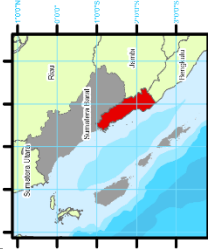
PETA ADMINISTRASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN



SKALA 1 : 500.000

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 84 Zone 47S

INDEKS LOKASI



KETERANGAN :

IBUKOTA PEMERINTAHAN

● Ibukota Kabupaten

○ Ibukota Kecamatan

BATAS ADMINISTRASI

— Batas Provinsi

- - - Batas Kabupaten/Kota

— Batas Kecamatan

JARINGAN JALAN

— Jalan Kolektor

— Jalan Lokal

PERAIRAN

— Garis Pantai

— Sungai

UNSUR ALAM

▲ Pegunungan

ADMINISTRASI KECAMATAN

— Airpura

— Basa Ampek Balai Tapan

— Basang Kipas

— Bayang

— IV Jural

— IV Nagari Bayang Utara

— Koto XI Tarusan

— Lengayang

— Linggo Sari Baganti

— Lunang

— Pancung Soal

— Ranah Ampek Hulu Tapan

— Ranah Pesisir

— Silaut

— Sutea

SUMBER DATA :

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, 2010

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, 2010

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, 2010

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, 2010

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, 2010

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, 2010

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, 2010

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, 2010

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, 2010

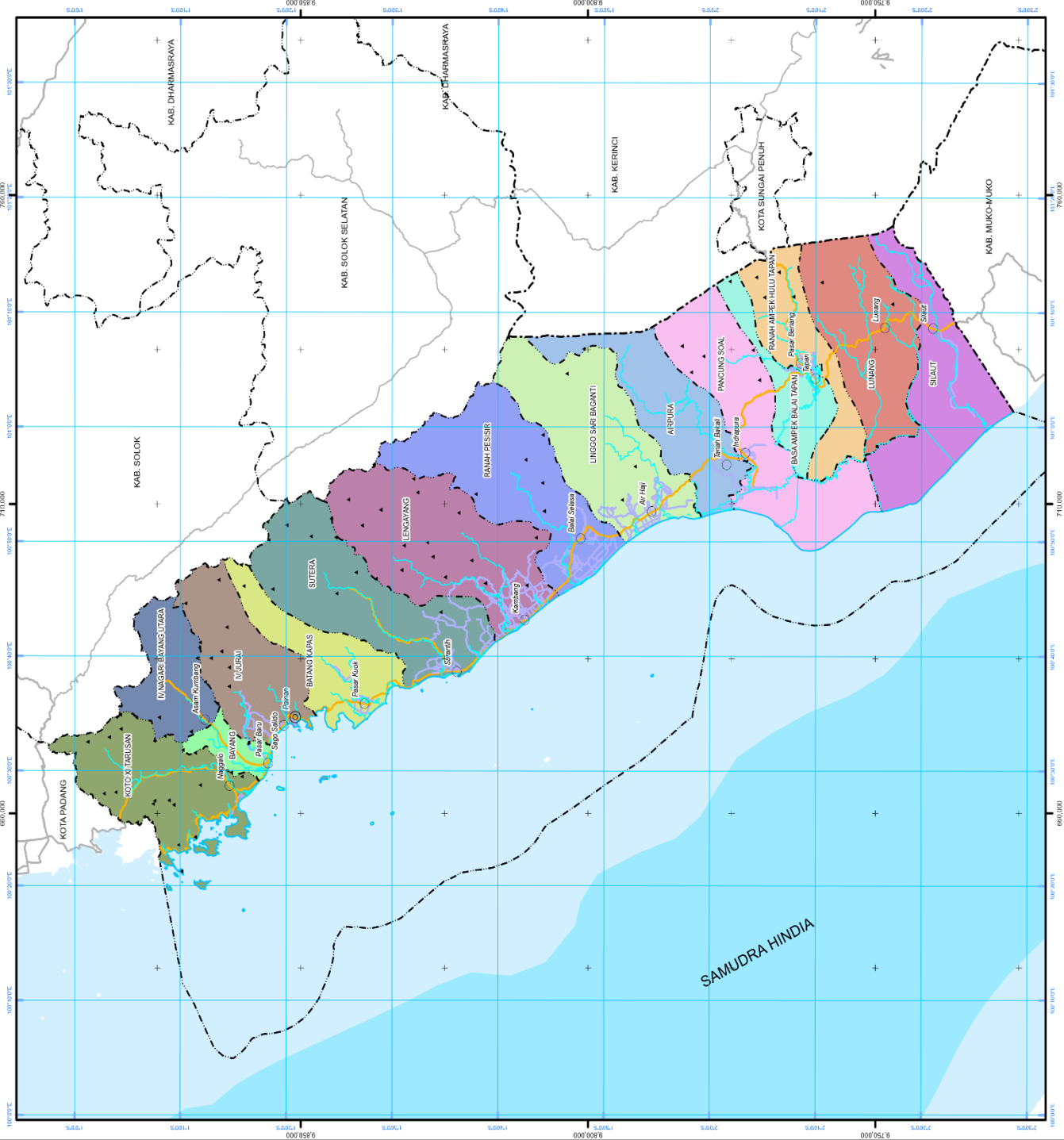
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, 2010

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, 2010

BUPATI PESISIR SELATAN

Ttd

Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 telah selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan, yang merupakan kewajiban Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir serta dalam pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Sumatera Barat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini merupakan dokumen dalam upaya menciptakan akuntabilitas dan transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja birokrasi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yang dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

Adapun tujuan penyusunan LPPD ini adalah sebagai perwujudan kinerja Kepala Daerah dalam sistem pelaporan yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap Pemerintah dan meningkatkan kinerja instansi Pemerintah sehingga terciptanya pemerintahan yang baik, dan kepada segenap Aparatur sipil daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kami sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kerja keras dan komitmen yang tinggi dalam membangun Kabupaten Pesisir Selatan kearah yang lebih baik sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026.



Melalui penyampaian LPPD ini diharapkan akan terlihat gambaran pelaksanaan, permasalahan dan solusi seluruh program dan kegiatan yang diamanatkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, Mudah-mudahan segala upaya bersama yang telah dilakukan akan bermanfaat bagi kemajuan Kabupaten Pesisir Selatan dimasa yang akan datang.

Painan, 30 Maret 2023

BUPATI PESISIR SELATAN



Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	13
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	24
BAB II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	30
2.1. Capaian Kinerja Makro	30
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	31
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	31
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	67
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	75
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	76
BAB III. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	223
3.1. Identifikasi Tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat di atasnya	223
3.2. Identifikasi Tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya	224
BAB IV. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	209
4.1. Bidang Urusan Pendidikan	209
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar	209
4.1.2 Target Pencapaian SPM	211
4.1.3 Anggaran	227
4.1.4 Dukungan Personil	227
4.1.5 Hasil Capaian	227
4.1.6 Permasalahan dan Solusi	231
4.2. Bidang Urusan Kesehatan	231
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar	231
4.2.2 Target Pencapaian SPM	237
4.2.3 Anggaran	241
4.2.4 Dukungan Personil	242
4.2.5 Hasil Capaian	237
4.2.6 Permasalahan dan Solusi	245



4.3.	Bidang Urusan Pekerjaan Umum	250
4.3.1.	Jenis Pelayanan Dasar	250
4.3.2.	Target Pencapaian SPM	251
4.3.3.	Anggaran	251
4.3.4.	Dukungan Personil	251
4.3.5.	Hasil Capaian	252
4.3.6.	Permasalahan dan Solusi	252
4.4.	Bidang Urusan Perumahan Rakyat	254
4.4.1.	Jenis Pelayanan Dasar	254
4.4.2.	Target Pencapaian SPM	254
4.4.3.	Anggaran	255
4.4.4.	Dukungan Personil	254
4.4.5.	Hasil Capaian	254
4.4.6.	Permasalahan dan Solusi	254
4.5.	Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	272
	Satuan Polisi PP dan Damkar	256
4.5.1.	Jenis Pelayanan Dasar	256
4.5.2.	Target Pencapaian SPM	256
4.5.3.	Anggaran	257
4.5.4.	Dukungan Personil	258
4.5.5.	Hasil Capaian	259
4.5.6.	Permasalahan dan Solusi	260
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	262
4.5.1.	Jenis Pelayanan Dasar	262
4.5.2.	Target Pencapaian SPM	263
4.5.3.	Anggaran	266
4.5.4.	Dukungan Personil	267
4.6.	Bidang Urusan Sosial	268
4.6.1.	Jenis Pelayanan Dasar	268
4.6.2.	Target Pencapaian SPM	271
4.6.3.	Anggaran	278
4.6.4.	Dukungan Personil	279
4.6.5.	Hasil Capaian	280
4.6.6.	Permasalahan dan Solusi	291
BAB V	PENUTUP	292



BAB 1

PENDAHULUAN

LPPD

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2022**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Dasar hukum pembentukan daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah.

Pembentukan dan pembagian wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan sudah melalui beberapa tahapan pemekaran Kecamatan dan pemekaran Desa/Nagari yang pada saat ini terdiri atas 15 kecamatan (pemekaran 3 kecamatan, 16 Juli 2012) dan 182 nagari (pemekaran Nagari tahun 2011).

Sektor perkebunan terutama perkebunan sawit mulai berkembang pesat sejak sepuluh tahun terakhir, yang berlokasi di Kecamatan Pancung Soal, Basa Ampek Balai dan Lunang. Melibatkan beberapa investor nasional dengan pola perkebunan inti dan plasma.

Pesisir Selatan selain itu juga memiliki panorama alam yang cukup cantik dan mempesona. Kawasan Mandeh misalnya, sekarang kawasan wisata ini oleh pemerintah pusat masuk dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPNAS) mewakili kawasan barat Indonesia.

Kawasan wisata potensial lainnya adalah Jembatan Akar, Water Pall Bayang Sani, Cerocok Beach Painan, Bukit Langkisau, Nyiur Melambai serta sejumlah objek wisata sejarah, seperti Pulau Cingkuak (Cengco), Peninggalan Kerajaan Inderapura dan Rumah Gadang Mandeh Rubiah Lunang.

b. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Pesisir Selatan terletak di ujung paling selatan Provinsi Sumatera Barat, dilalui jalur lintas barat Sumatera, dan berada di persimpangan strategis menuju Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi. Secara geografis Kabupaten Pesisir Selatan terletak di titik 0o 57' 31, 21'' LS - 20 28' 42, 32'' LS dan 100o 17' 48, 64 BT - 101o 17' 34, 3 BT, dengan luas $\pm 6.049.34 \text{ km}^2$, atau 14, 22 % dari luas



Provinsi Sumatera Barat. Dengan luas wilayah ini, maka Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kabupaten terluas di Provinsi Sumatera Barat. Panjang garis pantai Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 220 kilometer, membentang dari perbatasan dengan Kota Padang di utara, sampai ke perbatasan dengan Provinsi Bengkulu di Selatan.

Letak Kabupaten Pesisir Selatan di sisi Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia, di sisi Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Di sisi Utara berbatasan dengan Kota Padang, serta di sisi Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Painan sebagai Ibukota Kabupaten Pesisir Selatan, berjarak 78 kilometer dari Kota Padang, atau sejauh 102 kilometer dari Bandara Internasional Minangkabau. Jarak tempuh Painan ke Bandara BIM dapat ditempuh dengan perjalanan darat dalam waktu kurang dari 3 jam.

Secara administratif, Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 wilayah kecamatan dan 182 wilayah nagari. Jumlah nagari (nama lain dari desa) yang dimiliki oleh Kabupaten Pesisir Selatan, adalah yang terbanyak diantara kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Gambaran terhadap luas masing-masing kecamatan dan jumlah nagari serta kampung dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Luas Kecamatan, Jumlah Nagari dan Kampung
pada Setiap Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Nagari	Jumlah Kampung
A.	Wilayah Darat	6.049,33	182	480
1.	Koto XI Tarusan	437,37	23	51
2.	IV Nagari Bayang Utara	80,92	17	45
3.	Bayang	242,33	6	17
4.	IV Jurai	368,19	20	52
5.	Batang Kapas	277,54	9	29
6.	Sutera	569,81	12	32
7.	Lengayang	632,96	9	45
8.	Ranah Pesisir	562,44	10	27
9.	Linggo Sari Baganti	557,66	16	43
10.	Airpura	547,41	10	24
11.	Pancung Soal	380,10	10	20
12.	Ranah Ampek Hulu Tapan	187,46	10	20
13.	Basa Ampek Balai Tapan	281,96	10	20
14.	Lunang	456,73	10	27
15.	Silaut	466,45	10	28
B.	Wilayah Laut	84,312	84,312	84,312

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki topografi wilayah berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar 0-1000 m dari permukaan laut, memiliki 57 buah pulau serta dialiri sebanyak 18 sungai dengan 11 sungai besar dan 7 sungai kecil. Secara umum Kabupaten Pesisir Selatan beriklim tropis dengan temperatur bervariasi antara 230° C hingga 320° C disiang hari dan 20° C 280 °C dimalam hari dengan curah hujan rata-rata 224.63 mm perbulan. Kota Painan sebagai ibukota kabupaten berada pada ketinggian 3 meter dari permukaan laut dan untuk kota kecil lain pada umumnya terletak pada lokasi yang rendah kecuali daerah Asam Kumbang, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara berada pada ketinggian 60 meter di atas permukaan laut. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.2
Ketinggian Beberapa Tempat dari Permukaan Laut
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No.	Nama Tempat	Ketinggian
1	2	3
1	Silaut	14 meter
2	Lunang	30 meter
3	Basa Ampek Balai Tapan	25 meter
4	Ranah Ampek Hulu Tapan	28 meter
5	Pancung Soal	15 meter
6	Airpura	39 meter
7	Linggo Sari Baganti	7 meter
8	Ranah Pesisir	4 meter
9	Lengayang	2 meter
10	Sutera	3 meter
11	Batang Kapas	5 meter
12	IV Jurai	3 meter
13	Bayang	4 meter
14	IV Nagari Bayang Utara	60 meter
15	Koto XI Tarusan	3 meter

Sumber : BPS, Buku Pesisir Selatan Dalam Angka 2023

c. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan jumlah penduduk tahun 2022 tercatat 520.293 jiwa yang terdiri dari 260.489 laki-laki dan 259.804 perempuan. Sementara menurut data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 tercatat 516.518 jiwa yang terdiri dari 260.118 laki-laki dan 256.400 perempuan. Dari dua sumber data tersebut terdapat perbedaan sebanyak 3.775 jiwa. Perbedaan data tersebut disebabkan oleh perbedaan metodologi yang digunakan dalam pendataan. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Komposisi Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pancung Soal	13.745	13.596	27.341
2	Ranah Pesisir	17.054	17.625	34.679
3	Lengayang	31.206	31.266	62.472
4	Batang Kapas	18.527	18.702	37.229
5	IV Jurai	26.316	26.244	52.560
6	Bayang	21.743	21.973	43.716
7	Koto XI Tarusan	27.289	27.236	54.525
8	Sutera	29.368	28.963	58.331
9	Linggo Sari Baganti	25.497	25.384	50.881
10	Lunang	11.528	11.143	22.671
11	Basa Ampek Balai Tapan	8.112	8.117	16.229
12	IV Nagari Bayang Utara	4.189	4.358	8.547
13	Airpura	9.798	9.612	19.410
14	Ranah Ampek Hulu Tapan	7.972	7.808	15.780
15	Silaut	8.145	7.777	15.922
Total Kabupaten		260.489	259.804	520.293

Sumber : Data Agregat Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, menurut data Badan Pusat Statistik yaitu wilayah yang paling padat



penduduknya adalah Kecamatan Bayang dengan kepadatan rata-rata 531,43 jiwa/Km² dan Kecamatan Silaut dengan kepadatan terendah rata-rata 34,63 jiwa/Km². Hal Ini dapat dilihat pada tabel 1.4 sebagai berikut:

Tabel 1.4
Kepadatan Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km ²)
1	Silaut	34,63
2	Lunang	50,86
3	Basa Ampek Balai Tapan	56,50
4	Ranah Ampek Hulu Tapan	85,05
5	Pancung Soal	49,97
6	Airpura	49,24
7	Linggo Sari Baganti	90,07
8	Ranah Pesisir	60,91
9	Lengayang	98,77
10	Sutera	101,50
11	Batang Kapas	134,50
12	IV Jurai	141,53
13	Bayang	531,43
14	IV Nagari Bayang Utara	34,80
15	Koto XI Tarusan	122,27
Rata-Rata		85,38

Sumber : Data BPS, Buku Pesisir Selatan Dalam Angka 2023

Berdasarkan struktur usia, menurut Badan Pusat Statistik komposisi penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang produktif (range usia 20 s/d 54 tahun) hanya 257.746 jiwa (49,9 persen). Sementara usia yang di anggap tidak produktif berjumlah 258.772 jiwa (50,09 persen), untuk lebih jelasnya komposisi penduduk Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan struktur usia dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut:

Tabel 1.5
Komposisi Penduduk Menurut Struktur Usia
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No.	Kelompok Umur	Penduduk		Jumlah
		Laki - Laki N (jiwa)	Perempuan N (jiwa)	
1	00-04	22.197	21.057	43.236
2	05-09	21.414	20.384	41.798



No.	Kelompok	Penduduk		
3	10-14	22.862	21.748	44.610
4	15-19	23.950	22.001	45.951
5	20-24	22.276	20.970	43.246
6	25-29	20.714	19.105	39.819
7	30-34	20.137	19.032	39.169
8	35-39	18.775	18.731	37.506
9	40-44	18.169	18.276	36.445
10	45-49	16.115	15.990	32.105
11	50-54	14.587	14.869	29.456
12	55-59	11.593	12.808	24.401
13	60-64	10.357	11.674	22.031
14	65-69	8.143	8.530	16.673
15	70-74	5.280	5.850	11.130
16	> 75	3.567	5.375	8.942
Total Kabupaten		260.118	256.400	516.518

Sumber : BPS, Buku Pesisir Selatan Dalam Angka 2023

Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Pesisir Selatan menurut data Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil adalah 159.673 KK. Jumlah KK terbanyak berada di Kecamatan Lengayang yaitu sebesar 19.680 KK, dan yang paling sedikit berada pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yaitu 2.789 KK. Untuk lebih jelasnya jumlah Kepala Keluarga (KK) yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 1.6 berikut.

Tabel 1.6

Jumlah Kepala Keluarga Per Kecamatan
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No.	Kecamatan	Keluarga	
		N (KK)	(%)
1	Pancung Soal	7.760	4,9
2	Ranah Pesisir	11.340	7,1
3	Lengayang	19.680	12,3
4	Batang Kapas	11.666	7,3
5	IV Jurai	16.209	10,2
6	Bayang	13.685	8,6
7	Koto XI Tarusan	16.289	10,2
8	Sutera	17.237	10,8
9	Linggo Sari Baganti	15.901	10,0
10	Lunang	7.002	4,4
11	Basa Ampek Balai Tapan	4.763	3,0
12	IV Nagari Bayang Utara	2.789	1,7
13	Airpura	5.738	3,6
14	Ranah Ampek Hulu Tapan	4.638	2,9
15	Silaut	4.976	3,1
Total Kabupaten		159.673	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022



Sumber utama perekonomian masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan berada pada sektor agraris yang meliputi pertanian, perkebunan dan perikanan. Sektor agraris ini belum sepenuhnya diolah dengan penerapan teknologi yang maju, sebagian besar masih diolah secara tradisional.

Menurut komposisi penduduk usia 15 tahun menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu dan jenis kelamin di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dimana total angkatan bekerja yaitu 2.868.270 dan masih terdapat 180.106 pengangguran didalamnya. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 1.7.

Tabel 1.7

Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
	<i>Angkatan Kerja</i>	1.692.039	1.376.231	2.868.270
1	Bekerja	1.587.057	1.101.107	2.688.164
2	Pengangguran Terbuka	104.982	75.124	180.106
	<i>Bukan Angkatan Kerja</i>	356.808	913.871	1.270.679
1	Sekolah	179.043	208.730	387.773
2	Mengurus Rumah Tangga	74.472	650.057	724.529
3	Lainnya	103.293	55.084	158.377
	Total	2.048.847	2.090.102	4.138.949

Sumber : Data BPS, Buku Pesisir Selatan Dalam Angka 2023

Tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan masih relatif rendah. Namun berdasarkan indikator yang ada, terjadi kecenderungan peningkatan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, serta indek pembangunan manusia seperti dapat dilihat pada tabel 1.8.

Tabel 1.8

Data Perkembangan Pembangunan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup	70,45	70,73	70,86	70,96	71,25
Angka Harapan Lama Sekolah	13,30	13,31	13,32	13,33	13,35
Rata-rata lama sekolah	8,14	8,25	8,26	8,27	8,43
IPM	69,4	70,08	69,9	70,03	70,84

Sumber : Data BPS, Buku Pesisir Selatan Dalam Angka 2023



d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Nagari/Kelurahan di Kabupaten Pesisir Selatan

Wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 kecamatan (pemekaran 3 kecamatan, 16 Juli 2012) dan 182 nagari (pemekaran Nagari tahun 2011), dan 480 kampung dengan Kecamatan Terluas adalah Kecamatan Lengayang 632,96 km dan Kecamatan Terkecil adalah Kecamatan Bayang 80,32 km. hal ini dapat dilihat pada tabel 1.9 dan 1.10 berikut:

Tabel 1.9

Jumlah Kecamatan, Ibukota Kecamatan dan Luas Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan 2022

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km)
1	Silaut	Silaut	466,45
2	Lunang	Lunang	456,73
3	Basa Ampek Balai Tapan	Tapan	281,96
4	Ranah Ampek Hulu Tapan	Pasar Beriang	187,46
5	Pancung Soal	Inderapura	547,41
6	Airpura	Tamuan	380,10
7	Linggo Sari Baganti	Air Haji	557,66
8	Ranah Pesisir	Balai Selasa	562,44
9	Lengayang	Kambang	632,96
10	Sutera	Surantih	569,81
11	Batang Kapas	Pasar Kuok	277,54
12	IV Jurai	Salido	368,19
13	Bayang	Pasar Baru	80,32
14	IV Nagari Bayang Utara	Asam Kumbang	242,33
15	Koto XI Tarusan	Nanggalo	437,37
Total Kabupaten			6.049,33

Sumber : Data BPS, Buku Pesisir Selatan Dalam Angka 2023

Tabel 1.10

Jumlah Desa/Kelurahan/Nagari dari tahun 2018 – 2022 di Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Silaut	10	10	10	10	10
2	Lunang	10	10	10	10	10
3	Basa Ampek Balai Tapan	10	10	10	10	10
4	Ranah Ampek Hulu Tapan	10	10	10	10	10
5	Pancung Soal	10	10	10	10	10
6	Airpura	10	10	10	10	10



7	Linggo Sari Baganti	16	16	16	16	16
8	Ranah Pesisir	10	10	10	10	10
9	Lengayang	9	9	9	9	9
10	Sutera	12	12	12	12	12
11	Batang Kapas	9	9	9	9	9
12	IV Jurai	20	20	20	20	20
13	Bayang	17	17	17	17	17
14	IV Nagari Bayang Utara	6	6	6	6	6
15	Koto XI Tarusan	23	23	23	23	23
Pesisir Selatan		182	182	182	182	182

Sumber : Data BPS, Buku Pesisir Selatan Dalam Angka 2023

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

1. Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah yang memimpin suatu daerah otonom dalam hal ini Bupati, maka diperlukan adanya perangkat daerah. Perangkat daerah adalah lembaga atau badan pemerintahan daerah yang membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Perangkat daerah antara lain terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah (OPD), lembaga teknis daerah, kecamatan, nagari dan jorong. . hal ini dapat dilihat pada tabel 1.11 berikut:

Tabel 1.11

Jumlah dan Nama Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022

No.	Perangkat Daerah	Alamat	Ket
1.	Sekretariat Daerah	Painan	
2.	Sekretariat DPRD	Painan	
3.	Inspektorat	Painan	
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Painan	
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sago	
6.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup	Painan	
7.	Dinas Pertanian	Painan	
8.	Dinas Perikanan dan Pangan	Painan	
9.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Painan	
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Painan	
11.	Dinas Perhubungan	Sago	
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Painan	
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Painan	
14.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Painan	
15.	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	painan	
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Painan	



17.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Painan	
18.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Painan	
19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Painan	
20.	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Sago	
21.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Painan	
22.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Painan	
23.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Painan	
24.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Painan	
25.	RSUD Dr.M.Zein Painan	Painan	
26.	Kantor Camat Koto XI Tarusan	Nanggalo	
27.	Kantor Camat Bayang	Ps.Baru Bayang	
28.	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara	Asam Kumbang	
29.	Kantor Camat IV Jurai	Salido	
30.	Kantor Camat Batang Kapas	Pasar Kuok	
31.	Kantor Camat Sutera	Surantih	
32.	Kantor Camat lengayang	Kambang	
33.	Kantor Camat Ranah Pesisir	Balai Selasa	
34.	Kantor Camat Linggo Sari Baganti	Air Haji	
35.	Kantor Camat Pancung Soal	Indrapura	
36.	Kantor Camat Airpura	Tamuan	
37.	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	Psr Beriang	
38.	Kantor Camat Basa Ampek hulu Tapan	Tapan	
39.	Kantor Camat Lunang	Lunang	
40.	Kantor Camat silaut	Silaut	

2. Pegawai Pemerintah

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Pegawai Pemerintah di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022 menurut jabatan, jenis kelamin sebanyak 3.952 Perempuan dan 1.870 laki-laki dan tingkat pendidikan Sarjana 4.003 orang, tamat SD sebanyak 8 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.12 dan Tabel 1.13 berikut.

Tabel 1.12

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Utama	-	-	-
2	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	1	-	1
3	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	26	3	29



4	Administrator	112	46	158
5	Pengawas	90	109	199
6	Eselon V/5	-	-	-
7	Jabatan Fungsional Dosen	-	-	-
8	Jabatan Fungsional Guru	848	2.265	3.113
9	Jabatan Fungsional Medis	96	920	1.016
10	Jabatan Fungsional Teknis	208	202	410
11	Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana	489	407	896
Jumlah		1.870	3.952	5.822

Sumber : Data BPS, Buku Pesisir Selatan Dalam Angka 2023

Tabel 1.13
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pesisir Selatan Menurut
Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pesisir Selatan
tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	7	1	8
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	27	4	31
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	380	312	692
4	Diploma I/ Akta I	1	10	11
5	Diploma II/ Akta II	84	190	274
6	Diploma III/ Akta III	82	768	850
7	Diploma IV/ Akta IV	3	49	52
8	S 1/Sarjana	1.225	2.778	4.003
9	S 2/Pasca Sarjana	246	167	413
10	S 3/Doktor/Ph.D	-	-	-
Jumlah		2.055	4.279	6.334

Sumber : Data BPS, Buku Pesisir Selatan Dalam Angka 2023

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 1.14
Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan Desember 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2022

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.662.717.929.358,00	1.633.057.724.701,01	98,22	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	139.571.499.732,00	145.637.815.190,01	104,35	-
4.1.01.	Pajak Daerah	27.570.180.014,00	27.788.857.519,00	100,79	-
4.1.02.	Retribusi Daerah	4.537.044.250,00	3.990.134.633,00	87,95	-
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.766.118.702,00	9.928.421.974,00	101,66	-
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	97.698.156.766,00	103.930.401.064,01	106,38	-
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.478.227.245.818,00	1.442.770.582.697,00	97,60	-
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.381.617.701.514,00	1.350.825.408.000,00	97,77	-
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	96.609.544.304,00	91.945.174.697,00	95,17	-
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	44.919.183.808,00	44.649.326.814,00	99,40	-
4.3.01.	Pendapatan Hibah	44.219.183.808,00	44.530.897.014,00	100,70	-
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	700.000.000,00	118.429.800,00	16,92	-
5.	BELANJA DAERAH	1.763.605.092.125,00	1.629.132.948.487,50	92,38	-
5.1.	BELANJA OPERASI	1.206.766.763.146,00	1.119.345.707.675,50	92,76	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	748.588.025.998,00	689.434.142.713,50	92,10	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	397.758.132.382,00	371.823.293.418,00	93,48	-
5.1.05.	Belanja Hibah	57.225.604.766,00	55.453.182.969,00	96,90	-
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	3.195.000.000,00	2.635.088.575,00	82,48	-
5.2.	BELANJA MODAL	273.299.477.867,00	263.195.433.274,00	96,30	-
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	2.674.712.693,00	506.538.418,00	18,94	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.739.865.764,00	70.113.670.812,00	93,81	-
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.313.258.090,00	37.752.377.626,00	98,54	-
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	151.238.501.489,00	149.489.587.144,00	98,84	-
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.333.139.831,00	5.333.259.274,00	84,21	-
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	37.647.797.307,00	1.515.568.300,00	4,03	-
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	37.647.797.307,00	1.515.568.300,00	4,03	-
5.4.	BELANJA TRANSFER	245.891.053.805,00	245.076.239.238,00	99,67	-
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	4.536.097.205,00	3.721.283.638,00	82,04	-
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	241.354.956.600,00	241.354.955.600,00	100,00	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(100.887.162.767,00)	3.924.776.213,51	(3,89)	-
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	100.887.162.767,00	104.722.162.767,06	103,80	-
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	107.754.162.767,00	107.754.162.767,06	100,00	-
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	107.754.162.767,00	107.754.162.767,06	100,00	-
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.867.000.000,00	3.032.000.000,00	44,15	-



Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	6.867.000.000,00	3.032.000.000,00	44,15	-
	PEMBIAYAAN NETTO	100.887.162.767,00	104.722.162.767,06	103,80	-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	108.646.938.980,57	-	-

Painan, 31 Desember 2022

NIP.

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah

- 1) Sebagian besar Tugas Pembantuan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Kegiatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringnya ditemui kesulitan dalam pelaksanaan dilapangan. Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun dari tahun sebelumnya sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa dicapai.
- 2) Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja serta pelayanan publik yang prima.
- 3) Memantapkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana dengan Mengurangi risiko bencana dengan membangun kesiapsiagaan dan infrastruktur di seluruh lini secara terencana dan terpadu, Memobilisasi kemampuan masyarakat dan lembaga pada masa krisis dengan tujuan utama meminimalkan korban saat bencana dan mempercepat penyelesaian masa darurat bencana, serta Memulihkan dampak bencana secara fisik dan psikologis dengan tujuan utama melaksanakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pemulihan stabilitas kehidupan daerah korban bencana.
- 4) Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkala dengan Indikator Prosentase Penyusunan APBD Tepat Waktu dan Prosentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel, Berkualitas dengan Indikator Prosentase Barang Milik Daerah



Bernilai Ekonomis dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dengan indikator Hasil Penilaian AKIP.

- 5) Meningkatnya akses pendidikan, Meningkatnya mutu pendidikan, Meningkatnya jumlah seni budaya lokal yang direvitalisasi dan Meningkatnya benda cagar budaya yang direvitalisasi.
- 6) Peningkatan Target dan Realisasi Umur Harapan Hidup dari tahun ke tahun.
- 7) Menurunkan persentase angka kecelakaan pertahun.
- 8) Jumlah Produksi Perikanan menurun karena adanya wabah corona (covid 19) yang berdampak kepada perekonomian masyarakat dan faktor cuaca.
- 9) Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB dimana Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan peringkat Baik.
- 10) Peningkatan mutu genetik ternak tiap tahun dan Menurunnya angka kematian ternak dan kasus zoonosis dari tahun sebelumnya.
- 11) Menurunkan tingkat pengangguran, pemenuhan hak-hak pekerja dan peningkatan kemandirian masyarakat transmigran.
- 12) Pencapaian skor pola pangan harapan (pph) Tahun 2020.
- 13) Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB, Produktivitas padi per hektar, Cakupan Bina Kelompok Pertanian.
- 14) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Nagari, Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Nagari, dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan Nagari.
- 15) Peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), Penetapan Objek Pemeriksaan, Jadwal dan besaran anggaran Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dan Pengoptimalan pengelolaan risiko pada tingkat Pemerintah Daerah.

b. Visi Dan Misi Kepala Daerah

1. VISI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Visi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dapat terwujud dalam rentang waktu lima tahun yaitu



tahun 2021-2026. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai visi pembangunan jangka menengah daerah yang akan diharapkan terwujud pada akhir tahun 2026, yang menggambarkan tujuan dan sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya

Sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, visi Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

**“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA,
MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN
YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”**

Penjabaran dan filosofi dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Sejahtera** : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- Maju** : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan.
- Bermartabat** : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Barsandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).
- Akuntabel** : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- Profesional** : Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

2. MISI

Misi pembangunan 2021-2026 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026, yaitu Mewujudkan Pesisir



Selatan lebih sejahtera, maju, dan bermatahat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional. Misi pembangunan 2021-2026 diarahkan untuk meletakkan fondasi kokoh bagi pembangunan Pesisir Selatan ke depan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan fundamental perekonomian daerah. Usaha-usaha perwujudan visi 2021 dijabarkan dalam misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan. Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Strategi pembangunan daerah pada tahun 2021 disusun berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Misi Pertama:

Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan.

Misi pertama ini memuat beberapa kata kunci yaitu: (1) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, (2) Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur, (3) Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Hal ini lahir dari adanya tuntutan masyarakat akan layanan birokrasi yang bersih, berkinerja tinggi dan pelayanan publik yang berkualitas.

Membangun transparansi dan akutabilitas kinerja yang dimaksud dalam misi ini yaitu adanya saluran-saluran yang terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi, mengawasi dan memberi umpan balik terhadap setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kondisi ini ditandai dengan terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintahan, peningkatan akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah, makin

efektifnya penerapan e-government untuk mendukung open government pada seluruh instansi pemerintah daerah.

2. Misi Kedua:

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat

Pada misi ini terdapat dua kata kunci yang menentukan peningkatan kualitas hidup masyarakat, yaitu: (1) peningkatan derajat kesehatan; dan (2) peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini lahir dari adanya cita-cita untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat serta pemenuhan perlindungan sosial lainnya bagi masyarakat ekonomi lemah.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat sangat terkait dengan kualitas kesehatan masyarakat dan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas. Karena itu perlu untuk terus mendorong pemenuhan dan peningkatan tenaga kesehatan, sarana pelayanan primer (Puskesmas, klinik dan dokter praktek mandiri), pemenuhan prasarana pendukung (alat kesehatan, obat, dan perbekalan kesehatan lainnya), serta inovasi untuk pelayanan daerah terpencil.

Upaya ini tentu dilakukan dengan terus mendorong upaya-upaya promotif dan preventif secara masif dan terstruktur. Di sisi lain, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat ekonomi lemah, akan terus didorong sehingga beban hidup masyarakat dapat dikurangi.

3. Misi Ketiga:

Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah.

Pada misi ini terdapat hal-hal strategis yang perlu menjadi kata kunci antara lain: (1) komoditi unggulan; (2) mengoptimalkan industri pengolahan; (3) pemetaan potensi (4) pelestarian lingkungan hidup dan kawasan lindung; dan (5) pembangunan infrastruktur.

Keberlimpahan potensi daerah, khususnya lahan yang subur untuk pertanian seharusnya dapat dioptimalkan untuk menghasilkan produk-produk yang mendorong meningkatnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Karena itu dibutuhkan kebijakan yang benar-benar fokus pada pengembangan komoditi yang sesuai dengan keunggulan kompetitif daerah sehingga sektor pertanian dapat ditingkatkan lagi daya ungkitnya bagi kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selain upaya untuk memperbesar nilai produksi komoditi sektor pertanian (pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan), yang tidak kalah penting adalah bagaimana memaksimalkan nilai tambah dari komoditi tersebut melalui

pengembangan sistem budidaya produksi hulu-hilir yang tertata, terorganisir dan terpadu.

Pada tataran inilah konsep hilirisasi dan industrialisasi harus dijadikan arus utama pengembangan perekonomian daerah. Karena itu, ke depan pemerintah daerah akan mendorong terwujudnya keterpaduan antara upaya peningkatan produksi budidaya dengan peningkatan produk-produk turunannya yang bernilai ekonomi lebih tinggi.

Sejalan dengan upaya peningkatan nilai tambah komoditi, pemerintah daerah juga akan mencoba untuk meminimalkan production cost akibat ekonomi berbiaya tinggi yang selama ini menjadi salah satu penyebab rendahnya daya saing produk yang dihasilkan. Pemerintah daerah akan mengupayakan pemenuhan dan pemerataan infrastruktur penunjang perekonomian di seluruh wilayah seperti, konektivitas, penyediaan sumber air, jalan-jalan produksi dan sarana-prasarana lain yang dibutuhkan masyarakat. Dan yang lebih penting, untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan kekayaan alam dan potensi yang berlimpah ini maka setiap upaya pembangunan harus dilakukan dengan selalu menjaga kelestarian lingkungan.

4. Misi Keempat

Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan

Pada misi keempat ini terdapat dua kata kunci (1) Wisata yang Nyaman berkesan, dan (2) Pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkontribusi bagi kesejahteraan.

Membangun sektor pariwisata, tidak bisa dilepaskan dengan membangun manusia. Paradigma yang selama ini beranggapan bahwa membangun pariwisata itu lebih terfokus pada pembangunan destinasi dan infrastruktur saja perlu digeser kepada paradigma baru bahwa fokus utama pembangunan pariwisata itu adalah pembangunan manusianya (pelakunya). Oleh karena itu arah pengembangan kepariwisataan ke depan lebih dititikberatkan kepada pembenahan manajemen pengelolaan destinasi, penguatan peran pentahelix dan pemberdayaan masyarakat pelaku wisata.

Ke depan, Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi berfokus pada upaya menjual keindahan alam semata, namun akan ditingkatkan pada upaya menjual keunikan ragam budaya, keramahtamahan masyarakat, kenyamanan destinasi dan kreatifitas masyarakat dan generasi muda. Karena itu kedepannya akan diberikan perhatian yang lebih kepada upaya pemberdayaan masyarakat pelaku wisata, pengembangan potensi kekayaan budaya dan kearifan lokal serta

memperkuat peran nagari dalam memanfaatkan peluang daya ungkit pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata ini.

Dengan semakin meningkatnya kualitas masyarakat yang mengamalkan Sapta Pesona, maka wisatawan yang berkunjung akan merasa nyaman dan terkesan sehingga dapat tinggal lebih lama dan akan berkunjung kembali ke Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga harapan bahwa Pesisir Selatan menjadi daerah wisata favorit yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya dapat terwujud.

5. Misi Kelima

Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumber

Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing Pada misi ini terdapat dua kata kunci yang nilainya sangat strategis, yaitu: (1) pendidikan yang berkualitas; dan (2) sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.

Pendidikan yang berkualitas, murah dan terjangkau oleh semua kalangan masyarakat, menjadi target yang ingin diwujudkan pada misi ini, sehingga keadaan dimana iklim dan sistem pendidikan yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatifitas, inovasi, wawasan kebangsaan, kecerdasan, kedisiplinan, rasa tanggung jawab, kreatifitas dan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dicapai.

Dengan menekankan upaya pembenahan pada sisi tenaga pendidik dan sisi peserta didik secara berimbang, maka diharapkan sistem pendidikan yang dibangun dapat melahirkan insan-insan yang religius, cerdas, berakhlak dan mampu bersaing dalam era globalisasi. Misi ini juga menjadi ikhtiar Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyambut datangnya bonus demografi.

6. Misi Keenam

Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman Tentram dan Dinamis

Pada misi keenam ini terdapat dua kata kunci yaitu (1) masyarakat yang aman dan tentram; dan (2) komunikasi yang harmonis dan dinamis antar lembaga.

Pembangunan suatu daerah akan berjalan dengan baik dan optimal serta memberikan nilai tambah positif apabila masyarakatnya berada dalam kondisi aman dan tenteram. Kondisi aman dan tentram inilah yang akan coba diwujudkan agar selalu tercipta dalam masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, dengan tujuan agar seluruh masyarakat menjadi Bahagia. Karena itu akan diupayakan untuk meminimalkan terjadinya konflik horizontal, perselisihan keluarga/



rumah tangga, kenakalan remaja, kekerasan pada anak dan perempuan.

Untuk mewujudkan keamanan, ketentraman dan kebahagiaan masyarakat tentu perlu sinergi yang harmonis seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Organisasi kemasyarakatan serta para tokoh agama dan pemangku adat.

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Prioritas pembangunan daerah pada tahun 2020 berorientasi kepada tingkat kebutuhan, analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan. Prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Pengamalan Agama, Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat

Pengamalan agama, pelestarian budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat diarahkan untuk mewujudkan kerukunan hidup beragama serta menanamkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat. Pengamalan agama yang telah dilaksanakan seperti dalam Pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan (MDA, TPA, LDS, Majelis Taklim, Remaja Masjid, Pengurus Masjid/Mushalla), memberikan bantuan sarana dan prasarana serta biaya operasional yang bersifat stimulan.

2) Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan;

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan diarahkan pada peningkatan pelayanan pendidikan, infrastruktur dan mutu pendidikan, menerapkan wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun, meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan, peningkatan dan pemerataan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta mewujudkan pendidikan berkarakter.

3) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Pesisir Selatan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat diarahkan untuk mewujudkan tatanan hidup masyarakat yang sehat dengan gizi seimbang, melalui peningkatan pelayanan, infrastruktur dan kualitas SDM kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan ini dapat dilihat dari kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat, meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, perbaikan status gizi masyarakat, menurunnya tingkat kematian ibu dan bayi, meningkatnya angka harapan hidup, meningkatnya pengendalian terhadap penyakit menular, dan meningkatnya



upaya penyehatan lingkungan.

4) Peningkatan Ekonomi Pangan Berbasis Komoditi Lokal yang Berdaya Saing

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi keanekaragaman pangan yang berbasis komoditi lokal. Namun potensi ini belum semuanya tergali secara optimal. Pengembangan potensi ekonomi pangan berbasis komoditi lokal akan meningkatkan daya saing produk industri pangan, berkembangnya penganekaragaman konsumsi pangan dengan komoditi lokal, penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi, meningkatkan kesempatan kerja pada sektor industri pangan.

5) Peningkatan Daya Tarik, Pemasaran, Industri dan Kelembagaan Pariwisata

Peningkatan daya tarik, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata diarahkan untuk mengembangkan objek-objek wisata utama, strategis dan potensial seperti Kawasan Mandeh, Jembatan Akar, Carocok Painan, Batu Nago, Pasir Putih Kambang dan Mandeh Rubiah menjadi objek wisata yang menarik. Dengan pengembangan pariwisata ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat, menumbuhkan kembangkan objek-objek wisata yang potensial, membuka lapangan kerja di sektor pariwisata, mewujudkan Pesisir Selatan sebagai tujuan wisata utama di Sumatera Barat, meningkatkan pemasaran objek-objek wisata pesisir selatan baik didalam maupun diluar negeri

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesisir untuk menarik kunjungan wisata, dan beberapa diantaranya telah menjadi event tahunan seperti Pelaksanaan Festival Langkisau dan Tour de Singkarak, serta pelaksanaan olahraga mancing sebagai agenda tahunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai upaya pengembangan wisata bahari yang berwawasan lingkungan.

6) Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Kawasan Ekonomi Strategis

Pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada dikawasan perdesaan dan kawasan-kawasan potensial, yang memberikan nilai tambah kepada daerah baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Hal ini dapat dilihat dari dibangunnya infrastruktur publik, adanya akses air bersih dan sanitasi, munculnya kawasan strategis yang bernilai ekonomi serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Untuk pengembangan kawasan ekonomi yang



dimaksud dalam hal ini adalah meliputi pengembangan kawasan ekonomi khusus, pengembangan kawasan produksi (agropolitan, minapolitan) dan sentra industri dimaksudkan untuk mempercepat transformasi ekonomi, seperti:

- a. Pengembangan kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut.
- b. Pengembangan kawasan sentra produksi agropolitan meliputi Kecamatan Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir dan Linggosari Baganti.
- c. Pengembangan kawasan Minapolitan meliputi Kecamatan Koto XI Tarusan, Sutera, Lengayang dan Linggosari Baganti.
- d. Pengembangan sentra produksi Tanaman Pangan dan hortikultura berada di Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang, IV Nagari Bayang Utara, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggosari Baganti, Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan dan Ranah IV Hulu Tapan.
- e. Kawasan perkebunan meliputi Kecamatan Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggosari Baganti, Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah IV Hulu Tapan, Lunang dan Silaut.
- f. Kawasan agroindustri meliputi kecamatan Koto XI Tarusan, Lengayang, Pancung Soal, Lunang dan Silaut.
- g. Sentra industri sulaman bayangan Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kampung Batik Lumpo Kecamatan IV Jurai.
- h. Sentra industri anyaman pandan Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang.
- i. Sentra industri makanan tradisional di Painan Kecamatan IV Jurai.

Kawasan ekonomi memerlukan dukungan aksesibilitas transportasi darat dan transportasi laut. Pengembangan Transportasi laut untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam kedaulatan maritim. Pengembangan transportasi laut di Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan dengan mendorong percepatan pembangunan Pelabuhan Panasahan Painan sebagai pelabuhan pengumpan regional yang difungsikan untuk mendukung pelabuhan Teluk Bayur.

Untuk pengembangan kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan



partisipatif.

Prinsip dan tujuan pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan dengan prinsip partisipatif, holistik dan komprehensif, berkesinambungan, keterpaduan, keadilan, keseimbangan, transparansi dan akuntabilitas. Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan rencana program dan kegiatan seluruh pemangku kepentingan dalam suatu kawasan.

Pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Pesisir Selatan meliputi Pengembangan Kawasan Berbasis Sapi Potong di Kecamatan Sutera, Integrasi Perkebunan Kelapa Sawit dengan Peternakan Sapi di Kecamatan Silaut, Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Kawasan Wisata Bahari Terpadu Mandeh, Pengembangan Kawasan Perdesaan berbasis Sentra Peternakan dan pengembangan kawasan perdesaan lainnya.

7) Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat Berbasis Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat berbasis lingkungan hidup dan kebencanaan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga kelestarian dan daya dukung sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan sehingga potensi sumber daya yang sudah ada dapat dipertahankan untuk usaha ekonomi masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dengan terbangunnya sarana prasarana penunjang perekonomian masyarakat, terwujud konservasi sumber daya alam, pengendalian kerusakan lingkungan, penurunan pencemaran lingkungan, dan terpeliharanya kearifan lingkungan.

Untuk mengantisipasi dampak lingkungan dalam pembangunan sarana dan prasarana diperlukan pengelolaan yang berwawasan lingkungan. Beberapa bentuk prasarana lingkungan tersebut antara lain :

- a. Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- b. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM).
- c. Sarana dan prasarana lingkungan yang sifatnya menunjang kehidupan masyarakat.
- d. Jalur Evakuasi Bencana Alam.

8) Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengurangan Angka



Pengangguran

Penurunan Tingkat kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin secara intensif. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, terlaksananya program perlindungan sosial, pemberian beasiswa bagi keluarga miskin, meningkatnya akses dan produktivitas usaha mikro, dan meningkatnya partisipasi angkatan kerja.

9) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Pelayanan Prima

Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan pelayanan prima pemerintahan diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga profesionalitas pemerintahan dan pelayanan publik yang prima dapat dicapai. Hal ini dapat dilihat dari tata pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan bebas KKN, terlaksananya pemerintahan yang transparan dan akuntabel, terwujudnya tata pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif, terhipunnya data statistik yang handal dan berdayaguna tinggi, dan terwujudnya sinergi antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota.

10) Pencegahan Tingkat Kejahatan, Kriminalitas dan Peredaran Obat Terlarang

Pencegahan tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat terlarang diarahkan untuk memperkuat struktur sosial dalam mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas serta peredaran obat-obat terlarang dilingkungan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada kuatnya kelembagaan dan jaringan serta kebijakan daerah terhadap gender dan HAM, pemberdayaan perempuan dalam berwirausaha, meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan, terciptanya keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat dan munculnya generasi muda yang mandiri dan berprestasi.

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bahwa ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal yang merupakan tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus dicapai oleh setiap Pemerintah Daerah pada batas waktu yang ditentukan.



Urusan wajib yang diamanatkan memiliki SPM adalah yang terkait pelayanan dasar sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan urusan wajib adalah :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan
- f. Sosial.

SPM merupakan tolak ukur untuk menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang pemerintahan umum, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum dan layanan publik lainnya. Evaluasi SPM merupakan pemberian gambaran terhadap kinerja penyelenggaraan oleh daerah melalui Perangkat Daerah terkait.

Adapun penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, memiliki nilai capaian sebesar 85% dengan rincian sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator	Target	REALISASI/ CAPAIAN DAERAH 2022
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
Pendidikan Dasar	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	80%	96,80 %
Pendidikan Kesenjangan	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	80%	51,80 %
Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	80 %	66,15 %
2. Dinas Kesehatan			
Pelayanan kesehatan ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan	679	679 (100%)
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan	648	648 (100%)

JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator	Target	REALISASI/ CAPAIAN DAERAH 2022
	pelayanan persalinan sesuai standar		
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	618	618 (100%)
Pelayanan kesehatan balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3.036	3.036 (100%)
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.	6.198	6.198 (100%)
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s/d 59 tahun mendapat layanan kesehatan sesuai standar	241.811	241811 (100%)
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	4875	4875 (100%)
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	82.305	82.305 (100%)
Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus.	Setiap penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	2058	2058 (100%)
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGj)	1000	1000 (100%)

JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator	Target	REALISASI/ CAPAIAN DAERAH 2022
(ODGj)	berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis (TBC)	Setiap orang dengan TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar.	5329	5329 (100%)
Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasasyarakatan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.	14595	14595 (100%)
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	2.854	2.854 (100%)
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	500	500 (100%)
4. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dan Lingkungan Hidup			
Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	3	3 (100%)
Penyediaan & Rehabilitasi	Jumlah Rumah Korban	-	-

JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator	Target	REALISASI/ CAPAIAN DAERAH 2022
Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kota	Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni		
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	130	130 (100%)
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	33	33 (100%)
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	170	170 (100 %)
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	57	57 (100%)
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	25.890	25.890 (100%)
6. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah	80 %	98,02 %

JENIS PELAYANAN DASAR		Indikator	Target	REALISASI/ CAPAIAN DAERAH 2022
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100%	3 x patroli dalam sehari/ 100%
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
Pelayanan informasi rawan bencana		Cakupan layanan informasi rawan bencana	100%	80%
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	80%
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	86,89%
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa rata-rata capaian sebesar 90%, realisasi capaian masih di bawah 100%.



BAB 2

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

LPPD

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2022**

-BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah nilai indeks pembangunan manusia pada daerah yang bersangkutan IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Kesejahteraan Masyarakat dapat direpresentasikan dari baik atau buruknya tingkat pendapatan, pendidikan dan derajat kesehatan. Indikator yang biasa digunakan untuk melihat perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terbentuk dari empat komponen utama yaitu : (1) Usia Harapan Hidup, (2) Harapan lama sekolah, (3) Rata rata Lama sekolah dan (4) Pengeluaran perkapita. IPM Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022 adalah 70,84, meningkat dari tahun 2021 yaitu 70,03..

b. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin pada daerah bersangkutan. Angka kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022 yakni 7,11, turun dari tahun 2021 yaitu 7,92.

c. Tingkat Pengangguran

Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat pengangguran pada daerah yang bersangkutan, khususnya tingkat pengangguran terbuka yang dilihat dari persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka terdiri dari : mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena mereka tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Angka pengangguran di Kabupaten Pesisir Selatan berfluktuasi setiap tahunnya, dimana pada tahun 2022 adalah 4,61 yang terjadi penurunan dari tahun 2021 yaitu 5,97. Faktor telah berkurangnya pandemi sangat berpengaruh pada menggeliatnya perekonomian dan terbukanya kembali berbagai lapangan usaha yang kembali membutuhkan banyak tenaga kerja.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan, khususnya menggunakan PDB/PDRB. Tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi disuatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar ekonomi di daerah tersebut tumbuh, dan seberapa besar masyarakatnya menikmati pertumbuhan tersebut secara berkeadilan. PDRB



di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022 atas harga Konstan adalah 4.02 meningkat dari tahun 2021 adalah 3.37.

e. Pendapatan Per-Kapita

Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat kenaikan pendapatan perkapita daerah yang bersangkutan. Terdapat 2 metode penghitungan:

1. PDRB Per-kapita Nominal (berdasarkan harga berlaku) yang tidak mempertimbangkan tingkat inflasi atau kenaikan harga; dan
2. PDRB Per-kapita Riil (berdasarkan angka konstan) yang dihitung berdasarkan harga tetap sebagai acuan.

PDRB Per-Kapita atas harga berlaku pada Tahun Pelaporan (2022) adalah 10,18 dan tahun sebelumnya (2021) adalah 9,79

f. Ketimpangan Pendapatan (*Ratio Gini*)

Indikator yang menggambarkan ketimpangan pendapatan penduduk di suatu wilayah adalah Indeks Gini atau biasa disebut dengan *Gini Ratio*. *Gini Ratio* adalah ketidak merataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan). Indeks gini berkisar antara 0 sampai. Indeks Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna. Indeks Gini Kabupaten Pesisir Selatan telah menunjukkan nilai yang baik, dimana nilai Gini Ratio pada tahun 2022 dengan nilai 0,246 yang dimana nilai *Gini Ratio* tahun 2021 sebesar 0,253.

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
1	2		3	4	5	6
1	Pendidikan	1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (negeri dan swasta)	213	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
		2	Jumlah peserta didik PAUD (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	11.408		

	3	Jumlah peserta didik PAUD (negeri dan swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	11.408	
	4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (negeri dan swasta)	829	
	5	Jumlah pendidik pada PAUD (negeri dan swasta)	1151	
	6	Jumlah pendidik PAUD (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	168	
	7	Jumlah kepala sekolah PAUD (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non formal dari lembaga pemerintah	84	
	1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	456	
	2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	
	3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	
	4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	
	5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	
	6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	3.968	
	7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah	1.203	

			menengah pertama (Negeri dan Swasta)			
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	4.943		
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	2.125		
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1.218		
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	596		
		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	42		
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	59		
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2.083		
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	871		
		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	377		
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	72		
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	28		
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	51		
		1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	456		
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (negeri dan	0		

			swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		
		3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	
		4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	
		5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	3.968	
		7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.3203	
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	4.934	
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	2.125	
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1.218	
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	596	
		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	42	
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	59	
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2.083	
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	871	
		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri	377	

			dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	72		
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	28		
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	51		
		1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	10		
		2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	3.208		
		3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	3.208		
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	365		
		5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	90		
		6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	90		
		7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	19		
		8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	19		
2	Kesehatan	1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	4	Dinas Kesehatan	

	1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	$\frac{3}{4} \times 100 = 75\%$	
	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%	
	2	Jumlah SDM kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/berpotensi bencana	100%	
	3	Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/berpotensi bencana	100%	
	4	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana dan/berpotensi bencana	100%	
	5	Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan akibat bencana dan/berpotensi bencana	100%	
	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan	100%	
	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	100%	
	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	
	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	466	
	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	120	
	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	696	
	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%	

			kesehatan yang tersedia			
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	487		
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	670		
3	PUTR	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	51.137,90		
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	936.890		
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	58.460		
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	38.830		
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada		
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada		
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Tidak Ada		
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	51.137,90		

		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	936.890		
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	58.460		
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	38.830		
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada		
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada		
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Tidak Ada		
		1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	$\frac{59.180}{69.000} \times 100 = 85,77\%$		
		2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	$\frac{72.937}{143.000} \times 100 = 51\%$		
		3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	$\frac{30.450}{60.840} \times 100 = 50,05\%$		
		1	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada	DINAS PUTR	
		2	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Tidak		
		3	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	1		
		4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	1		
		5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	186		
		1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan	78.565		

			pelayanan dasar menggunakan SPALD S			
		2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	3.778		
		3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	82.343		
		4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	951		
		5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	951		
		6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	82.343		
		7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\frac{78.565}{81.786} \times 100 = 96,06\%$		
		8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\frac{951}{25.824} \times 100 = 3,68\%$		
		9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\frac{3.778}{29.455} \times 100 = 12,83\%$		
		10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\frac{78.565}{107.610} \times 100 = 73,01\%$		
		11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\frac{1}{29} \times 100 = 3,45\%$		
		12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\frac{10}{252} \times 100 = 5,15\%$		
		13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{3.778}{3.993} \times 100 = 94,62\%$		
		14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\frac{951}{107.610} \times 100 = 0,88\%$		
		1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	$\frac{32}{63} \times 100 = 50\%$		
		2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	63		
		3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada		Perbub 99 th. 2018
		4	Penetapan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	ada		
		5	Jumlah bangunan gedung yang	0		

			ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan			
		6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0		
		7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	1		
		8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	2		
		1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	2333.18 Km		
		2	Panjang jalan yang dibangun	17,152 Km		
		3	Panjang jembatan yg dibangun	10 Unit		
		4	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	73,665 Km		
		5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	3 Unit		
		6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	0		
		7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	5 Unit		
		8	Panjang jalan yang dipelihara	135,10 Km		
		9	Panjang jembatan yang dipelihara	341 m		
		1	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	3		
		2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	73		
		3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	58		
		4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada		
		5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Ada		

		6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Ada		
		7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada		
		8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada		
		9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada		
		10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Ada		
		11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Ada		
		12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Ada		
		13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Ada		
		14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak Ada		
		15	Tersedianya data dan informasi	Tidak Ada		

			hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
		16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada		
		17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada		
		18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0		
		19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0		
		20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0		
		21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	24		
		22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0		
		23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0		
		24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0		
		25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0		
4	Perumahan Rakyat	1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana	91	DINAS PERKIMTAN	

			dan rencana penanganannya		
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	17	
		3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	17	
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	6	
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	2	
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	4	
		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	
		8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	3	
		9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	1.092 m ²	
		1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	
		2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	
		3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	
		4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	
		5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	
		6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	

		1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	131,99		
		2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	1.383		
		3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	14,29		
		1	Jumlah rumah di kab/kota	115.273		
		2	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	1.284		
		3	Jumlah rumah tidak layak huni	9.547		
		4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	Tidak ada data		
		5	Rasio rumah dan KK	$\frac{105.726}{115.273} = 91,72\%$		
		6	Jumlah rumah yang tidak dihuni	Tidak ada data		
		1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	6		
		2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	96.711		
		3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Dikerjakan oleh PU		
		4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	73		
		5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	6		
		6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Dikerjakan oleh Dinas Perhubungan		
		7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0		
		8	Jumlah pengembang yang teregistrasi	0		
		9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0		
5	TRANTIBUM LINMAS	1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	99	POL PP & DAMKAR	
		2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	3092		
		3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	1		
		4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	1		
		5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	ada		
		6	Tersedianya sarana prasarana minimal	113		
		1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Belum di Update	BPBD	

		2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100		
		1	Persentase penyelesaian dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) sampai dinyatakan sah/legal	Belum di Update		
		2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon (Rencana Kontijensi) sampai dinyatakan sah/legal	Tidak ada Anggaran		
		3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan (pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana)	$\frac{320}{400} \times 100 = 80 \%$		
		4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{35}{91} \times 100 = 38,46 \%$		
		5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	0		
		6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	$\frac{9}{72} \times 100 = 12,5 \%$		
		1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	-		
		2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	-		
		3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	-		
		4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100		
		1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	40	POL PP & DAMKAR	
		2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada		

		3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada		
		4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	4 Pos		
		5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	7 Mobil Pemadam Dan 103 sarana lainnya		
		6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	2 Orang		
		7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	0		
		8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	0		
		1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	1.463		
		2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	6.102		
6	SOSIAL	3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	48 Orang	DINSOS P3A	Surat Pernyataan
		4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	27		
		5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	4		
		6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	330		
		7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	0		
		8	Jumlah penyandang disabilitas	330		

			terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang			
		9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	252		
		10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	0		Surat Pernyataan
		11	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	330		
		12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	330		
		13	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0		Surat Pernyataan
		14	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	318		
		15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	390		
		16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	314		
		17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	338		
		18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	46		
		19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	338		
		20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang	214		

			direunifikasi dengan keluarga			
		21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	19		
		1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	25.890		
		2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	25.890		
		3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	15		
		4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	25.890		
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	25.890		
		6	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	318		
7	Ketenaga Kerjaan	1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	ada		
		2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	0		
		3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	0		
		1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	$\frac{8}{8} \times 100 = 100\%$		
		2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	$\frac{6}{7} \times 100 = 85,71\%$		
		3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	$\frac{7}{128} \times 100 = 5,46\%$		
		4	Persentase LPK yang terakreditasi	$\frac{9}{33} \times 100 = 27,27\%$		
		5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	$\frac{33}{33} \times 100 = 100\%$		
		6	Jumlah penganggur yang dilatih	128 Orang		
		7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	$\frac{128}{128} \times 100 = 100\%$		
		8	Persentase penyerapan lulusan	$\frac{31}{128} \times 100 = 24,21\%$		
		9	Lulusan bersertifikat kompetensi	$\frac{90}{128} \times 100 = 70,31\%$		
		10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0		
		11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon	0		

DIS Kop UMK,
Naker

			Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)		
		1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0	
		2	Data tingkat produktivitas total	0	
		1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	$\frac{20}{94} \times 100 = 21,28\%$	
		2	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	$\frac{12}{12} \times 100 = 100\%$	
		3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	26 SP/SB	
		4	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	$\frac{32}{32} \times 100 = 100\%$	
		5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{91}{97} \times 100 = 93,81\%$	
		6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	$\frac{12}{118} \times 100 = 10,17\%$	
		7	Jumlah mogok kerja	0	
		8	Jumlah penutupan perusahaan	0	
		9	Jumlah perselisihan kepentingan	0	
		10	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	
		11	Jumlah perselisihan PHK	12 Kasus	
		12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	18	
		13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	0	
		14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	tidak	
		15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	$\frac{9}{12} \times 100 = 75\%$	
		1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	0	
		2	Jumlah pencari kerja yang	1.747 orang	

			terdaftar di kab/kota			
		3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	0		
		4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0		
		5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	0		
		6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0		
		7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	0		
		8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0		
		9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	0		
		10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	66		
		11	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0		
		12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0		
		13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0		
		14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0		
8	Perlindungan Perempuan dan Anak	1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	35		
		2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	72 PROGRAM 74 KEGIATAN	DINSOS P3A	
		1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan	25		

			terhadap anak			
		2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1		
		3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$\frac{73}{73} \times 100 = 100\%$		
		4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	42 Lembaga		
		5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	1 Lembaga		
		1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	2 Lembaga		
		2	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	165		
		3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	1		
		4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	1		
		5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1 kegiatan		
		6	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	1		
		7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{19}{19} \times 100 = 100\%$		
9	Pangan	1	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	7 unit		
		2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	3.500 Kg		
		3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak Ada	DINAS PANGAN	Surat pernyataan
		4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	4 KEL		

		5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada		
		6	Tertanganinya kerawanan pangan	8 Kec		
		7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	11 Nagari		
		8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	3 registrasi PSAT		
10	Pertanahan	1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	0	DISPERKIMTAN	
		2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0		
		3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	0		
		4	Dokumen Izin membuka tanah	0		
		5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	0		
11	Lingkungan Hidup	1	Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks Kualitas Air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Kualitas Tutupan Hutan (IKTH)	66.83	DINAS LH	
		1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Ada		
		1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	$\frac{62}{80} \times 100 = 77,5 \%$		
		2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	0		Surat Pernyataan
		3	Penetapan hak MHA (Masyarakat Hukum Adat) terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	0		Surat Pernyataan
		4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan	0		Surat Pernyataan

			ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH			
		5	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0		Surat Pernyataan
		6	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	$\frac{11}{11} \times 100 = 100 \%$		
12	Adminduk Capil	1	Penerbitan akta perkawinan	$\frac{1}{1} \times 100 = 0 \%$	DUKCAPIL	
		2	Penerbitan akta perceraian	$\frac{0}{0} \times 100 = 100 \%$		
		3	Penerbitan akta kematian	$\frac{4.403}{4.403} \times 100 = 100 \%$		
		4	Penyajian data kependudukan	2 kali		
13	Pemberdayaan Masyarakat desa	1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	83	DMPDPPKB	
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	83		
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	1269		
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	217		
		5	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	83		
		6	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	83		
		7	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	1269		
		8	Jumlah peningkatan desa yang	217		

			lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan			
14	Pengendalian Penduduk dan KB	1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-perda-kan	0	DMPDPPKB	
		2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	23 Tahun		
		3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	20,5		
		4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	$\frac{81.713}{110.466} \times 100 = 73,97\%$		
		5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	43		
		1	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	$\frac{263}{263} \times 100 = 100\%$		
		2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{41.496}{65.574} \times 100 = 63,29\%$		
		3	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	542		
		4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	$\frac{1.258}{1.258} \times 100 = 100\%$		
		1	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	0,49		
15	Perhubungan	2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	$\frac{21.434}{22.079} \times 100 = 97\%$		
		1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal angkutan tipe c	$\frac{0}{0} \times 100 = 0$	DISHUB	
		2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	$\frac{1918}{4820} \times 100 = 39,79\%$		
		3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	$\frac{2}{10} \times 100 = 20 \%$		
		4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu	$\frac{285}{6000} \times 100 = 4,75\%$		

			lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota			
16	Komunikasi dan Informatika	1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{40}{40} \times 100 = 100$	DINAS KOMINFO	
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	$\frac{40}{40} \times 100 = 100$		
		3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	ada		
		1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$		
		2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	$\frac{40}{40} \times 100 = 100\%$		
		3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	$\frac{40}{40} \times 100 = 100\%$		
		4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$		
		5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$		
		6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$		

		7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$		
		8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$\frac{40}{40} \times 100 = 100\%$		
		9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	$\frac{5}{40} \times 100 = 13\%$		
		10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	$\frac{40}{40} \times 100 = 100\%$		
		11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$		
		12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	$\frac{40}{40} \times 100 = 100\%$		
		13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	$\frac{8}{18} \times 100 = 44,4\%$		
		14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada Perda No. 4 tahun 2020s		
		1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	$\frac{82}{148} \times 100 = 5,79\%$		
		2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	$\frac{6,37}{91,02} \times 100 = 7\%$		
		3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	$\frac{913}{913} \times 100 = 100\%$		
17	Koperasi dan UMKM	1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{48}{106} \times 100 = 45,28\%$	DINAS KOPERINDAG	
		2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor	0	DINAS KOPERINDAG	

			kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		
		3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{32}{326} \times 100 = 9,81\%$	
		4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{30}{110} \times 100 = 27,27\%$	
		5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{64}{326} \times 100 = 19,64 \%$	
		6	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{176}{17.526} \times 100 = 1,05\%$	
		7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{2}{326} \times 100 = 0,61 \%$	
		8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Tidak perlu diisi	
		9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{131}{326} \times 100 = 40,18 \%$	
		10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{5}{326} \times 100 = 1,53 \%$	
		11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{0}{0} \times 100 = 0 \%$	Surat Pernyataan
		12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan	$\frac{25}{326} \times 100 = 7,77 \%$	

			dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
		13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{1}{326} \times 100 = 0,31 \%$		Surat Pernyataan
		1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	$\frac{3.459}{7.381} \times 100 = 46,8\%$		
		2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	$\frac{264}{10.207} \times 100 = 2,5\%$		
		3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	$\frac{12}{10.207} \times 100 = 0,1 \%$		
		4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	$\frac{2}{84} \times 100 = 2,3\%$		
		5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	$\frac{20}{145} \times 100 = 13,7 \%$		
		6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	$\frac{225}{10.207} \times 100 = 2,2 \%$		
		7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	$\frac{234}{10.207} \times 100 = 2,2 \%$		
18	Penanaman Modal	1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah		
		2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Keputusan Bupati pesisir selatan Nomor 570/285/Ktps/BPT-PS/2017 tentang SOP pelayanan perizinan dan Non perizinan		
		3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tahapan Penyusunan Ranperda	DPMPTSP	
		4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	0		
		5	Kegiatan pameran penanaman modal	1		
		6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0		
		7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	54		
		8	Penerbitan perizinan dan non	5.311		

			perizinan penanaman modal			
		9	Laporan realisasi penanaman modal	679.243.825.238		
		10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	5		
		11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	24 (Pembinaan) 22 (Pengawasan)		
		12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	9		
19	Kepemudaan	1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0		
		1	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	0		
		2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	4		
		1	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	62/496		
		2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	0		
20	Statistik	1	Tersedianya buku profil daerah	ada	DINAS KOMINFO	
		2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	4		
		3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	114		
		4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	2		
		5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	2		
		6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	$\frac{13}{114} \times 100 = 0,11\%$		
		7	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	$\frac{13}{114} \times 100 = 0,11\%$		
		8	Persentase kelengkapan metadata Indicator sektoral	$\frac{13}{114} \times 100 = 0,11\%$		
21	Persandian	1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah	$\frac{0}{0} \times 100 = 0$		Surat pernyataan

			kegiatan strategis yang harus diamankan			
		2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	$\frac{32}{33} \times 100 = 96,97\%$		
		3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	$\frac{2}{33} \times 100 = 6,06\%$		
		4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	$\frac{83}{265} \times 100 = 31,32\%$		
22	Kebudayaan	1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan penyelamatan dan publikasi)	185 Objek Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	151 Objek Cagar Budaya		
		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	151 obyek Cagar Budaya		
		4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	25 Orang SDM		
		5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	13 Cagar Budaya		
		6	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	185 Cagar Budaya		
		7	Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0		

		8	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	185 Cagar Budaya		
		9	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	168 Cagar Budaya		
		10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	300 lebih koleksi		
		11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	13.681 orang		
		12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	8 orang		
		13	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	3 orang (1 orang penunggu tamu, 1 orang pemandu, dan 1 orang petugas Kebersihan museum)		
		14	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0		
		15	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	5 orang		
		16	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	5 orang		
		17	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	21		
		18	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	6		
		19	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	6		
		20	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	1		
23	Perpustakaan	1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	$\frac{21.140}{520.293} \times 100 = 4,06\%$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		2	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	$\frac{65.398}{520.293} \times 100 = 12,57\%$		
		3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	$\frac{940}{520.293} \times 100 = 0,18\%$		
		4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	$\frac{17}{775} \times 100 = 2,19\%$		
		5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	20 TBM		
		6	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	-		

24	Kearsipan	7	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		8	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	-		
		1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{14.573}{17.571} \times 100 = 82,94\%$		
		2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{7.225}{9.024} \times 100 = 80,06\%$		
		3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	-		
		4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	$22/130 \times 100 = 16,92$		
		5	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	-		
		6	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	$6 \text{ boks}/825 \text{ boks} \times 100 = 0,72$		
		7	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	-		
		8	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	$22/161 \times 100 = 13,66$		
25	Kelautan dan Perikanan	9	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	-	Dinas Perikanan Dan Kelautan	
		10	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	-		
		1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	-		
		2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang operasional	0 %		
		3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota	23		

			yang diterbitkan			
		4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	2		
		5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	5.830.750 ekor		
26	Pariwisata	1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	75	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	163		
		3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kab/kota	89		
		4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	124		
		5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	0		
		6	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	0		
		7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	0		
		8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	$\frac{45}{843} \times 100 = 5 \%$		
		9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	$\frac{394}{1.213} \times 100 = 32 \%$		
		10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	2 Lokasi		
27	Pertanian	1	Jumlah Sarana dan prasarana pertanian yang diberikan	Bantuan Benih/Bibit 1. Bantuan Pengembangan Padi Sawah 4.915 Ha 2. Bantuan Pengembangan Jagung Hibrida 3.980 Ha 3. Bantuan Pengembangan Bawang Merah 3 Ha 4. Bantuan Bibit Durian 7.476 Btg 5. Bantuan Bibit Lengkek 2.000 Btg	DISTANHORT BUN	

				6. Bantuan Tanaman Sayuran 1 Paket 7. Bantuan Tanaman Hias 1 Paket 8. Bantuan Bibit Cengkeh 36.280 Btg 9. Bantuan Bibit Kopi 41.694 Batang 10. Bantuan Bibit Kelapa Sawit 17.610 Batang 11. Bantuan Bibit Pala 16.800 Btg 12. Bantuan Bibit Kelapa Dalam 18.600 Btg 13. Bantuan Bibit Pinang 47.337 Btg Bantuan Ternak 1. Bantuan Itik 9.840 Ekor 2. Bantuan Ayam Buras 31.000 Ekor 3. Bantuan Puyuh 16.200 Ekor 4. Bantuan Sapi 9 Ekor Alat dan Mesin Pertanian 1. Mesin Pembeku Durian 10 Unit 2. Pendingin Durian 4 Unit 3. Timbangan Digital 100 Kg 2 Unit 4. Timbangan Digital 30 Kg 1 Unit 5. Senapan Angin 41 Unit 6. Peluru Senapan Angin 45 Kotak 7. Kompresor 1 Unit 8. Tabung Scuba 1 Unit 9. Kendaraan Roda tiga 1 Unit 10. Cultivator 23 Unit 11. Excavator Mini 2 Unit 12. Handsprayer 505 Unit 13. Tractor Roda empat 1 Unit 14. Hand Tractor Roda 2 6,5 PK 6 Unit 15. Hand Tractor Roda 2 8,5 PK 23 Unit 16. Hand Tractor Roda		
--	--	--	--	---	--	--

			2 8,5 PK (G 3000 ZEVA RD 85) 1 Unit 17. Hand Tractor Rotary 10,5 PK 15 Unit 18. Hidrotiller 7 Unit 19. Pompa Air 6 Unit 20. Alat Tanam Jagung 3 Unit 21. Bangunan RMU + RMU 1 Unit 22. Colour Sorter 1 unit 23. Combine Harvester Besar 10 Unit 24. Combine Harvester Kecil 9 Unit 25. UV Dryer 3 Unit 26. Mesin Giling Kopi 1 Unit 27. Power Thresher 4 Unit 28. Husker dan Polisher 1 Unit Infrastruktur Pertanian 1. Rehabilitasi jaringan irigasi tersier 48 Unit; 2. Pembangunan Jaringan irigasi air tanah dangkal 5 unit; 3. Pembangunan Dam Parit 5 Unit; 4. Unit Pengolahan Pupuk Organik 2 unit; 5. Perpompaan 1 unit; 6. Jalan pertanian 51 unit.		
		2	Prasarana pertanian yang digunakan	52 Unit	
		3	Penerbitan izin usaha pertanian	4 buah	
		4	Persentase prasarana yang digunakan	$\frac{52}{52} \times 100 = 100 \%$	Dinas Pertanian
		5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	$\frac{4}{4} \times 100 = 100 \%$	
		1	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana (kejadian/kasus penyakit hewan menular)	$\frac{15}{15} \times 100 = 100 \%$	Diskeswan
28	Kehutanan	1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura		Kewenangan Provinsi
		2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga		Kewenangan Provinsi
		3	Pemulihan ekosistem pada Tahura		Kewenangan

					Provinsi	
		4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA		Kewenangan Provinsi	
29	Energi dan SDM	1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	0	Bag Perekonomian dan ESDM SETDA KAB	Surat Pernyataan
30	Perdagangan	1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	$\frac{9}{9} \times 100 = 100 \%$	DINAS KOPERINDAG	Surat Pernyataan
		2	Persentase penerbitan TDG	$\frac{1}{1} \times 100 = 100 \%$		
		3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	0		Surat Pernyataan
		4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0		Surat Pernyataan
		5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	0		Surat Pernyataan
		6	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	0		Surat Pernyataan
		7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$\frac{47}{51} \times 0,5 = 46 \%$		
		8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	8,886%		
		1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$\frac{14.182}{67.258 \times 74.731} \times 100\% = 0,00028\%$		
		1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	$\frac{387}{5718} \times 100\% = 6.77\%$		
		2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	0		Surat Pernyataan
31	Perindustrian	1	Persentase jumlah penetapan izin usaha	-	DINAS KOPERINDAG	Belum ada IUKI dan IPKI

			kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota			yang diterbitkan
		1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	100%		Sudah terbit tahun 2019
		1	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	$\frac{116}{116} \times 100 = 100\%$		
		1	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	-		Belum ada IPUI yang diterbitkan
		1	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	$\frac{14}{4.971} \times 100 = 0,28\%$		SIINas
32	Transmigrasi	1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	0		Surat Pernyataan
		2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0		Surat Pernyataan
		3	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0		Surat Pernyataan

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
1	2		3	4	5	6
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	$\frac{15.122}{18.870} \times 100 = 80,14\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	$\frac{57.623}{57.961} \times 100 = 99,42\%$		
		3	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam	$\frac{22.362}{28.222} \times 100 = 79,24\%$		

			Pendidikan Menengah Pertama			
		4	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	$\frac{3.208}{21.610} \times 100 = 14,84\%$		
2	Kesehatan	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	$\frac{389}{520.293} \times 100 = 0,07\%$	Dinas Kesehatan	
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kab/Kota yang Terakreditasi	$\frac{3}{4} \times 100 = 75\%$		
		3	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	$\frac{679}{679} \times 100 = 100\%$		
		4	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	$\frac{648}{648} \times 100 = 100\%$		
		5	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	$\frac{618}{618} \times 100 = 100\%$		
		6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	$\frac{3036}{3036} \times 100 = 100\%$		
		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{6198}{6198} \times 100 = 100\%$		
		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{241811}{241811} \times 100 = 100\%$		
		9	Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{4875}{4875} \times 100 = 100\%$		
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{82305}{82305} \times 100 = 100\%$		
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{2058}{2058} \times 100 = 100\%$		
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$		
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{5329}{5329} \times 100 = 63,80\%$		
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{14595}{14595} \times 100 = 100\%$		
3	PUTR	1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian	$\frac{17.007,37}{51.137,9} \times 100 = 33,26\%$	Dinas PSDA	

			banjir di WS kewenangan kab/kota			
		2	Rasio luas kawasan pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	$\frac{1.427}{58.460} \times 100 = 2,44\%$		
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{12.891}{20.930} \times 100 = 61,59\%$		
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota	$\frac{96.710}{107.610} \times 100 = 89,87\%$	Dinas PUTR	
		5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{82.343}{107.610} \times 100 = 76,52\%$		
		6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	$\frac{63}{63} \times 100 = 100\%$		
		7	Tingkat kemantapan jalan kab/kota	$\frac{999,97}{2333,32} \times 100 = 42,86\%$		
		8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{58}{1271} \times 100 = 4,56\%$		
		9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{398}{398} \times 100 = 100\%$		
4	Perumahan Rakyat	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	$\frac{3}{3} \times 100 = 100 \%$	Dinas PERKIMTAN	
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	$\frac{0}{0} \times 100 = 0 \%$		Surat Pernyataan
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	$\frac{0}{131.99} \times 100 = 0 \%$		Surat Pernyataan
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{9547}{115.273} \times 100 = 8,28 \%$		
		5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{6}{38} \times 100 = 15,79 \%$		
5	TRANTIBUM LINMAS	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{99}{101} \times 100 = 98,02 \%$	Satpol PP dan Damkar	

		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{1}{1} \times 100 = 100 \%$	BPBD	
		3	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	$\frac{83.211}{63.336} \times 100 = 131,3 \%$		
		4	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	$\frac{83.211}{83.211} \times 100 = 100 \%$		
		5	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$\frac{50.274}{50.274} \times 100 = 100 \%$	Satpol PP dan Damkar	
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{23}{47} \times 100 = 48,94 \%$		
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	$\frac{7241}{47} = 154 \text{ Mnt}$		
6	SOSIAL	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	$\frac{390}{6102} \times 100 = 6,39 \%$	Dinas Sosial dan P3A	
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	$\frac{25.890}{25.890} \times 100 = 100 \%$		
7	Ketenaga Kerjaan	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$\frac{4}{16} \times 100 = 25 \%$	Disnakertrans	
		2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	$\frac{90}{229.994} \times 100 = 0,03 \%$		
		3	Tingkat produktivitas tenaga kerja	$\frac{10.183.456,97}{229.994} \times 100 = 44,27 \%$		
		4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$\frac{23}{118} \times 100 = 19,49 \%$		
		5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kab/kota	$\frac{66}{1.747} \times 100 = 3,78 \%$		
8	Perlindungan Perempuan dan Anak	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{17.700.000.000}{1.382.565.072.949,50} \times 100 = 1,28 \%$	Dinas Sosial dan P3A	

		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kab/kota	$\frac{73}{73} \times 100 = 100 \%$		
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{19}{259.804} \times 100 = 0.007 \%$		
9	Pangan		Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{55.586,75}{186.683} \times 100 = 29,78 \%$	Dinas Pangan	
10	Pertanahan	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{0}{0} \times 100 = 0 \%$	Dinas Perkimtan	Surat Pernyataan
		2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	$\frac{3.460}{7001} \times 100 = 49,42 \%$		
		3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	$\frac{0}{0} \times 100 = 0 \%$		Surat Pernyataan
		4	Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	$\frac{0}{0} \times 100 = 0 \%$		Surat Pernyataan
		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	$\frac{0}{0} \times 100 = 0 \%$		Surat Pernyataan
		6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	$\frac{12}{12} \times 100 = 100 \%$		
11	Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	IKLH Pessel = $(0.376 \times 66,83) + (0.405 \times 92,43) + (0.219 \times 70.21) = 77.94$ (Baik)	Dinas Lingkungan Hidup	
		2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	$\frac{12.994}{55.803,17} \times 100 = 23,28 \%$		
		3	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	$\frac{8}{12} \times 100 = 66,67 \%$		
12	Adminduk Capil	1	Perekaman KTP elektronik	$\frac{364.889}{374.556} \times 100 = 97,42 \%$	Disdukcapil	
		2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	$\frac{53.130}{145.736} \times 100 = 36,46 \%$		
		3	Kepemilikan akta kelahiran	$\frac{154.832}{155.867} \times 100 = 99,34 \%$		
		4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan	$\frac{6}{40} \times 100 = 15 \%$		

			perjanjian kerja sama			
13	Pemberdayaan Masyarakat desa	1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	$\frac{1}{2} \times 100 = 50 \%$	DPMDPP&KB	
		2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	$\frac{0}{92} \times 100 = 0 \%$		
14	Pengendalian Penduduk dan KB	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,88		
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	$\frac{41.496}{65.574} \times 100 = 63,28 \%$		
		3	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak terpenuhi (unmeet Need)	$\frac{13.679}{65.574} \times 100 = 20,86 \%$		
15	Perhubungan	1	Rasio Konektivitas Kab/Kota	$(0,55 \times 100) + (0 \times 0) = 0,58$	Dinas Perhubungan	
		2	V/C Ratio di Jalan Kab/Kota	$\frac{7679}{29500} \times 100 = 0,26 \%$		
16	Komunikasi dan Informatika	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{40}{40} \times 100 = 100 \%$	DISKOMINFO	
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{0}{0} \times 100 = 0 \%$		
		3	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Kab/Kota	$\frac{254.698}{374.556} \times 100 = 68 \%$		
17	Koperasi dan UMKM	1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	$\frac{51}{326} \times 100 = 15,64 \%$	Dinas Koperindag	
		2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	$\frac{7.381}{10.251} \times 100 = 72\%$		
18	Penanaman Modal	1	Persentase peningkatan investasi di kab/kota	$\frac{679.243.825.238 - 1.767.753.342.797}{1.767.753.342.797} \times 100 = -61,58\%$	DPMPPTSP	
19	Kepemudaan	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{7}{128.464} \times 0,005 = - \%$	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	$\frac{1.184}{128.464} \times 100 = 0,92 \%$		
		3	Peningkatan Prestasi Olahraga	152		
20	Statistik	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{41}{41} \times 100 = 100 \%$	DISKOMINFO	
		2	Persentase OPD yang menggunakan data statistic	$\frac{41}{41} \times 100 = 100 \%$		

			dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah			
21	Persandian	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	$\frac{316}{645} \times 100 = 48,99 \%$		
22	Kebudayaan	1	Terlestarikannya cagar budaya	$\frac{151}{185} \times 100 = 81.62 \%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
23	Perpustakaan	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Surat Pernyataan
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	7.172		
24	Kearsipan	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	5485.25		
		2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	0		Surat Pernyataan
25	Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	$\frac{50.184.82}{48.977} \times 100 = 102,47 \%$	Dinas Perikanan Dan Kelautan	
26	Pariwisata	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{124-0}{0} \times 100 = 124\%$	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Naik 124% persen dari tahun sebelumnya
		2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota	$\frac{944.540 - 344.197}{344.197} \times 100 = 174.4\%$		
		3	Tingkat hunian akomodasi	$\frac{42.159}{264.204} \times 100 = 15,96\%$		
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	$\frac{211.203,64}{16.601.341,83} \times 100 = 1,272\%$		
		5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	$\frac{3.139.3875.323}{145.678.296.972,01} \times 100 = 2,16\%$		
27	Pertanian	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{156.430+208.010}{28.779 + 24.195} \times 100 = 6,87 \text{ Ton/ha}$	Distanhortbun	
		2	Jumlah kasus zoonosis yang dilaporkan	$\frac{155-148}{148} = 4,73\%$	Diskeswan	Kasus Zoonosis naik 4,73 %

28	Kehutanan	1		Kewenangan Provinsi		
29	Energi dan SDM	1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab	0	Bag Perekonomian dan ESDM SETDA KAB	
30	Perdagangan	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{756}{7614} \times 100 = 9,93\%$	Dinas Koperindag	
		2	Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{14.182}{74.731,24} \times 100 = 18,98\%$		
		3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{387}{5.718} \times 100 = 6,77\%$		
31	Perindustrian	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	$\frac{4.971 - 3.879}{3.879} \times 100 = 28,2\%$	Dinas Koperindag	
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	80,15 %		
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{33}{116} \times 100 = 28,45\%$		
		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0		Belum Ada IPUI yang terpantau
		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	0		Belum ada IUKI dan IPKI yang dipantau
		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	65 %		terlampir
32	Transmigrasi	1				

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang urusan Pemerintahan

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

NO	FUNGSI PENUNJANG	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	
1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{1244}{470} \times 100 = 264,68 \%$	BKPSDM	
		2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{394}{1717} \times 100 = 22,99 \%$		
		3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{107}{394} \times 100 = 27,16 \%$		
2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\frac{1.629.156.880.487,5}{1.659.976.410.410} - 1 \times 100 = 1,86 \%$	BPKD	
		2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\frac{145.678.296.972,01}{139.571.499.732} - 1 \times 100 = 4,38 \%$		
		3	Assets Management 1. Daftar aset tetap 2. Manual untuk penyusunan aset tetap 3. Proses inventarisasi aset tahunan 4. Nilai aset tercantum dalam laporan anggaran	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. ya		
		4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	$\frac{107.754.162.767,06}{1.591.682.331.641,50} \times 100 = 6,77 \%$		
3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	$\frac{0}{725} \times 100 = 0 \%$	Bagian PBJ	Tidak ada proyek konstruksi dengan nilai besar dari RP 50 M
		2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	$\frac{622}{725} \times 100 = 85,79 \%$		
		3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{235.205.365.368}{1.382.565.072.949,5} \times 100 = 17,01 \%$		

		4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	$\frac{489.759.982.368}{1.332.437.982.368}$ $\times 100 = 36,76 \%$		
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	$\frac{184.403.922.404.45}{1.629.156.880.487,5}$ $\times 100 = 11,32 \%$	BPKD	
		2	Rasio PAD	$\frac{145.678.296.972,01}{1.630.561.933.717}$ $\times 100 = 8,93 \%$	BAPENDA	
		3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{1.365.961.447.213,50 - 304.704.011.082}{1.629.156.880.487,50}$ $\times 100 = 65,14 \%$	BPKD	
		4	Opini Laporan Keuangan	2020 = WTP 2019 = WTP 2018 = WTP 2017 = WTP 2016 = WTP 2015 = WTP 2014 = WTP 2013 = WTP 2012 = WDP 2011 = WDP		
5	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	INSPEKTORAT	
		2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3		
6	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	$\frac{62}{62}$ $\times 100 = 100 \%$	Dinas Kominfo	
		2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	$\frac{13}{13}$ $\times 100 = 100 \%$		

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat:

2.3.1 TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	
					Sebelum	Setelah
1	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	tanpa satuan	WTP	WTP
		2.	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	tanpa satuan	B	B (70,00)
		3.	Skor Nilai LPPD	tanpa satuan	3209	3215
		4.	Level Maturitas SPIP Pemda	tanpa satuan	3	3 (3,0057)
2	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	1	Indeks Kelembagaan	tanpa satuan	N/A	N/A
		2	Indeks SPBE	tanpa satuan		3.20
		3	Indeks Inovasi	tanpa satuan		6,300
		4	Indeks Profesionalitas ASN	tanpa satuan		62
3	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	1.	Kategori keterbukaan informasi publik	tanpa satuan		93
		2.	Indeks Kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik	tanpa satuan		82
4	Meningkatnya kualitas Kesehatan Masyarakat	1	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup		8
		2	Angka Kematian Ibu	Per 1.000 kelahiran hidup		95
		3	Prevalensi stunting	persen		10,92
		4	Angka Kesakitan	persen		15,95
5	Meningkatnya Perlindungan Kesehatan Masyarakat	1	Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan	persen		80
6	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	1	Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar			53
7	Meningkatnya ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin	1	Pencapaian skor pola pangan harapan			87
		2	Pengeluaran perkapita			9,369,000
8	Meningkatkan Investasi PMA dan PMDN	1	Nilai investasi swasta dan masyarakat	Juta Rp.		310,000
9	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	1	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	TriliunRp	3.55	3.61
		2	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Milyar Rp.	703,61	707,32

10	Menurunnya Pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	6.93	6.85
11	Meningkatnya kualitas infrastruktur	1	Persentase jalan kabupaten kondisi baik	persen	29.55	31,90
		2	Rasio Konektivitas	persen	55.00	57.00
		9.3	Proporsi lahan sawah beririgasi baik	persen	59.05	59.20
12	Terjaminya Kelestarian Lingkungan	10.1	Indek kualitas lingkungan hidup	tanpa satuan	86.74	86.85
13	Pesisir Selatan Menjadi Daerah Tujuan Wisata Favorit di Pantai Barat Indonesia	11.1	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	1,000,000	1,200,000
		11.2	Lama tinggal wisatawan	hari	1.25	1.25
14	Berkembangnya Ekonomi Kreatif	12.1	Jumlah omset usaha ekonomi kreatif	Milyar Rp.	12	18
15	Meningkatnya Akses Layanan Bidang Pendidikan	13.1	Harapan Lama Sekolah	tahun	13.36	13.40
		13.2	Rata-Rata Lama Sekolah'	tahun	8.29	8.32
16	Meningkatnya daya saing pendidikan	14.1	Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat provinsi	orang	4	4
		14.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	tanpa satuan	5.9258	6.643
17	Meningkatnya pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	15.1	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	persen	96.40	96.50
		15.2	Tingkat partisipasi subuh berjamaah di mesjid / mushola	tanpa satuan	Rendah (≤ 10 orang)	Rendah (≤ 10 orang)
18	Meningkatnya SDM kreatif dan berdaya saing	16.1	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional	orang	10	10
19	Terwujudnya Keluarga Bahagia	17.1	Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	persen	0.00085	0.0008
		17.2	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak huni	persen	90.5208	91.0944
20	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	18.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	tanpa satuan	56.93	56.93
		18.2	Jumlah nagari tangguh bencana	nagari	Pratama (182) Madya (0) Utama (0)	Pratama (182) Madya (0) Utama (0)

2.3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 20 (dua puluh) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2022			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
MISI 1 : Memperkuat tata kelola, pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan							
Tujuan 1 : Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkinerja tinggi							
1	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	1	Penilaian LKD (opini BPK)	tanpa satuan	WTP	WTP	100
		2	Kualifikasi penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	tanpa satuan	B (70,00)	68,97	98,53
		3	Skor Nilai LPPD	tanpa satuan	32150	3,1433	97,77
		4	Level Maturitas SPIP	tanpa satuan	3 (3,0057)	3,0000	99,81
2	Meningkatnya kapasitas birokrasi	1	Indek Kelembagaan	tanpa satuan	P-3 (Cukup Efektif)	N/A	-
		2	Indeks SPBE	tanpa satuan	3.20	3,48	108,75
		3.	Indek Inovasi	tanpa satuan	6,300	N/A	-
		4	Indeks Profesionalitas ASN	tanpa satuan	62	51,94	83,77
3	Meningkatnya keterbukaan informasi dan pelayanan publik	1	Kategori keterbukaan terhadap informasi publik	tanpa satuan	93 (Informatif)	99,92	107,44
		2	Indek Kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik	tanpa satuan	82	82,65	100,79
MISI 2 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat							
Tujuan 1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat							
4	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup	8	9	87,50
		2	Angka Kematian Ibu	Per 1.000 kelahiran hidup	95	144	48,42
		3	Prevalensi stunting	persen	10,92	7	135,90
		4	Angka Kesakitan	persen	15,95	15,16	95,05
5	Meningkatnya perlindungan kesehatan masyarakat	1	Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan	persen	80	79	99
Tujuan 2 : Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat							

6	Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat	1	Persentase PPKS yang memperoleh Bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	53	66,21	124,92
7	Meningkatnya ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin	1	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	Skor	87	80,4	92,41
		2	Pengeluaran Perkapita	Rp./org/tn	9,369,000	9.686.000	103,38
MISI 3 : Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah							
Tujuan 1 : Meningkatnya pertumbuhan dan ekonomi secara berkelanjutan							
8	Meningkatnya investasi PMA dan PMDN	1	Nilai investasi swasta dan masyarakat	Juta Rp.	310,000	679.234	219,11
9	Meningkatnya PDRB sektor unggulan	1	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	TriliunRp	3.61	3,74	103,60
		2	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Milyar Rp.	707,32	741,26	104,80
10	Menurunnya pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	6.85	4,61	67,30
11	Meningkatnya kualitas infrastruktur	1	Persentase jalan kabupaten kondisi baik	persen	31,90	32,34	101,38
		2	Rasio Konektivitas	persen	57.00	58,00	101,75
		3	Proporsi lahan sawah beririgasi baik	persen	59.20	59,49	100,49
12	Terjaminnya kelestarian lingkungan	1	Indek kualitas lingkungan hidup	tanpa satuan	86.85	77,94	89,74
MISI 4 : Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan							
Tujuan 1 : Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif bagi kesejahteraan masyarakat							
13	Pesisir Selatan menjadi daerah tujuan wisata favorit di pantai barat Indonesia	1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	1,200,000	942.240	78,52
		2	Lama tinggal wisatawan	Hari	1.25	1,25	100,00
14	Berkembangnya ekonomi kreatif	1	Jumlah omset usaha ekonomi kreatif	Milyar Rp.	18	16	88,89
MISI 5 : Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing							

Tujuan 1 : Terwujudnya pendidikan yang berkualitas							
15	Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan	1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.40	13,35	99,63
		2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.32	8,43	101,32
16	Meningkatnya daya saing pendidikan	1	Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat provinsi	Orang	4	2	50,00
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	tanpa satuan	6.643	7,172	107,96
Tujuan 2 : Terwujudnya SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing							
17	Meningkatnya pengalaman nilainilai agama dalam kehidupan masyarakat	1	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	persen	96.50	75,5	78,24
		2	Tingkat partisipasi subuh berjamaah di mesjid/ mushola	tanpa satuan	Rendah (≤10 orang)	Tinggi (≥35 orang)	350,00
18	Meningkatnya SDM kreatif dan berdaya saing	1	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional	Orang	10	17	170,00
		2	Jumlah wirausahawan yang berdaya saing	Orang	500	656	131,20
MISI 6 : Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan dinamis							
Tujuan 1 : Terciptanya kondisi masyarakat Pesisir Selatan yang aman							
19	Terwujudnya keluarga bahagia	1	Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	persen	0.0008	0,0058	72,50
		2	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak huni	persen	91.0944	91,7179	100,68
20	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri	1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	tanpa satuan	56.93	53,39	93,78
		2	Jumlah nagari tangguh bencana	Nagari	Pratama (182) Madya (0) Utama (0)	47	25,82
Rata-rata Capaian Indikator 20 Sasaran Strategis : 40 Indikator Kinerja							102,97

Dari tabel di atas dapat dilihat, capaian rata-rata 40 (empat puluh) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 20 (dua puluh) sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 102,97%, sebanyak 31 (tiga puluh satu) indikator nilainya predikat *Sangat Baik*, sebanyak 3 (tiga)

indikator nilainya predikat *Baik*, sebanyak 1 (satu) indikator nilainya predikat *cukup*, sebanyak 3 (tiga) indikator gagal dan 2 (dua) indikator tidak dapat diukur karena belum adanya formula untuk mengukur capaian kedua indikator kinerja tersebut.

2.3.3 CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sasaran 1 : Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2.6
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Penilaian LKD (opini BPK)	tanpa satuan	WTP	WTP	100
2	Kualifikasi penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	tanpa satuan	BB (70,00)	68,97	98.53
3	Skor Nilai LPPD	tanpa satuan	32150	31433	97.77
4	Level Maturitas SPIP	tanpa satuan	3 (3,0057)	3 (3,0000)	99.81
Rata-rata Capaian					99.03

Dari tabel 2.6. di atas dapat dilihat rata-rata capaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran strategis 1 sebesar 99.03%. Pencapaian sasaran strategis 1 termasuk kategori keberhasilan *Sangat Baik*.

1. Penilaian LKD (opini BPK)

Ada beberapa indikator yang dapat menjadi ukuran keberhasilan good governance dan clean government diantaranya yaitu pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik apabila dari hasil audit BPK mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah opini BPK. Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun 2021 dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini BPK diberikan kepada Daerah yang memenuhi Kriteria sebagai berikut (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b)

kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak berdasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak.

BPK dapat memberikan 4 (empat) jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified Opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/*Disclaimer Opinion*) dan Tidak Wajar (TW/*Adverse Opinion*).

Opini WTP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Opini WDP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

Opini TMP diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Misalnya, auditor tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap, sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan benar sesuai dengan SAP. Dalam hal ini auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP, atau TW.

Opini TW diberikan jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Dengan demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP. Berikut tabel 2.7, realisasi dan capaian indikator kinerja Penilaian LKD (opini BPK):

Tabel 2.7
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Penilaian LKD
(Opini BPK) Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penilaian LKD (Opini BPK)	opini	WTP	WTP	100

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022 target indikator kinerja Penilaian Laporan Keuangan Daerah (Opini BPK) adalah WTP dengan realisasi WTP dan capaian indikator kinerja adalah 100%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator ini adalah *Sangat Berhasil* dengan predikat *Sangat Baik*.

Pada tahun 2022, Badan Pemeriksa Keuangan telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dengan Nomor : 37.A/LHP/XVIII.PDG/05/2022 dan Nomor : 37.B/LHP/XVIII.PDG/05/2022 bertanggal 17 Mei 2022 dan Surat Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 74/S-HP/XVIII.PDG/05/2022 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2022 merupakan pencapaian untuk yang ke-9 (**sembilan**) kalinya sejak laporan keuangan tahun 2013. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut didukung oleh beberapa faktor-faktor sebagai berikut :

1. Adanya Penguatan komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola dan para pelaksana kegiatan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah melalui upaya :
 - 1) Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - 2) Peningkatan kepatuhan terhadap aturan perundang- undangan;
 - 3) Meningkatkan peran PPK-PD untuk meyakini compliance.
2. Adanya upaya seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan kualitas LK-PD nya masing-masing. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan di bidang perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
3. Adanya dukungan aplikasi yang terintegrasi mulai dari penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang semakin baik sehingga laporan dapat diselesaikan tepat waktu dan meminimalisir terjadi kesalahan-kesalahan baik pada tahap penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.
4. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern (APIP) dalam pelaksanaan pengendalian internal pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan beberapa upaya dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, antara lain :

1. Melakukan Rekonsiliasi Bidang Barang Milik Daerah dan Akuntansi dengan semua Perangkat Daerah (yang memiliki DPA dan melaksanakan anggaran) dan melakukan asistensi dan fasilitas dengan Perangkat Daerah terkait

penyusunan laporan keuangan setiap bulannya sehingga menghasilkan data/angka yang valid pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada para Bendahara, PPK, dan Sekretaris seluruh Perangkat Daerah.
3. Melaksanakan pendampingan secara terus menerus melalui media group WhatsApp yaitu Help Desk SIPKD terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terdapat pada Perangkat Daerah dan dapat ditindaklanjuti secara langsung oleh admin SIPKD keuangan maupun SIPKD Aset.

2. Kualifikasi penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah itu didapatkan dengan mengukur 4 (empat) komponen meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta objektif instansi pemerintah.

Sasaran Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diukur dari indikator yang diperjanjikan yaitu Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Pesisir Selatan, yang merupakan perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang dipertanggungjawabkan secara periodik.

Berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor : B/881/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (AKIP) pada tahun 2022 memperoleh nilai **68,97** dengan predikat **B**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "BAIK" yaitu pelaksanaan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah baik khususnya unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. Adapun rincian penilaian capaian kinerja tersebut seperti pada tabel 2.8 di bawah ini :

Tabel 2.8
Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021 s.d 2022

No.	Komposisi Yang Dinilai	Nilai			
		Bobot	2021	Bobot	2022
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,11	30	24,15
b.	Pengukuran kinerja	25	17,06	25	17,93

c.	Pelaporan kinerja	15	11,38	15	11,19
d.	Evaluasi kinerja	10	7,08	25	15,70
e.	Capaian kinerja	20	9,09		
	Nilai Hasil Evaluasi	100	68,72	100	68,97
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B		B

Sumber : Hasil Evaluasi Menpan RB, 2021 dan 2022

Hasil akuntabilitas kinerja yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor : B/881/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan surat sebagaimana tersebut diatas, disampaikan bahwa dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja maka diberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

- 1) Memperbaiki rumusan tujuan/sasaran strategis beserta indikatornya di level Pemda maupun PD agar berorientasi pada hasil dan memastikan kecukupannya dalam mengukur keberhasilan tujuan/sasaran strategis tersebut;
- 2) Melakukan reuiu kinerja prioritas Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar indikator keberhasilan yang ada di perjanjian kinerja sesuai pada levelnya;
- 3) Mereview kembali dokumen penjenjangan kinerja (cascade down) dengan mengacu kepada Permenpan Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjangkan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Menyusun pedoman SAKIP Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan memastikan minimal aspek perencanaan, pengumpulan dan pengukuran data kinerja serta evaluasi internal secara komprehensi;
- 5) Melakukan review kembali target yang diperjanjikan agar selaras dengan hasil capaian tahun sebelumnya dan menggambarkan kinerja yang lebih tinggi;
- 6) Menerapkan kebijakan *reward and punishment* dengan memperhitungkan capaian kinerja organisasi;
- 7) Memanfaatkan aplikasi e-sakip sebagai alat untuk monitoring pencapaian kinerja Bupati dan setiap perangkat daerah sekaligus dapat diintegrasikan dengan system manajemen kinerja lainnya;
- 8) Menjadikan laporan kinerja sebagai bahan evaluasi dalam perbaikan dokumen perencanaan selanjutnya;
- 9) Meningkatkan kualitas SDM Inspektorat agar hasil evaluasi akuntabilitas yang dilakukan dapat memberikan rekomendasi yang cukup dan mendalam untuk perbaikan implementasi akuntabilitas kinerja.

Realisasi AKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel 2.9 dibawah ini :

Tabel 2.9
Realisasi Kualifikasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2021-2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
			2021	2022
1.	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah	Skala	B	B

Berikut tabel 2.10 realisasi dan capaian indikator kinerja Kualifikasi penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah:

Tabel 2.10
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kualifikasi Penilaian
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022*

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022*		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Kualifikasi penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Tanpa satuan	BB (70,00)	B (68,97)	98,53

Sumber data : Hasil Evaluasi Menpan RB, 2022

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022 adalah BB (70,00) dan terealisasi B (68,97) dengan capaian indikator kinerja adalah 98,53%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong *Sangat Berhasil* dengan predikat *Sangat Baik*.

Upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022 dalam rangka pencapaian komponen-komponen penilaian SAKIP sehingga menghasilkan nilai 68,97 (B), antara lain :

1. Perencanaan Kinerja

Komponen Perencanaan Kinerja memiliki Bobot penilaian sebesar 30 % dengan yang dibagi menjadi 3 (tiga) sub komponen meliputi keberadaan, kualitas dan pemanfaatan. Objek penilaian dari Komponen Perencanaan Kinerja yakni ketersediaan dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Panjang dan Jangka Menengah. Dalam hal Perencanaan Kinerja Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2005-2025. Sedangkan untuk perencanaan kinerja jangka menengah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 yang kemudian dijabarkan pada Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026 (Renstra PD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022, Rencana Kerja Anggaran, Rencana Kerja Anggaran Perubahan dan dokumen teknis lainnya.

Keberhasilan pada komponen Perencanaan Kinerja ini ditunjang oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami dan kemudian melaksanakan perencanaan sesuai dengan regulasi. Selain itu, didukung oleh berkembangnya beragam aplikasi terkait perencanaan yang sangat membantu dalam menunjang keberhasilan mencapai target kerja yang telah ditetapkan. Hal ini mempermudah hubungan koordinasi antara pihak-pihak terkait yang menjadi kunci suksesnya pencapaian target.

Selain hal tersebut diatas, tingginya komitmen dari setiap personal sumber daya manusia dalam hal pencapaian target kerja yang telah disepakati dan ditetapkan juga sangat mempengaruhi, meskipun masih dibutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia itu sendiri. Mendorong dan memaksimalkan komitmen tersebut dalam kondisi minimnya anggaran merupakan wujud dari efisiensi itu sendiri. Dimasa yang akan datang perlu dilakukan peningkatan anggaran dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia, atau setidaknya relevan dengan target yang akan dicapai.

Dalam melaksanakan perencanaan kinerja sebagai salah satu komponen penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam pelaksanaannya pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan didukung/ditunjang oleh 2 (dua) program sebagai berikut :

- 1) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan target anggaran sebesar Rp. 351.466.990,- (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 285.065.530,- (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah) dan/atau dengan capaian 81,11%.
- 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan target anggaran Rp. 464.897.304,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 441.691.834,- (Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) dan/atau dengan capaian 95,01%.

Berdasarkan dari 2 (dua) program sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 89.606.930,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah) atau sebesar 10,98%.

Penjelasan mengenai hasil evaluasi komponen Perencanaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor : B/881/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

- ❖ Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja dan dokumen lainnya baik pada tingkat perangkat daerah. Penyusunan dokumen ini berdasarkan hasil perbaikan sasaran dan indikator hasil evaluasi internal yang telah dilakukan, hal ini ditunjukkan dengan kualitas dokumen perencanaan level Pemerintah Daerah yang sudah cukup baik.
- ❖ Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam perencanaan kinerja diantaranya sebagai berikut :
 - ◆ Indikator Pemerintah Daerah sebahagian besar merupakan kompilasi indikator perangkat daerah;
 - ◆ Indikator kinerja belum sepenuhnya berorientasi hasil dan memenuhi kriteria spesifik, terukur/*measurable*, relevan dan cukup. Sebagai contoh pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa indikator PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial, dan sebagian indikator perangkat daerah lainnya;
 - ◆ Terdapat indikator ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan target 0,00%;
 - ◆ Penjabaran kinerja belum menggambarkan kerangka logis dalam mencapai kinerja; Hal tersebut terlihat pada turunan kinerja yang telah disusun masih berdasarkan pada pendistribusian kinerja pada setiap PD;
 - ◆ Terdapat beberapa target tahun 2022 pada level pusat yang lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

2. Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal pengukuran kinerja pada tahun 2022 mendapatkan penghargaan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu sebagai Terbaik I Tingkat Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Klaster Keuangan Rendah dengan Skor 77,2975 Nilai A tentang. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur Sumatera Barat di Padang pada Desember 2022.

Adapun hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan komponen Pengukuran Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, uraiannya sebagai berikut :

- ❖ Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan unit kerjanya telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja, dan rencana aksinya kepada seluruh perangkat daerah. Untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja tersebut, telah memiliki aplikasi *e-sakip* dalam kegiatan monitoring evaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja diantaranya sebagai berikut :
 - ◆ Belum terdapatnya pedoman mengenai pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang lengkap termasuk mekanisme pemanfaatan aplikasi pengukuran kinerja;
 - ◆ Pemerintah Daerah telah melakukan pengukuran kinerja, namun hasilnya belum digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*;
 - ◆ Belum memanfaatkan aplikasi *e-sakip* sebagai monitoring dan evaluasi kinerja, sehingga pemantauan kinerja masih dilakukan secara manual.

3. Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja baik tingkat instansi maupun tingkat perangkat daerah. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan serta telah dipublikasi secara umum, dan sebahagian perangkat daerah telah memiliki laporan akuntabilitas yang berkualitas. Namun berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor : B/881/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja antara lain sebagai berikut :

- ❖ Laporan kinerja pada level perangkat daerah belum cukup memnyampaikan informasi yang memadai. Hal tersebut terlihat pada laporan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang belum sepenuhnya menjelaskan faktor keberhasilan, hambatan dan strategi kedepan dalam mencapai sasaran strategis.
- ❖ Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya dipergunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut terlihat pada ketercapaian Target Dinas Perdagangan dan Transmigrasi dengan indikator laju pertumbuhan sektor perindustrian, namun target pada tahun 2022 cenderung lebih rendah. Dan hal tersebut juga ditemukan pada sebahagian indikator perangkat daerah lainnya.

4. Evaluasi Kinerja

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pencapaian penilaian SAKIP tahun 2022, juga didukung oleh komponen Evaluasi Kinerja

yang memiliki Bobot penilaian sebesar 10 %. Adapun Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, sebagai berikut :

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI	PREDIKAT	KET.
1	Dinas Pertanian	91,89	AA	
2	Inspektorat Daerah	89,99	A	
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89,90	A	
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	89,34	A	
5	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	88,99	A	
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	88,56	A	
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	86,14	A	
8	Dinas Kesehatan	86,01	A	
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	85,85	A	
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	85,34	A	
11	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	84,79	A	
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	84,32	A	
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	85,59	A	
14	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	82,51	A	
15	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	82,38	A	
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	81,57	A	
17	Kecamatan Ranah Pesisir	81,51	A	
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	81,47	A	
19	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	81,23	A	
20	RSUD Dr. M. Zein Painan	81,13	A	
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	80,88	A	
22	Dinas Perikanan dan Pangan	80,87	A	
23	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	80,80	A	
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	80,22	A	
25	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	80,14	A	
26	Kecamatan Batang Kapas	80,13	A	
27	Sekretariat Daerah	80,03	A	
28	Kecamatan Silaut	80,02	A	
29	Dinas Perhubungan	79,04	BB	
30	Kecamatan Airpura	78,02	BB	
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	77,15	BB	
32	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	77,02	BB	
33	Kecamatan Lunang	76,24	BB	
34	Kecamatan Sutera	74,23	BB	
35	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	71,22	BB	

36	Kecamatan Lengayang	71,10	BB	
37	Kecamatan IV Jurai	70,95	BB	
38	Kecamatan Pancung Soal	70,89	BB	
39	Kecamatan Koto XI Tarusan	70,35	BB	
40	Kecamatan Linggo Sari Baganti	70,68	BB	
41	Kecamatan Bayang	63,56	B	
JUMLAH		3302,05		
RATA-RATA (Jumlah nilai SAKIP/Jumlah Perangkat Daerah)		80,53	A	

Dari tabel tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 melakukan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah sebanyak 41 (empat puluh satu) dengan nilai rata-rata 80,53 dengan kualifikasi (A), dimana nilai tersebut didapatkan dengan membagi total nilai SAKIP dengan jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi.

Jika dibandingkan, nilai rata-rata Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah tahun 2020 lebih tinggi daripada nilai rata-rata tahun 2021. Pada tahun 2020 nilai rata-rata Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah yakni 80,85 dengan kualifikasi (A), namun dari jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi lebih banyak dibandingkan tahun 2021 yakni sebanyak 45 perangkat daerah. Hal ini disebabkan karena terjadinya perampingan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berikut Tabel Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, sebagai berikut :

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI	PREDIKAT	KET.
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	90,84	AA	
2	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	90,73	AA	
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89,82	A	
4	Inspektorat Daerah	89,79	A	
5	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	89,78	A	
6	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	88,31	A	
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	85,64	A	
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	87,57	A	
9	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan	87,22	A	
10	Badan Pengelolaan Keuangan daerah	86,34	A	
11	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	86,34	A	
12	Dinas Pangan	85,71	A	
13	Dinas Kesehatan	85,59	A	

14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	85,44	A	
15	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	84,79	A	
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	84,51	A	
17	Dinas Lingkungan Hidup	84,32	A	
18	Badan Pendapatan	83,02	A	
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB	82,71	A	
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	82,06	A	
21	Sekretariat Daerah	80,82	A	
22	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	80,53	A	
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	80,40	A	
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	80,35	A	
25	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	80,17	A	
26	Dinas Perikanan	80,09	A	
27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	80,08	A	
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	80,05	A	
29	Kecamatan Silaut	80,04	A	
30	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	79,34	BB	
31	Kecamatan Ranah Pesisir	79,31	BB	
32	Kecamatan Linggo Sari Baganti	78,98	BB	
33	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	78,51	BB	
34	Dinas Perhubungan	78,32	BB	
35	Kecamatan Airpura	77,97	BB	
36	Kecamatan Sutera	75,90	BB	
37	Kecamatan IV Jurai	72,45	BB	
38	Kecamatan Batang Kapas	72,29	BB	
39	Kecamatan Koto XI Tarusan	70,69	BB	
40	Kecamatan Lengayang	70,68	BB	
41	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	70,55	BB	
42	Kecamatan Bayang	70,26	BB	
43	Kecamatan Lunang	70,11	BB	
44	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	70,02	BB	
45	Kecamatan Pancung Soal	70,02	BB	
JUMLAH		3638,46		
RATA-RATA (Jumlah nilai SAKIP/Jumlah Perangkat Daerah)		80,85	A	

Berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor : B/881/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai berikut :

- ❖ Laporan hasil evaluasi belum memberikan rekomendasi yang cukup untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap perangkat daerah;
- ❖ Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum mampu mendorong perbaikan dan capaian kinerja *output* dan *outcome* pada level Pemerintah Daerah maupun level perangkat daerah seperti pada indikator jumlah kunjungan wisatawan, jumlah nigari tangguh bencana, dan sebagian indikator lainnya;
- ❖ Belum ada kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi SAKIP internal sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di perangkat daerah;
- ❖ Hasil evaluasi yang dilakukan inspektorat belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh perangkat daerah.

3. Skor nilai LPPD

Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Memenuhi amanat Pasal 69 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan kewajiban menyampaikan LPPD kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya. Pada Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Pemerintah Provinsi melalui Tim Daerah evaluasi LPPD terhadap LPPD Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri RI berkewajiban menetapkan peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional, namun sampai dengan saat ini keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut belum diterima. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terakhir menerima nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada tahun 2018 dari Kementerian Dalam Negeri RI yang tetapkan pada tanggal 25 April 2020 dengan Skor **3,1433** dan Status Kinerja **Sangat Tinggi**.

Pada dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026 ditetapkan target LPPD yang harus dicapai dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) tahun 2022 sebesar 3,2150 dengan skor penilaian sangat tinggi. Dengan belum diterbitkannya nilai EKPPD tahun 2022 dimana terakhir nilai tersebut diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI pada tahun 2018, maka nilai EKPPD masih menggunakan nilai pada tahun dimaksud yakni **3,1433** dengan status **Sangat Tinggi**. Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 97,77%.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya melalui Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 120/26/Pem-Otda/2023 tanggal 13 Januari 2023 perihal Nilai dan Peringkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Tahun 2019-2021, meminta dan memohon kepada Menteri Dalam Negeri RI agar menetapkan dan menerbitkan peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2019-2021.

Realisasi dan capaian indikator kinerja skor nilai LPPD Tahun 2022 pada tabel 2.11 berikut:

Tabel 2.11
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Skor Nilai LPPD
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Skor Nilai LPPD	skor	32150	31433	97,77

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Skor Nilai LPPD Tahun 2022 adalah 3,2150 dan terealisasi sebesar 3,1433 dengan capaian adalah 97,77%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong *Sangat Berhasil* dengan predikat *Sangat Tinggi*.

Level Maturitas SPIP

Maturitas sistem pengendalian internal merupakan ukuran kualitas dari sistem pengendalian intern pada suatu organisasi. Semakin tinggi maturitasnya semakin baik kualitas sistem pengendalian internnya. Selain itu penilaian maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan target indikator kinerja bidang aparatur negara yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2021-2026. Indikator kinerja ini berupa tingkat kematangan implementasi SPIP yang berskala 1-5. Sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga / Pemerintah Daerah. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturitas ini dapat digunakan paling tidak sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern.

Level maturitas SPIP Kabupaten Pesisir Selatan meraih predikat level 3. Hal ini merupakan Nilai Lampiran Re-Assesment Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 berdasarkan hasil Quality Assurance (QA) karena SPIP Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan belum dinilai, yang menurut rencana akan dilakukan penilaian pada Tahun 2023. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan serta langkah dan upaya yang dilakukan oleh OPD penanggung jawab pencapaian target indikator kinerja level maturitas SPIP yaitu Inspektorat beserta OPD pendukung dalam memenuhi kriteria penilaian.

Langka-langkah yang harus dilakukan penilaian level SPIP antara lain :

1. Penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis
2. Pengkomunikasian kebijakan dan prosedur
3. Peningkatan komitmen implementasi dan dokumentasi
4. Evaluasi formal, berkala dan terdokumentasi
5. Pemantauan/pengembangan berkelanjutan

Implementasi dari penilaian level maturitas SPIP yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Menerapkan perilaku dan penegakkan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara
2. Menetapkan standar kompetensi maupun uraian tugas untuk seluruh jabatan
3. Implementasi kepemimpinan yang kondusif
4. Prosedur dan implementasi pendelegasian wewenang dan tanggung jawab Menetapkan kebijakan/aturan mengenai pembinaan SDM
5. Hasil kinerja pengawasan Inspektorat secara internal dan eksternal
6. Reviu kinerja atas capaian kinerja dan membuat analisa pencapaian target kinerja
7. Rekonsiliasi antar PD
8. Meningkatkan kinerja pegawai PD
9. Pengendalian umum dan pengendalian kinerja yang signifikan
10. Pengamanan barang milik daerah (BMD)
11. Otorisasi dan pencatatan transaksi kejadian penting

Peningkatan maturitas level SPIP di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dicapai dengan beberapa upaya antara lain :

1. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk menyelenggarakan SPIP
2. Ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor : 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Ditetapkannya Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Ditetapkannya Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 700/407/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
5. Melakukan Sosialisasi tentang SPIP
6. Perangkat Daerah agar meningkatkan kualitas pengelolaan risiko
7. Inspektorat Daerah melakukan penilaian efektifitas pengelolaan risiko

Berikut tabel 2.12. realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP Tahun 2022.

Tabel 2.12
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Level Maturitas SPI
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Level Maturitas SPIP	tanpa satuan	3 (3,0057)	3 (3,0000)	99.81

Level Maturitas SPIP Tahun 2022 adalah 3,0057 dan realisasi 3,000 dengan capaian adalah 99,81%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong *Sangat Berhasil* dengan predikat *Sangat Baik*.

Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 telah berada pada level 3 artinya secara umum menunjukkan bahwa SPIP telah dipraktekkan diseluruh organisasi di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan didukung dengan sistem pendokumentasian yang memadai, namun efektifitas pengendalian belum seluruhnya dievaluasi sehingga terdapat kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Beberapa infrastruktur pengendalian intern yang masih belum dilaksanakan secara memadai yaitu :

1. Belum sepenuhnya mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan serta prosedur atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi dalam Pemerintah Daerah serta belum mendokumentasikan secara konsisten.
2. Belum melakukan evaluasi atas efektifitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas semua kegiatan pokok unit organisasi dalam Pemerintah Daerah secara berkala dan terdokumentasi.
3. Belum melakukan pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan semua kegiatan.
4. Melakukan Revisi petunjuk teknis/pelaksanaan terkait penilaian resiko.

Untuk dapat ke level yang lebih tinggi dari capaian sekarang maka perlu melakukan :

1. Mengoptimalkan implementasi SPIP.
2. Menyusunan dokumen Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2023, dan inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Koordinator.
3. Melakukan penilaian maturitas SPIP secara mandiri terhadap semua PD di
4. Merevisi pedoman penilaian risiko secara khusus dan menyusun RTP berbasis risiko secara komprehensif atas program/kegiatan utama PD dan mengimplementasikan menjadi dasar perencanaan kegiatan yang harus ditindaklanjuti oleh PD terkait.
5. Setiap Kepala PD terkait agar melakukan evaluasi secara berkala atas:
 - a. Aturan perilaku dan penegakan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara.
 - b. Menetapkan standar kompetensi maupun uraian tugas untuk seluruh jabatan.
 - c. Implementasi kepemimpinan yang kondusif.
 - d. Prosedur dan implementasi pendelegasian wewenang dan tanggungjawab.
 - e. Menetapkan kebijakan/aturan mengenai pembinaan SDM.
 - f. Hasil kinerja pengawasan inspektorat secara internal dan eksternal.

- g. Reviu kinerja atas capaian kinerja dan membuat analisa pencapaian target kinerja.
- h. Rekonsiliasi antar PD.
- i. Meningkatkan Kinerja Pegawai PD.
- j. Pengendalian Umum dan pengendalian kinerja yang signifikan.
- k. Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD).
- l. Otorisasi dan pencatatan transaksi kejadian penting.

Program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan Yang Berkinerja, Akuntabel dan Bebas KKN antara lain :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
3. Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Aparatur
4. Program Pemantapan Otonomi Daerah
5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
6. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari
7. Program Penyelenggaraan Pengawasan
8. Perencanaan pembangunan Daerah
9. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
10. Program Pemantapan Otonomi Daerah

Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas birokrasi

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 2.13 berikut ini:

Tabel 2.13
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks SPBE	tanpa satuan	3.20	3.48	108.75
2.	Indeks Profesional ASN	tanpa satuan	62	49,93	80.53
Rata-rata Capaian					94,64

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 2 sebesar 94,64 %. Pencapaian sasaran strategis 2 termasuk predikat **Sangat Baik**.

1. Indeks SPBE

Indek Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pelaksanaan SPBE ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk mengetahui pelaksanaan SPBE (tingkat kematangan SPBE) pada instansi pemerintah tersebut perlu dilakukan evaluasi. Tingkat kematangan dalam evaluasi SPBE ini ditinjau dari tahapan pada 2 (dua) yaitu kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Sedangkan dalam menentukan penilaian akhir, nilai indeks dihitung secara agregat dari nilai tingkat kematangan pada indikator. Nilai indeks terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

1. Nilai Indeks Aspek adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE pada aspek tertentu.
2. Nilai Indeks Domain adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE pada domain tertentu.

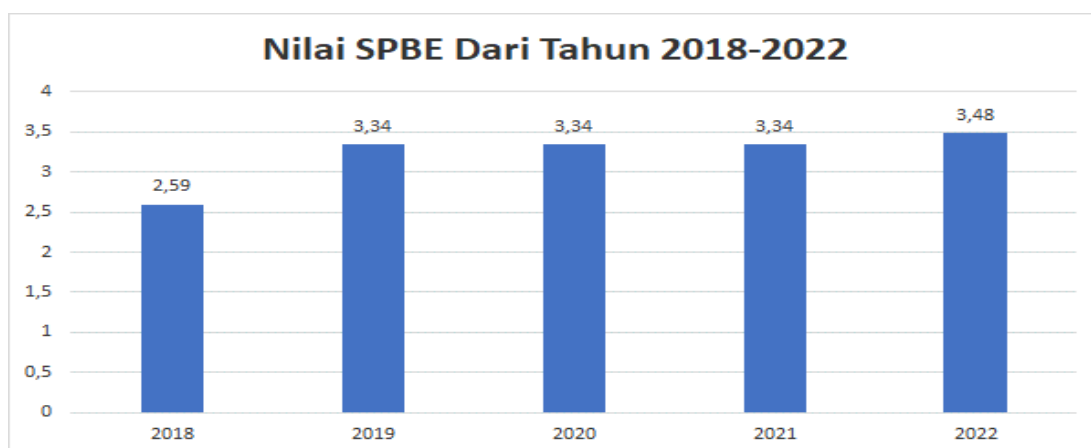
Nilai Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain.

Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan kategori sebagai berikut:

No.	Nilai Indeks	Kategori
1.	4,2-<5,0	memuaskan
2.	3,5-<4,2	Sangat baik
3.	2,6-<3,5	baik
4.	1,8-<2,60	cukup
5.	<1,8	kurang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memiliki cakupan yang luas, meliputi: layanan dari pemerintah ke pemerintah, pemerintah ke masyarakat, pemerintah ke pelaku usaha, dan pemerintah ke ASN. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan e-government, berdampak pada integrasi sistem. Implementasi SPBE yang terpadu ini bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Proses Bisnis SPBE merupakan salah satu domain pada Arsitektur SPBE memiliki tujuan untuk memberikan pedoman dan arahan dalam penggunaan data dan informasi serta untuk mendukung pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.

Indikator yang memiliki target berupa nilai Indeks SPBE sebesar 3,20, diakhir tahun 2022 Realisasi Kinerja sebesar 3,48 atau predikat SPBE Baik sehingga capaian untuk indikator Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 108,75 %, ini berarti termasuk dalam kriteria Berhasil. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan Kegiatan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.2.992.992.200,- sebagai penunjang pelaksanaan untuk mencapainya Nilai SPBE



Gambar 2.1. Pencapaian Nilai SPBE dari tahun 2018 – 2022

Keterangan :

- i. Indikator penilaian dari Tahun 2018-2020 sebanyak 35 indikator
- ii. Indikator penilaian dari Tahun 2021-2022 sebanyak 47 indikator

Hasil Indeks SPBE tahun 2022 sebagaimana tersebut diatas, didasari atas evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PANRB melalui surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor : B/810/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022 Perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2022																					
Domain dan Aspek Penilaian		Bobot	Predikat Indeks SPBE																		
Domain 1 - Kebijakan SPBE		13%	<table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – < 3,5</td><td>Baik *)</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0	Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5	Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6	Cukup																			
5	< 1,8	Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		13%																			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE		25%																			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis		10%																			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi		10%																			
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE		5%																			
Domain 3 - Manajemen SPBE		16,5%																			
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE		12%																			
Aspek 6 - Audit TIK		4,5%																			
Domain 4 - Layanan SPBE		45,5%																			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		27,5%																			
Aspek 8 - Layanan Publik		18%																			

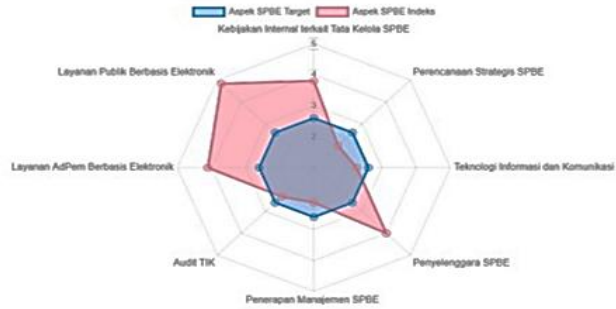
*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2.6)

^{*)} Target penilaian: Predikat Baik
(indeks minimal 2,6)

INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. PESISIR SELATAN

3,48
(Baik)

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2022
SPBE	3,48

Nama Indeks	Nilai 2022
SPBE	3,48
Domain Kebijakan SPBE	3,80
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,80
Domain Tata Kelola SPBE	2,50
Perencanaan Strategis SPBE	2,00
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,25
Penyelenggara SPBE	4,00
Domain Manajemen SPBE	2,18
Penerapan Manajemen SPBE	2,13
Audit TIK	2,33
Domain Layanan SPBE	4,39
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,10
Layanan Publik Berbasis Elektronik	4,83

Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi menjadi salah satu factor dalam peningkatan nilai SPBE

No	Nama Aplikasi	Nama Lengkap	Tahun Pembuatan	Tahun Penggunaan	Tahun Pengembangan
1	SIPD	Sistem Infomasi Pemerintah daerah		2019	
2	GIS Insfrastuktur		2017		



3	E-PLANNING	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2017		
4	E-PAD		2017		
5	SISMIOP		2017		
6	SAPK	Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	2017		
7	SIM GAJI		2017		
8	SIPKD	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	2017	2017	
9	SIPKD Modul Aset		2017		
10	E-RTLH		2017		
11	E-PUSKESMAS		2017		
12	SLRT		2017		
13	SIKS-NG		2017		
14	SIM-PKH		2017		
15	SIMFONI		2017		
16	SIMDAPODIK		2017		
17	SIMTUN		2017		
18	SIMDAK		2017		
19	SIMUN		2017		
20	SIKAK	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	2017		
21	SIM-PKB		2017		
22	SLIMS		2017		
23	SISKEUDES	Sistem Informasi Keuangan Desa	2015	2016	2016-2021
24	CELOK	Cek Lokasi Pessel	2017	2017	2019
25	TV Pessel	TV Pessel	2017	2017	
26	PRODESSEL		2017		
27	PORTAL DESA		2017		
28	SIPO		2017		
29	SPIPISE		2017		
30	ANJAB-ABK		2017		
31	JKN		2017		
32	SPSE / SIRUP	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan	2017		
33	INAPROC		2017		
34	E-FORMASI		2018		
35	Talent Pool		2018		
36	SIM-RS	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	2018		
37	E-BOS		2018		
38	Aplikasi Antrian Pelayanan		2018		
39	E-LAPOR	Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat	2018		

40	SIMANTRA	Sistem Informasi Manajemen Integrasi Informasi Dan Pertukaran Data	2018		
41	DASHBOARD	Website Pesisir Selatan	2018	2018	2019
42	OSS	Online Single Submission	2018		
43	SIBAPER	Sistem Informasi Barang Persediaan	2018	2018	
44	Web Client Pajak	Web Client E-PAD Pessel	2019		
45	eTPP	Aplikasi Tambahan Penghasilan	2019	2021	2021;2022
46	SIMPEG	Sistem Informasi Kepegawaian	2019		2022
47	SIPENAMPUNG SINAR	Sistem Informasi Penampungan Data	2019	2019	
48	PPID	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	2019	2019	
49	WBS	Whistle Blowing System	2019		
50	E-SPPD	Sistem Informasi Perjalanan Dinas	2019	2019	2020;2021
51	SIMAYA	Sistem Administrasi Perkantoran Maya	2019	2019	2020
52	MANDEH	Monitoring Anggaran Desa Hebat	2019	2020	202.020.21 2.022
53	WEBSITE BERITA	Webiste Pemerintah Kabupaten	2019	2019	2020;2021
54	SINAR - 182 SUB DOMAIN	Sistem Informasi Nagari	2019		
55	SiCANTIK Cloud	Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik	2019	2019	2020;2021
56	SIMARDI		2019		
57	E-SAKIP	Sistem Informasi Akuntabilitas Pemerintahan	2019	2019	2020;2021; 2022
58	JDIH	Jaringan Dokumentasi Informasi Publik	2019	2019	2020
59	SIMBANGDA	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	2019	2021	2022
60	TALIKASI	Portal Layanan Informasi & komunikasi Terintegrasi	2019	2019	
61	WEBSITE OPD	Webiste Perangkat Daerah	2018	2018	2020;2021; 2022
62	E-KINERJA BKN	Sistem Informasi Kinerja ASN	2020	2021	2022
63	WEBSITE LPPL RADIO LANGKISAU FM	Lembaga Penyiaran Publik Lokal	2018	2018	
64	APLIKASI WEB MAIL OPD	Mail Perangkat Daerah	2017		
65	APLIKASI WEB MAIL ASN	Mail Perangkat Daerah	2017		
66	APLIKASI CLOUD KOMINFO	Storage Dan Share Data	2018		
67	SIMHP		2021		
68	SIPTL		2021		

69	LAPOR SP4N	Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional	2021		
70	OPENDATA	Satudata terbuka	2021	2021	2022
71	UKW	Unit Kepatuhan Warga	2021		
72	IBI PESSEL	Ikatan Bidan Indonesia Pesisir Selatan	2021	2021	2022
73	PESSEL DALAM GENGAMAN	Pesisir Selatan Dalam Gengaman	2022	2022	
74	BPHTP Pajak	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2022	2023	2023
75	ABON Pessel	Absensi Online	2021	2021	2022
76	APLIKASI FLLAJ BERBASIS WEB	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2020		
77	APLIKASI BEASISWA PESSEL	Aplikasi Beasiswa Pesisir Selatan	2020		
78	APLIKASI UPK DPMDPPKB	Unit Pengelola Keuangan	2021		
79	SiRomet	Aplikasi Room Meeting	2022		
80	APLIKASI FLLAJ BERBASIS ANDROID	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2022	2022	
81	Aplikasi Vaksin	Aplikasi Vaksin	2021		
82	Aplikasi Informasi Digital	Aplikasi Informasi Digital	2019		
83	Aplikasi e-Monev	Evaluasi Monitoring	2018		
84	Siguru	Sistem Informasi Guru Kontrak	2022	2022	
85	Simapan	Sistem Informasi Masyarakat Penerima Bantuan	2021	2022	
86	SPBE	Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik	2021	2021	
87	siPENDEKAR	Sistem Informasi Pemadam Kebakaran	2022	2022	
88	siGAP-DANA	Sistem Informasi Tanggap Bencana	2022	2022	
89	PPDB Online	Penerimaan Peserta Didik Baru	2022	2022	
90	eSURVEY	Survey Statistik Potensi Nagari	2022	2022	
91	siMANTAN	Sistem Informasi Manajemen Pertanahan	2022	2022	
92	Lapau PESSEL	Aplikasi Pemasaran Produk UMKM Pessel	2022	2022	
93	Manrisk SPBE	Aplikasi Manajemen Risiko SPBE	2020	2022	2022
94	SIPPORA Pessel	Aplikasi Informasi Pariwisata	2022	2022	
95	Pronasa	Program Nagari Bersekolah	2022	2022	

Program yang menunjang pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

NO	Program	Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp	%
1	Program Aplikasi Informatika	2.992.992.900	2.964.164.228	99,04%
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	154.650.900	128.845.190	83,31%
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial Sektorial	203.166.500	156.333.450	76,95%
2	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	798.278.800	772.248.432	96,74%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.878.796.774	3.753.823.163	97%

Indikator ini ditunjang oleh semua program yang ada dengan target anggaran Rp.8.027.885.874,- dan realisasi sebesar Rp. 7.775.414.463,- atau capaian 96,86%.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 25.247.141,- atau 3,14 %.

Hambatan pada sasaran Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu belum adanya arsitektur SPBE sebagai kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

Tabel 2.14
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks SPBE
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks SPBE	tanpa satuan	3.20	3.48	108.75

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Indeks SPBE tahun 2022 adalah 3,20 dan realisasi level 3,48 dengan capaian adalah 108,75%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong *Sangat Berhasil* dengan predikat *Sangat Baik*.

2. Indeks Profesional ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari beberapa dimensi yaitu Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin. Pengukuran indeks berdasarkan Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Berikut tabel 2.15, realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesional ASN tahun 2022.

Tabel 2.15
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesional ASN
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Profesional ASN	tanpa satuan	62	49,93	80,53

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Indeks Profesional ASN Tahun 2022 targetnya adalah 62 dan terealisasi 49,93 dengan capaian kinerja sebesar 80,53%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong *Berhasil* dengan predikat *Baik*.

Penjabaran :

1. Dimensi Kualifikasi (Nilai 13.38)

Kualifikasi merupakan salah satu dimensi dalam pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Dimensi ini memiliki bobot nilai maksimal sebesar 25% dari total nilai IP ASN yang dapat diperoleh oleh suatu instansi. Indikator yang diambil dalam pengukuran dimensi kualifikasi ini adalah riwayat jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS.

Berdasarkan nilai IP ASN yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022, dimensi kualifikasi menyumbangkan nilai sebesar 13.38 %. Berikut data riwayat pendidikan yang dicapai oleh PNS yang ada di pemda Pesisir Selatan.

NO	Jenis	Jumlah PNS	Bobot	%
1	S3	0	25	0,00
2	S2	412	20	1,47
3	S1/D4/Sederajat	3693	15	9,90
4	D3/ Sederajat	785	10	1,40
5	D1/D2/SMA/SMK/Sederajat	670	5	0,60
6	SD/SMP/Sederajat	34	1	0,01
	Total	5594		13,38

Salah satu langkah yang bisa diambil untuk peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi yaitu, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar. Pemberian tugas belajar diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dalam mengisi suatu jabatan. Apabila PNS memiliki keahlian atau kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya maka akan berdampak pada peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan sikap dan kepribadian profesional PNS sehingga diharapkan mampu meningkatkan nilai IP ASN.

2. Dimensi Kompetensi (Nilai 12.86)

Dalam pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Dimensi ini memiliki bobot nilai maksimal sebesar 40% dari total nilai IP ASN yang dapat diperoleh oleh suatu instansi. Indikator yang diambil dalam pengukuran dimensi kompetensi ini adalah riwayat pengembangan kompetensi yang dicapai oleh PNS.

PNS yang menduduki Jabatan Struktural (nilai maksimal 40)		
No	Indikator	Bobot per indikator
1	"Sudah" melaksanakan Diklat Kepemimpinan	15
2	"Belum" Diklat Kepemimpinan	0
3	Diklat Teknis (20 JP)	15
	Cara perhitungannya jika PNS mendapatkan "XX" JP maka bobot yang didapatkan adalah "XX"/20 x 15 =	Contoh jika PNS mendapatkan 10 JP pada diklat teknisnya maka bobot nilai yang didapatkan adalah 10/20x 15 = 7.5
4	"Sudah" melaksanakan Seminar/ Workshop/ Magang/ Kursus/ dan sejenisnya dalam 2 tahun terakhir	10
5	"Belum" melaksanakan Seminar/ Workshop/ Magang/ Kursus/ dan sejenisnya dalam 2 tahun terakhir	0

PNS yang menduduki Jabatan Fungsional (nilai maksimal 40)		
No	Indikator	Bobot per indikator
1	"Sudah" melaksanakan Diklat Fungsional	15
2	"Belum" Diklat Fungsional	0
3	Diklat Teknis (20 JP)	15
	Cara perhitungannya jika PNS mendapatkan "XX" JP maka bobot yang didapatkan adalah "XX"/20 x 15 =	Contoh jika PNS mendapatkan 10 JP pada diklat teknisnya maka bobot nilai yang didapatkan adalah 10/20x 15 = 7.5
4	"Sudah" melaksanakan Seminar/ Workshop/ Magang/ Kursus/ dan sejenisnya dalam 2 tahun terakhir	10
5	"Belum" melaksanakan Seminar/ Workshop/ Magang/ Kursus/ dan sejenisnya dalam 2 tahun terakhir	0

PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana (nilai maksimal 40)		
No	Indikator	Bobot per indikator
1	Diklat Teknis (20 JP)	22.5
	Cara perhitungannya jika PNS mendapatkan "XX" JP maka bobot yang didapatkan adalah $\frac{\text{"XX"}}{20} \times 22.5 = \dots$	Contoh jika PNS mendapatkan 5 JP pada diklat teknisnya maka bobot nilai yang didapatkan adalah $\frac{5}{20} \times 22.5 = 5.625$
2	"Sudah" melaksanakan Seminar/ Workshop/ Magang/ Kursus/ dan sejenisnya dalam 2 tahun terakhir	17.5
3	"Belum" melaksanakan Seminar/ Workshop/ Magang/ Kursus/ dan sejenisnya dalam 2 tahun terakhir	0

Berdasarkan nilai IP ASN yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022, dimensi kompetensi menyumbangkan nilai sebesar 12.86%. Berikut data riwayat pengembangan kompetensi yang dicapai oleh PNS Pemda Pesisir Selatan berdasarkan pembagian jenis jabatan.

NO	Jenis Jabatan	Jumlah PNS	Bobot Dimensi Kompetensi	%
1	JABATAN STRUKTURAL	410	5,09	0,37
2	JABATAN FUNGSIONAL	4123	16,61	12,24
3	PELAKSANA	1061	1,29	0,24
	Total			12,86

3. Dimensi Kinerja (Nilai 20.72)

Dalam pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dimensi Kinerja memiliki bobot nilai maksimal sebesar 30% dari total nilai IP ASN yang dapat diperoleh oleh suatu instansi. Indikator yang diambil dalam pengukuran dimensi kinerja adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP) dicapai oleh PNS dalam satu tahun periode penilaian.

Nilai prestasi kerja/kinerja yang seoran PNS peroleh dalam satu tahun terakhir akan mendapatkan bobot nilai sebagai berikut :

Nilai SKP	Bobot nilai yang diterima
91 – 100	30
76 – 90	20
61 – 75	15
51 – 60	5
50 ke bawah	1

Berdasarkan nilai IP ASN yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022, dimensi kinerja menyumbangkan nilai sebesar

20.72%. Berikut data riwayat hasil penilaian kinerja dicapai oleh PNS Pemda Pesisir Selatan dalam satu tahun berdasarkan pembagian jenis jabatan.

NO	Jenis	Jumlah PNS	Bobot Dimensi Kinerja	%
1	JABATAN STRUKTURAL	410	23,39	1,71
2	JABATAN FUNGSIONAL	4123	20,05	14,78
3	PELAKSANA	1061	22,27	4,22
	Total			20,72

4. Dimensi Disiplin (4.98)

Dimensi Disiplin memiliki bobot nilai maksimal sebesar 5% dalam pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang suatu instansi dapat memperolehnya. Indikator yang diambil dalam pengukuran dimensi disiplin adalah Data/ informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima oleh seoran PNS.

Rincian perhitungan bobot nilai yang dapat dilihat dari dimensi disiplin sebagai berikut :

Data/ informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima		Bobot nilai yang diterima
Tidak pernah dikenai hukuman disiplin		5
Pernah Dikenai Hukuman Disiplin	Ringan	3
	Sedang	2
	Berat	1

Berdasarkan nilai IP ASN yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022, dimensi disiplin mendapatkan nilai sebesar 4.98%. Berikut Data/ informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima oleh PNS Pemda Pesisir Selatan berdasarkan pembagian jenis jabatan.

NO	Jenis	Jumlah PNS	Bobot Dimensi Disiplin	%
1	JABATAN STRUKTURAL	410	4,96	0,36
2	JABATAN FUNGSIONAL	4123	4,99	3,68
3	PELAKSANA	1061	4,95	0,94
	Total			4,98

Sasaran 3 : Meningkatnya keterbukaan informasi dan pelayanan publik

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 2.16 berikut ini:

Tabel 2.16
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 3

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Kategori keterbukaan terhadap informasi publik	tanpa satuan	93	99.92	107.44
2.	Indek Kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik	tanpa satuan	82	82.65	100.79
Rata-rata Capaian					104,12

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 2 sebesar 104,12%. Pencapaian sasaran strategis 2 termasuk predikat *Sangat Baik*.

1. Kategori keterbukaan terhadap informasi publik

Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang **Keterbukaan Informasi Publik** adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. **Keterbukaan informasi publik didasarkan pada pertimbangan :**

- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- d. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Adapun tujuan dari **Keterbukaan informasi publik** adalah untuk :

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi dalam penilaiannya menggunakan 4 indikator, yaitu:

1. Mengumumkan Informasi Publik berbobot 25%;
2. Menyediakan Informasi Publik berbobot 20%;
3. Pelayanan Informasi Publik berbobot 25%; dan
4. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik berbobot 30%.

Tabel kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik

NO	KUALIFIKASI	NILAI
1	Informatif	97-100
2	Menuju Informatif	80-96
3	Cukup Informatif	60-79
4	Kurang Informatif	40-59
5	Tidak Informatif	<39

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat Nomor : 05/KEP/KI-PSB/XII/2022 Tentang Penetapan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2022. Hasil perolehan penetapan kualifikasi Pemeringkatan dan Pemberian yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022 dengan nilai **99,92** dalam kategori **Informatif** dan meraih juara 1 se Provinsi Sumatera Barat.

Berikut tabel 2.17, realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kategori Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022.

Tabel 2.17
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kategori Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Kategori keterbukaan informasi publik	tanpa satuan	93	99,92	107.44

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Kategori keterbukaan informasi publik Tahun 2022 ditargetkan 93 (informatif) dan terealisasi sebesar 99,92 (informatif) dengan capaian kinerja sebesar 107,44%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong *Sangat Berhasil* dengan predikat *Sangat Baik*

Dalam pencapaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 menyediakan :

1. Pengumuman Informasi Publik yang disampaikan :
Daftar Informasi Publik (DIP) terdiri dari OPD = 4.488, Kecamatan = 1.824 dan Nagari = 3.017
Total DIP 9.329
2. Informasi Publik yang disediakan dan Jenis-jenis informasi :
 - a. Informasi Berkala
 - b. Informasi Setiap Saat
 - c. Informasi Serta Merta
 - d. Informasi Dikecualikan

Dalam melaksanakan pencapaian indikator keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan didukung/ditunjang oleh 2 (dua) yaitu Program Informasi & Komunikasi Publik dengan besaran anggaran sebesar Rp. 798.278.800 dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan besaran anggaran sebesar Rp. 3.878.796.774. Total keseluruhan anggaran sebesar Rp. 4.677.075.574 (96.77 %) terealisasi Rp. 4.526.071.595 (3.23%).

3. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
 - Dokumentasi Informasi Publik (DIP)Kabupaten Pesisir Selatan untuk ke lima kalinya mendapatkan nilai "Informatif"



1. *Indek Kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik*

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat memerlukan data atau informasi kepuasan masyarakat, yang diukur secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 yang mengamanatkan bahwa seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Survey kepuasan sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, dimana kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat diketahui dari persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan karena pelayanan publik merupakan indikator keberhasilan pemerintah yang dapat dirasakan masyarakat.

Berikut tabel 2.18, realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik Tahun 2021.

Tabel 2.18
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik	tanpa satuan	82	82.65	100.79

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Indeks kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik Tahun 2022 target 82 dan realisasi 82,65 dengan capaian kinerja adalah 100,79%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong *Sangat Berhasil* dengan predikat *Sangat Baik*.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terdiri atas 10 (sepuluh) unsur yang harus ada dalam Unsur SKM diantaranya : (1) Kejelasan Persyaratan, (2) Persyaratan Pelayanan, (3) Sistem, Mekanisme dan Prosedur, (4) waktu Pelayanan, (5) Biaya/Tarif Layanan, (6) Sarana dan Prasarana Pelayanan, (7) Perilaku Pelaksana, (8) Kompetisi Pelaksana, (9) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (10) Hasil Produk Layanan.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022 melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan survey kepuasan masyarakat kepada perangkat daerah/unit kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yakni Unit Pelayanan Teknis Puskesmas sebanyak 7 (tujuh) Puskesmas sebagai berikut :

1. Puskesmas Tarusan
2. Puskesmas Koto Berapak
3. Puskesmas Surantih
4. Puskesmas Kambang
5. Puskesmas Balai Selasa
6. Puskesmas Airhaji
7. Puskesmas Tanjung Beringin

Survei Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mendapatkan feed back/umpan balik atas kinerja/kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat guna perbaikan/peningkatan kinerja/kualitas pelayanan secara berkesinambungan. Program ini diselenggarakan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya IKM Kabupaten Pesisir Selatan 2022 dalam mewujudkan kepemimpinan yang baik (good governance).

Maksud dilakukan survey indek kepuasan masyarakat pada 7 (tujuh) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud adalah untuk mengetahui penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan. Sedangkan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah :

1. Terukurnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ada pada 7 Puskesmas Rawat Inap (Unit Kerja/ Satker) di Kabupaten Pesisir Selatan
2. Untuk mengetahui perkembangan kinerja pelayanan pada 7 Puskesmas Rawat Inap (Unit Kerja/ Satker) di Kabupaten Pesisir Selatan secara periodik.
3. Hasil pengukuran dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik selanjutnya.
4. Sebagai bahan dalam penetapan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pencapaian indikator makro Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Sebagai ukuran dasar dalam menilai penilaian pencapaian kinerja pelayanan pada tahun berikutnya.

Kategori pelayanan dibedakan dengan interval sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Nilai Indeks Kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan pada Pelayanan Puskesmas Tarusan, Puskesmas Koto Berapak, Puskesmas Surantih, Puskesmas Kambang, Puskesmas Balai Selasa, Puskesmas Air Haji dan Puskesmas Tanjung Beringin di Kabupaten Pesisir Selatan Selatan adalah :

- Nilai IKM setelah dikonversi = $3,306 \times 25 = 82,65$
- Mutu Pelayanan = **B**
- Kinerja Unit Pelayanan = **BAIK**

Bila diurut satu persatu dari unsur pelayanan, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.19
IKM atas Masing-Masing Unsur Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Nilai RR Unsur	Dikalikan 25
1	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0,363	9,073
2	Biaya/ Tarif Pelayanan	0,357	8,898
3	Hasil Produk Layanan	0,330	8,257
4	Perilaku Pelaksana	0,326	8,152
5	Kejelasan Persyaratan	0,325	8,127
6	Kompetisi Pelaksana	0,324	8,119
7	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	0,322	8,057
8	Persyaratan Pelayanan	0,322	8,052
9	Sarana dan Prasarana	0,319	7,978
10	Waktu Pelayanan	0,316	7,907
Jumlah		3,306	82,649

Rekapitulasi Daftar Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No.	Unit Kerja Pelayanan Publik	Jumlah Responden	Nilai IKM	Kategori
1	2	3	4	5
1	Puskesmas Air Haji	150	86,265	Baik
2	Puskesmas Balai Selasa	150	84,067	Baik



3	Puskesmas Koto Berapak	150	82,683	Baik
4	Puskesmas Tarusan	150	81,667	Baik
5	Puskesmas Tanjung Beringin	150	81,433	Baik
6	Puskesmas Surantih	150	81,367	Baik
7	Puskesmas Kambang	150	81,067	Baik
Jumlah Nilai IKM		1.050	578,549	

Karena penilaian masyarakat ini masih berada pada nilai kategori B dan **BAIK**. Untuk itu perlu terus dilakukan perbaikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kedisiplinan petugas dan menjadikan kedisiplinan/kehadiran secara terukur.
2. Ketersediaan layanan pengaduan masyarakat.
3. Tindak lanjut dari keluhan pengaduan/saran masyarakat.
4. Memfasilitasi pengaduan masyarakat melalui form dan kotak pengaduan (diisi tanpa harus memberikan identitas), dan di evaluasi setiap hari.
5. Melakukan penelusuran atas pengaduan yang diterima.
6. Merespon pengaduan secepat mungkin.
7. Prosedur pelayanan di publikasikan (dalam bentuk papan, poster dan brosur).
8. Kejelasan tahapan pelayanan.
9. Kesederhanaan/kemudahan tahapan pelayanan/proses pelayanan.
10. Kecepatan pendaftaran pelayanan.
11. Diperlukan kemampuan menjelaskan dengan mudah kepada masyarakat tentang tahapan pelayanan dan dibantu dengan adanya poster/brosur. Dalam hal peningkatan kemampuan ini, pelatihan komunikasi dan service menjadi hal yang dibutuhkan oleh jajaran pelayanan Puskesmas Tarusan, Puskesmas Koto Berapak, Puskesmas Surantih, Puskesmas Kambang, Puskesmas Balai Selasa, Puskesmas Air Haji dan Puskesmas Tanjung Beringin di Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Jika diperlukan menata ulang sistem pendaftaran atau menambah loket pelayanan agar mempermudah kecepatan pelayanan dan memperpendek antrian pada loket antrian Puskesmas Tarusan, Puskesmas Koto Berapak, Puskesmas Surantih, Puskesmas Kambang, Puskesmas Balai Selasa, Puskesmas Air Haji dan Puskesmas Tanjung Beringin di Kabupaten Pesisir Selatan
13. Sarana dan prasarana penunjang pada Puskesmas Tarusan, Puskesmas Koto Berapak, Puskesmas Surantih, Puskesmas Kambang, Puskesmas Balai Selasa, Puskesmas Air Haji dan Puskesmas Tanjung Beringin di Kabupaten Pesisir Selatan, seperti ruangan pelayanan yang memadai dan nyaman, ruangan tunggu yang memadai, kafetaria, ruangan shalat dan WC umum.

14. Penyediaan Genset sebagai antisipasi bila pasokan listrik dari PLN mengalami gangguan.
15. Dibuat dan ditetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan. Standar pelayanan ini setidaknya-tidaknya memuat tentang persyaratan pelayanan, sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya dan produk pelayanan.
16. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga masyarakat memahami bagaimana proses penyelenggaraan pelayanan kependudukan sampai jangka waktu penyelesaian pelayanan.
17. Penambahan tenaga IT dibidang pelayanan dan pengoperasian peralatan pelayanan.
18. Peningkatan kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat yang dilayani, sehingga menimbulkan empati dari masyarakat yang dilayani.
19. Kejelasan petugas dan pembagian tugas dalam pelayanan.
20. Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsur pelayanan yang masih mendapat persepsi kepuasan terendah atau dibawah rata-rata, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat lebih baik lagi.
21. Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan service excellent (pelayanan prima) khususnya bagi petugas yang melayani masyarakat secara langsung, untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi internal mengenai sikap layanan dan disiplin kerja.
22. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna layanan terhadap petugas dalam memberikan pelayanan. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah :
 - a. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas.
 - b. Memberikan informasi secara komunikatif baik secara langsung maupun melalui media kepada pengguna layanan.
 - c. Memberikan penghargaan (reward) dan sanksi (*punishment*) kepada petugas.
23. Diperlukan penambahan petugas yang melayani masyarakat secara langsung, agar kecepatan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Disamping itu juga dapat melakukan pendistribusian petugas secara tepat agar produktifitas untuk masing-masing petugas pelayanan bisa lebih maksimal.
24. Diharapkan setelah mendapatkan Juara Harapan I Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik tingkat Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan lebih meningkatkan kinerja, agar Inovasi tersebut dapat menjadi acuan oleh Kabupaten/Kota lain.
25. Diperlukan upaya oleh masing-masing unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan kemudahan pelanggan dalam mengajukan keluhan melalui pembentukan Tim Kerja yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelanggan serta menyediakan media yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna

layanan seperti memanfaatkan Sistem Informasi yang menyangkut kesehatan pada Kecamatan, telephone, SMS Center, Email, dan/atau penempatan Kotak Saran.

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 4 terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 2.20 berikut ini:

Tabel 2.20
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 4

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup	8	9	87,50
2.	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	95	144	48,42
3.	Prevalensi stunting	Persen	10,92	7	135,90
4.	Angka kesakitan	Persen	15,95	15,16*	95,05
Rata-rata Capaian					91,72

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran strategis 4 sebesar 91,72%. Pencapaian sasaran strategis 4 termasuk predikat *Sangat Baik*.

1. Angka Kematian Bayi

Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB), dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.21
Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup	8	9	87,50%

Capaian Indikator AKB ini termasuk dalam kategori/ prediket ' Sangat Baik". Gambaran Pencapaian indikator tersebut diatas jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 s/d 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.22
Angka Kematian Bayi (AKB)
Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2022

Indikator	2020			2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Angka KematianBayi (AKB) / 1000 KH	8	6.9	119.25%	8	7	112.5%	8	9	87,50%

Dari table diatas dapat dilihat bahwa, ada peningkatan jumlah realisasi Angka Kematian bayi (AKB) dari tahun 2021 sebanyak 7/1000 KH menjadi 9/1000 KH pada tahun 2022.

Tabel 2.23
Tabel : Jumlah Kematian Bayi di Puskesmas
Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020-2022

NO	PUSKESMAS	Jumlah Kelahiran			Jumlah Kematian Bayi		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Barung2 Belantai	397	320	329	4	3	0
2	Tarusan	515	482	547	9	2	4
3	Pasar Baru	413	389	420	2	2	2
4	Koto Berapak	333	321	330	2	4	6
5	Asam Kumbang	122	120	135	2	1	1
6	Salido	637	603	618	3	8	9
7	Lumpo	212	189	216	0	3	5
8	Pasar Kuok	383	318	385	7	4	8
9	IV Koto Mudik	171	168	161	6	4	1
10	Surantih	984	989	796	5	2	7
11	Kayu gadang			200			3
12	Kambang	746	698	645	1	2	1
13	Koto Baru	273	264	247	2	1	2
14	Balai Selasa	543	492	510	3	5	4
15	Air Haji	888	796	811	4	1	1
16	Air Pura	347	477	314	0	1	4
17	Indera Pura	501	309	463	1	5	5
18	Tapan	271	270	276	5	0	0
19	Rahul	278	277	258	2	0	2
20	Tanjung Beringin	393	408	387	4	7	1
21	Tanjung Makmur	257	284	288	2	3	4
	JUMLAH	9070	8664	8336	64	58	75

Jumlah Kematian bayi paling tinggi pada tahun 2022 ada di Puskesmas Salido, yaitu berjumlah 9 orang. Dari 75 bayi yang meninggal, penyebabnya antara lain BBLR, Asfiksia, pneumonia, Kelainan Bawaan, dan lainnya.

Terjadi peningkatan jumlah kematian bayi dari tahun 2021 s/d tahun 2022. yaitu dari 58 orang di tahun 2021 menjadi 75 orang di tahun 2022. Sedangkan jumlah kelahiran pada tahun 2022 adalah 8.336 orang.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan kematian ibu dan bayi tersebut. Kebijakan teknis yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam upaya menurunkan kematian ibu dan bayi adalah :

1. Mengalokasikan anggaran persalinan (Jampersal) bagi masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan lainnya.

2. Menyediakan rumah tunggu dan menyediakan konsumsi bagi pasien dan keluarga yang berdomisili jauh dari RSUD M. Zein Painan.
3. Menyediakan biaya transportasi bagi pasien yang akan dirujuk ke pelayanan yang lebih tinggi / ke M. Djamil Padang.
4. Mengadakan Audit Maternal Perinatal (AMP) berkoordinasi dengan dokter spesialis obgyn dan spesialis anak RSUD M. Zein Painan yang dilaksanakan tiap triwulan
5. Pelatihan Blended Learning Dokter dan Bidan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan.
6. Meningkatkan universal access dan coverage untuk pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) termasuk Keluarga Berencana.
7. Pelayanan Antenatal yang sesuai dengan standar
8. Pelaksanaan kelas ibu hamil dan kelas balita yang telah dilaksanakan di seluruh Puskesmas.
9. Melakukan kunjungan ke rumah ibu hamil resiko tinggi yang dilaksanakan oleh tenaga Puskesmas.
10. mengaktifkan Program Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) pada masing-masing nagari Siaga
11. Dengan melakukan audit kematian ke Puskesmas terkait.
12. Mendorong persalinan dengan tenaga kesehatan di fasyankes.
13. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan emergensi PONEK (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Komprehensif) dan PONED (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Dasar)
14. Meningkatkan kualitas in service training dan distribusi tenaga kesehatan : Bidan, perawat, dokter, dokter spesialis (tugas belajar, pengiriman residen, sister hospistal)
15. Meningkatkan ketersediaan sumber daya kesehatan : Obat program dan bahan habis pakai, sarana/alat PONEK dan PONEK.
16. Menerapkan standar pelayanan kesehatan di Poskesdes / Polindes, Pustu (Puskesmas Pembantu, Puskesmas dan Rumah Sakit)
17. Memberdayakan keluarga dan masyarakat dalam KIA untuk meningkatkan health care seeking.
18. Peningkatan pemanfaatan pembiayaan kesehatan yang ada melalui dana dekonsentrasi, tugas perbantuan, Dana Alokasi Khusus, Jamkesmas dan Jampersal.
19. Peningkatan kerjasama dengan organisasi profesi, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Perguruan tinggi dan swasta.

2. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah : Banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Pencapaian Indikator dari sasaran strategis ini terlihat pada tabel :

Tabel 2.24
Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	target	Realisasi	Capaian
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	/100.000 KH	95	144	48,42

Capaian indikator AKI sebesar 100,69% dan masuk dalam kategori “*gagal*”. Gambaran Pencapaian indikator tersebut diatas jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.25
Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020 s/d 2022

Indikator	2019			2020			2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Angka Kematian Ibu (AKI) / 100.000 KH	92/100.000 KH	105/100.000 KH	93%	100/100.000 KH	172/100.000 KH	28%	95/100.000 KH	144/100.000 KH	48,42 %

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi Angka Kematian Ibu dari tahun 2021 ke tahun 2022 terjadi penurunan yaitu dari 172/100.000 KH pada tahun 2021 turun menjadi 144/100.000 KH pada tahun 2022 dari 8.336 orang Kelahiran Hidup. Angka Kematian Ibu pada Kabupaten Pesisir Selatan ini berada dibawah Target AKI RPJMN Tahun 2024 yakni 183/100.000 KH . Begitu juga jika dilihat dari jumlah ibu yang meninggal terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 14 orang pada tahun 2021 menjadi 12 orang pada tahun 2022. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Pesisir Selatan tersebar di beberapa Puskesmas seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2.26
Jumlah Kematian Ibu (AKI) Per-Puskesmas
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2022

NO	PUSKESMAS	Jumlah Kelahiran			Jumlah Kematian Ibu		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Barung2 Belantai	397	320	329	0	1	1
2	Tarusan	515	482	547	1	1	0
3	Pasar Baru	413	389	420	1	1	0
4	Koto Berapak	333	321	330	0	0	0
5	Asam Kumbang	122	120	135	0	0	0
6	Salido	637	603	618	1	2	0
7	Lumpo	212	189	216	0	0	0
8	Pasar Kuok	383	318	385	1	0	0
9	IV Koto Mudik	171	168	161	0	0	0

10	Surantih	984	989	796	1	1	0
11	Kayu gadang			200			0
12	Kambang	746	698	645	0	0	1
13	Koto Baru	273	264	247	0	1	0
14	Balai Selasa	543	492	510	1	2	1
15	Air Haji	888	796	811	0	3	3
16	Air Pura	347	477	314	1	0	0
17	Inderapura	501	309	463	0	1	3
18	Tapan	271	270	276	0	0	1
19	Rahul	278	277	258	1	1	2
20	Tanjung Beringin	393	408	387	0	0	0
21	Tanjung Makmur	257	284	288	1	0	1
	JUMLAH	9070	8664	8336	9	14	12

Jika dilihat dari jumlah kematian ibu yang ada di Puskesmas se Kabupaten Pesisir Selatan, dapat dilihat bahwa jumlah kematian ibu pada tahun 2022 sebanyak 12 orang, terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2021. Kasus Kematian Ibu disebabkan oleh 4 (empat) orang disebabkan oleh Perdarahan, 1 (satu) orang disebabkan oleh Hipertensi dalam Kehamilan, 1 (satu) orang disebabkan oleh infeksi nifas, 1 (satu) orang disebabkan karena kelainan jantung, serta 5 (lima) orang gangguan cerebravovaskular.

3. *Prevalensi Stunting*

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005.

Indikator ini mengukur persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak, dan bukti menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak, sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima gizi yang tepat.

Selain itu anak yang mengalami stunting beresiko lebih besar menderita penyakit menular dan tidak menular pada usia dewasa seperti jantung, diabetes, dan penyakit pembuluh darah. Oleh karena itu, indikator ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak. Berikut data prevalensi stunting di Kabupaten Pesisir Selatan 3 tahun terakhir:

Tabel 2.27
Realisasi Prevalensi Stunting
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2022

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi		
			2020	2021	2022
1.	Prevalensi stunting	Persen	11,8	12,3	7

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa data prevalensi stunting di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 terealisasi sebesar 11,8% kemudian naik menjadi 12,3% pada tahun 2021. Namun kondisi ini pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 7%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Rendahnya capaian Kesehatan anakbalita (0-59 bulan) selama periode pandemic tahun 2020, sehingga berdampak pada kegiatan program Kesehatan anak pada tahun 2021.
2. Balita dengan imunisasi dasar lengkap (IDL) Sebagian besar tidak dibawa oleh orang tuanya untuk dilakukan stimulasi, Deteksi dan intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) sebagai salah satu pelayanan yang semestinya didapatkan oleh balita.
3. Masih rendahnya kualitas Puskesmas dalam manajemen kegiatan-kegiatan Kesehatan masyarakat dikarenakan salah satunya kurangnya tenaga Kesehatan sebagai sumberdaya penunjang kegiatan di Puskesmas.
4. Banyaknya tupoksi yang diemban oleh pengelola program yang ada di Puskesmas.
5. Kegiatan penanggulangan dan vaksinasi covid-19 yang mengganggu pelaksanaan kegiatan lainnya yang ada di Puskesmas.

Berikut tabel 2.28, realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Prevalensi Stunting Tahun 2022.

Tabel 2.28
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Prevalensi Stunting
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Prevalensi Stunting	Persen	10,92	7	135,90

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Prevalensi Stunting Tahun 2022 ditargetkan 10,92% dan terealisasi sebesar 7 % dengan capaian kinerja sebesar 135,90%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong *Sangat Berhasil* dengan predikat *Sangat Baik*.

Upaya yang dilakukan untuk menyukseskan pencapaian indikator ini adalah :

- Pelaksanaan aksi konvergensi/integrasi penurunan stunting dengan TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting).

- Melakukan validasi data yang berkesinambungan per puskesmas.
- Pelaksanaan supervisi pada posyandu terutama penggunaan antropometri yang baik dan standar.

4. Angka Kesakitan

Angka kesakitan (morbidity) merupakan indikator penting yang digunakan untuk penilaian dan perencanaan program yang bertujuan untuk menurunkan kesakitan dan kematian di suatu wilayah. Angka kesakitan ialah jumlah kejadian suatu penyakit yang dirumuskan sebagai jumlah anak yang sakit per 1000 anak yang bisa terkena penyakit. Angka ini dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan kesehatan secara umum, mengetahui keberhasilan program pemberantasan penyakit, dan sanitasi lingkungan serta memperoleh gambaran pengetahuan penduduk terhadap pelayanan kesehatan.

Untuk mengetahui angka kesakitan penduduk, data dapat bersumber dari sarana pelayanan kesehatan yang diperoleh dari laporan rutin yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Dalam pengumpulan data angka kesakitan, terdapat dua ukuran utama yang terdiri dari angka insidensi maupun angka prevalensi.

Berikut data angka kesakitan di Kabupaten Pesisir Selatan selama 3 tahun terakhir:

Tabel 2.29
Realisasi Angka Kesakitan
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2022

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
		2020	2021	2022
1. Angka Kesakitan	Persen	16,57	15,16	15,16*

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa angka kesakitan di Kabupaten Pesisir Selatan 2 tahun terakhir mengalami penurunan dimana tahun 2020 angka kesakitan sebesar 16,57. Pada tahun 2021 menurun hingga mencapai angka 15,16. Sedangkan untuk tahun 2022 angka kesakitan masih menggunakan data tahun 2021 karena data angka kesakitan ini belum dipublikasi oleh BPS.

Berikut tabel 2.30, realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Angka Kesakitan Tahun 2022.

Tabel 2.30
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Angka Kesakitan
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Angka Kesakitan	Persen	15,95	15,16	95,05

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Angka Kesakitan Tahun 2022 ditargetkan 15,95% dan terealisasi sebesar 15,16%

dengan capaian kinerja sebesar 95,05%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong *Sangat Berhasil* dengan predikat *Sangat Baik*.

Sasaran 5 : Meningkatnya perlindungan kesehatan masyarakat

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 5 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 2.31 berikut ini:

Tabel 2.31
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan	Persen	80.00	79.00	99.00
Rata-rata Capaian					99.00

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 5 sebesar 99,00%. Pencapaian sasaran strategis 5 termasuk predikat *Sangat Baik*.

5. Persentase Masyarakat yang Terlindungi Hak Layanan Kesehatan

Hak atas kesehatan adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hak-Hak dalam Kesehatan yaitu:

- Hak memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- Hak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- Berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;

Upaya pemenuhan hak atas kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yang meliputi pencegahan dan penyembuhan. Upaya pencegahan meliputi penciptaan kondisi yang layak bagi kesehatan baik menjamin ketersediaan pangan dan pekerjaan, perumahan yang baik, dan lingkungan yang sehat.

Tabel 2.32
Realisasi indikator Persentase Masyarakat yang Terlindungi Hak Layanan Kesehatan Tahun 2019 s.d 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
		2020	2021	2022
1. Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan	Persen	70,19	64,70	79,00

Dari table diatas realisasi tahun 2022 ada peningkatan persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan Kesehatan dibandingkan dengan tahun 2021, atau terjadi peningkatan persentase peserta JKN-KIS di KabupatenPesisir Selatan yaitu dari 64,70% tahun 2021 meningkat menjadi 79,00% tahun 2022.

Penurunan ini disebabkan oleh terbitnya Permensos No. 92/HUK/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Tahun 2021. Akibat dari Permensos tersebut pengurangan kuota peserta PBI JKN-KIS dari anggaran APBN di kabupaten Pesisir Selatan yaitu sebanyak 50.000 jiwa. Tujuan dari Permensos ini adalah untuk pembersihan data peserta yang ganda, meninggal, yang sudah mampu dan NIK yang tidak update untuk divalidasi dan verifikasi oleh Dinas Sosial PPrAKabupatenPesisir Selatan.

Berikut tabel 2.33, realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan Tahun 2022.

Tabel 2.33
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan	persen	80,00	79,00	99,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan Tahun 2022 ditargetkan 80,00% dan terealisasi sebesar 79,00% dengan capaian kinerja sebesar 99,00%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong *Sangat Berhasil* dengan predikat *Sangat Baik*.

Sasaran 6 : Meningkatnya perlindungan Sosial Masyarakat

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 6 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 2.34 berikut ini:

Tabel 2.34
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 6

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	53	66,21	124,92
Rata-rata Capaian					124,92

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 6 sebesar 124,92%. Pencapaian sasaran strategis 6 termasuk predikat **Sangat Baik**.

1. Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Definis operasional dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Jenis-jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS):

- 1) Anak balita terlantar
 - a) terlantar/ tanpa asuhan yang layak;
 - b) berasal dari keluarga sangat miskin / miskin;
 - c) kehilangan hak asuh dari orangtua/ keluarga;
 - d) Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga;
 - e) Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan
 - f) Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang
- 2) Anak terlantar
 - a) berasal dari keluarga fakir miskin;
 - b) anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
 - c) anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- 3) Anak yang hadapan dengan hukum
 - a) disangka;
 - b) didakwa; atau
 - c) dijatuhi pidana
- 4) Anak jalanan
 - a) menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun ditempattempat umum; atau
 - b) mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempattempat umum.
- 5) Anak dengan Kedisabilitas (ADK)
 - a) Anak dengan disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara
 - b) Anak dengan disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik
 - c) Anak dengan disabilitas fisik dan mental/ disabilitas ganda
 - d) Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.
- 6) Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah
 - a) anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
 - b) sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis;
 - c) pernah dianiaya dan/atau diperkosa; dan
 - d) dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya)

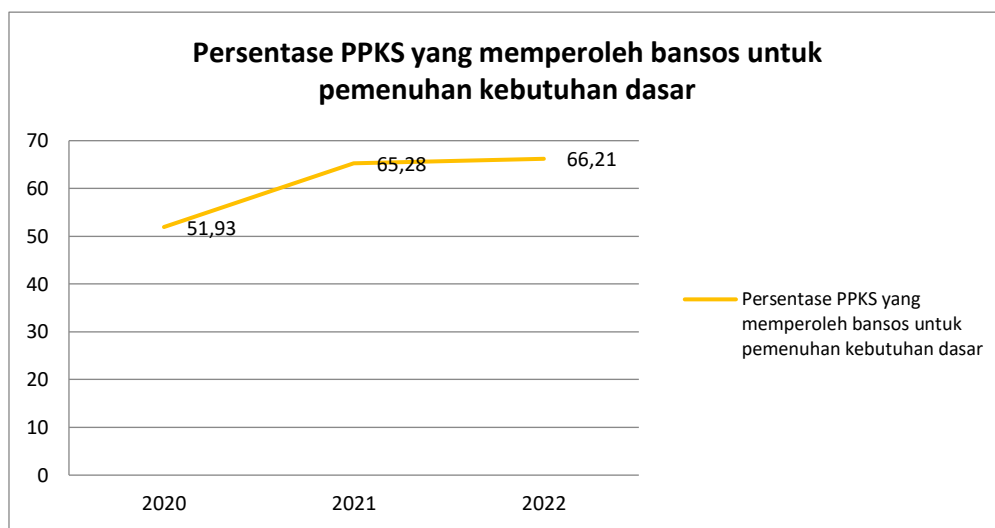
- 7) Pengemis
- 8) Gelandangan
- 9) Pemulung

Masyarakat yang masuk dalam jenis-jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial diatas, berhak memperoleh Bantuan Sosial diantaranya Bantuan Program PKH, Program Sembako, Bantuan Iuran dan lain-lain untuk pemenuhan kebutuhan dasar baik dari kementerian sosial, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Capaian yang diperoleh dengan membandingkan jumlah bantuan yang diperoleh masyarakat dengan jumlah masyarakat yang terdata dalam DTKS.

Tercapainya target Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dapat berhasil juga dikarenakan dukungan oleh bantuan yang berasal dari kementerian Sosial Berupa bantuan Sembako, Bantuan Program PKH dan bantuan Iuran PBI APBN.

Tabel 2.35
Data Perkembangan Realisasi PPKS yang memperoleh Bantuan
Tahun 2020 s.d. 2022

Uraian	Satuan	Tahun		
		2020	2021	2022
1 Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	51.93%	65,28%	66,21%



Gambar 2.2. Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap pencapaian target indikator Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar diantaranya :

a. Faktor Keberhasilan/Peningkatan

Faktor keberhasilan dalam penyaluran bansos adalah kerjasama semua pihak, khususnya tenaga di pemerintahan terendah terkait data penerima yang sudah tidak update dikarenakan meninggal dunia,

pindah domisili dan sudah masuk dalam kategori mampu. Verifikasi dan validasi secara berkala sepanjang tahun sangat menentukan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial ini.

b. Faktor Kegagalan/Penurunan

Faktor kegagalan adalah masih adanya data penerima yang belum update sehingga penyaluran bantuan sosial ini tidak bisa maksimal 100%, adanya bantuan yang tidak dapat disalurkan merupakan indikasi kegagalan dan penurunan dalam pemberian dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

c. Efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya terdiri dari penggunaan sumber daya manusia berupa tenaga pekerja sosial di kecamatan dan dipemerintahan nagari, koordinasi yang kuat dan intens sangat diperlukan. Efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dilakukan dengan refokusing anggaran pada rekening belanja yang sangat diperlukan dalam penyaluran bantuan sosial sampai kepada masyarakat.

Program/kegiatan penunjang sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Program Pendukung terdiri dari:

1. Program rehabilitasi sosial, dengan target anggaran Rp. 87.889.110,- dan realisasi sebesar Rp. 87.552.225,-, atau capaian 99,61%.
2. Program perlindungan dan jaminan sosial, dengan target anggaran sebesar Rp. 3.494.773.716, dan realisasi sebesar Rp. 2.867.111.625,-, atau capaian 82,04%.
3. Program penanganan bencana, dengan target anggaran sebesar Rp. 74.548.870,- dan realisasi sebesar Rp. 74.235.950,-, atau capaian 99,58%.

Berdasarkan uraian program diatas diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 ditargetkan anggaran sebesar Rp. 3.657.211.696 dengan realisasi Rp. 3.028.899.800, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 628.311.896 atau 17,18 %.

Sasaran 7 : Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 7 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 2.36 berikut ini:

Tabel 2.36
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 7

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pencapaian skor pola pangan harapan	Persen	87,00	80,4	94.45

2.	Pengeluaran per kapita	Rp./org/thn	9,369,000	9.686. 000	103,38
Rata-rata Capaian					97,90

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 7 sebesar 97,90%. Pencapaian sasaran strategis 7 termasuk predikat ***Sangat Baik***.

1. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan

PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Skor PPH merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan program ketahanan pangan melalui kondisi/situasi konsumsi pangan masyarakat dilakukan analisis situasi konsumsi pangan dapat menggambarkan akses masyarakat terhadap pangan, status gizi dan kesejahteraannya, yang dinyatakan dalam nilai skor mutu pangan atau skor pola Pangan Harapan (PPH). Pola Pangan Harapan adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya baik secara absolut maupun relative terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mencakup kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, aroma dan cita rasa. Definisi PPH konsumsi adalah proporsi kelompok pangan yang menggambarkan keberagaman pangan dalam kondisi konsumsi pangan. Jumlah skor PPH konsumsi maksimal 100.

Langkah-langkah menghitung Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah sebagai berikut :

1. Mengelompokkan jenis pangan ke dalam delapan kelompok pangan.
2. Menghitung jumlah energi masing-masing kelompok pangan dengan DKBM (Daftar Komposisi Bahan Makanan)
3. Menghitung persentase masing-masing kelompok pangan terhadap total energi per hari.
4. Skor PPH dihitung dengan mengalikan persen energi dari kelompok pangan dengan bobot.

Sembilan kelompok pangan antara lain : padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah dan biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta lain-lain.

Urutan Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri atas subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Berikut data realisasi dan capaian indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2022:

Tabel 2.37
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Skor Pola Pangan
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Skor Pola Pangan Harapan	persen	87	80.4	92.41

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2022 ditargetkan 87% dan terealisasi sebesar 80,4% dengan capaian kinerja sebesar 92,41%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini dengan predikat *Sangat Baik*.

Berikut tabel Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2020-2022 :

Tabel 2.38
Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan
Tahun 2020-2022

No	Uraian	Target			Realisasi		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.	Skor Pola Pangan Harapan	82	86,5	87	86,4	81,7	80,4

Pada tahun 2020 skor pola pangan harapan mencapai 86,4, angka ini melebihi dari target tahun tersebut sebesar 82. Sementara tahun 2021 terjadi penurunan dari target 86,5 menjadi 81,7. Sedangkan pada tahun 2022 kembali terjadi penurunan angka skor Pola Pangan Harapan dari target 87 menjadi 80,4.

Dari table diatas menunjukkan adanya penurunan pencapaian target konsumsi di 3 tahun terakhir. Berikut dapat dijelaskan perbandingan skor pola pangan harapan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Skor Maksimal Pola Pangan Harapan tahun 2020 hingga 2022, seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2.39
Perbandingan Skor PPH Kabupaten Pesisir Selatan
dengan Skor Maksimal PPH (tahun 2020,2021,2022)

No	Kelompok pangan	Skor Maks PPH	Skor PPH 2020	Skor PPH 2021	Skor PPH 2022
1	Padi-padian	25,0	25,0	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	2,5	0,6	0,6	0,7
3	Pangan Hewani	24,0	19,0	20,2	18,9
4	Minyak dan Lemak	5,0	5,0	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	1,0	1,0	1,0	1,0
6	Kacang-kacangan	10,0	3,8	2,6	2,5
7	Gula	2,5	2,4	1,9	1,8
8	Sayur dan Buah	30,0	29,6	25,4	25,6
9	Lain-lain	0,0	0,0	0,0	0,0
	Jumlah	100,0	86,4	81,7	80,4

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa kelompok pangan yang mengalami penurunan dibandingkan dengan skor yang telah ditetapkan. Untuk kelompok padi-padian cenderung stabil. Tingginya konsumsi kelompok padi-padian khusus beras, kemungkinan disebabkan oleh pola makan masyarakat yang masih tergantung pada beras sebagai sumber energi dan didukung oleh produksi dan ketersediaan beras yang cukup tinggi. Sedangkan konsumsi 8 (delapan) kelompok pangan lainnya baik kuantitas, kualitas maupun tingkat keragamannya relatif masih rendah jika dibandingkan dengan standar konsumsi pangan nasional. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal seperti bahan pangan yang relatif masih dan rendahnya daya beli masyarakat.

2. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu yang lalu, sedangkan untuk bukan makanan dihitung selama sebulan dan 12 bulan yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka-angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengkonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.

Tabel 2.40
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Pengeluaran Perkapita
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pengeluaran perkapita	Rp./org/thn	9,369,000	9.686,000	103,38

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja Pengeluaran Perkapita Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 9,369,000 dan terealisasi sebesar Rp. 9,2686,000 dengan capaian kinerja sebesar 103,38%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong *Sangat Berhasil* dengan predikat *Sangat Baik*.

Tabel 2.41
Realisasi Pengeluaran Perkapita Tahun 2020-2022

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
		2020	2021	2022
Pengeluaran perkapita	Rp./org/thn	9.212.000`	9.270.000	9.686.000



Gambar 2.3. Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2022

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa Pengeluaran Per Kapita sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan tren positif yang baik untuk kemajuan Kabupaten Pesisir Selatan. Beberapa faktor yang mendorong meningkatnya pengeluaran per kapita diantaranya adalah bertambahnya pendapatan masyarakat, meningkatnya kebutuhan, tingkat inflasi serta pulihnya kondisi ekonomi masyarakat setelah selesainya pandemi covid 19.

Seiring dengan bertambahnya pendapatan dapat mendorong kemampuan daya beli yang akan menstimulasi peningkatan konsumsi masyarakat. Konsumsi pokok yang paling dibutuhkan masyarakat adalah bahan pangan. Harga bahan pangan dipengaruhi ketersediaan barang atau keseimbangan tingkat permintaan dan penawaran. Bila terjadi kesenjangan antara tingkat permintaan dan penawaran maka akan mengakibatkan inflasi harga barang. Semakin tinggi kesenjangan maka akan semakin tinggi tingkat inflasi yang terjadi. Hal ini akan berdampak pada kenaikan harga barang dan akan berakibat pada bertambahnya pengeluaran masyarakat untuk memberi

barang-barang yang dibutuhkannya. Konsumsi merupakan salah satu faktor penggerak pertumbuhan ekonomi.

Tingkat konsumsi masyarakat akan turut menentukan kecepatan akselerasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan. Hal yang harus diperhatikan adalah pertumbuhan ekonomi harus berimbang dengan terciptanya pemerataan pendapatan. Artinya pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja baru, pengurangan pengangguran dan pengurangan kemiskinan. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 menunjukan pertumbuhan dapat menciptakan lapangan kerja baru, yang berkolerasi dengan turunnya tingkat pengangguran terbuka, mengecilnya kesenjangan pendapatan sehingga menurunkan tingkat kemiskinan. Terjadi peningkatan pendapatan berbanding lurus dengan peningkatan konsumsi/pengeluaran masyarakat tapi tingkat inflasi relatif kecil dan terkendali, ini menunjukan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan menjadi lebih baik.

Sasaran 8 : Meningkatkan Investasi PMA dan PMDN

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 8 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 2.42 berikut ini:

Tabel 2.42
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 8

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai investasi swasta dan masyarakat	Juta Rp.	310,000,000,000	679.243.825.238	219,11
Rata-rata Capaian					219,11

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 8 sebesar 219,11%. Pencapaian sasaran strategis 8 termasuk predikat *Sangat Baik*.

1. Nilai Investasi swasta dan masyarakat

Investasi adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Seorang yang berinvestasi disebut dengan investor atau penanam modal. Sedangkan nilai investasi itu sendiri yaitu (investment value) adalah nilai dari suatu perusahaan atau saham (business interest) atau kepentingan dalam

perusahaan yang bersifat spesifik terhadap seorang investor, didasarkan pada atau terkait dengan persyaratan tertentu dari seorang atau kelompok investor.

Sedangkan indikator nilai investasi swasta dan masyarakat digunakan untuk melihat besarnya jumlah investasi swasta dan investasi masyarakat yang ditanamkan di daerah. (Semua Investasi di luar Investasi Pemerintah)

Pendataan realisasi investasi swasta dan masyarakat didapatkan dari 15 Kecamatan. Pendataan ini terlaksana berkat koordinasi Penanaman Modal ke BKPM RI dan BKP Provinsi. Serta terselenggaranya Operasional Tim Task Force Investasi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal dan regulasi kemudahan berusaha di Kabupaten Pesisir Selatan.

Nilai investasi yang ada sekarang di Kabupaten Pesisir Selatan, merupakan nilai investasi swasta. Sementara untuk nilai investasi masyarakat belum ada dilakukan penghitungan. Berikut perkembangan nilai investasi swasta di Kabupaten Pesisir Selatan 3 tahun terakhir dari tahun 2020 s.d. 2022:

Tabel. 2.43
Perkembangan Nilai Investasi di Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020 s.d. 2022

Tahun	Uraian		Total nilai investasi
	Swasta	Masyarakat	
2020	704.435.368.737	Nihil	704.435.368.737
2021	1.767.753.324.797	Nihil	1.767.753.324.797
2022	679.243.825.238	Nihil	679.243.825.238

Sumber data : Dinas DPMPSTSP Kabupaten Pesisir Selatan

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan nilai investasi di Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun ke tahun terjadi fluktuasi. Tahun 2020 investasi di kabupaten pesisir selatan terealisasi sebesar Rp. 704.435.368.737 dengan jumlah investor sebanyak 162 investor, yang terdiri dari 13 PMA dan 149 PMDN.

Selanjutnya pada tahun 2021, investasi di kabupaten pesisir selatan terrealisasi sebesar Rp. 1.767.753.342.796 dengan jumlah investor sebanyak 162 investor, yang terdiri dari 13 PMA dan 149 PMDN. Sedangkan tahun 2022 investasi di kabupaten pesisir selatan terrealisasi sebesar Rp. 679.243.825.238 dengan jumlah investor sebanyak 37 investor, yang terdiri dari PMA dan PMDN. Terjadi penurunan nilai investasi pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

1. Pada tahun 2021 pelaporan kegiatan usaha melalui sistem manual dan sistem SPIPISE sampai kondisi agustus 2021. Pada pertengahan agustus 2021 sistem penyampaian pelaporan beralih ke Sistem OSS RBA melalui

Web LKPM pada saat penyampaian laporan, pelaku usaha melaporkan seluruh modal usaha (baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan modal tetap maupun modal kerja). Akan tetapi terjadi pelaporan ganda yang dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga realisasi investasi menjadi tinggi.

2. Untuk tahun 2022 pelaporan LKPM hanya mengatur kepada pelaku usaha yang nilai investasi sampai dengan 5 M (untuk pelaku usaha yang beraktifitas pada tahun 2022), sementara pelaku usaha yang beraktifitas pada tahun sebelumnya tidak di hitung dalam realisasi investasi tahun 2022.
3. Faktor menurun lainnya disebabkan masih kurangnya sumberdaya manusia yang memahami tentang cara pelaporan LKPM dengan menggunakan Aplikasi.

Adapun program pendukung dalam pencapaian target indikator nilai investasi swasta dan masyarakat pada tahun 2022 yaitu Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Dengan target anggaran Rp. 415.374.936 Dan realisasi sebesar Rp. 312.047.846 Atau capaian 75,12%) berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.103.327.090 atau 33,11%.

Sasaran 9 : Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 9 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 2.44 berikut ini:

Tabel 2.44
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 9

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	Triliun Rp.	3.61	3.74	103.60
2.	Nilai PDRB Sektor Industri (ADHK)	Milyar Rp.	707.32	741.26	104.80
Rata-rata Capaian					104,20

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 9 sebesar 104,20%. Pencapaian sasaran strategis 9 termasuk predikat *Sangat Baik*.

1. Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)

Indikator Nilai PDRB Sektor Pertanian termasuk indikator yang mempunyai peran penting dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 karena peran sektor pertanian ini semakin penting dan strategis dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pertanian pada negara berkembang dapat dilihat sebagai suatu sektor ekonomi yang sangat potensial. Ada 4 (empat) kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan dan pembangunan yaitu:

1. Sektor pertanian merupakan ekspansi dari sektor sektor ekonomi lainnya baik dari sisi permintaan sebagai sumber pemasok makanan yang secara kontinyu mengikuti pertumbuhan penduduk
2. Sektor pertanian berperan sebagai sumber permintaan domestik bagi produk produk sektor ekonomi dalam memberikan kontribusi pasar
3. Sebagai sumber modal untuk investasi, karena proses pembangunan ekonomi terjadi transfer surplus tenaga kerja dari pertanian ke industri
4. Sebagai sumber surplus neraca perdagangan, baik lewat ekspor hasil hasil pertanian maupun dengan peningkatan produksi pertanian

Terkait dengan capaian Nilai PDRB Sektor pertanian tahun 2022, dalam laporan kinerja ini akan dijabarkan dalam beberapa sub sektor pertanian yang memberikan kontribusi terhadap nilai PDRB tersebut. Nilai PDRB itu sendiri dihitung oleh Badan Pusat Statistik dengan menggunakan metoda-metoda tertentu dengan beberapa faktor yang menjadi tolak ukur. Namun demikian ada beberapa indikator yang dapat digambarkan untuk menjawab pencapaian indikator Nilai PDRB Sektor Pertanian yang berkaitan langsung dengan kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut indikator indikator sub sektor pertanian yang memberikan kontribusi diantaranya pada tabel 2.45 berikut ini:

Tabel 2.45
Capaian indikator kinerja Sub Sektor Pertanian

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA 2022		
			TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	1.1. Jumlah Produksi Pertanian	Ton	719.816	752.837,81	104,59
	a. Padi	Ton	187.314	156.430,30	83,51
	b. Jagung	Ton	140.849	208.010,52	147,68
	c. Cabe Merah	Ton	4.599	5.041,90	109,63
	d. Bawang merah	Ton	205	146,30	71,37
	e. Jengkol	Ton	2.385	5.746,60	240,95
	f. Jeruk	Ton	17.204	4.465,10	25,95
	g. Manggis	Ton	2.468	4.695,10	190,24
	h. Durian	Ton	8.446	18.482,00	218,83
	i. Kelapa Sawit	Ton	344.558	338.348,86	98,20
	j. Kopi	Ton	2.366	2.372,90	100,29

	k. Gamber	Ton	5.861	5.944,49	101,42
	l. Kelapa Dalam	Ton	3.561	3.153,76	88,56
	1.2 Peningkatan Populasi Ternak	%	1,20	4,78	398,06
	a. Sapi Potong	%	1,00	0,04	4,00
	b. Itik	%	1,80	10,84	602,22
	c. Ayam Buras	%	0,80	3,45	431,25
	1.3 Jumlah Produksi Perikanan		48.977	50.184	102.46

1. Peningkatan Produksi Utama Padi

Produksi Padi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 s.d 2022

Kabupaten/ Kota	TAHUN 2021			TAHUN 2022*)		
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kw/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Provi tas (Kw/ Ha)
1	2	3	4	5	6	7
Kepulauan Mentawai	376,77	940,98	24,97	603,61	1.423,29	23,58
Pesisir Selatan	30.440,73	146.140,73	48,01	28.779,19	156.430,34	54,36
Solok	32.553,83	171.335,32	52,63	32.901,89	173.816,33	52,83
Sijunjung	13.591,03	49.837,55	36,67	14.031,40	50.704,96	36,14
Tanah Datar	32.375,24	182.566,15	56,39	31.023,69	167.001,84	53,83
Padang Pariaman	25.461,11	115.529,25	45,37	27.244,15	132.047,54	48,47
Agam	29.690,65	152.606,78	51,40	27.780,60	140.831,03	50,69
Lima Puluh Kota	28.119,14	123.703,37	43,99	25.526,84	115.353,82	45,19
Pasaman	28.220,58	129.629,39	45,93	29.509,35	138.324,72	46,87
Solok Selatan	13.693,36	54.869,13	40,07	12.047,91	50.487,43	41,91
Dharmasraya	5.226,46	25.537,80	48,86	9.984,60	45.975,14	46,05
Pasaman Barat	11.023,77	52.247,64	47,40	10.025,27	49.826,76	49,70
Padang	9.370,93	47.258,32	50,43	8.857,74	44.193,45	49,89
Solok	2.175,86	12.775,72	58,72	2.156,94	13.792,83	63,95
Sawah Lunto	1.457,89	7.896,95	54,17	1.852,64	10.855,66	58,60
Padang Ppanjang	784,29	4.933,85	62,91	826,83	5.549,37	67,12
Bukittinggi	479,69	3.325,28	69,32	617,78	3.978,76	64,40
Payakumbuh	4.969,59	24.857,83	50,02	4.950,72	25.825,58	52,17
Pariaman	2.381,03	11.217,34	47,11	3.161,96	16.208,96	51,26
SUMATERA BARAT	272.391,95	1.317.209,38	48,36	282.234,22	1.393.242,54	49,36

Dari tabel diatas dapat dilihat terjadi peningkatan produksi padi dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 sebesar 7,04%. peningkatan produksi ini di pengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

a) Peningkatan penggunaan benih padi unggul

Benih unggul bermutu menjadi syarat utama dalam memaksimalkan hasil produksi tanaman padi, selain dengan



penanganan faktor-faktor agronomi. Benih bermutu merupakan benih dengan tingkat kemurnian dan daya tumbuh yang tinggi. Di Kabupaten Pesisir Selatan persentase penggunaan benih padi unggul meningkat dari Tahun ke Tahun. Pada Tahun 2020 penggunaan benih padi unggul hanya sebesar 10%, Tahun 2021 sebesar 12% dan Tahun 2022 ini penggunaan benih unggul meningkat menjadi 20,50% dari total luas tanam 38.810 Ha.

b) Penggunaan Pupuk Yang Berimbang

Pupuk merupakan faktor pendukung peningkatan produktivitas pertanian. Pada dasarnya, pupuk merupakan makanan bagi tanaman. Seperti manusia, jika asupan gizi cukup, maka pertumbuhan manusia akan bagus dan kualitas dari manusia itupun juga akan bagus. Begitu juga dengan padi, jika hara yang dibutuhkan lengkap maka peningkatan produksi juga akan lebih mudah tercapai.

Di bawah ini dapat dilihat tingkat penyaluran pupuk bersubsidi Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 :

NO	JENIS PUPUK	ALOKASI (TON)	DISTRIBUSI (TON)	CAPAIAN (%)
1	Urea	7.622	7.162	93,96
2	NPK Phonska	6.600	6.600	99,99
3	Organik	622	622	99,95
Jumlah		14.222	13.762	96,76

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa penyerapan pupuk bersubsidi oleh petani/kelompok tani **sangat baik**. Dari 3 (tiga) jenis pupuk bersubsidi yang dialokasikan sebesar 14.222 ton dan realisasi penyerapan oleh petani/kelompok tani sebesar 13.762 ton atau sebesar 96,76%.

c) Ketersediaan dan Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian

Ketersediaan dan Pemanfaatan alat dan mesin pertanian dapat mendorong petani dalam transformasi teknologi kearah yang lebih modern, efektif dan ramah lingkungan. Dengan penerapan mekanisasi pertanian, dapat meningkatkan mutu pengelolaan tanah, meningkatkan indeks pertanaman padi, mengurangi kehilangan hasil, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian yang bermuara pada peningkatan produksi padi dan pendapatan petani.

d) Pendampingan dan pembinaan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)

Penyuluh Pertanian Lapangan melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap petani/kelompok tani dalam budidaya padi. Pendampingan dan pembinaan dilakukan mulai dari pra tanam sampai panen dan penanganan pasca panen.

2. Jagung

Produksi Jagung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 s/d 2022

NO	KABUPATEN/KOTA	PRODUKSI (TON)		
		2020	2021	2022*)
1	Kab. Mentawai	37,50	134,00	121,58
2	Kab. Pesisir Selatan	241.163,07	189.636,00	208.010,52
3	Kab. Solok	4.059,06	3.255,74	2.488,38
4	Kab. Sijunjung	5.469,82	7.663,81	7.208,81
5	Kab. Tanah Datar	34.040,31	28.451,28	26.999,63
6	Kab. Padang Pariaman	35.007,31	53.462,03	51.700,86
7	Kab. Agam	106.579,64	119.623,71	121.130,72
8	Kab. Lima Puluh Kota	46.400,79	42.636,05	50.459,84
9	Kab. Pasaman	69.529,33	106.073,11	114.099,69
10	Kab. Solok Selatan	77.845,21	80.414,06	103.385,08
11	Kab. Dharmasraya	4.042,36	14.694,37	2.559,11
12	Kab. Pasaman Barat	262.284,36	276.183,84	222.557,75
13	Kota Padang	115,00	119,26	224,29
14	Kota Solok	903,87	700,90	554,13
15	Kota Sawahlunto	144,50	310,21	791,41
16	Kota Padang Panjang	-	-	-
17	Kota Bukittinggi	121,77	169,51	156,70
18	Kota Payakumbuh	1.533,81	1.846,77	2.932,78
19	Kota Pariaman	1.602,01	1.380,06	1.253,46
Jumlah		890.879,73	926.754,74	916.634,75

Dari Tabel diatas dapat dilihat produksi jagung di Kabupaten Pesisir Selatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir berfluktuatif. Pada Tahun 2020 produksi jagung Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 241.163,07 ton terjadi penurunan pada Tahun 2021 sebesar 27,31% atau hanya sebesar 189.636 ton. Tahun 2022 terjadi peningkatan produksi jagung sebesar 9,69% atau sebanyak 208.010,52 ton.

Faktor peningkatan produksi jagung ini hampir sama dengan faktor peningkatan produksi padi yaitu: 1) penggunaan benih jagung hibrida, 2) pemupukan yang berimbang, 3) pemanfaatan alsintan, dan 4) pendampingan dan pembinaan oleh PPL dalam budidaya jagung.

3. Cabe Merah

Produksi Cabe Merah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 s.d Tahun 2022

NO	KABUPATEN/KOTA	PRODUKSI (TON)		
		2020	2021	2022*)
1	Kab. Mentawai	14,00	1,00	3,83
2	Kab. Pesisir Selatan	5.506,00	5.513,20	5.041,90
3	Kab. Solok	32.775,00	25.997,44	34.254,96
4	Kab. Sijunjung	399,00	775,74	993,96
5	Kab. Tanah Datar	19.917,00	20.664,98	21.517,23
6	Kab. Padang Pariaman	1.668,00	1.681,80	1.115,00
7	Kab. Agam	33.464,00	33.479,08	34.932,10
8	Kab. Lima Puluh Kota	19.819,00	8.321,64	10.611,92
9	Kab. Pasaman	576,00	762,43	910,58
10	Kab. Solok Selatan	5.428,00	8.576,30	9.649,13
11	Kab. Dharmasraya	358,00	419,63	363,10
12	Kab. Pasaman Barat	9.559,00	5.689,30	5.223,30
13	Kota Padang	700,00	338,50	172,00
14	Kota Solok	76,00	185,26	55,00
15	Kota Sawahlunto	725,00	1.071,85	415,89
16	Kota Padang Panjang	930,00	712,73	673,33
17	Kota Bukittinggi	579,00	590,30	608,70
18	Kota Payakumbuh	645,00	883,96	1.522,48
19	Kota Pariaman	54,00	61,30	153,42
Jumlah		133.192,00	115.726,43	128.217,81

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa produksi cabe merah Kabupaten Pesisir Selatan cenderung berfluktuatif. Pada Tahun 2020 produksi cabe merah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 5.506 ton, Tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 5.513,20 ton dan Tahun 2022 terjadi penurunan produksi sebesar 8,55% atau menjadi 5.041,9 ton. Penurunan produksi ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

- Pada periode Maret s.d Agustus Tahun 2022 terjadi musim kemarau yang cukup panjang, sehingga banyak petani cabe merah yang gagal panen.
- Masih tingginya serangan hama dan penyakit utama tanaman cabe merah seperti virus kuning dan keriting yang disebabkan oleh serangga dan tungau.
- Banyak petani yang alih komoditi selain cabe merah.

4. Daging

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tujuan meningkatnya kesejahteraan masyarakat tani, yang dimana sasaran strategis meningkatnya



produksi pertanian tahun 2022 menjadi salah satu pendukung tujuan tersebut. Untuk mencapai sasaran strategis diatas, peningkatan populasi ternak menjadi salah satu target kinerja yang harus dicapai. Tentunya selain sapi potong, itik dan ayam buras yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dalam upaya peningkatan populasi ternak, secara umum Kabupaten Pesisir Selatan masih memiliki jenis ternak lain yang juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi pertanian.

Berikut ini dijelaskan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tani melalui peningkatan populasi ternak, produksi daging, produksi telur dan faktor penghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat tani yaitu kematian ternak dan penyakit zoonosis sebagai berikut :

Tabel 2.46
Jumlah Populasi Ternak Tahun 2021 s.d 2022
Di Kabupaten Pesisir Selatan

NO	KECAMATAN	SAPI		KUDA		KERBAU		KAMBING	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Silaut	4.324	3.967	-	-	20	20	1.201	1.204
2	Lunang	2.300	2.101	-	-	145	97	1.501	1.509
3	BAB Tapan	1.310	1.403	-	-	1.719	1.728	2.867	2.888
4	Rahul Tapan	1.075	1.179	-	-	1.387	1.498	2.978	2.990
5	Pancung Soal	5.103	4.794	-	-	598	574	921	939
6	Airpura	4.613	4.159	-	-	779	680	805	900
7	Linggo Sari Baganti	6.083	8.979	-	-	624	633	595	941
8	Ranah Pesisir	11.347	10.736	2	2	225	271	556	656
9	Lengayang	14.423	14.945	-	1	478	475	4.360	4.253
10	Sutera	10.487	9.033	-	-	470	461	2.726	2.346
11	Batang Kapas	7.182	7.444	-	-	1.276	1.344	2.905	2.980
12	IV Jurai	5.330	5.514	2	2	58	47	2.755	2.882
13	Bayang	5.291	4.924	3	3	289	236	3.541	3.440
14	Bayang Utara	630	434	-	-	-	-	62	53
15	Koto XI Tarusan	7.095	7.018	-	-	740	752	1.010	1.018
Jumlah (ekor)		86.593	86.630	7	8	8.808	8.816	28.783	28.999

Sumber : Bidang Peternakan, 2022

Berdasarkan tabel 2.46 di atas dapat dilihat bahwa dari 4 (empat) jenis ternak tersebut diatas rata-rata terjadi peningkatan populasi pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021. Peningkatan populasi ini didorong oleh semakin meningkatnya pengelolaan ternak oleh peternak, baik itu pengelolaan ternak itu sendiri maupun lingkungan ternak berada seperti ketersediaan hijauan pakan ternak/pakan, obat-obatan, Inseminasi Buatan (IB) dan kandang yang sesuai persyaratan teknis.

Tabel 2.47
Jumlah Populasi Ternak Unggas Tahun 2021 s.d 2022
Di Kabupaten Pesisir Selatan

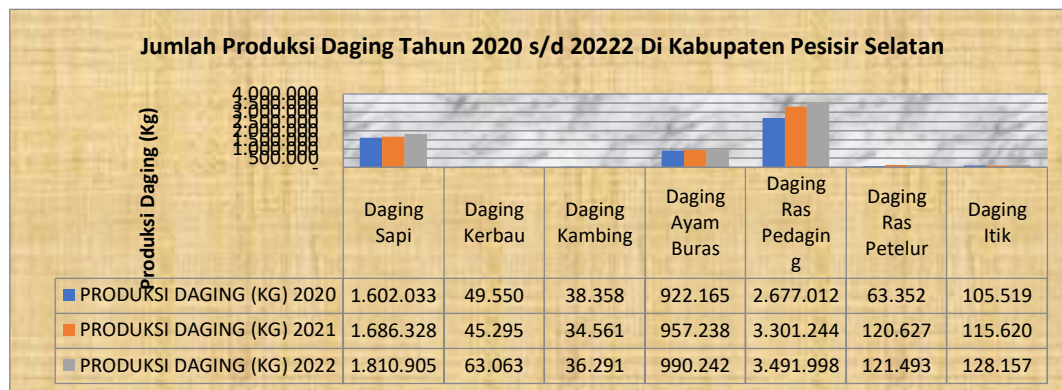
NO	KECAMATAN	AYAM BURAS		AYAM RAS PEDAGING		AYAM RAS PETELUR		ITIK	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Silaut	31.920	30.930	-	-	30.000	18.000	1.003	1.300
2	Lunang	36.241	36.818	-	-	-	386	911	812
3	BAB Tapan	39.470	40.220	82.000	84.000	4.200	4.500	9.430	10.660
4	Rahul Tapan	40.180	41.360	-	-	1.200	1.500	5.210	6.600
5	Pancung Soal	37.898	38.005	245.000	305.000	-	-	2.501	2.513
6	Airpura	26.552	26.420	564.000	564.000	7.800	8.000	1.911	1.496
7	Linggo Sari Baganti	6.956	13.498	15.000	18.000	3.000	-	241	7.199
8	Ranah Pesisir	58.000	57.690	250.000	250.000	6.500	8.000	10.130	11.190
9	Lengayang	140.832	141.536	-	-	4.700	8.300	46.932	46.900
10	Sutera	42.791	46.626	272.000	312.000	12.500	13.000	5.179	4.787
11	Batang Kapas	47.315	49.450	327.000	350.000	-	-	26.100	28.400
12	IV Jurai	101.600	108.650	595.000	640.000	38.000	42.000	18.610	22.400
13	Bayang	110.163	114.466	13.000	-	-	-	63.505	149
14	Bayang Utara	7.550	7.588	-	13.000	-	-	350	68.680
15	Koto XI Tarusan	49.511	50.511	631.000	631.000	1.500	6.500	4.620	4.868
Jumlah (ekor)		776.979	803.768	2.994.000	3.167.000	109.400	110.186	196.633	217.954

Dari tabel 2.47 diatas dapat dilihat bahwa dari 4 (empat) jenis ternak unggas tersebut diatas terjadi peningkatan populasi pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021. Peningkatan populasi tertinggi yaitu itik sebesar 10,84% dan yang terendah adalah ayam petelur sebesar 0.72%. Peningkatan populasi ini didorong oleh semakin meningkatnya pengelolaan ternak unggas oleh peternak, baik itu pengelolaan ternak itu sendiri maupun lingkungan ternak berada seperti ketersediaan pakan ternak, obat-obatan, dan kandang yang sesuai persyaratan teknis.

Tabel 2.48
Jumlah Produksi Daging Tahun 2020 s.d 2022
Di Kabupaten Pesisir Selatan

NO	JENIS DAGING	PRODUKSI DAGING (KG)		
		2020	2021	2022
1	Daging Sapi	1.602.033	1.686.328	1.810.905
2	Daging Kerbau	49.550	45.295	63.063
3	Daging Kambing	38.358	34.561	36.291
4	Daging Ayam Buras	922.165	957.238	990.242
5	Daging Ras Pedaging	2.677.012	3.301.244	3.491.998
6	Daging Ras Petelur	63.352	120.627	121.493
7	Daging Itik	105.519	115.620	128.157
Jumlah		5.457.989	6.260.912	6.642.149

Pada tabel diatas dapat dilihat produksi daging setiap jenis semuanya mengalami kenaikan kecuali daging kerbau yang fluktuasi dan daging kambing mengalami penurunan setiap tahunnya. Lebih jelasnya dapat kita lihat dalam grafik dibawah ini :



Gambar 2.4. Jumlah Produksi Daging di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2022

Daging ayam ras pedaging menjadi jenis daging yang memiliki jumlah terbanyak dan peningkatan yang cukup baik setiap tahunnya. Pada tahun 2021 jumlah ayam pedaging sebanyak 3.301.244 Kg dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 3.491.998 Kg. Jumlah terbesar kedua adalah jenis daging sapi yang juga meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022 produksi daging sapi tahun 2022 mencapai jumlah 1.810.905 kg, jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 1.686.328 kg.

a. Sapi Potong

Populasi Sapi Potong Tahun 2020 s/d 2022 di Kabupaten Pesisir Selatan

NO	KECAMATAN	JUMLAH SAPI (EKOR)		
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022*)
1	Silaut	4.097	4.324	3.967
2	Lunang	2.235	2.300	2.101
3	BAB Tapan	1.240	1.310	1.403
4	Rahul Tapan	969	1.075	1.179
5	Pancung Soal	4.861	5.103	4.794
6	Airpura	4.404	4.613	4.159
7	Linggo Sari Baganti	7.333	6.083	8.979
8	Ranah Pesisir	10.794	11.347	10.736
9	Lengayang	14.288	14.423	14.945
10	Sutera	10.477	10.487	9.033
11	Batang Kapas	6.656	7.182	7.444
12	IV Jurai	4.960	5.330	5.514
13	Bayang	4.724	5.291	4.924
14	Bayang Utara	512	630	434
15	Koto XI Tarusan	6.137	7.095	7.018
Jumlah		83.687	86.593	86.630

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam 3 (tiga) tahun terakhir populasi ternak di Kabupaten Pesisir Selatan terus naik. Kenaikan tertinggi terjadi pada Tahun 2021 sebesar 3,41% (dari 83.687 ekor pada Tahun 2020 menjadi 86.593 pada Tahun 2021). pada Tahun 2022 kenaikan populasi hanya mencapai 0,04%, hal ini dikarenakan pada Tahun 2022 terjadi kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Surra dan Jembrana yang sangat mempengaruhi populasi ternak sapi. Dibawah ini dapat dilihat jumlah ternak mati berdasarkan sebab kematiannya.

NO	URAIAN	SEBAB KEMATIAN (EKOR)				TOTAL (EKOR)	PENYEBAB
		MATI SAKIT	POTONG PAKSA	BENCANA ALAM	DAN LAIN-LAIN		
1	Sapi Potong	3.905	1.491	58	22	5.476	Penyakit Mulut dan Kuku, Surra dan Jembrana
Jumlah		3.905	1.491	58	22	5.476	

Selain itu kelahiran, pemotongan, pemasukan dan pengeluaran ternak juga sangat mempengaruhi populasi ternak sapi.

b. Itik

Populasi Itik Tahun 2020 s/d 2022 di Kabupaten Pesisir Selatan

NO	KECAMATAN	JUMLAH ITIK (EKOR)		
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022*)
1	Silaut	999	1.003	1.300
2	Lunang	619	911	812
3	BAB Tapan	7.280	9.430	10.660
4	Rahul Tapan	3.725	5.210	6.600
5	Pancung Soal	2.321	2.501	2.513
6	Airpura	1.866	1.911	1.496
7	Linggo Sari Baganti	2.934	241	7.199
8	Ranah Pesisir	11.170	10.130	11.190
9	Lengayang	47.772	46.932	46.900
10	Sutera	5.286	5.179	4.787
11	Batang Kapas	22.649	26.100	28.400
12	IV Jurai	15.230	18.610	22.400
13	Bayang	52.794	63.505	68.680
14	Bayang Utara	550	350	149
15	Koto XI Tarusan	4.250	4.620	4.868
Jumlah		179.445	196.633	217.954

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam 3 (tiga) tahun terakhir populasi itik di Kabupaten Pesisir Selatan selalu meningkat, peningkatan populasi ini didorong semakin baiknya pengelolaan budidaya itik yang dilakukan peternak. Disamping itu juga adanya bantuan itik dari kegiatan APBD Kabupaten dan APBD Provinsi. Pada Tahun 2022 ini bantuan itik dari APBD Kabupaten dan APBD Provinsi sebanyak 9.840 ekor.

c. Ayam Buras

Populasi Ayam Buras Tahun 2020 s/d 2022 di Kabupaten Pesisir Selatan



NO	KECAMATAN	JUMLAH (EKOR)		
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022*)
1	Silaut	31.849	31.920	30.930
2	Lunang	36.241	36.241	36.818
3	BAB Tapan	38.210	39.470	40.220
4	Rahul Tapan	39.115	40.180	41.360
5	Pancung Soal	37.697	37.898	38.005
6	Airpura	26.487	26.552	26.420
7	Linggo Sari Baganti	6.854	6.956	13.498
8	Ranah Pesisir	60.000	58.000	57.690
9	Lengayang	140.777	140.832	141.536
10	Sutera	43.060	42.791	46.626
11	Batang Kapas	31.726	47.315	49.450
12	IV Jurai	100.865	101.600	108.650
13	Bayang	8.700	110.163	114.466
14	Bayang Utara	101.616	7.550	7.588
15	Koto XI Tarusan	49.453	49.511	50.511
Jumlah		752.650	776.979	803.768

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 populasi ayam buras semakin meningkat, peningkatannya populasi dari Tahun 2020 ke Tahun 2021 sebesar 3,23% dan dari tahun 2021 ke Tahun 2022 sebesar 3,45%. salah satu faktor peningkatan populasi ini adalah adanya bantuan ayam buras dari APBD Provinsi Tahun 2022 sebanyak 31.000 ekor. Dan disamping itu pengelolaan budidaya ayam buras semakin baik yang dilakukan oleh peternak.

5. Produksi Telor

Pada tahun 2022 jumlah produksi tiga jenis telur kompak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Telur ayam meningkat yang pada tahun 2021 hanya 843.475 kg, meningkat pada tahun 2022 sebesar 861.099 kg. Sehingga jika tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021, produksi telur ayam ras mengalami peningkatan 2,09 %.

Sedangkan untuk ayam buras juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 hanya berjumlah 326.331 kg menjadi sebesar 337.583 kg pada tahun 2022. Peningkatan produksi ayam buras dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 3,45%. Lalu untuk telur itik menjadi jenis telur yang memiliki peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 paling besar, yaitu 10,84%. Dimana produksi pada tahun 2022 berjumlah 1.196.567 kg, angka ini lebih besar bila dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 1.079.515 kg. Untuk lebih jelasnya gambaran perkembangan produksi telur tahun 2020 s.d 2022 dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini :

Tabel 2.49
Jumlah Produksi Telur Tahun 2020 s.d 2022
Di Kabupaten Pesisir Selatan

NO	JENIS TELOR	PRODUKSI (KG)		
		2020	2021	2022
1	Telur Ayam Ras	816.875	843.474	861.099
2	Telur Ayam Buras	473.788	326.331	337.583
3	Telur Itik	985.153	1.079.515	1.196.567
Jumlah		2.275.816	2.249.320	2.395.249

Sumber : Bidang Peternakan, 2022



Gambar 2.5 : Produksi Telur Tahun 2020 s.d 2022
di Kabupaten Pesisir Selatan

6. Produksi Ikan

Pada tahun 2022 Produksi perikanan mengalami peningkatan dibanding tahun 2021, dimana produksi perikanan berjumlah 50.184 ton. Sedangkan pada tahun 2021 sebesar 49.641 ton. Peningkatan produksi perikanan ini dikarenakan meningkatnya jumlah tangkapan nelayan dan pembudidaya ikan dan bantuan alat penangkapan seperti Perahu Jukung, Mesin tempel dan long tail, Alat tangkap ikan serta alat bantu penangkapan ikan baik bersumber APBD, APBD Provinsi dan DAK. Data perkembangan produksi perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dalam tabel tersebut :

Tabel 2.50
Perkembangan Produksi Ikan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2022

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi		
			2020	2021	2022
1	Peningkatan produksi ikan	Ton	35.479	49.641	50.184,82

Produksi Perikanan ini didukung oleh Produksi Perikanan Budidaya dan Produksi Perikanan Tangkap yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.51
Capaian Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan
Tahun 2021 dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
			2021	2022
1.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	14.092	14.277,82
2.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	35.549	35.907,00

a. Produksi Perikanan Budidaya

Pada Tahun 2022 produksi perikanan budidaya berjumlah 14.277,82 ton sedangkan realisasi produksi perikanan budidaya pada tahun 2021 sebesar 14.092 ton. Hal ini menunjukkan peningkatan produksi perikanan budidaya tahun 2022 lebih tinggi dari pada tahun 2021. Produksi perikanan budidaya pada tahun 2022 melebihi dari target ini disebabkan banyaknya masyarakat yang sudah mulai berusaha budidaya ikan di air tawar dengan membuat kolam baik swadaya maupun berkelompok. Dismaping itu bantuan benih ikan dan pakan sudah dibantu oleh pemerintah. (BBI)

b. Produksi Perikanan Tangkap

Pada Tahun 2022 produksi perikanan tangkap sejumlah 35.907 ton, sedangkan realisasi produksi perikanan tangkap pada tahun 2021 sebesar 35.549 ton. Data ini menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan terjadi disebabkan telah selesainya. Keberhasilan ini didukung oleh kondisi new normal ditengan pandemic Covid 19 yang memungkinkan aktifitas pelaku usaha perikanan mulai berjalan normal.

2. Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)

Industri Pengolahan merupakan aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. PDRB sendiri merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, sedangkan PDRB sektor Industri Pengolahan adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha sektor pengolahan. Sedangkan Indikator Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan diformulasikan oleh Badan Pusat Statistik.

Lingkup Industri pengolahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah Industri Kecil Menengah /IKM (UMK sektor pengolahan menurut UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja) sedangkan Industri Besar (Usaha Menengah dan Besar menurut UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja) merupakan tanggung jawab Provinsi,

lingkup tanggung jawab Pemerintah Kabupaten hanya pengawasan. Berikut Data Dukung Pencapaian Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan :

A. Data Industri Kecil dan Menengah (IKM) Sektor Pengolahan :

NO	JENIS INDUSTRI	DATA INDUSTRI KECIL DAN MENEGAH		
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1.	Jumlah IKM	2.503	3.879	4.971
2.	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	9.796	11.879	13.797
3.	Nilai Investasi (Rp.)	100.412.401.000	127.583.320.000	145.385.535.000
4.	Nilai Produksi (Rp.)	433.303.325.000	441.090.628.700	462.181.592.000
5.	Nilai Bahan Baku (Rp.)	216.526.551.000	236.799.132.400	253.239.031.000
6.	Omset (Rp.)	498.905.842.550	532.850.652.400	576.726.784.000

B. Data Legalitas dan Sertifikat Tahun 2021-2026

**Rekapitulasi Jumlah IKM yang difasilitasi
Sertifikasi, Standarisasi Produk IKM dan Izin Usaha Industri
Tahun 2021-2022**

No	Jenis Izin	Izin yang difasilitasi tahun	
		2021	2022
1	LEGALITAS USAHA		
	IUI-K (IKM)	6	2
2	LEGALITAS PRODUK		
	MD	1	1
	Halal	8	6
	Merek	4	15
	SNI (Sukarela)	0	0
	Barcode	0	0
	Total Legalitas Produk	19	24

**Rekapitulasi Sertifikasi, Standarisasi Produk IKM dan Izin
Usaha Industri yang Terbit Tahun 2021-2022**

No	Jenis Izin	Jumlah Izin yang diterbitkan tahun -	
		2021	2022
1	LEGALITAS USAHA		
	IUI-K (IKM)	6	2
2	LEGALITAS PRODUK		
	MD	1	1
	Halal	8	5
	Merek	4	0

	SNI (Sukarela)	0	0
	Barcode	0	0
	Total Legalitas Produk	19	8
	Total Legalitas yang difasilitasi Dinas (Tanpa PIRT)	19	8

Data fasilitasi sentra IKM 2020-2022

NO.	SENTRA IKM	2020	2021	2022
1.	1 (satu) Unit Bangunan Sentra IKM Perikanan di Carocok Anau Kec. Koto XI Tarusan	-	Pembangunan Tahap 3 (Peralatan dan gedung penunjang lainnya)	Pembangunan Sentra IKM Minyak Atsiri

REKAPITULASI DIREKTORI PERUSAHAAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) BERDASARKAN CABANG INDUSTRI DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	KLASIFIKASI INDUSTRI	JUMLAH IKM	TENAGA KERJA	INVESTASI	NILAI PRODUKSI	NILAI BAHAN BAKU	OMSET
1	INDUSTRI MAKANAN	1,723	4,616	35,812,135,000	185,323,863,500	104,100,784,000	226,881,706,500
2	INDUSTRI MINUMAN	142	365	9,907,350,000	8,967,145,000	3,689,318,000	11,965,553,000
3	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU	-	-	-	-	-	-
4	INDUSTRI TEKSTIL	120	684	4,818,391,000	7,781,314,000	4,847,649,000	9,475,136,000
5	INDUSTRI PAKAIAN JADI	310	808	5,377,249,000	12,931,654,500	8,562,199,000	16,980,836,000
6	INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI	12	26	389,635,000	990,535,000	607,250,000	1,209,379,000
7	INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR) DAN BARANG ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN DAN SEJENISNYA	158	318	1,263,782,000	4,063,350,000	1,804,395,000	5,153,369,500
8	INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS	-	-	-	-	-	-
9	INDUSTRI PENCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN	17	61	2,235,022,000	1,514,630,000	1,106,800,000	2,411,636,000



10	INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI	-	-	-	-	-	-
11	INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA	1,357	3,743	36,641,024,000	77,526,227,000	32,929,664,000	94,966,986,000
12	INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL	4	15	35,000,000	101,160,000	46,900,000	121,480,000
13	INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK	3	7	114,500,000	204,000,000	146,933,000	234,600,000
14	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM	339	802	6,654,297,000	22,377,819,000	12,411,712,000	30,143,554,000
15	INDUSTRI LOGAM DASAR	-	-	-	-	-	-
16	INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA	156	394	7,383,734,000	19,975,759,000	16,180,938,000	24,280,019,000
17	INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK	-	-	-	-	-	-
18	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK	-	-	-	-	-	-
19	INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN YTDL	5	11	368,800,000	1,749,600,000	969,460,000	1,895,350,000
20	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER	17	81	1,767,950,000	4,653,800,000	1,953,687,000	5,809,020,000
21	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA	20	54	1,556,100,000	1,551,000,000	883,900,000	1,831,900,000
22	INDUSTRI FURNITUR	518	1,595	28,872,206,000	103,000,230,000	58,719,556,000	129,595,171,000
23	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	70	217	2,188,360,000	9,469,505,000	4,277,886,000	13,771,088,000
24	REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	4,971	13,797	145,385,535,000	462,181,592,000	253,239,031,000	576,726,784,000

Tabel 2.52
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 3 Tahun terakhir
(2020 s.d 2022)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
			2020	2021	2022
9,2	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Milyar Rp.	700,37	725,44	741,26

Pada tabel diatas dapat kita lihat kontribusi sektor industri selalu meningkat setiap tahunnya. Tahun 2020, PDRB pada sektor Industri Pengolahan sebesar Rp.700,37 Milyar, dan meningkat pada tahun 2021 sebesar Rp. 725,44 Miliar. Dan pada tahun 2022 kontribusi sektor industri pada PDRB Kabupaten Pesisir Selatan meningkat kembali hingga mencapai angka Rp. 741,26 Milyar. Grafik dan penjelasan level sumbar.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/provinsi

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Pesisir Selatan			Prov Sumatera Barat		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
9,2	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Milyar Rp.	700,37	725,44	741,26	16 031,82	16 628,38	16 917,97

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target indikator Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK) yaitu :

a. Faktor Keberhasilan/ Peningkatan

- Pemulihan ekonomi pasca covid-19 yang cukup cepat, terutamanya IKM yang bergerak dibidang sandang dan pangan. Perubahan cara konsumsi masyarakat semenjak pandemi, telah membuka alternatif perluasan pasar produk IKM. Dengan memanfaatkan media online, para pelaku IKM mampu memperluas pangsa pasar produk
- Adanya dukungan dari Pusat dalam hal pembangunan sarana dan prasarana IKM

b. Hambatan

- Kurangnya kompetensi ASN yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan
- Ketidaksesuaian penganggaran dengan perencanaan

c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Kemitraan dan pemanfaatan CSR dalam pelaksanaan pembinaan IKM, diantaranya :
 - a. Kelas Inkubasi Bisnis dengan Universitas Negeri Padang (UNP) di IKM Lokana

- b. Temu pelaku Bisnis IKM di Gedung PCC yang disponsori oleh Bank Nagari Painan
- c. Webinar konsultasi bisnis IKM dengan Ruang 412
- Pelaksanaan Inovasi OPD, yaitu :
 1. Forum Industri Kecil dan Menengah (FIKMA) Pesisir Selatan
 2. Galeri dan Pusat Informasi IKM Pesisir Selatan
 3. Pengembangan Website “Laku Bana”
 4. Dilaksanakannya retribusi perdagangan secara non tunai (on progress)
 5. “Tanggap Pasar”, yaitu layanan grup Whatsapp yang memberikan kesempatan kepada mantri pasar untuk membagikan permasalahan di pasar serta memperoleh solusi dari pihak yang tepat.
 6. Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi melalui BUMNag dalam hal penggunaan asset di kawasan transmigrasi

Program/kegiatan pendukung pencapaian indikator ini yaitu; program (1) Perencanaan dan Pembangunan Industri Dengan target anggaran Rp 17.119.295.961 Dan realisasi sebesar Rp 16.738.730.758 Atau capaian 97,77 % (2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan target anggaran Rp 25.000.000 Dan realisasi sebesar Rp 24.643.500 Atau capaian 98,57 % (3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan target anggaran Rp 63.299.880 Dan realisasi sebesar Rp 63.237.900 Atau capaian 99,90 %.

Total anggaran yang dibutuhkan dalam pencapaian indicator ini adalah sebesar Rp. 17.207.595.841, dengan realisasi sebesar Rp 16.826.612.158 Atau capaian 97,79%.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 terdapat efisiensi sebesar 2,21%.

Sasaran 10 : Menurunnya Pengangguran

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 10 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 2.53 berikut ini:

Tabel 2.53
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 10

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6.85	4,61	132,70
Rata-rata Capaian					132,70

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 10 sebesar 132,70%. Pencapaian sasaran strategis 10 termasuk predikat **Sangat Baik**.

Pengangguran terbuka terdiri dari mereka yang sedang aktif mencari pekerjaan, mereka yang sedang mempersiapkan usaha namun usahanya belum mulai berjalan, mereka yang sengaja tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkannya, dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka terdiri dari :

a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.

➤ **Mencari pekerjaan** adalah kegiatan seseorang yang pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti mereka:

- a. Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
- b. Yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.
- c. Yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.

Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan, jadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan asalkan seminggu yang lalu masih mengharapkan pekerjaan yang dicari. Mereka yang sedang bekerja dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lain tidak dapat disebut sebagai penganggur terbuka.

b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.

➤ **Mempersiapkan suatu usaha** adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang "**baru**", yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila "**tindakannya nyata**"□, seperti: mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan.

- Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat, dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha.
- Mempersiapkan suatu usaha yang nantinya cenderung pada pekerjaan sebagai berusaha sendiri (*own account worker*) atau sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar atau sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.

c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sedangkan Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka pada suatu daerah termasuk Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Nilai investasi
3. Angka upah minimum daerah
4. Jumlah penyaluran kredit usaha rakyat
5. Jumlah pelatihan peningkatan keterampilan/ softkill

Berikut data perkembangan realisasi dan capaian tingkat pengangguran terbuka dalam 3 (tiga) tahun terakhir di Kabupaten Pesisir selatan:

Tabel 2.54
Realisasi Capaian Kinerja Indikator Tingkat Pengangguran
Terbuka di Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020 s.d 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
			2020	2021	2022
10,1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,00	5,97	4,61

Pada tabel diatas, dapat dilihat kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 – 2022 dari tahun ke tahun terjadi penurunan angka Tingkat Pengangguran Terbuka. Hal ini memperlihatkan bahwa ketersediaan lapangan kerja di Kabupaten Pesisir Selatan juga terus meningkat, namun demikian upaya penciptaan lapangan kerja dan usaha harus terus ditingkatkan agar tingkat pengangguran dapat semakin ditekan guna mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

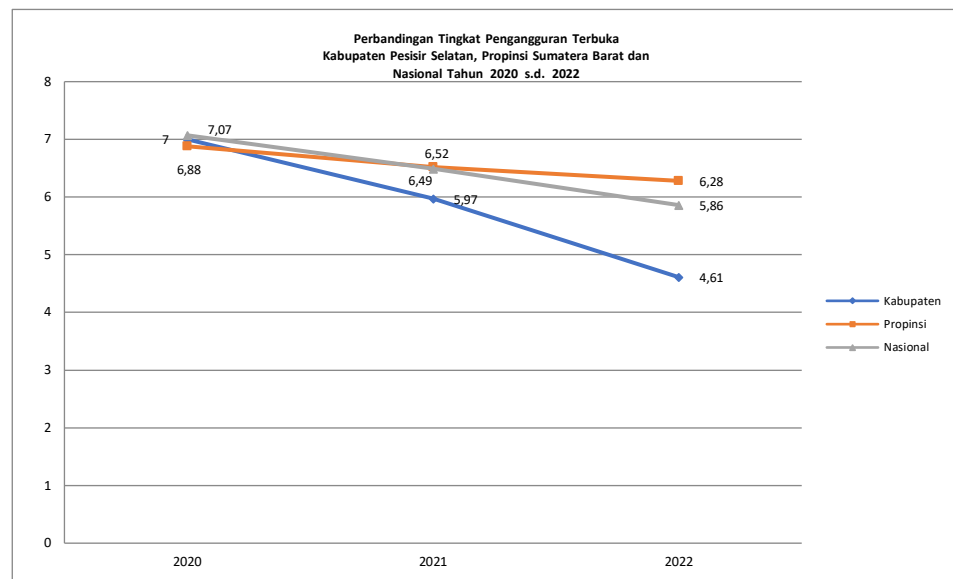
Tabel 2.55
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat
dan Nasional Tahun 2020 s.d. 2022

No	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Kabupaten	7,00	5,97	4,61
2	Propinsi	6,88	6,52	6,28
3	Nasional	7,07	6,49	5,86

Sumber Data : Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2023

Bila dibandingkan dengan realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi dan Nasional terkonfirmasi capaian bahwa Kabupaten Pesisir Selatan di bawah rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka skala provinsi yang

mencapai 6,28% dan nasional yang sebesar 5,86%. Dan selama tiga tahun terakhir Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pesisir Selatan konsisten dibawah tingkat nasional.



Gambar 2.6 : Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020 s.d. 2022

Seiring berjalannya waktu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sangat bekerja keras dalam menurunkan angka pengangguran. Melalui berbagi macam program kerjanya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berhasil menurunkan angka pengangguran dengan jumlah yang cukup signifikan.

Ada beberapa faktor penyebab keberhasilan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka :

1. Semakin banyak program pelatihan kerja. Pemerintah memang sangat gencar dalam mengadakan program pelatihan kerja, baik program pelatihan tata rias, tata boga, garmen dan sebagainya. Saat masyarakat memiliki bakat atau kemampuan, maka mereka bisa semakin mandiri dan bisa mendapatkan penghasilan dari bakat yang dimiliki tersebut.
2. Menanamkan jiwa wirausaha, karena jumlah tenaga kerja yang semakin meningkat dan tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia, maka pemerintah berusaha untuk membuat masyarakat lebih mandiri dengan menjalani wirausaha. Saat menjalankan sebuah bisnis, maka masyarakat tidak hanya tergantung dengan lapangan pekerjaan yang disediakan pemerintah. Mereka justru akan lebih mandiri dalam menghasilkan pendapatan dengan bisnis yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bahkan, nantinya para pengusaha ini bisa membuka kesempatan kerja bagi masyarakat yang lain.

3. Faktor demografis, seiring meningkatnya populasi penduduk usia kerja.
4. Meningkatkan keterampilan dan kualitas tenaga kerja menuju profesionalisme.
5. Penempatan Tenaga Kerja yang memiliki kompetensi dengan kualitas yang memadai di Luar Negeri.
6. Adanya *jobfair* (bursa kerja)

Dalam mencapai indikator kinerja ini, terdapat beberapa kendala dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, antara lain :

1. Internal :
 - a. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, seperti : belum tersedianya penginapan bagi peserta pelatihan, sehingga pencari kerja yang dilatih hanya yang berada disekitar Kecamatan IV Jurai.
 - b. Terbatasnya Instruktur yang bersertifikat kompetensi.
 - c. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM Pembina.
2. Eksternal :
 - a. Pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja.
 - b. Kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja.
 - c. Jumlah lapangan kerja dan tenaga kerja yang kurang seimbang.
 - d. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
 - e. Jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak merata
 - f. Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang disebabkan akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi, hambatan dalam proses ekspor-impor.
 - g. Kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja.

Pada tahun 2022, Balai Latihan Kerja (BLK) sudah berubah menjadi UPTD-BLK. dibawah Bidang Ketenagakerjaan, UPTD juga dipimpin oleh seorang Kepala UPTD serta 1 (satu) orang Tata Usaha.

Eksistensi BLK pada saat ini cukup penting mengingat ini tingkat pengangguran yang semakin tinggi dan lapangan kerja yang terbatas, maka dengan adanya lembaga-lembaga pelatihan keterampilan ini selain itu diharapkan juga akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri yang berguna bagi pencari kerja.

Kebutuhan yang begitu besar pelatihan tenaga kerja mendorong OPD untuk semaksimal mungkin mengusahakan keinginan masyarakat akan kebutuhan ini. Pelatihan untuk tenaga kerja dilaksanakan guna menyiapkan tenaga kerja terlatih bagi pencari kerja agar memiliki daya saing dalam memasuki dunia kerja. Kebutuhan yang begitu besar bagi tenaga kerja terlatih mendorong OPD untuk semaksimal mungkin mengusahakan keinginan masyarakat akan kebutuhan ini. Dalam hal ini Pemerintah Daerah juga mendukung program dengan mengalokasikan anggaran. Untuk pelatihan

berbasis masyarakat diutamakan bagi kelompok keluarga miskin, penganggur, diajukan oleh pemerintah desa setempat, pendidikan minimal, sedangkan pelatihan berbasis kompetensi diutamakan bagi yang telah mempunyai keterampilan khusus dan tinggal memoles serta meningkatkan keterampilan supaya bisa bersaing didunia kerja.

Indikator ini didukung oleh 3 (tiga) program, yaitu : program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, dan program hubungan industrial. Dengan target anggaran Rp. 110.042.180, dan realisasi sebesar Rp. 109.338.120,- atau capaian 99,36%. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.704.060,- atau 0,64%.

Sasaran 11 : Meningkatnya kualitas infrastruktur

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 11 terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 2.56 berikut ini:

Tabel 2.56
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 11

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase jalan kabupaten kondisi baik	Persen	31.90	32.34	101.38
2	Rasio konektivitas	Persen	57	58	101.75
3	Proporsi lahan sawah beririgasi baik	Persen	59.20	59.49	100.49
Rata-rata Capaian					101,21

sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis 11 sebesar 101,21%. Pencapaian sasaran strategis 11 termasuk predikat **Sangat Baik**.

1. Persentase jalan kabupaten kondisi baik

Persentase jalan kondisi baik di peroleh dari data inspeksi kondisi jalan tahun 2022 dan pemutakhiran *data base* jalan dengan panjang jalan kabupaten adalah 2.333,32 km. Target indikator Persentase jalan kondisi baik pada tahun 2022 adalah 31.90%, dengan realisasi 32,34% atau dengan capaian sebesar 101,38%. Pemutakhiran data base jalan merupakan akumulasi dari hasil kegiatan fisik jalan, yaitu pekerjaan perbaikan/pemeliharaan/peningkatan/kualitas jalan. Data kondisi ini menyajikan total panjang jalan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, sedang, rusak dan rusak berat.

Berdasarkan kondisi jalan tersebut di atas, dapat dihitung persentase jalan dalam kondisi baik. Berikut tabel 2.57 rincian jalan berdasarkan jenis dan kondisi jalan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2022.

Tabel 2.57
Panjang Jalan Kabupaten berdasarkan Jenis dan Kondisi Jalan
Tahun 2020-2022

No.	Jenis dan Kondisi Jalan	Realisasi					
		2020		2021		2022	
		(Km)	(%)	(Km)	(%)	(Km)	(%)
1.	Baik	689,47	29,55	718,11	30,78	754,59	32,34
2.	Sedang	252,28	10,18	255,56	10,95	245,38	10,52
3.	Rusak	382,85	16,41	382,64	16,40	371,56	15,92
4.	RusakBerat	1.008,58	43,23	976,87	41,87	961,78	41,22
Jumlah		2.333,18	100,00	2.333,18	100,00	2.333,32	100,00

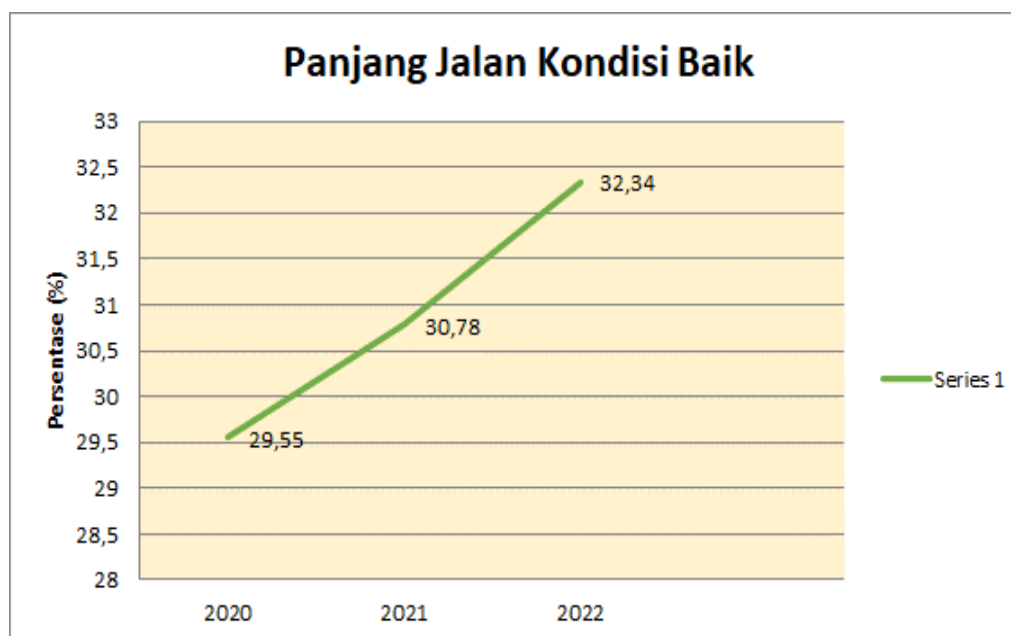
Sumber :LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan kondisi jalan baik dari 718,11km (30,78%) tahun 2021 menjadi 754,59 km (32,34%) pada tahun 2022 atau meningkat sebesar (1,56%). Bertambahnya kondisi jalan baik di Kabupaten Pesisir Selatan disebabkan karena makin berkurangnya kondisi jalan rusak berat. Bila dibandingkan pada tahun 2021 kondisi jalan rusak berat mengalami penurunan dari 976,87 km menjadi 961,78 km pada tahun 2022.

Tabel 2.58
Target dan Realisasi Jalan Kondisi Baik Tahun 2020-2022

No.	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Target Capaian Setiap Tahun (%)	29,90	30,90	31,90
2.	Realisasi (%)	29,55	30,77	32,34

Sumber :LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022



Sumber :LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

Gambar 2.7 : Target dan realisasi per tahun jalan kondisi baik
Tahun 2020-2022

Dari tabel dan gambar di atas dapat di jelaskan bahwa capaian indikator

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik untuk tahun 2022 termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan data kondisi jalan tersebut dapat di hitung persentase panjang jalan status kabupaten dalam kondisi baik dan kondisi baik tahun 2022. Berikut data realisasi dan capaian indikator kinerja persentase jalan kondisi baik tahun 2022.

Tabel 2.59
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Persentase Jalan Kondisi Baik Tahun 2022

No.	Uraian	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	31,90	32,34	101,38

Sumber :LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

Berdasarkan pencapaian kondisi jalan baik di atas, klasifikasi penilaian indicator kinerja persentase jalan kondisi baik adalah predikat **Sangat Baik**. Pelaksanaan kegiatan untuk mendukung indikator persentase jalan dalam kondisi baik dapat dilihat pada gambar berikut :



**Gambar 2.8 : Peningkatan Jalan Ruas Cimpu Sei-Sirah,
Kec. Sutera Tahun 2022**



**Gambar 2.9 : Peningkatan Jalan Labuhan Tanjak – Sei Sirah Hilir
Kec. Pancung Soal Tahun 2022**

Tabel 2.60
Jenis, Kondisi dan Status Jalan di Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020 s.d. 2022

No.	JenisKondisi	Status Jalan JalanKabupaten		
		2020 Km	2021 Km	2022 Km
A	Jenis Permukaan			
	1. Aspal	680,11	687,53	721,10
	2. Kerikil	722,01	700,38	669,84
	3. Beton	706,50	215,91	235,47
	4. Tanah	224,56	707,21	706,77
	Jumlah	2.333,18	2.333,18	2.333,18
B	Kondisi Jalan			
	1. Baik	689.47	718.11	754.59
	2. Sedang	252.28	255.56	245.38
	3. Rusak	382.85	382.64	371.56
	4. Rusak Berat	1008.58	976.87	961.78
	Jumlah	2.333,18	2333.18	2333.32
C	Panjang Jalan			
	1. Kelas I	-	-	-
	2. Kelas jalan II	-	-	-
	3. Kelas Jalan III	232.90	232.90	232.90
	4. Kelas Jalan IIIA	376.50	376.50	376.50
	5. Kelas Jalan IIIB	413.26	413.26	413.26
	6. Kelas Jalan IIIC	-	-	-
	7. Kelas Tidak Rinci	1.310,52	1.310,52	1.310,52
	Jumlah	2.333,18	2.333,18	2.333,18

Sumber :Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pesisir Selatan, 2022

Capaian Indikator ini ditunjang oleh Progam *Penyelenggaraan Jalan* dengan target anggaran sebesar Rp. 129.185.258.177,- dan terealisasi sebesar Rp. 127.710.293.866,- atau 98,86 %. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program *Penyelenggaraan Jalan* terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.474.964.311 atau 1,14 %.

Adapun kendala dan upaya dalam pencapaian indikator Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik adalah sebagai berikut :

Kendala :

1. Database jalan belum terupdate secara maksimal
2. Kegiatan Inspeksi kondisi jalan belum optimal dilaksanakan untuk semua jalan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

Strategi/ Upaya pemecahan masalah adalah:

1. Penyiapan dokumen pemetaan jaringan jalan yang terupdate sesuai kebutuhan setiap tahunnya.
2. Inspeksi kondisi jalan harus dilaksanakan secara rutin
3. Pelaksanaan kualitas sumber daya aparaturdan penyedia jasa sebagai unsur pelaksanaan pembangunan melalui diklat teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengawasan kegiata fisik jalan.

2. Rasio Konektivitas

Konektivitas adalah terhubungnya suatu wilayah dalam suatu daerah. Rasio Konektivitas merupakan pengukuran akan wilayah yang terlayani angkutan, baik angkutan jalan maupun angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Meningkatkan konektivitas suatu wilayah dapat dilakukan dengan cara membangun jalan, pelabuhan, dan pembangunan angkutan massal. Manfaat dari adanya konektivitas adalah untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, dimana daerah yang dulunya sulit untuk dijangkau tapi dengan adanya konektivitas daerah tersebut bisa keluar dari keterisoliran, sehingga semua aspek akan mudah dijangkau seperti, aspek pendidikan, aspek ekonomi dan juga aspek kesehatan.

Penghitungan Rasio konektivitas Kabupaten berdasarkan kepada:

1. Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP
2. Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu
3. Jumlah Lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintas perintis ditambah lintasan komersil
4. Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu IK1 (Angkutan Jalan) IK2 (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan
5. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70 wilayah yang tidak memiliki angkutan laut dan penyeberangan (bobot angkutan SDP=0, bobot angkutan jalan = 100)

Sedangkan untuk bobot trayek dan lintas adalah sebagai berikut:

- a. Bobot Trayek Lintas dengan frekwensi tinggi (>5X dalam seminggu), bobot = 1
- b. Bobot Trayek Lintas dengan frekwensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0,8
- c. Bobot Trayek Lintas dengan frekwensi rendah (<3 dalam seminggu), bobot = 0,5

Untuk lebih jelasnya realisasi dan capaian kinerja Rasio Konektivitas Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.64. dibawah ini:

Tabel 2.61
Realisasi dan Capaian Indikator Rasio Konektivitas
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Rasio Konektivitas	Persen	57	58	101,75

Sumber data : Dinas Perhubungan, 2022

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Rasio konektivitas Tahun 2022 yaitu 57% dan terealisasi sebesar 58% atau dengan capaian kinerja sebesar 101,75%. Hasil Capaian kinerja rasio konektivitas ini termasuk kategori *sangat baik*.

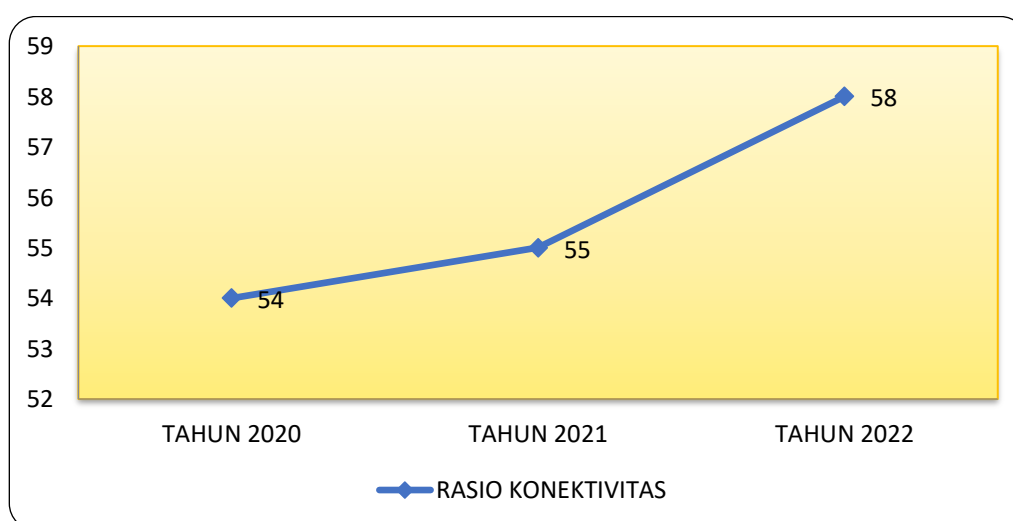
Berikut realisasi indikator kinerja rasio konektivitas tahun 2020-2022:

Tabel 2.62
Realisasi Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian %		
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Rasio Konektivitas	Persen	54	55	58	100	100	101,75

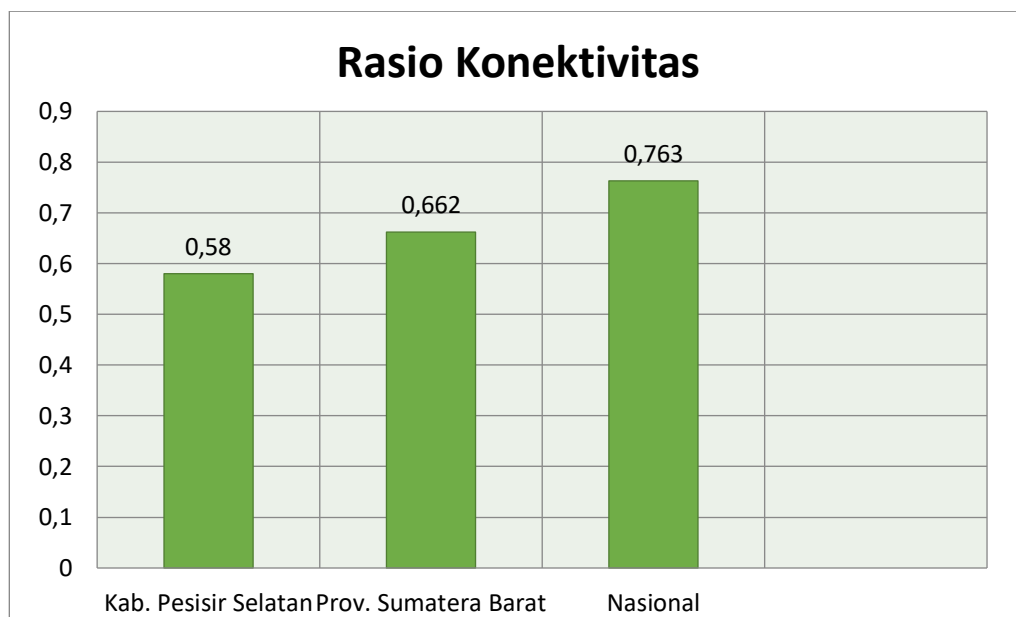
Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, pertumbuhan Indikator kinerja Rasio Konektivitas Kabupaten Pesisir Selatan sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2020 rasio konektivitas berada pada angka 54 % dan pada Tahun 2022 meningkat menjadi 58 %. Berikut gambaran peningkatan rasio konektivitas selama 3 (tiga) tahun:



Gambar 2.10. Peningkatan Rasio Konektivitas tahun 2020-2022

Berikut data perbandingan realisasi Rasio Konektivitas Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional pada tahun 2022:



Gambar 2.11. Perbandingan Rasio Konektivitas Kab. Pesisir Selatan dengan Provinsi dan Nasional

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa Rasio Konektivitas Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 58%. Sedangkan Rasio Konektivitas Provinsi adalah sebesar 66,2% dan Nasional sebesar 76,3%. Berdasarkan data tersebut maka Kabupaten Pesisir Selatan masih berada di bawah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator kinerja Rasio Konektivitas di kabupaten Pesisir Selatan adalah :

- Meningkatnya Kesadaran masyarakat terhadap penggunaan transportasi umum
- Meningkatnya fasilitas moda transportasi
- Pelaksanaan pendataan pelayanan trayek angkutan
- Sumber daya manusia yang kompeten.

Indikator ini didukung oleh beberapa program yaitu program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan program Pengelolaan Pelayaran dengan total anggaran sebesar 9.884.467.917,- dan realisasi sebesar 9.557.848.216,-. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan program Pengelolaan Pelayaran terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 326.619701,- atau 3,3 %.

3. *Proporsi Lahan sawah beririgasi baik*

Luas irigasi di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai **20.907 Ha** dengan jumlah Daerah Irigasi (DI) sebanyak **249** buah yang merupakan kewenangan

Kabupaten, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria – Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu luas irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar **18.800 Ha** dan luas irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang lokasinya berada di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai **22.540 Ha** sehingga total luas irigasi di Kabupaten Pesisir Selatan menjadi **62.647 Ha**.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 maka dilaksanakan pemetaan terhadap areal sawah yang ada serta untuk merevisi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria – Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kabupaten Pesisir Selatan telah mengusulkan DI baru sebanyak **67 DI** sehingga total DI Kabupaten Pesisir Selatan menjadi **313 DI**.

Adapun luas usulan DI Kabupaten Pesisir Selatan adalah Luas baku **14.514,67 Ha**, luas potensial **10.662,42 Ha** dan luas fungsional adalah **10.269,79 Ha**. Sedang total luas fungsional Kabupaten Pesisir Selatan baik kewenangan kabupaten, kewenangan propinsi dan kewenangan pusat seluas **23.837 Ha** (kesepakatan Dinas PSDA, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Badan Pertanahan Nasional Painan dan Badan Pusat Statistik Painan). Data usulan ini telah di ajukan dan diverifikasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, Bidang irigasi mempunyai beberapa indikator yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut :

1. Indeks pertanaman padi (Kali/Tahun)
2. Persentase Irigasi Kondisi Baik
3. Jumlah P3A aktif (Kelompok)
4. Penanganan Bendung (Unit) :
 - Rehabilitasi Ringan/sedang
 - Rehabilitasi berat/ Total
 - Pembangunan Baru
5. Penanganan Bendung (Unit)
 - Rehabilitasi ringan/sedang
 - Peningkatan Kualitas saluran irigasi (saluran tanah menjadi pasangan)
6. Jumlah klasifikasi irigasi yang ditingkatkan (DI)
7. Daerah Irigasi yang dilakukan OP (DI)
8. Jumlah P3A ynag berbadan hukum
9. Jumlah P3A yang dilakukan pembinaan.

Realisasi dari kinerja bidang irigasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Indeks Pertanaman Padi

Indeks pertanaman padi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 adalah sebesar **1,95** dan meningkat menjadi **1,97** pada tahun 2021, sedang pada tahun 2021 bertambah menjadi **1,99**. atau mengalami peningkatan sebesar **0,04** dari tahun 2021 ke tahun 2022. Peningkatan ini akan berpengaruh terhadap produksi pertanian yang merupakan mayoritas penghasilan penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Indeks Kinerja Sistem Irigasi

Indeks Kinerja Sistem irigasi merupakan indeks yang menilai beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan hasil pertanian, adapun faktor tersebut adalah prasarana fisik, produktivitas (padi), sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi dan perkumpulan P3A/GP3A/IP3A. Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 adalah sebesar **59,03** meningkat menjadi **59,32** pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 bertambah menjadi **59,52** atau mengalami peningkatan sebesar **0,49** dari tahun 2020 ke tahun 2022.

C. Persentase Irigasi Kondisi Baik

Irigasi kondisi baik adalah kondisi sawah yang dapat terairi secara lancar dan teratur. Irigasi kondisi baik ini merupakan salah satu dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 - 2026. Adapun persentase irigasi kondisi baik Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 - 2022 adalah pada tahun 2020 Persentase Irigasi kondisi baik Kabupaten Pesisir Selatan adalah **57,05** meningkat menjadi **59,13** pada tahun 2021-, pada tahun 2022 naik menjadi **59,49** atau mengalami peningkatan sebesar **2,44** dari tahun 2020 ke tahun 2022. Berikut indikator bidang irigasi di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 s.d. 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 2.63
Indikator Bidang irigasi Tahun 2020 - 2022

No.	Indikator	Tahun		
		2020	2021	2022
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Bendung yang direhabilitasi (unit)	6	6	11
2.	Panjang Saluran irigasi yang direhabilitasi (m)	8.565	8.519,97	6.153,49
3.	Jumlah klasifikasi Irigasi yg ditingkatkan (DI)	2	1	5
4.	Daerah irigasi yang dilaksanakan OP (DI)	21	7	3
5.	Jumlah P3A yang berbadan hukum (Klp)	28	19	20
6.	Jumlah P3A yang dilakukan pembinaan (Klp)	-	28	68

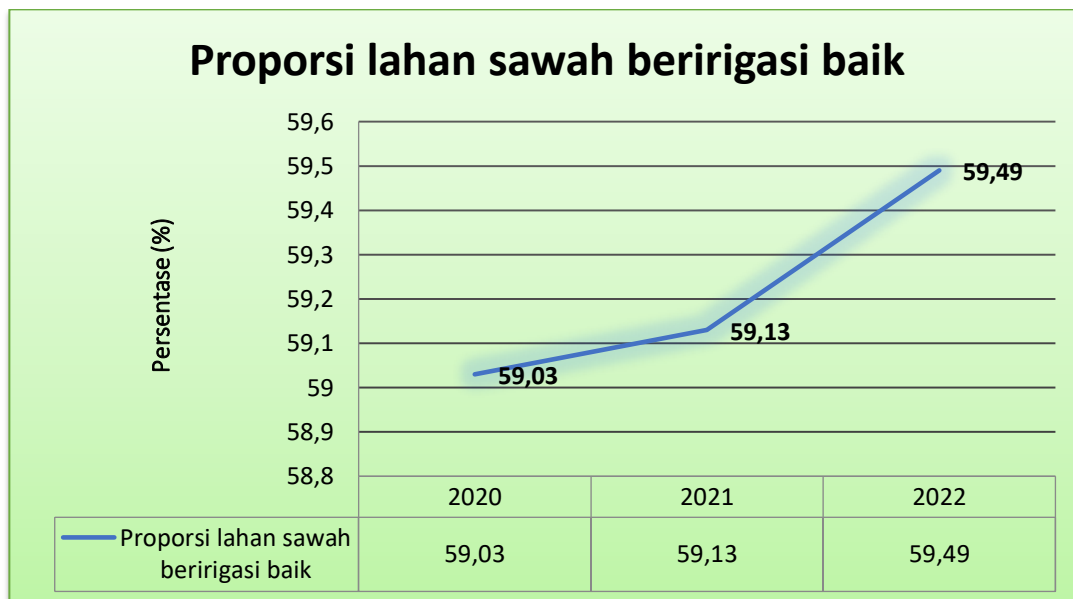
Sumber :LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

Jumlah penanganan bendung baik rehabilitasi ringan/ sedang, rehabilitasi berat maupun pembangunan baru dalam rentang waktu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebanyak 23 unit dengan rincian tahun 2020 sebanyak 6 unit, tahun 2021 sebanyak 6 unit serta tahun 2022 sebanyak 11 unit.

Tabel 2.64
Capaian Kinerja Indikator Proporsi Lahan Sawah Beririgasi Baik Tahun 2021 s.d 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian %		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
Proporsi Lahan Sawah Beririgasi Baik	%	59.03	59.13	59.49	100.05	99.88	100.49

Sumber :LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022



Sumber :LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

Gambar 2.12. Proporsi Sawah Beririgasi di Kabupaten Pesisir Selatan

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator Proporsi Lahan Sawah Beririgasi Baik dalam pelaksanaan RPJMD masih dalam kategori baik . Berikut data realisasi dan capaian indikator kinerja Proporsi Lahan sawah beririgasi Baik Tahun 2022 :

Tabel 2.65
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Proporsi Lahan sawah beririgasi Baik Tahun 2022

No.	Uraian	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Proporsi lahan sawah beririgasi baik	%	59.20	59.49	100.49

Sumber :LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022, target proporsi lahan sawah beririgasi baik di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebesar 59,20%, dengan realisasi sebesar 59,49% atau capaian sebesar 100,49%. Berdasarkan pencapaian indikator Proporsi lahan sawah beririgasi Baik di atas, maka klasifikasi penilaian indikator kinerja tersebut termasuk kategori **Sangat Baik**.

Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebutuhan irigasi kondisi baik adalah :

1. Adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan oleh Direksi Pekerjaan sehingga setiap kendala dan permasalahan pekerjaan segera ditindaklanjuti dan dicari solusinya.
2. Koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait antara Direksi Pekerjaan dengan Pengamat dan Juru Pengairan serta kelompok masyarakat petani.

Indikator ini didukung oleh program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Dengan target anggaran **Rp. 21.575.951.646,-** dan realisasi sebesar **Rp. 17.839.968.635** atau capaian **82,68%**. berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) terdapat efisiensi anggaran sebesar **3.735983.011,-** atau **17,32 %**.



Gambar 2.13. Bendung DI. Sei. Kuyung Pancung Soal (2022)



Gambar 2.14. DI. Sawah Liek (2022)

Saluran irigasi sangat penting kegunaannya karena akan membawa aliran air dari bendung menuju areal sawah, oleh karena itu bidang irigasi telah melakukan rehabilitasi saluran irigasi baik rehabilitasi ringan, sedang maupun berat. Adapun panjang saluran irigasi yang telah direhab pada tahun 2019 sepanjang 6.149 m, pada tahun 2020 panjang saluran irigasi yang telah direhab adalah 8.565 m serta tahun 2021 sepanjang 8.519,97 m sehingga total panjang saluran irigasi yang direhabilitasi rentang tahun 2019 sampai dengan 2021 sepanjang 23.233,97 m.



Gambar 2.15. Perbaikan Sayap Bendung Daerah Irigasi (DI) Damar Rumpit



Gambar 2.16 Rehabilitasi Saluran DI Damar Rumpit

Dalam pengelolaan jaringan irigasi tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah tetapi peran serta masyarakat terutama masyarakat petani harus ikut

berperan aktif atau partisipasi masyarakat. Kelompok masyarakat bergabung menjadi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), antara P3A bergabung menjadi Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) dan beberapa GP3A bersatu menjadi Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A). Selama tiga tahun jumlah P3A yang sudah berbadan hukum adalah sebanyak 67 kelompok dengan rincian tahun 2020 sebanyak 28 kelompok dan tahun 2021 sebanyak 19 kelompok serta pada tahun 2022 sebanyak 20 Kelompok P3A.

Selain pembangunan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Pesisir Selatan, irigasi kewenangan propinsi dan pusat pada rentang tahun 2019 sampai tahun 2021 juga banyak pembangunan yang dikerjakan. Adapun pekerjaan yang cukup besar adalah Pembangunan Lanjutan Saluran Irigasi DI. Kawasan Sawah Laweh di kecamatan Koto XI Tarusan dan DI Malepang Ampang Tulak di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang merupakan kewenangan pusat, dimana pembangunan bendung telah selesai dilaksanakan sedang pekerjaan saluran masih dikerjakan sampai sekarang.

Sasaran 12 : Terjaminnya kelestarian lingkungan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 12 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 2.66 berikut ini:

Tabel 2.66
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 12

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indek kualitas lingkungan hidup	tanpa satuan	86.85	77.94	89,74
Rata-rata Capaian					89,74

sumber :LKJ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup,2022

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 12 sebesar 89,74%. Pencapaian sasaran strategis 12 termasuk predikat *Sangat Baik*.

1. Indek Kualitas Lingkungan Hidup

Upaya mengendalikan Pencemaran dan kerusakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan komponen masyarakat masih belum dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kabupaten Pesisir Selatan. Berbagai inisiatif dilakukan dan ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak lagi pemangku kepentingan, namun hal yang menjadi krusial adalah penentuan tolak ukur pencapaian yang dapat dengan mudah dipahami dan bersifat implementasi.

Kementerian Lingkungan Hidup pada Tahun 2009 telah mengembangkan alat ukur yang mudah di pahami dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup sehingga menghasilkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indek ini terfokus pada media lingkungan air, Udara

dan lahan. IKLH adalah perwujudan parameter Lingkungan Hidup yang kompleks namun tetap mempertahankan makna esensi dari masing-masing indikator pada setiap Lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), rumusannya adalah sebagai berikut :

Untuk IKLH Kabupaten/Kota $(0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$

Perhitungan Pencapaian IKLH Tahun 2022.

IKLH diperoleh = $(0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$

= $(0,376 \times 66,83) + (0,405 \times 92,43) + (0,219 \times 70,21)$

= 25,13 + 37,43 + 15,36

IKLH = 77,94 (baik)

Keterangan :

1. IKU = Indeks Kualitas Udara
2. IKL = Indeks Kualitas Lahan
3. IKA = Indeks Kualitas Air

Status IKLH Kabupaten Pesisir Selatan berada pada angka 77.94. Hal ini menunjukkan bahwa IKLH Kabupaten Pesisir Selatan termasuk kategori baik. Parameter yang di uji pada IKA ini adalah untuk parameter fisika pH, TSS, dan TDS sedangkan parameter kimia BOD, COD dan Fosfat . Pemantauan Kualitas Air pada sumber air dilakukan paling sedikit 1 x 6 bulan di Musim Hujan dan Musim Kemarau. Pada peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 1 Tahun 2010 Pasal 31 menjelaskan bahwa pemantauan terhadap kualitas air dilakukan dengan tujuan untuk menentukan status mutu dari air sungai yang merupakan dasar untuk evaluasi terhadap pengaruh lingkungan sekitar.

Parameter yang diukur Dinas Lingkungan Hidup Pada Tahun 2022 antara lain : DO, BOD, COD, TSS, Fosfat, Caliform E.Coli dan Pemantauan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun pada bagian hulu dan hilir sungai di 8 (delapan) Sungai yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 2.67
Titik Pantau Pengambilan Sampel Pemantauan Kualitas Air
Tahun 2022

No	Sungai	Lokasi
1	Batang Tarusan	Kec. Koto XI Tarusan
2	Batang Bayag	Kec. Bayang
3	Batang Batang Kapas	Kec. Batang kapas
4	Batang Kambang	Kec. Lengayang
5	Batang Indera Pura	Kec. Pangkalan
6	Batang Tapan	Kec. BAB Tapan



Gambar 2.17. Pengujian Kualitas Air di Laboratorium UPD Lingkungan Hidup Kab.Pesisir Selatan

Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup juga didukung dengan Indikator (1) Indeks Kualitas Udara dan (2) Indeks Kualitas Lahan. Kedua indeks ini diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Program Kegiatan yang mendukung Pencapaian sasaran strategis 12 (Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup) adalah: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati. Program Pengelolaan Persampahan di berlakukan di seluruh pelosok kabupaten dengan membersihkan sampah dan mengumpulkan sampah serta mengangkut sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Program Keanekaragaman Hayati dengan memelihara, merawat dan menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 2.68
Perkembangan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2020–2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Capaian %		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Tanpa satuan	72,458	86,74	86,85	119,7	87,39	89,74

Analisis hasil capaian kinerja 3 tahun terakhir untuk indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan IKLH karena ada perubahan formula dan target kinerja yang diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan surat edaran No.SE.4/MenLHK/ Setjen/ KUM.14/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Berwawasan Lingkungan. Kemudian Perbandingan capaian 2021 ke Tahun 2022 mengalami peningkatan dengan hasil IKLH Baik. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Kota Lain Capaian Kinerja Dinas Perkimtan LH berada di posisi 2 terbaik di Sumatera Barat dengan posisi 1 adalah Kabupaten Pasaman dengan Capaian IKLH 78.07. Berikut dapat dilihat hasil capaian Kinerja Kabupaten Kota ses Sumatera Barat Tahun 2022.

No	Kabupaten/Kota	Provinsi	IKA	IKU	IKL	IKLH	Targ et	Rating
1	Kabupaten Agam	Sumatera Barat	61.28	90.94	48.01	70.39	67.8	BAIK
2	Kabupaten Dharmas Raya	Sumatera Barat	51.38	85.32	42.7	63.23	64.93	SEDAN G
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat	0	92.68	93.21	57.95	79.51	SEDAN G
4	Kabupaten Lima Puluh Kota	Sumatera Barat	55.63	92	62.53	71.87	71.02	BAIK
5	Kabupaten Padang Pariaman	Sumatera Barat	53.81	93.89	39.76	66.97	67.89	SEDAN G
6	Kabupaten Pasaman	Sumatera Barat	62.38	93.44	76.56	78.07	74.64	BAIK
7	Kabupaten Pasaman Barat	Sumatera Barat	61.25	94.36	46.81	71.5	68.74	BAIK

8	Kabupaten Pesisir Selatan	Sumatera Barat	66.83	92.43	70.21	77.94	72.45	BAIK
9	Kabupaten Sijunjung	Sumatera Barat	57.64	94.51	65.58	74.31	70.79	BAIK
10	Kabupaten Solok	Sumatera Barat	54.17	90.55	72.96	73.02	69.28	BAIK
11	Kabupaten Solok Selatan	Sumatera Barat	56.67	91.9	75.07	74.97	79.74	BAIK
12	Kabupaten Tanah Datar	Sumatera Barat	57.39	91.06	52.26	69.9	68.01	SEDAN G
13	Kota Bukittinggi	Sumatera Barat	30	87.89	22.38	51.77	56.8	SEDAN G
14	Kota Padang	Sumatera Barat	66.67	73.87	72.34	70.83	66.84	BAIK
15	Kota Padang Panjang	Sumatera Barat	46.07	91.29	56.18	66.6	72.64	SEDAN G
16	Kota Pariaman	Sumatera Barat	33.33	95.09	24.24	56.35	63.6	SEDAN G
17	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	55.14	93.11	25.78	64.09	58.75	SEDAN G
18	Kota Sawah Lunto	Sumatera Barat	52	87	37.01	62.89	65.7	SEDAN G
19	Kota Solok	Sumatera Barat	50.83	91.07	38.3	64.38	69.6	SEDAN G

Sebagai Monitoring dan Evaluasi dalam mencapai sasaran strategis diatas dilakukan Pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang telah diberikan rekomendasi izin Lingkungan yang diharapkan dari pengawasan ini Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup bisa melakukan pembinaan , sosialisasi sekaligus menindak lanjuti pengaduan yang terkait dengan masalah lingkungan, di samping itu dari hasil Monitoring ini Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup bisa melakukan pembinaan dan mengusulkan terkait dengan peningkatan Peringkat Perusahaan (proper) dan sosialisasi mengenai kewajiban perusahaan kepada lingkungan sekitar perusahaan dengan program CS dan melakukan pengendalian terhadap bahan Berbahaya dan Beracun(B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun(Limbah B3) melalui Program Pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun(B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun(Limbah B3)

Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH dan Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/Kota. Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPL. Izin ini dapat dilihat dari Dokumen Lingkungan dan SPPL yang sudah mendapat persetujuan dari DinasLingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Dokumen UKL-UPL sebanyak 52 (Lima Puluh Dua) dokumen terdiri atas usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Ruas Jalan, Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani dan lain-lain
2. Persetujuan SPPL sebanyak 10 (Sepuluh) buah yang terdiri atas usaha

dan/atau kegiatan Pembangunan Menara, Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK) Peningkatan Jaringan Irigasi dan lain-lain .

Indikator ini didukung oleh program Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan target anggaran Rp. 396,646,545 dan realisasi sebesar Rp 360,948,796 atau capaian 91%, berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 35.697.749 atau 9,9 %.

Adapun prestasi yang sudah di peroleh dari program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat dengan kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup, melalui pembinaan ke sekolah-sekolah dengan program Adiwiyata.

Pada tahun 2022 sekolah yang mendapat Adiwiyata Tingkat Kabupaten yaitu SMP Negeri 8 Koto XI Tarusan, SD Negeri 22 Palangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir, SMA Negeri 1 Pancung Soal. Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional yaitu UPT SMPN 3 Ranah Pesisir dan Sekolah Adiwiyata Tingkat Mandiri diraih oleh SMAN 3 Painan.



Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Mandiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sasaran 13 : Pesisir Selatan menjadi Daerah Tujuan Wisata Favorit di Pantai Barat Indonesia

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 13 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 2.69 berikut ini:

Tabel 2.69
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 13

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	1.200.000	942.240	78.52
2.	Lama tinggal wisatawan	Hari	1.25	1.25	100.00
Rata-rata Capaian					89,26

sumber : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga ; 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 13 sebesar 89,26%. Pencapaian sasaran strategis 13 termasuk predikat *Sangat Baik*.

2. Jumlah kunjungan wisatawan

Indikator Jumlah kunjungan wisatawan ini digunakan untuk menilai peran serta pemerintah dalam upaya meningkatkan jumlahwisatawan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara yang berkunjung ke daya tarik

wisata. Formulasinya Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara baik yang membayar maupun yang tidak membayar.

Pada tahun 2022 realisasi jumlah kunjungan wisatawan diambil dari pengunjung yang berkunjung ke destinasi wisata yang dijadikan sampel, diantaranya : Pantai Carocok Painan, Kawasan Mandeh, Jembatan Akar, Air Terjun Bayang Sani, Pulau Penyu Amping Parak, Pantai Pasir Putih Kambang, Pantai Pasar Lama Muaro Air Haji, Sako Tapan, Rumah Gadang Mande Rubiah dan Pantai Sambungo Silaut. Jumlah pengunjung yang berwisata ke Pesisir Selatan sebanyak 942.240 orang (78,52%) dari target sebanyak 1.200.000 orang. Jumlah pengunjung terdiri dari wisatawan nusantara sebanyak **942.240** orang dan wisatawan mancanegara sebanyak **124** orang.

Tabel 2.70
Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2022

No	Wisatawan Mancanegra (Wisman)	Wisatawan Nusantara (Wisnu)	Jumlah total
1	120	942.120	942.240

sumber : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga ; 2022

Banyaknya wisatawan yang berkunjung menjadikan sektor pariwisata berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk lebih jelasnya realisasi dan capaian kinerja jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.71 dibawah ini:

Tabel 2.71
Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Kunjungan
Wisatawan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	1. 200.000	942,240	78,52 %

sumber : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga ; 2022

Tabel 2.72
Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Kunjungan Wisatawan
Tahun2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian		
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	177.283	344.297	942.240	17,71%	34,43%	78,52%

sumber : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga ; 2022

Selama 3 tahun terakhir realisasi indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan yang datang ke Kabupaten Pesisir Selatan yaitu, tahun 2020 realisasi sekitar 177.283 orang, tahun 2021 jumlah realisasi Wisatawan mencapai 344.297 orang, sedangkan pada tahun 2022 berjumlah 942.240 orang, dengan capaian tahun 2020 sebesar 17,71 % tahun 2021 sebesar 34,43% dan tahun 2022 sebesar 78,52 %.

Tabel 2.73
Perbandingan realisasi Capaian Indikator Jumlah Kunjungan
Wisatawan Tahun 2022 dengan standar provinsi
Tahun 2020 - 2022

No	Wilayah	2020	2021	2022
1	Kabupaten Pesisir Selatan	177.283	344.297	942.240
2	Provinsi Sumatera Barat	8.052.742	4.806.599	4.783.664

sumber : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga ; 2022

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perbandingan jumlah kunjungan wisatawan kabupaten Pesisir Selatan telah mengalami peningkatan selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Faktor-faktor yang Mendukung Keberhasilan Pariwisata :

1. Adanya pelanggaran aturan pembatasan Covid-19 yang telah dimulai sejak tahun 2022, dimana pembatasan perjalanan bagi turis lokal maupun turis mancanegara sudah tidak banyak ditemukan pembatasan secara ketat.
2. Semakin banyaknya kelompok sadar wisata (Pok darwis) di kabupaten Pesisir Selatan yang berjumlah 30 pok darwis dengan menyiapkan iven berbasis potensi desa.
3. Promosi yang dilaksanakan dengan melibatkan media sosial dan internet.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata secara umum yaitu :

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara, menjaga dan memanfaatkan potensi wisata.
- b. Inflasi yang terjadi dampak kenaikan BBM.
- c. Kurangnya iven untuk promosi dan publikasi pariwisata.
- d. Masih terbatasnya SDM yang memiliki keahlian dalam bidang kepariwisataan terutama dalam penguasaan bahasa asing.

Dalam DPA 2022, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga memperoleh alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan di bidang pariwisata sebesar Rp 9.210.094.110. Anggaran tersebut terdistribusi ke dalam komponen dan sub komponen dengan bentuk kegiatan yang telah dilakukan meliputi penyediaan sarana prasarana pariwisata dan olahraga serta perencanaannya, peningkatan sumber daya manusia bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dan iven pariwisata.

Sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga selalu berupaya untuk meningkatkan capaian kinerja sesuai target dalam dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) yang ditetapkan pada setiap awal tahunnya. Namun demikian, upaya tersebut disadari tidaklah mudah, terutama karena dipengaruhi oleh dinamika lingkungan internal maupun eksternal organisasi sebagai bagian dari

wujud peningkatan pelayanan kepada pemangku kepentingan utama (stake holders).

Melalui mekanisme evaluasi atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh segenap jajaran pimpinan unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, telah dilakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran, yang berpengaruh pada capaian kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. Perubahan ini disebabkan oleh pengaruh kondisi keuangan daerah yang menyebabkan perlunya perubahan tersebut. Hal ini dapat dipahami sebagai arah kebijakan untuk melakukan perbaikan, inovasi dan kreativitas organisasi dalam mencapai peningkatan capaian kinerja.

Indikator ini ditunjang oleh program *Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata* Dengan target anggaran Rp. 8.148.019.752 Dan realisasi sebesar 8.013.886.560 atau capaian 98,35% berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program *Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata* terdapat efisiensi anggaran sebesar 134.113.192 atau 1,64 %.

Adapun prestasi yang di peroleh adalah peringkat III Daya Tarik Wisata Halal Tahun 2022 Masjid Samudera Illahi di Kawasan Pantai Carocok Painan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tanggal 27 September 2022 di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Barat.



3. Lama tinggal wisatawan

Lama tinggal wisatawan yang berwisata ke Kabupaten Pesisir Selatan masih statis/sama seperti tahun sebelumnya, selama 1.25 hari. Kondisi ini berkorelasi dengan tingkat hunian kamar yang tidak sebanding dengan ketersediaan kamar yakni sekitar 15%. Jumlah hunian kamar ini juga dipengaruhi oleh masih banyak penginapan yang tidak melaporkan jumlah kamar yang terhuni oleh para tamunya dengan berbagai alasan. Selain itu juga dipengaruhi oleh jumlah event pariwisata berskala besar yang berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan ke Pesisir Selatan.

Pada tahun 2022, realisasi lama tinggal wisatawan di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 1.25 hari dari 942.240 Jumlah kunjungan wisatawan. Jumlah

kunjungan ini tidak sampai pada target yang ditetapkan yaitu 1.200.000 orang. Hal ini disebabkan karena kurangnya event untuk promosi dan publikasi pariwisata serta semakin banyaknya tempat objek wisata yang ditawarkan daerah lain serta semakin berlomba-lombanya kabupaten/kota lain dalam mengembangkan pariwisata, sehingga kunjungan wisatawan yang datang Kabupaten Pesisir Selatan menjadi terbagi.

Perhitungan lama tinggal wisatawan dengan mempertimbangkan penghitungan kapasitas/kemampuan hunian pertahun. Kemampuan hunian tersebut seperti hotel, homestay dan wisman di Kabupaten Pesisir Selatan dapat menampung sebanyak 248.565 orang dengan jumlah penginapan sebanyak 124 buah dan jumlah kamar sebanyak 36.206 kamar. Untuk lebih jelasnya realisasi dan capaian kinerja jumlah Lama tinggal wisatawan di Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.71 dibawah ini:

Tabel 2.74
Realisasi dan Capaian Indikator Lama Tinggal Wisatawan
Tahun 2022 di Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1,25	1,25	100

sumber : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga ; 2022

Lama tinggal wisatawan dapat tercapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan kamar pada hotel dan homestay dapat memenuhi jumlah wisatawan yang berkunjung. Sebagian besar wisatawan yang berkunjung ke Pesisir Selatan lebih banyak menginap di Kota Padang. Hal ini disebabkan karena ketersediaan akomodasi dan jarak tempuh yang relatif tidak jauh dari Kota Painan. Sementara itu pertumbuhan penginapan, homestay dan resort di Kabupten Pesisir Selatan cukup pesat terutama di Kawasan Mandeh pada beberapa tahun terakhir.

Jumlah kunjungan wisatawan dan akomodasi sangat berpengaruh pada pengembangan industri pariwisata dan pendapatan asli daerah. Dengan adanya dukungan alokasi dana melalui event, promosi dan publikasi melalui media serta pengembangan dan pemeliharaan fasilitas di destinasi wisata maka jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal memberikan kontribusi positif dalam pendapatan asli daerah.

Tabel 2.75
Realisasi Indikator Kinerja Lama Tinggal Wisatawan
Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian		
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Lama Tinggal Wisatawan	hari	1,5	1,25	1,25	120%	100%	100%

sumber : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga ; 2022

Selama 3 tahun terakhir realisasi indikator Lama Tinggal Wisatawan yang datang ke Kabupaten Pesisir Selatan cenderung turun yaitu, tahun 2020 realisasi sebesar 1,5 hari sedangkan pada tahun 2021 jumlah realisasi mencapai 1,25 hari, dan pada tahun 2022 berjumlah 1,25 hari, dengan capaian tahun 2020 sebesar 120 % tahun 2021 sebesar 100% dan tahun 2022 sebesar 100 %.

Tabel 2.76
Perbandingan realisasi Capaian Indikator Lama Tinggal
Wisatawan Tahun 2022 dengan standar provinsi
Tahun 2020 - 2022

No	Wilayah	2020	2021	2022
1	Kabupaten Pesisir Selatan	1,5	1,25	1,25
2	Provinsi Sumatera Barat	2,9	1,45	1,24

sumber : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga ; 2022

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator Lama Tinggal wisatawan kabupaten Pesisir Selatan cenderung fluktuatif.

Faktor-faktor yang Mendukung Keberhasilan Pariwisata :

1. Semakin banyaknya Pok darwis di setiap lokasi-lokasi wisata sehingga pengunjung wisata bisa di layani dengan baik.
2. Promosi yang dilaksanakan sudah baik dengan melibatkan media sosial dan internet.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata secara umum yaitu :

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara, menjaga dan memanfaatkan potensi wisata
- b. Kurangnya partisipasi investor dalam pengembangan objek objek wisata. Hal ini disebabkan karena sulitnya proses pembebasan lahan, aturan atau regulasi yang belum jelas tentang izin pengembangan usaha dalam bidang kepariwisataan
- c. Masih terbatasnya SDM yang memiliki keahlian dalam bidang kepariwisataan terutama dalam penguasaan bahasa asing.

Strategi/ upaya pemecahan:

1. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga, memelihara, dan memanfaatkan potensi wisata yang ada di sekitar mereka.
2. Memberikan berbagai kemudahan kepada pihak ketiga yang berniat menanamkan modalnya di sektor pariwisata. Kemudahan yang dimaksud bisa dalam bentuk memangkas tingkat hirarki perizinan, memberikan tarif yang jelas dan pasti mengenai biaya pengurusan perizinan, mengajak masyarakat untuk memanfaatkan rumahnya menjadi home stay.
3. Mengembangkan hasil kerajinan /produksi rumah tangga untuk menjadi souvenir daerah
4. Memberikan pelatihan berbahasa asing untuk menanti tamu wisawawan asing.

Indikator ini didukung oleh program *Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata* Dengan target anggaran Rp. 1.062.074.358 Dan realisasi sebesar Rp. 952.115.310 atau capaian 89,64% berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program *Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif* terdapat efisiensi anggaran sebesar 109.959.048 atau 10,35 %.

Sasaran 14 : Berkembangnya Ekonomi Kreatif

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 14 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 2.77 berikut ini:

Tabel 2.77
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 14

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah omset usaha ekonomi kreatif	Milyar Rp.	18	16	88,89
Rata-rata Capaian					88,89

sumber : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga ; 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 14 sebesar 88,89%. Pencapaian sasaran strategis 14 termasuk predikat *Sangat Baik*.

1. Jumlah omset usaha ekonomi kreatif

Jumlah omset usaha ekonomi kreatif yang ada di Pesisir Selatan berasal dari beberapa usaha yang tersebar di 15 kecamatan, baik yang tergabung dalam bentuk kelompok maupun individu. Pelaku ekonomi kreatif Pesisir Selatan terdiri dari Sub sektor kerajinan, sub sektor fashion, sub sektor kuliner, sub sektor film, animasi dan video, dan sub sektor fotografi. Realisasi omset pada tahun 2022 sebesar Rp 16 Milyar dari target yang direncanakan sebesar Rp 18 Milyar. Omset terbesar ekonomi kreatif didominasi oleh sub sektor kuliner, sub sektor kerajinan dan fashion. Hampir 95 % omset usaha ini berasal dari ketiga sub sektor tersebut. Sedangkan sub sektor yang sedang berkembang pesat saat ini adalah sub sektor fotografi dan subsektor film, animasi dan video. Perkembangan tersebut disebabkan oleh semakin banyaknya anak muda yang bekerja di bidang industri ekonomi kreatif seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital dan internet.

Pembinaan pelaku ekonomi kreatif dilakukan melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga baik melalui dana APBD maupun APBN. Beberapa bentuk kegiatan pelatihan yang sudah dilaksanakan diantaranya:

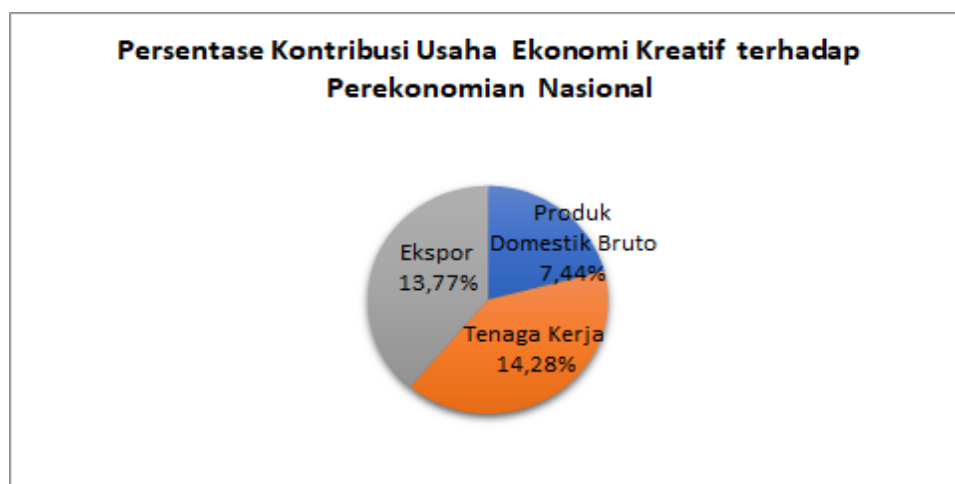
- a. Pelatihan digitalisasi: Branding pemasaran dan penjualan pada desa wisata, Homestay, kuliner, souvenir dan fotografer
- b. Pelatihan Pengelolaan Usaha Homestay/Pondok Wisata
- c. Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner
- d. Pelatihan Pemandu Ekowisata
- e. Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata
- f. Pelatihan Sadar Wisata

Tabel 2.78
Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Omset Usaha Ekonomi Kreatif
Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian		
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jumlah omset usaha ekonomi kreatif	Milyar Rp.	-	7,2	16	-	60%	88,89 %

sumber : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga ; 2022

Dari tabel diatas dapat di jelaskan bahwa selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, pertumbuhan Jumlah Omset Usaha Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Selatan sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2021 omset ekonomi kreatif sebesar Rp. 7,2 Milyar dan meningkat menjadi Rp 16 Milyar pada tahun 2022.



Gambar 2.18. Kontribusi Usaha Ekonomi Kreatif terhadap Perekonomian Nasional

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), subsektor ekonomi kreatif memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional dengan menyumbangkan 7,44% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), 14,28% tenaga kerja, dan 13,77% ekspor. Sumatera Barat mempunyai beberapa industri kreatif yang tumbuh berbasis budaya setempat yang didorong oleh industri kepariwisataan tetapi dukungan kebijakan pengembangannya belum ada. Arah kebijakan industri kreatif perlu mempertimbangkan keterkaitan antar sektor ekonomi dan rantai pasok (supply chain) untuk peningkatan daya saing dan kesinambungan. Untuk Kabupaten Pesisir Selatan sendiri terjadi peningkatan omset ekonomi kreatif seiring dengan terkendalinya pandemi Covid-19. Perekonomian semakin menggeliat dan usaha-usaha masyarakat khususnya ekonomi kreatif kembali bangkit.

Adapun faktor keberhasilan pencapaian jumlah omset ekonomi kreatif di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 yaitu:

1. Fasilitasi ruang pemasaran bagi pelaku ekonomi kreatif berupa tempat berdagang seperti TIC dan Taman Spora
2. Sinergi program pelaku ekonomi kreatif dengan Pemda berupa promosi hasil usaha pelaku Ekonomi Kreatif di berbagai media
3. Pelatihan peningkatan kapasitas bagi pelaku ekonomi kreatif
4. Peningkatan kualitas produk melalui fasilitasi sertifikasi produk
5. Fasilitasi pihak perbankan kepada pelaku usaha ekonomi kreatif.

Faktor hambatan terhadap pencapaian indikator jumlah omset usaha ekonomi kreatif yaitu :

1. Kurang optimalnya pembinaan kepada pelaku ekonomi kreatif
2. Kurangnya perhatian pada kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif dalam skala kebijakan
3. Inflasi sebagai dampak dari kenaikan BBM.

Dalam DPA 2022, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga memperoleh alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan ekonomi kreatif sebesar Rp 1.062.074.358. Anggaran tersebut terdistribusi ke dalam komponen dan sub komponen dengan bentuk kegiatan yang telah dilakukan meliputi peningkatan sumber daya manusia bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, pembinaan komunitas ekonomi kreatif serta pembelian produk ekonomi kreatif, terbatasnya anggaran untuk ekonomi kreatif ini tidak terlepas dari skala prioritas anggaran yang ditetapkan.

Indikator ini didukung oleh program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan target anggaran Rp. 1.062.074.358 dan realisasi sebesar Rp 952.115.310 atau capaian 89,65%, berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 109.959.048 atau 10,35%. Berikut beberapa prestasi yang diperoleh pelaku usaha pada tahun 2022:

Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk Batik Loempo yang diadakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Padang tanggal 9 Desember 2022

- Sertifikasi Barista untuk Klinkink Coffee dan Khawla Coffee Roastery yang diadakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Padang tanggal 3 November 2022



- Sertifikasi CHSE untuk Rumah Makan/Penginapan Dena dan Pulau Setan diadakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tanggal 2 Desember 2022



Sasaran 19 : Meningkatnya Akses Layanan Bidang Pendidikan

Dalam rangka mewujudkan sasaran Meningkatnya Akses Layanan Bidang Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan 2 (dua) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 15 yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 2.79. berikut ini:

Tabel 2.79
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 15

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Harapan lama sekolah	Tahun	13.40	13.35	99.63
2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8.32	8.43	101,32
Rata-rata Capaian					100,47

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 15 sebesar 100,47%. Pencapaian sasaran strategis 15 termasuk predikat *Sangat Baik*.

1. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah merupakan perhitungan untuk mengukur lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-

umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Pada tahun 2022, target indikator Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan adalah 13,40 tahun dan terealisasi sebesar 13,35 tahun dengan capaian kinerja sebesar 99,63%. Berikut table 2.80 target dan realisasi Harapan Lama Sekolah tahun 2022:

Tabel 2.80
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,40	13,35	99,63

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa harapan lama sekolah tahun 2022 yang semula ditargetkan sebesar 13,40 tahun terealisasi sebesar 13,35 tahun atau dengan capaian 99,63%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator ini dinilai kategori *sangat baik*.

Dibandingkan tahun 2020 sampai 2022, Harapan lama sekolah Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan. Hal ini dapat di lihat pada tabel 2.81 berikut ini:

Tabel 2.81
Perkembangan Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah
Tahun 2021–2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Capaian %		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,32	13,33	13,35	98,63	99,79	99,63

sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan, Tahun 2022

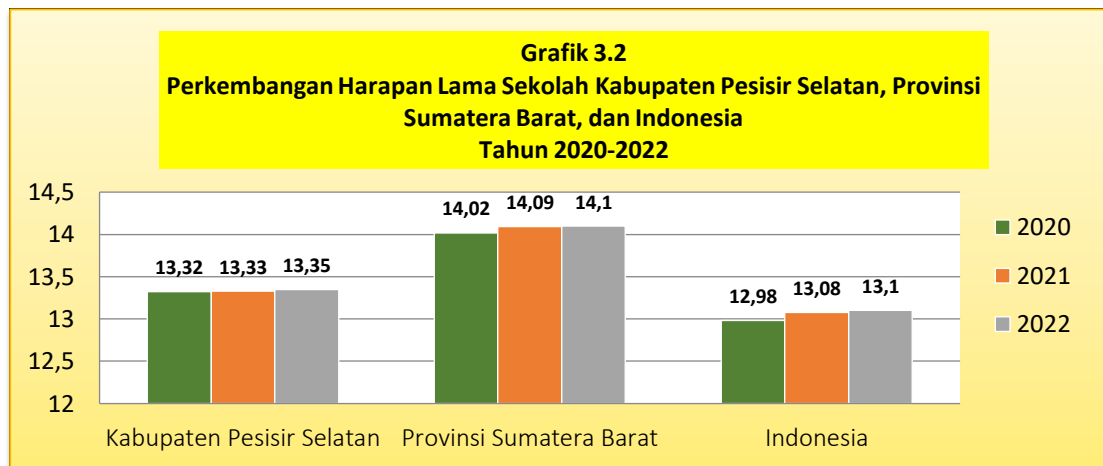
Berikut data realisasi Harapan lama Sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan, provinsi Sumatera Barat dan Nasional pada tahun 2020-2022:

Tabel 2.82
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pesisir selatan
Tahun 2020 – 2022

No	Wilayah	2020	2021	2022
1	Kabupaten Pesisir Selatan	13,32	13,33	13,35
2	Provinsi Sumatera Barat	14,02	14,09	14,10
3	Indonesia	12,98	13,08	13,10

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan , 2022





Gambar 2.20. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, terlihat bahwa Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat yang sangat tinggi akan perlunya pendidikan bahkan sampai ke jenjang perguruan tinggi.

Berikut Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2020–2022:

Tabel 2.83
Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2020–2022

Kabupaten/Kota		Tahun		
		2020	2021	2022
(1)		(3)	(4)	(5)
Kabupaten				
1.	Kepulauan Mentawai	12,82	12,89	12,89
2.	Pesisir Selatan	13,32	13,33	13,35
3.	Solok	13,04	13,05	13,30
4.	Sijunjung	12,37	12,38	12,64
5.	Tanah Datar	14,33	14,34	14,59
6.	Padang Pariaman	13,67	13,68	13,93
7.	Agam	13,87	13,88	13,88
8.	Lima Puluh Kota	13,29	13,30	13,40
9.	Pasaman	12,80	12,81	13,05
10.	Solok Selatan	12,71	12,72	12,73
11.	Dharmasraya	12,43	12,44	12,51
12.	Pasaman Barat	13,61	13,68	13,69
Kota				
13.	Padang	16,52	16,53	16,54
14.	Solok	14,32	14,33	14,34
15.	Sawahlunto	13,17	13,18	13,42
16.	Padang Panjang	15,06	15,07	15,07
17.	Bukittinggi	14,97	14,98	14,99
18.	Payakumbuh	14,26	14,27	14,29
19.	Pariaman	14,54	14,55	14,61
Sumatera Barat		14,02	14,09	14,10

Sumber: Pesisir Selatan Dalam Angka, 2022

Peningkatan pendidikan terlihat pada tabel dan gambar perkembangan Harapan Lama Sekolah, dimana untuk wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 sebesar 13,32, tahun 2021 sebesar 13,33 naik menjadi 13,35 pada tahun 2022 dan untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 sebesar 14,02, tahun 2021 sebesar 14,09 naik menjadi 14,10 di tahun 2022 sedangkan untuk wilayah Indonesia pada tahun 2020 sebesar 12,98, tahun 2021 sebesar 13,08 menjadi 13,10 di tahun 2022. Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Lainnya indikator Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan berada di posisi ke- 7 (tujuh) setelah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Adapun faktor - faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja harapan Lama Sekolah adalah sebagai berikut :

a. Faktor Keberhasilan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendukung setiap guru dan siswa dalam menyalurkan kemampuan, minat dan bakat pada Program Pengelolaan Pendidikan, yaitu pada kegiatan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa. Dengan anggaran pada pembinaan SD dan SMP sebesar Rp. 298.551.540, dilaksanakan penyelenggaraan lomba-lomba baik akademis maupun non akademis, seperti, KSN, SOSN, dan FLS2N. Selanjutnya dilakukan pembinaan berkelanjutan siswa berprestasi pada tahun 2022 target dan realisasi sebanyak 6 orang.

b. Faktor Kegagalan

1. yang pertama keinginan untuk mempertahankan keseimbangan hidup bersama-sama
2. yang kedua pertimbangan atas lawan, kelompok oposisi dimana perubahan akan terjadi dari dalam maupun dari luar di suatu organisasi, baik secara perseorangan maupun kelompok
3. dan yang terakhir ketidakmampuan untuk mengadakan perubahan.

Kegiatan Penunjang dalam meningkatkan daya saing pendidikan adalah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa. Untuk mewujudkan kegiatan dimaksud, khususnya kegiatan Lomba, Festival dan Olimpiade tahun 2022 telah disusun berbagai kebijakan dan strategi yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan atau kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi, baik di tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional. Kegiatan di tingkat Nasional meliputi Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN), *Kompetisi Sains Nasional (KSN)*. Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada kegiatan tingkat Provinsi dan tingkat nasional sehingga setiap tahun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan menyeleksi beberapa cabang/jenis lomba yang diperuntukan siswa SD se-Kabupaten Pesisir Selatan .

Maksud kegiatan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki pada cabang mata pelajaran, olahraga dan seni serta memberikan wadah kepada siswa dalam meningkatkan

prestasinya mulai dari tingkat sekolah, Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Tujuan kegiatan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama adalah menyeleksi siswa berprestasi dari cabang mata pelajaran, olahraga dan seni yang nantinya akan mewakili Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengikuti kegiatan serupa di tingkat yang lebih tinggi.

Indikator ini didukung oleh program Pengelolaan Pendidikan dengan target anggaran Rp.95.950.130.443,- dan realisasi sebesar Rp. 93.517.699.199,- atau capaian 99,63 %. berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program Pengelolaan Pendidikan terdapat efisiensi anggaran sebesar 2.432.431.244 ,- atau 2,5 %

2. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Pada tahun 2022, Kabupten Pesisir Selatan menargetkan rata-rata lama sekolah 8,32 tahun dan terealisasi sebesar 8,43 tahun dengan capaian 101,32%. Berikut tabel 2.84 target dan realisasi rata rata lama sekolah tahun 2022:

Tabel 2.84
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Rata-rata Lama Sekolah
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,32	8,43	101,32 %

sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan, Tahun 2022

Dari di atas dapat dijelaskan bahwa rata rata lama sekolah tahun 2022 ditargetkan sebesar 8,32 tahun, terealisasi sebesar 8,43 tahun atau dengan capaian 101,32%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator ini dinilai sangat berhasil dengan kategori **sangat baik**.

Dibandingkan tahun 2021 sampai 2022, rata rata lama sekolah Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan, seperti tabel 2.85 berikut ini:

Tabel 2.85
Perkembangan Indikator Kinerja Rata-rata Lama Sekolah
Tahun 2020–2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Capaian %		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,49	8,27	8,32	97,29	99,76	101,32

Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Lainnya, Rata-rata lama Sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan berada pada posisi ke-12 setelah Kabupaten Tanah Datar. Berikut tabel 2.86, perbandingan rata-rata lama sekolah 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2020–2022:

Tabel 2.86
Perbandingan Rata rata Lama Sekolah
Kabupaten/Kota Tahun 2020–2022

Kabupaten/Kota		Tahun		
		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
Kabupaten				
1.	Kepulauan Mentawai	7.09	7,20	7,48
2.	Pesisir Selatan	8.26	8,27	8,43
3.	Solok	7.86	7,87	7,89
4.	Sijunjung	8.11	8,12	8,30
5.	Tanah Datar	8.61	8,62	8,90
6.	Padang Pariaman	8.87	7,88	8,16
7.	Agam	8.96	8,97	8,98
8.	Lima Puluh Kota	7.99	8,07	8,08
9.	Pasaman	8.09	8,10	8,11
10.	Solok Selatan	8.28	8,32	8,41
11.	Dharmasraya	8.47	8,55	8,56
12.	Pasaman Barat	8.19	8,27	8,55
Kota				
13.	Padang	11.58	11,59	11,60
14.	Solok	11.03	11,04	11,35
15.	Sawahlunto	10.17	10,32	10,43
16.	Padang Panjang	11.62	11,63	11,92
17.	Bukittinggi	11.33	11,34	11,63
18.	Payakumbuh	10.73	10,81	10,82
19.	Pariaman	10.59	10,67	10,78
Sumatera Barat		8.99	9,07	9,18

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 2022

Indikator ini didukung oleh program Pengelolaan Pendidikan dengan target anggaran Rp 35.284.783.786,- dan realisasi sebesar Rp. 34.475.393.770,- atau capaian **97,71 %**. berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program Pengelolaan Pendidikan terdapat efisiensi anggaran sebesar **Rp. 809.390.016,-** atau **2,29 %**

Sasaran 16 : Meningkatnya Daya Saing Pendidikan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 16 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2.87
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 16

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat propinsi	orang	4	2	50.00
2	Indek Pembangunan literasi	tanpa satuan	6.643	7.172	107.96
Rata-rata Capaian					78,98

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 16 sebesar 78,98%. Pencapaian sasaran strategis 16 termasuk predikat *Baik*.

1. Jumlah Tenaga Pendidik dan Siswa yang Berprestasi Minimal Tingkat Propinsi

Pada tahun 2022, target indikator Jumlah Tenaga Pendidik dan Siswa yang Berprestasi Minimal Tingkat Propinsi adalah 4 orang dan terealisasi sebesar 2 orang dengan capaian kinerja sebesar 50,00%. Berikut tabel 2.88 target dan realisasi Jumlah Tenaga Pendidik dan Siswa yang Berprestasi Minimal Tingkat Propinsi tahun 2022:

Tabel 2.88
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Tenaga Pendidik dan Siswa yang Berprestasi Minimal Tingkat Propinsi Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Tenaga Pendidik dan Siswa yang Berprestasi Minimal Tingkat Propinsi	Tahun	4	2	50.00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi tingkat propinsi tahun 2022 ditargetkan sebesar 4 orang, terealisasi sebesar 2 orang atau dengan capaian 50,00%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator ini dinilai kategori cukup.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Perumusan kebijakan untuk mencapai tujuan dari Indikator Kinerja telah disusun dalam rencana strategis guna meningkatkan akses pendidikan dan meningkatnya daya saing pendidikan melalui Program Pengelolaan Pendidikan.

Berikut data jumlah guru se Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.89
Jumlah Guru Se-Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Guru		
		TK	SD	SMP
1	Silaut	21	144	64
2	Lunang	36	179	72
3	Basa Ampek Balai	21	156	61
4	Ranah Ampek Hulu	6	143	70
5	Pancung Soal	51	276	100
6	Airpura	31	171	101
7	Linggo Sari Baganti	51	482	222
8	Ranah Pesisir	36	369	145

9	Lengayang	58	586	228
10	Sutera	51	525	265
11	Batang Kapas	12	350	160
12	IV Jurai	41	536	245
13	Bayang	41	458	131
14	Bayang Utara	7	94	44
15	Koto XI Tarusan	37	474	253
	Jumlah	500	4.943	2.161

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk mengetahui perbandingan perkembangan realisasi indikator kinerja jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat provinsi selama 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.90
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian	
			2021	2022	2021	2022
1,1	Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal Tk. Provinsi	Orang	1	2	50%	50%

Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis “Meningkatnya Daya Saing Pendidikan” pada tahun 2022 salah satunya melalui pencapaian jumlah tenaga pendidik dan siswa berprestasi ke tingkat Nasional dengan target sebanyak 4 dan realisasi sebanyak 2 orang. Dibandingkan dengan capaian tahun 2021, angka ini mengalami peningkatan dimana sebelumnya ditargetkan sebanyak 2 orang dan terealisasi sebanyak 1 orang.

Sasaran Akses Pendidikan diukur dengan 4 Indikator yaitu Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (PAUD, SD, SMP) dan Angka Partisipasi Murni (SD, SMP). Angka Harapan Lama Sekolah sudah sesuai target yaitu 13,33 tahun dimana capaian realisasinya adalah 100%. Angka Rata-rata Lama sekolah memiliki persentase 100,83%. Berikut adalah tabel sasaran dan indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022:

Tabel 2.91
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RELISASI
1	Meningkatnya Akses Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,33 Tahun	13,33
		Rata-rata Lama Sekolah	8,32 Tahun	8,43
		APK PAUD	62,92%	63,48
		APK SD	110,52%	101,63
		APK SMP	86,48%	102,28
		APM SD	99,53%	91,27%
		APM SMP	80,43%	82,6%
2	Meningkatnya Daya Saing Pendidikan	Lembaga Pendidik SD dan SMP akreditasi A	65%	11,13%
		inovasi pendidikan	1 inovasi	1 inovasi

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Angka Partisipasi Kasar SD memiliki target sebesar 110,52% namun realisasinya yaitu sebesar 101,63%, sedangkan Angka Partisipasi Kasar SMP memiliki target sebesar 86,48% dan terealisasi sebesar 102,28%, Namun capaian tersebut lebih tinggi dibanding dengan APK SMP Provinsi dan Nasional. Angka Partisipasi Kasar SD dan SMP merupakan ukuran yang menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. APK dihitung dengan membandingkan antara jumlah siswa SD SMP yang bersekolah di Kabupaten Pesisir Selatan dengan jumlah penduduk usia 7-15 tahun.

Angka Partisipasi Murni SD (APM SD) dalam target yaitu 99,53%, terealisasi 91,27%, untuk Angka Partisipasi Murni SMP (APM SMP) diatas target yaitu 80,43%, terealisasi 82,6%. Dimana untuk Angka Partisipasi Murni SD, persentase capaian realisasinya 90,84% dan untuk Angka Partisipasi Murni SMP, persentase capaian realisasinya 102,86% .

Berikut data perbandingan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP Kabupaten Pesisir Selatan dengan Provinsi Sumatera barat dan Nasional seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2.92
Perbandingan APK di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dan Nasional

No	Angka Partisipasi Kasar	Kab. Pesisir Selatan	Sumatera Barat	Nasional
1	SD	99,13 %	101,52 %	100,74 %
2	SMP	99,99 %	105,34 %	102,17 %

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kemdikbud 2021-2022

Berikut data perbandingan capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SMP Kabupaten Pesisir Selatan dengan Provinsi Sumatera barat dan Nasional seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2.93
Perbandingan APM di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dan Nasional

No	Angka Partisipasi Murni	Kab. Pesisir Selatan	Sumatera Barat	Nasional
1	SD	89,00 %	91,49 %	91,84 %
2	SMP	74,95 %	79,54 %	76,13 %

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kemdikbud 2021-2022

Dari kedua tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa perbandingan APK dan APM tingkat Kabupaten Pesisir Selatan memiliki persentase yang kecil di bandingkan Sumatera Barat dan Nasional.

Beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah agar Kualitas pendidikan menuju ke kualitas yang semakin baik. Salah satu upaya tersebut antara lain yaitu dengan memperhatikan etika dan keterampilan dalam pembentukan norma dan nilai di sebuah sekolah. Untuk melakukan perubahan tidak lepas dari peran sekolah baik guru maupun kepala sekolah hendaknya dapat menciptakan visi perubahan sehingga menciptakan arah yang jelas, dengan mengkomunikasikan kemungkinan yang akan terjadi di sekolah dan peluang potensial kepada warga sekolah untuk dimanfaatkan guna memajukan sekolah.

Dukungan kepada setiap guru dan siswa dalam menyalurkan kemampuan, minat dan bakat disalurkan melalui Program Pengelolaan Pendidikan, yaitu pada kegiatan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa. Dengan anggaran pada pembinaan SD dan SMP sebesar Rp. 298.551.540, dilaksanakan penyelenggaraan lomba-lomba baik akademis maupun non akademis, seperti, KSN, SOSN, dan FLS2N. Selanjutnya dilakukan pembinaan berkelanjutan siswa berprestasi pada tahun 2022 target dan realisasi sebanyak 6 orang.

Beberapa Kegiatan Penunjang dalam meningkatkan daya saing pendidikan adalah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa. Untuk mewujudkan kegiatan dimaksud, khususnya kegiatan Lomba, Festival dan Olimpiade tahun 2022 telah disusun berbagai kebijakan dan strategi yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan atau kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi, baik di tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional. Kegiatan di tingkat Nasional meliputi Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN), *Kompetisi Sains Nasional (KSN)*. Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada kegiatan tingkat Provinsi dan tingkat nasional sehingga setiap tahun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan menyeleksi beberapa cabang/jenis lomba yang diperuntukan siswa SD se-Kabupaten Pesisir Selatan .

Maksud kegiatan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki pada cabang mata pelajaran, olahraga dan seni serta memberikan wadah kepada siswa dalam meningkatkan prestasinya mulai dari tingkat sekolah, Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Tujuan kegiatan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama adalah menyeleksi siswa berprestasi dari cabang mata pelajaran, olahraga dan seni yang nantinya akan mewakili Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengikuti kegiatan serupa di tingkat yang lebih tinggi.

2. Indeks Pembangunan Literasi

Indek Pembangunan Literasi adalah sebuah instrumen pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Berikut data Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Tenaga Pendidik dan Siswa yang Berprestasi Minimal Tingkat Propinsi seperti pada tabel 2.94

Tabel 2.94
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Tenaga Pendidik
Dan Siswa yang Berprestasi Minimal Tingkat Propinsi
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian

1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Tanpa Satuan	6,60	7,17	108.00
----	--	--------------	------	------	--------

Data perkembangan indikator indeks pembangunan literasi di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.95
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Jenis Pengunjung, 2022

Jenis Pengunjung/ Type Visitor		Jumlah/ Total
(1)		(2)
1	Umum	19,016
2	SD	9,651
3	SMP	7,717
4	SMA	17,418
5	Mahasiswa	5,952
6	PNS/Guru	5,376
Jumah/Total		2022 65,130
		2021 61,754
		2020 15,258

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan

Tabel. 2.96
Jumlah Perpustakaan Menurut Jenis Perpustakaan dan Kecamatan
di Kabupaten Pesisir Selatan, 2022

Kecamatan/ Sub-District		Jenis Perpustakaan /Kind or Library					Jumlah Total
		Perpustakaan Umum Daerah/ Regional Public Library	Perpustakaan Sekolah / School Library	Taman Bacaan Masyarakat	Perpustakaan Masjid	Perpustakaan Nagari	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Silaut		11	2	21	10	44
2	Lunang		20	2	21	10	53
3	Basa Ampek Balai Tapan		13	1	20	10	44
4	Ranah Ampek Hulu Tapan		12	1	12	10	35
5	Pancung Soal		17	-	24	10	51
6	Airpura		16	-	16	10	42
7	Linggo Sari Baganti		33	1	56	16	106
8	Ranah Pesisir		30	2	46	10	88
9	Lengayang		53	1	76	9	139
10	Sutera		40	3	43	12	98
11	Batang Kapas		34	3	34	9	80
12	IV Jurai	1	46	4	46	20	116
13	Bayang		42	2	41	17	102

14	IV Nagari Bayang Utara		10	1	15	6	32
15	Koto XI Tarusan		43	2	38	23	106
	Jumlah /Total	2022	1	420	25	509	1,137
		2021	1	420		509	1,136
		2020	1	404	24	509	1,120

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan

Tabel 2.97
Jumlah judul Buku Perpustakaan Umum Daerah
Kab. Pesisir Selatan Menurut Jenis Buku Tahun 2022

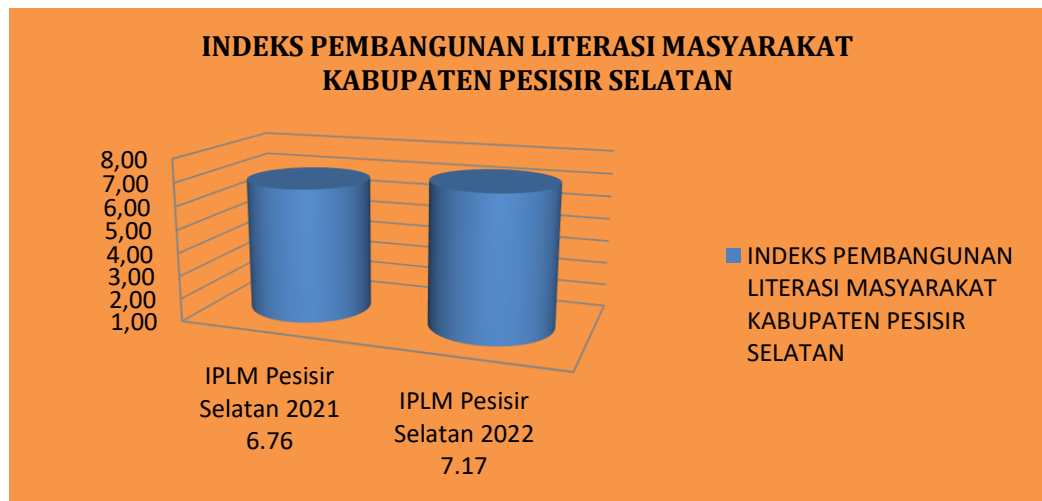
Jenis Buku/Type of Books		Jumlah Judul Buku / Number of Title	Jumlah Eksemplar / Number of Copies
(1)		(2)	(3)
1	Karya Umum	2,158	4,407
2	Filsafat	168	672
3	Agama	487	1,403
4	Kesenian, Olahraga	209	419
5	Sastra	278	563
6	Sejarah	217	843
7	Ilmu Terapan	1,779	3,662
8	Teknik Kesehatan	734	1,491
9	Ilmu Ssial	865	1,791
10	Bahasa	902	1,806
11	Koleksi Referensi	107	419
12	Koleksi SMA	185	743
13	Koleksi SMP	135	427
14	Koleksi SD	135	270
15	Fiksi	1,006	2,229
	Jumah/Total	2022	9,365
		2021	21,145
		2020	20,545
			8,537
			19,565

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan

Tabel 2.98
Hasil Perhitungan Indeks Pembangunan
Literasi Masyarakat

No	Kategori	Interval indeks
1	Kurang	$\leq 10,92$
2	Cukup	10,93 – 12,99
3	Baik	13,00 – 14,72
4	Sangat Baik	$\geq 14,73$

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan



**Gambar 2.21. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Kabupaten Pesisir Selatan**

Perbandingan realisasi indikator kinerja untuk 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.99
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Indeks
Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2020-2022**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	tanpa satuan	3,45	5,93	6,60	3,45	5,93	7,17

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat setiap tahunnya meningkat walaupun secara perhitungan interval indeks masih dalam kategori kurang.

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar provinsi dan Nasional yaitu, Provinsi dengan indeks 9,00 (kategori sedang) sementara untuk Nasional dengan indeks 13,00 (kategori sangat baik).

Beberapa Faktor Keberhasilan/Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sebagai berikut :

1. Mengembangkan diversifikasi layanan perpustakaan berbasis Teknik Informasi dan Komunikasi (TIK);
2. Mengembangkan Perpustakaan yang menjangkau masyarakat luas;
3. Mengujudkan tenaga perpustakaan yang kompeten dan profesional;
4. Menggalakan sosialisasi / promosi / pemasyarakatan gemar membaca;
5. Mengembangkan infrastruktur perpustakaan yang modern;

Sedangkan Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis (hambatan) yang

terdapat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Belum lengkap regulasi daerah mengenai Perpustakaan dan Kearsipan .
2. Terbatasnya SDM pengelola kearsipan dan perpustakaan (belum mempunyai arsiparis dan pustakawan baik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan maupun OPD dan unit kerja lainnya)
3. Kemajuan Informasi Teknologi belum dimanfaatkan secara proporsional untuk hal-hal yang berguna/produktif.
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta pendanaan pendukung pelayanan
5. Luasnya wilayah jangkauan untuk pelayanan baik pelayanan perpustakaan keliling.

Efisiensi penggunaan sumber dayapada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan merujuk pada keterbatasan SDM yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan perlu dilakukan peningkatan SDM dengan melakukan/mengikuti pelatihan maupun diklat baik yang dilaksanakan oleh Provinsi maupun Pusat yang tentunya perlu adanya dukungan anggaran dalam pelaksanaannya.

Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat inididukung oleh program Pembinaan Perpustakaan dengan target anggaran Rp. 827.789.550 Dan realisasi sebesar Rp 820.509.670 Atau capaian 99,12 %sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 7.279.889 Atau 1 %.

Sasaran 17 : Meningkatnya Pengalaman Nilai nilai Agama dalam Kehidupan Masyarakat

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 17 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 2.100 berikut ini:

Tabel 2.100
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 17

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	persen	96.50	75,5	78.24 %
2	Tingkat partisipasi subuh berjamaah dimesjid/mushola	tanpa satuan	Rendah (≤10 orang	Tinggi (≥35 orang	350 %
Rata-rata Capaian					214,12

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 17 sebesar 214,12%.Pencapaian sasaran strategis 17 termasuk predikat *Sangat Baik*.

1. Pemenuhan Kewajiban Membayar Zakat Harta

Indikator kinerja persentase pemenuhan kewajiban membayar zakat harta yang dikelola oleh BAZ, ditargetkan 96,50% dan terealisasi sebesar 75,5% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 78,24%. Berdasarkan klasifikasi penilaian indikator kinerja ini termasuk *berhasil* dengan kategori penilaian *baik*.

Perhitungan dari potensi zakat pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp10.700.000.000,- (*sepuluh milyar tujuh ratus juta rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp8.076.989.471,- (*Delapan milyar tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan empat ratus tujuh puluh satu rupiah*). Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian zakat yang dikelola BAZ perlu terus ditingkatkan dimasa mendatang. Beberapa Potensi zakat yang dikelola oleh BAZ berasal dari PNS, karyawan swasta dan perorangan.

Tabel 2.101

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Potensi Zakat yang dikelola BAZ Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	Persen	96,50	75.5	78.24 %

Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja persentase potensi zakat yang dikelola oleh BAZ Tahun 2022 yaitu :

1. Melakukan sosialisasi yang intens sehingga tumbuh kesadaran muzaki untuk berzakat.
2. Penataan administrasi yang transparan dan akuntabel
3. Penyaluran tepat sasaran sehingga manfaatnya betul betul bisa dirasakan oleh masyarakat
4. Membuka akses bagi masyarakat yang ingin tahu seputar pengelolaan zakat
5. Terjalinnnya kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam mengupayakan pencapaian target kinerja juga ditemukan berbagai permasalahan dan kendala diantaranya :

1. Masih ada muzaki yang membagikan zakatnya secara langsung tidak melalui BAZNAS
2. Masih ada sebagian muzaki yang enggan untuk berzakat
3. Pengetahuan dan kesadaran untuk berzakat masih kurang
4. Zakat guru sertifikasi dilingkup Dinas Pendidikan tidak lagi diambil (setor)
5. Masih ada lembaga vertikal dan lain-lainnya yang keberatan memberikan data potensi zakat.

Untuk melihat lebih jelas realisasi penerimaan BAZ Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2020 sampai dengan 2022 adalah sebagaimana tercantum pada tabel 2.102 berikut ini :

Tabel 2.102
Realisasi Penerimaan BAZ Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020–2022

No.	Tahun	Realisasi
1	2020	Rp. 12.437.494.662, –
2	2021	Rp. 8.860.881.363, –
3	2022	Rp. 8.076.989.471, –

Sumber data : BAZ Kabupaten Pesisir Selatan

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pencapaian realisasi penerimaan zakat di Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2020 ke tahun 2022 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena potensi zakat baru pada lingkup ASN. Selain itu penurunan ini juga disebabkan oleh tidak semua yang menjadi target potensi zakat dapat terpenuhi.

Pada dasarnya kesadaran masyarakat Pesisir Selatan dalam membayar zakat cukup tinggi dan potensi zakat yang menjadi target cukup besar. Namun karena disebabkan oleh beberapa faktor maka optimalisasi BAZ dalam menggali potensi zakat sedikit mengalami perlambatan. Perolehan zakat yang diterima oleh BAZ Kabupaten Pesisir Selatan telah dikelola untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial ekonomi kemasyarakatan yang direalisasikan dalam bentuk program-program kerja. Berikut realisasi program kerja yang sudah dilaksanakan oleh BAZ pada tahun 2022 sebagaimana tercantum pada tabel 2.103 berikut ini:

Tabel 2.103
Program Kerja BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan sesuai
Tahun 2022

No.	Program	Jumlah Penerima
1.	Pessel Peduli	164
	Bedah Rumah / Rehab Rumah	99
	Bantuan Biaya Hidup / Santunan Fakir	40
	Bantuan Kemanusiaan	6
	Bantuan Bencana	19
2.	Pessel Cerdas (Pendidikan)	4.676
3.	Pessel Sehat (Biaya Berobat)	875
4.	Pessel Makmur (Modal Usaha)	31
5.	Pessel Relegius	26
Total Jumlah		6.025

Sumber data : BAZ Kabupaten Pesisir Selatan

Dari tabel di atas dapat dilihat program kerja BAZ Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada program BAZNAS, dimana program-program tersebut disalurkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan.

2. Tingkat Partisipasi Subuh Berjamaah di Mesjid/Mushola

Indikator kinerja Tingkat Partisipasi Subuh Berjamaah di Mesjid/Mushola, ditargetkan Rendah (≤ 10 orang) dan terealisasi Tinggi (≥ 35 orang) dengan tingkat capaian kinerja sebesar 350%. Berdasarkan klasifikasi penilaian indikator kinerja ini termasuk *Sangat berhasil* dengan kategori penilaian *Sangat baik*.

Tabel 2.104
Realisasi dan Capaian Indikator Tingkat Partisipasi Subuh Berjamaah di
Mesjid/Mushola Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat Partisipasi Subuh Berjamaah di Masjid/Mushola	tanpa satuan	Rendah (≤10 orang)	Tinggi (≥35 orang)	350

Tabel 2.105
Jumlah Masjid berdasarkan Tipologi
di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Tipologi Masjid	Jumlah
1.	Masjid Besar	14
2.	Masjid Jami	188
3.	Masjid di Tempat Publik	345
Jumlah		547

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat

Tabel 2.106
Jumlah Mushalla berdasarkan Tipologi
di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Tipologi Masjid	Jumlah
1.	Mushalla Perkantoran	15
2.	Mushalla Pendidikan	44
3.	Mushalla Perumahan	206
4.	Mushalla di Tempat Publik	660
Jumlah		925

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat

Adapun strategi untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Pengalaman Nilai nilai Agama dalam Kehidupan Masyarakat yaitu dengan cara penguatan peran ulama, niniak mamak, bundo kanduang, cendikiawan dan generasi muda dalam pengembangan dan penerapan nilai-nilai ABS-SBK. Strategi ini didukung oleh beberapa arah kebijakan antara lain Peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh agama, pemangku adat dalam melakukan bimbingan kepada masyarakat, Peningkatan Pelaksanaan Event event keagamaan dan Peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga agama, lembaga sosial keagamaan dan dan lembaga adat dalam melakukan bimbingan kepada masyarakat.

Di Kabupaten Pesisir Selatan masjid yang aktif dalam mengelola kegiatan keagamaan termasuk subuh berjamaah sebanyak 547 masjid.

Sasaran 18 : Meningkatnya SDM kreatif dan berdaya saing

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 18 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.105 berikut ini:

Tabel 2.107
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 18

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional	Orang	10	17	170
2	Jumlah wirausahawan yang berdaya saing	Orang	500	656	131,20
Rata-rata Capaian					150,60

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 18 sebesar 150,60%. Pencapaian sasaran strategis 18 termasuk predikat *sangat baik*.

1. Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional

Indikator kinerja Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional, ditargetkan 10 orang dan terealisasi 17 orang dengan tingkat capaian kinerja sebesar 170%. Berdasarkan klasifikasi penilaian indikator kinerja ini termasuk *Sangat berhasil* dengan kategori penilaian *Sangat baik*.

Tabel 2.108
Realisasi dan Capaian Indikator jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
1.	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional	orang	10	17	170
Rata-rata Capaian					170

Berdasarkan Undang-undangan Nomor 40 Tahun 2009, Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun sedangkan Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.

Indikator Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional ditetapkan untuk memantau perkembangan prestasi pemuda-pemudi di Kabupaten Pesisir Selatan, hal ini sangat penting karena berkaitan dengan peningkatan daya saing SDM khususnya generasi muda dengan Formulasi : Jumlah pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan nasional.

Pada tahun 2022 capaian realisasi indikator kinerja jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional yang semula di targetkan sebanyak 10 Orang dan terealisasi sebanyak 17 Orang atau dengan capaian 170%.

Berikut data perkembangan pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional pada tahun 2022 seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2.109
Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional
Tahun 2022

No	Nama Pemuda	Prestasi
1	Rhaza Reva	Uda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022
2	Ikhsandy Satrio Wibowo	Paskibraka Provinsi Tahun 2022
3	Dinda Defahmi	Paskibraka Provinsi Tahun 2022
4	Mutia Febri Yeza	Puteri Heritage Indonesia 2022 (5 Juni 2022)
5	Rahmadani Putera	Cabang Olahraga Atletik di Pesonas tingkat Nasional di Semarang Tahun 2022
6	Muhammad Alfin	Cabang Olahraga Atletik tingkat Provinsi dan Nasional di Semarang Tahun 2022 (Provinsi 2 Emas dan 1 Perunggu, Nasional 1 Perunggu)
7	Arif Rahmat Yusuf	Kejuaraan Hapkido Tingkat Nasional (1 Emas)
8	Khairunisa Putri Hamdi	Kejuaraan Hapkido Tingkat Nasional (2 Perak)
9	Fino Nofrizal	Kejuaraan Hapkido Tingkat Nasional (1 Perunggu)
10	Rolef Leogustri	Kejuaraan Hapkido Tingkat Nasional (1 Perunggu)
11	Dariasman	Kejuaraan Catur Tingkat Provinsi (1 Emas)
12	Nofricayanti	Kejuaraan Paralayang Tingkat Provinsi (2 Perak)
13	Yoanda Putra	Kejuaraan Paralayang Tingkat Provinsi (1 Perak)
14	Ade Oktavia	Kejuaraan Paralayang Tingkat Provinsi (1 Emas)
15	Govinda	Kejuaraan Paralayang Tingkat Provinsi (1 Perak)
16	Gustia Permata Sari	Kejuaraan Paralayang Tingkat Provinsi (1 Perak)
17	Syafrijon Hendri	Kejuaraan Paralayang Tingkat Provinsi (1 Perunggu)

Sumber data : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Tabel 2.110
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
3 Tahun terakhir (2020 s.d 2022)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional	orang	-	10	17	-	100%	170%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun ini melebihi target yang telah ditetapkan dan termasuk predikat **Sangat Baik**.

Faktor Keberhasilan Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional yaitu dengan melakukan kegiatan kepemudaan dan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan maupun keolahragaan, diantaranya:

- Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
 - 1) Bantuan Pembinaan Organisasi KNPI, yang digunakan untuk Konsolidasi DPD KNPI Kabupaten Pesisir Selatan dengan OKP se-Pesisir Selatan, Pembinaan Pemuda Nagari tentang UU Kepemudaan (peserta seluruh Pemuda Nagari se-Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan di 6

kecamatan), Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi Kepemudaan di Pesisir Selatan (Peserta : OSIS SMAN 1 Painan, OSIS SMAN 2 PAINAN, BEM STAI Bayang, BEM UNP, BEM STAI Nurul Ikhlas Painan dan BEM STKIP, serta beberapa OKP), Konsolidasi DPD KNPI Pesisir Selatan dengan Pengurus Kecamatan (Peserta : Pengurus DPD KNPI Pesisir Selatan dan Pengurus Kecamatan)

- 2) Bantuan Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Bantuan Organisasi Asosiasi Pelajar Islam Pesisir Selatan)
- 3) Bantuan Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Bantuan Organisasi Forum Komunikasi Studi Islam Mahasiswa Pesisir Selatan Iv Jurai)
- 4) Bantuan Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Bantuan Organisasi Pemuda Air Jernih Pd. Mandiangin)
- 5) Bantuan Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Bantuan Organisasi Pemuda Nagari Taluak, Taluak Tigo Sakato)
- 6) Bantuan Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Bantuan Organisasi Pemuda Sawah Lintang Pd. Panjang)
- 7) Bantuan Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Bantuan Organisasi Pemuda Sungai Sarik)
- 8) Bantuan Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Bantuan Organisasi Pemuda Tanjung Pondok Tapan)
- 9) Bantuan Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Bantuan Organisasi Pemuda Tapan)
- 10) Bantuan Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Organisasi Pemuda Koto Tuo)
- 11) Bantuan Organisasi Pemuda Kenagarian Kampung Laban Salido
- 12) Bantuan Organisasi Pemuda Kenagarian Painan

Berikut ini data organisasi kemasyarakatan pemuda pada tahun 2022:

Tabel 2.111
Organisasi Kemasyarakatan Pemuda
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No.	Nama OKP/DPK	Jumlah Personil Aktif (Orang)
1	DPD AMPI	21
2	GEMA KOSGORO	17
3	GM KOSGORO	20
4	FKPPI	26
5	HMI	20
6	IMM	21
7	IPM	18
8	PDPM	27
9	NA	18
10	PP APRI	21
11	GM SRIWIJAYA	24
12	GM TRIKORA	22
13	MAHASISWA PEMBANGUNAN INDONESIA	20
14	MAPANCAS	25
15	PEMUDA ISLAM	22
16	ANGKATAN MUDA TAREKAT INDONESIA	18

17	GERAKAN MUDA AL WASHLIYAH	27
18	HIMPUNAN MAHASISWA AL WASHLIYAH	21
19	IKATAN SARJANA AL WASHLIYAH	18
20	IKATAN PELAJAR AL WASHLIYAH	23
21	ANGKATAN PUTRI AL WASHLIYAH	20
22	GERAKAN PEMUDA KA'BAH	29
23	PEMUDA KA'BAH	25
24	BM PAN	20
25	GARDA KEADILAN	24
26	GPII	25
27	PEMUDA TARBIYAH	21
28	GP ANSOR	24
29	PMII	20
30	BKPMRI	25
31	BMK 57	24
32	GEMA LANTANG	21
33	DPK PEMUDA/KNPI KEC. KOTO XI TARUSAN	38
34	DPK PEMUDA/KNPI KEC. BAYANG	32
35	DPK PEMUDA/KNPI KEC. IV NAGARI BAYANG UTARA	26
36	DPK PEMUDA/KNPI KEC. IV JURAI	30
37	DPK PEMUDA/KNPI KEC. BATANG KAPAS	38
38	DPK PEMUDA/KNPI KEC. SUTERA	33
39	DPK PEMUDA/KNPI KEC. LENGAYANG	50
40	DPK PEMUDA/KNPI KEC. RANAH PESISIR	27
41	DPK PEMUDA/KNPI KEC. LINGGO SARI BAGANTI	25
42	DPK PEMUDA/KNPI KEC. AIRPURA	28
43	DPK PEMUDA/KNPI KEC. PANCUNG SOAL	23
44	DPK PEMUDA/KNPI KEC. BASA AMPEK BALAI TAPAN	38
45	DPK PEMUDA/KNPI KEC. BASA AMPEK HULU TAPAN	28
46	DPK PEMUDA/KNPI KEC. LUNANG	20
47	DPK PEMUDA/KNPI KEC. SILAUT	41
JUMLAH		1.184

Sumber : Knpi Pesisir Selatan

Tabel 2.112
Data Pengelola Organisasi Kepemudaan yang mendapatkan Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan

No	Nama	Pelatihan yang diikuti
1	Desry Syahputra	Latihan Manajemen Organisasi Pemuda (LMOP)
2	Muhammad Firdaus	Latihan Manajemen Organisasi Pemuda (LMOP)
3	Eriyen Gustina Ulfa	Latihan Manajemen Organisasi Pemuda (LMOP)
4	Ahmad Fauzi	Latihan Manajemen Organisasi Pemuda (LMOP)

Sumber data : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

- Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
- Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
- Pengembangan Organisasi Keolahragaan (bantuan pembinaan organisasi KONI, Bantuan Alat Olahraga Bola Volly dan Net Volly (Sutera), Bantuan Bola Volly dan Bola Kaki Untuk Kelompok Olahraga di Kecamatan Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti, Bantuan Kelompok Senam Lakitan Tengah, Pelatihan Wasit Sepak Takraw dan Pelatihan Sepak Takraw (Organisasi Takraw, Bantuan Pelatihan Klub Sepak Bola Tapan, Hibah Uang kepada Club Gulat Perkasa Bayang, dan bantuan peralatan dan perlengkapan olahraga kepada club-club olahraga).



Tabel 2.113
Daftar Cabang Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan

No	CABANG OLAHRAGA	PENGURUS CABOR		
		KETUA	KETUA HARIAN	SEKRETARIS
1	AERO SPORT (FASI)	IKHWAN WILDANI		
2	ANGKAT BESI (PABBSI)	On Proses		
3	ANGKAT BERAT (PABERSI)	PATRIA WIWIK		
4	BINARAGA	On Proses		
5	ATLETIK (PASI)	MASRISAF		
6	BALAP MOTOR (IMI)	SUPRIYADI OMPRI		
7	BOLA BASKET (PERBASI)	M. ADLI		
8	BOLA VOLLEY (PBVSI)	KAPOLRES		WARDI KAMAL
9	BRIDGE (GABSI)	RUDI ANWAR		
10	BULUTANGKIS (PBSI)	DAILIPAL		
11	CATUR (PERCASI)	HERIZAL HARPEN, S.Kom		
12	DAYUNG (PODSI)	RAFLENOVA YULANDA		
13	BERKUDA (PORDASI)	HAKIMIN		
14	GULAT (PGSI)	GESTRO JONI, S.Pd		
15	JUDO (PJSI)	KAPOLRES		HARI KURNIAWAN
16	KARATE (FORKI)	DANDIM 0311		DARYULISMAN
17	KEMPO (PERKEMI)			
18	MENEMBAK (PERBAKIN)	KAPOLRES		
19	PANAHAN (PERPANI)	RIMA MELATI, S.Pd		
20	PANJAT TEBING (FPTI)	RINO YURISMANTO, ST		
21	PARALYMPIC (BPOC/NPC)	-		
22	PENCAK SILAT (IPSI)	HENGKI MUSTAF	AL ZUKRI	
23	PENTAQUE (FOPI)	FIRMAN		
24	RENANG (PRSI)	FORZIL		
25	SENAM (PERSANI)	SULIADI, S.Pd		
26	SEPAK BOLA (PSSI)	ERA SUKMA MUNAF		DONA SATRIA PUTRA
27	SEPAK TAKRAW (PSTI)	Ir. AFRIZON NAZAR, MM		
28	SEPEDA (ISSI)	SUBCANDRI, SE. M.Si		
29	SELAM	ROGENDRA MIDONA, S.Pd		

30	TAEKWONDO (TI)	YULMEDYA		JENDRI EFENDI
31	TARUNG DRAJAT (KODRAT)	CIPTO		
32	TENIS LAPANGAN (PELTI)	REVA MANSARIN		
33	TENIS MEJA (PTMSI)	PIWAL		
34	TINJU (PERTINA)	On Proses		
35	WUSHU (WI)	HERI MURIANTO, SH		
36	FUTSAL	On Proses		
37	SEPATU RODA(PERSEROSI)	On Proses		
38	BILYAR (POBSI)	On Proses Perpanjangan		
39	MUAYTHAI	ILMAN		
40	SOFT TENIS	On Proses		
41	BOLA TANGAN (ABTI)	NOVRAL BAHRUN		REGA DESFINAL, ST
42	CRICKET (PCI)	RAFLENOVA YULANDA, SE		
43	ARUNG JERAM (FAJI)	RINO YURISMANTO, ST		
44	HAPKIDO	ROLEF		
45	KICKBOXING (KBI)	MUHASNAN		
46	E-SPORT (ESI)	KRISTIAN RINALDO		ROBI PADANG TV

Sumber data : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Indikator ini di dukung oleh program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, Pengembangan Kapasitas Kepramukaan. Dengan target anggaran Rp. 9.210.094.110 ,- Dan realisasi sebesar Rp 8.966.001.870,- Atau capaian 97,35 %

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 244.092.240,- Atau 2,65%.

Beberapa prestasi dan keberhasilan yang di peroleh dalam menunjang pencapaian indikatorJumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.114
Dokumentasi Prestasi yang diperoleh pada
Tahun 2022

No	Nama Penghargaan	Tahun	Lembaga yang Memberikan	Keterangan
1	KTM Beregu Nasional Super League	2022	PEMDA Parigi Mutong Sulawesi Tengah	
2	KTM Beregu Internasional Super League	2022	PEMDA Parigi Mutong Sulawesi Tengah	
3	KTM Beregu Kejurnas dan AFA di Bali	2022	PB FASI Pusat	
4	KTM Kejurda Puncak Lawang	2022	PEMDA Agama	

Sumber data : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

3. Jumlah wirausahawan yang berdaya saing

Wirausahawan adalah orang yang mengelola dan berani memikul resiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang berusaha atau dengan kata lain mereka yang mengelola, mengembangkan dan melembagakan perusahaan miliknya sendiri. Adapun unsur-unsur wirausaha antara lain; 1). Peluang, 2). Kemampuan menangkap peluang.

Sedangkan yang dimaksud dengan berdaya saing adalah kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi standar nasional maupun internasional. Beberapa indikator daya saing dapat diukur dengan; 1). Sejauh mana suatu usaha dapat memenuhi permintaan pasar, 2). Mempertahankan pendapatan, 3). Meningkatkan kemampuan kompetitif.

Pada tahun 2022, target indikator Jumlah wirausahawan yang berdaya saing adalah 500 orang dan terealisasi 656 orang dengan capaian kinerja sebesar 131,2%. Berikut tabel 2.115 target dan realisasi indikator kinerja Jumlah wirausahawan yang berdaya saing tahun 2022:

Tabel 2.115
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Jumlah wirausahawan yang berdaya saing Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah wirausahawan yang berdaya saing	Orang	500	656	131,20

Tabel 2.116
Perusahaan Industri Kecil Menengah
Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan cabang industri
Tahun 2022

No	Cabang Industri	Jumlah
1.	Industri Tekstil	34
2.	Industri Makanan	176
3.	Industri Furnitur	127
4.	Industri alat angkutan lainnya	7
5.	Industri barang galian buka logam	40
6.	Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia	5
7.	Industri percetakan dan reproduksi media rekaman	14
8.	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	21
9.	Industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer	10
10.	Industri pengolahan lainnya	6
11.	Industri pakaian jadi	39
12.	Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki	2
13.	Industri minuman	38
14.	Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya	24
15.	Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional	1
16.	Industri karet, barang dari karet dan plastik	1
17.	Cabang industri	2
Jumlah		547

Sumber data : Perdagangan dan Transmigrasi

Tabel 2.117
Data Hotel/ Penginapan/ Villa/Home Stay
Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

NO	NAMA OBJEK PENDATAAN	NAMA PEMILIK	TAHUN BERDIRI	IZIN USAHA	KECAMATAN
1	SAGA MURNI	H.FIRDAUS	2016	ADA	IV JURAI
2	PENGINAPAN AL- BARQAH	HJ.ROSNANI	2017	ADA	IV JURAI
3	LANGKISAU RESORT	ADITYAWARMAN	2014	ADA	IV JURAI
4	ANORDIO	DEWANTO	2006	ADA	IV JURAI
5	TRIZA HOTEL	FERRA YANTI	2014	ADA	IV JURAI
6	PENGINAPAN AA	EDI MELAYU	2016	ADA	IV JURAI
7	HOME STAY DENA	DENA SRI HANDAYANI	2013	ADA	IV JURAI
8	HOME STAY DORIA	MARIA	2014	ADA	IV JURAI
9	HOME STAY DELIMA	DILA	2013	ADA	IV JURAI
10	HOME STAY CIKHA	NURTINAS	2016	ADA	IV JURAI
11	HOME STAY RAPINBI	ROSNANI	2016	ADA	IV JURAI
12	HANNAH HOTEL	H.MELDIAN	2016	ADA	IV JURAI
13	GUEST HOUSE ANGGREK	NANIK IDA ISIANI	2015	ADA	IV JURAI
14	GUEST HOUSE PULAU CINGKUAK	RAHMI KARIDA	2016	ADA	IV JURAI
15	HOME STAY WISMA PURI	H.SAIDAL MASFIYUDDIN	2010	ADA	IV JURAI
16	HOME STAY RUMAH PUTI	YOGI DIRGANTARA	2014	ADA	IV JURAI
17	HOME STAY NANDA	NANDA	2015	ADA	IV JURAI
18	PENGINAPAN SIVIA	YUSHARNI	2016	ADA	IV JURAI
19	PENGINAPAN WATI	YUNIDARWATI	2015	ADA	IV JURAI
20	PENGINAPAN SEDERHANA	JUSMAINI	2016	ADA	IV JURAI
21	PENGINAPAN MAWAR	MAWAR	2015	ADA	IV JURAI
22	HOTEL AIDA	H.MUNAF MALIN KAYO	1972	ADA	IV JURAI
23	EDOTEL	PEMDA	2006		IV JURAI
24	GISZELLA HOTEL	ROZEKMAL/NELIATI	2016	ADA	BAYANG
25	PENGINAPAN BUNGA TANJUNG	HENDRI HARIADI	1990	ADA	LINGGO SB
26	PENGINAPAN ACEH MINANG	OSIN	2015	ADA	PC. SOAL
27	PENGINAPAN BUNDA	HEL	1996	ADA	PC. SOAL
28	PENGINAPAN RRR	SUMIATI	2015	ADA	B.A.B TAPAN
29	PENGINAPAN AZIZAH	UNANG	2013	ADA	B.A.B TAPAN

30	HOTEL FELIA	MARNI	2017	ADA	B.A.B TAPAN
31	HOTEL BUNGA FACHRI	MARLINDA WATI	2015	ADA	B.A.B TAPAN
32	PENGINAPAN BAGUS	BURHANUDDIN	2016	ADA	B.A.B TAPAN
33	PENGINAPAN KASIAN OMBAK	ETI	2016	ADA	LUNANG
34	PENGINAPAN REGIL	ABU SANTO	2017	ADA	LUNANG
35	PENGINAPAN NURUL HIDAYAH	MAIHENDRA	2003	ADA	LUNANG
36	PENGINAPAN DINDA	IRFAN	2018	ADA	LUNANG
37	PENGINAPAN RINI	RINI	2017	ADA	LUNANG
38	PENGINAPAN LISA	KAR	2002	ADA	SILAUT

Sumber data : Perdagangan dan Transmigrasi

Adapun wirausaha UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2022 adalah sebanyak 583 Wirausaha UMKM.

Pencapaian indikator ini di dukung oleh program Pemberdayaan UMKM dengan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dengan anggaran Rp. 707.550.100 dengan realisasi anggaran Rp. 686.073.720 dengan efesiensi anggaran sebesar Rp. 21.476.380.

Sasaran 19 : Terwujudnya Keluarga Bahagia

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 19 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.16 berikut ini:

Tabel 2.118
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 19

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	Persen	0.0008	0.0058	72,50
2.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	91.0944	91.7179	100.68
Rata-rata Capaian					86,59

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 19 sebesar 86,59%. Pencapaian sasaran strategis 19 termasuk predikat *Sangat Baik*.

1. Proporsi Temuan Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan terhadap jumlah keluarga

Proporsi temuan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terhadap jumlah keluarga merupakan perbandingan antara jumlah kekerasan

terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi selama satu tahun dibagi jumlah kepala keluarga. Kasus yang difasilitasi adalah kasus yang dilaporkan oleh masyarakat melalui lembaga P2TP2A dan juga kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian dengan adanya laporan ke Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pada tahun 2022, target indikator Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga adalah 0,0008% dan terealisasi 0,0058% dengan capaian kinerja sebesar 72,50%. Berikut tabel 3.117 target dan realisasi indikator kinerjaProporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluargatahun 2022:

Tabel 2.119
Realisasi dan Capaian Indikator KinerjaProporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	Persen	0.0008%	0.0058%	72,50

Tabel 2.120
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 3 Tahun terakhir (2020 s.d 2022)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.	Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	Persen	0.0069%	0.0073%	0.0058%	100%	62%	72,50%

Indikator kinerja Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga tahun 2022, ditargetkan 0,0008 % dan terealisasi 0,0058 % dengan tingkat capaian kinerja sebesar 72,50%. Berdasarkan klasifikasi penilaian indikator kinerja ini termasuk klasifikasi penilaian *baik*.

Adapun faktor keberhasilan dan peningkatanProporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak adalah kerjasama yang baik dengan berbagai pihak meliputi pemerintahan nagari, sekolah ramah anak, tokoh masyarakat dan lembaga organisasi masyarakat. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan dengan sosialisasi pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan layanan fasilitasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sedangkan Faktor kegagalan dan penurunan Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga adalah masih adanya keterbatasan dalam pengungkapan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak karena kasus dalam rumah tangga masih dianggap sebagai

aib keluarga sehingga ada keengganan masyarakat dalam melaporkan kasus kepada lembaga yang berwenang dan pihak yang berwajib.

Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan Satgas PPPA yang ada di Kecamatan dan mengaktifkan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di Pemerintahan Nagari sehingga cakupan jangkauan dan penyelesaian kasus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Adapun Indikator Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga ini ditunjang oleh program:

1. Program Perlindungan Perempuan dengan target anggaran Rp. 67.300.976,- dan realisasi sebesar Rp. 32.489.150,- atau capaian 48,27 %
2. Program Pemenuhan Hak Anak dengan target anggaran Rp. 44.364.360,- dan realisasi sebesar Rp. 43.535.050,- atau capaian 98,13
3. Program Perlindungan Khusus Anak dengan target anggaran Rp. 193.674.134,- dan realisasi sebesar Rp.162.119.740,- atau capaian 83,71 %

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.67.195.530,- atau 22%.

Beberapa prestasi dan keberhasilan yang di peroleh dalam menunjang pencapaian indikator Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga dapat di lihat pada gambar berikut:

Dokumentasi Penghargaan



Gambar 2.22. Piagam Penghargaan Kabupaten Layak Anak Peringkat Madya Tahun 2022 di Jakarta 23 Juli 2022 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Cakupan Ketersediaan rumah layak huni

Rumah layak huni merupakan kondisi ideal di mana bangunan tersebut memiliki kecukupan minimal dalam unsur ruang dan luas ruangan. Selain itu, juga memperhatikan kualitas material pembangunan seperti dinding, atap untuk keselamatan serta sanitasi dan air bersih yang layak untuk kesehatan bagi siapa pun yang menempatinnya.

Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 11/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kab./Kota, maka Rumah layak huni pengertiannya adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Adapun kriteria dari rumah layak huni tersebut antara lain :

1. Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi
 - a. Struktur bawah/pondasi;
 - b. Struktur tengah/kolom dan balok
 - c. Struktur atas
2. Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi
3. Memenuhi kecukupan luas minimum, 7,2 M²/orang sampai dengan 12 M²/orang

Berikut tabel 2.121 target dan realisasi indikator kinerja cakupan ketersediaan rumah layak huni tahun 2022:

Tabel 2.121
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Cakupan Ketersediaan
Rumah Layak Huni Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	91.0944	91.7179	100.68

Indikator kinerja Cakupan ketersediaan rumah layak huni tahun 2022, ditargetkan 91.0944% dan terealisasi 91.7179% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100.68%. Berdasarkan klasifikasi penilaian indikator kinerja ini termasuk *Sangat berhasil* dengan kategori penilaian *Sangat baik*.

Berikut perkembangan data realisasi dan capaian indikator kinerja Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni tahun 2020 s.d. 2022

Tabel 2.122
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Cakupan Ketersediaan
Rumah Layak Huni Di Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020 s.d. 2022

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi		
			2020	2021	2022
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen	99.828	90.5339	91.7179

Analisis hasil capaian untuk 3 tahun terakhir indikator Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni pada Tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan Capaian pada Tahun 2021 karena ada pendataan ulang Rumah Tidak Layak Huni pada Tahun 2020. Pada Akhir Tahun 2020 memakai data TNP2K Tahun 2016 dimana Jumlah Rumah Layak Huni di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 6.387 Unit yang berarti bahwa pada tahun 2020 berdasarkan hasil capaian kinerja 99.828 % sudah mendekati 100 % (hampir tuntas).

Pada Tahun 2021 kita memakai data baru berdasarkan hasil validasi yang dilaksanakan Satuan Kerja Perumahan provinsi Sumatera Barat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan jumlah RTLH 11.345 Unit.

NO	LOKASI	JUMLAH RUMAH	JUMLAH RTLH 2021	PENANGANAN 2022	JUMLAH RTLH 2022	JUMLAH RLH 2022	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KOTO XI TARUSAN	14,685	713	27	686	13,999	
2	BAYANG	1,515	212	124	88	1,427	
3	BAYANG UTARA	9,662	710	16	694	8,968	
4	IV JURAI	7,206	815	405	410	6,796	
5	BATANG KAPAS	11,771	445	80	365	11,406	
6	SUTERA	13,433	792	121	671	12,762	
7	LENGAYANG	16,241	1,072	141	931	15,310	
8	RANAH PESISIR	10,307	789	23	766	9,541	
9	LINGGO SARI BAGANTI	7,857	1,043	121	922	6,935	
10	AIR PURA	3,253	809	27	782	2,471	
11	PANCUNG SOAL	5,235	849	50	799	4,436	
12	BASA IV BALAI TAPAN	2,485	666	47	619	1,866	
13	RANAH AMPEK HULU TAPAN	3,182	403	78	325	2,857	
14	LUNANG	5,058	946	22	924	4,134	
15	SILAUT	3,383	567	2	565	2,818	
	JUMLAH	115,273	10,831	1,284	9,547	105,726	

Sumber Data : Hasil Kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup tahun 2022

Apabila dibandingkan dengan kabupaten Kota Lain Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.123
Perbandingan Cakupan Ketersediaan
Rumah Layak Huni dengan kabupaten/kota lain pada tahun 2020-2022

No	Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja		
		2020	2021	2022
1	Kota Padang	95.75	95.596	96.74
2	Kabupaten 50 Kota	30.38	32.44	33.52

Sumber Data : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan LH tahun 2022



Jika dibandingkan dengan Kota Padang dengan jumlah RTLH 8.400 Unit, Cakupan ketersediaan rumah layak huni Tahun 2020 Kabupaten Pesisir Selatan lebih tinggi kemudian terjadi penurunan tahun 2021 disebabkan validasi ulang data RTLH.

Dibandingkan Kabupaten 50 Kota dengan jumlah RTLH 16.991, Cakupan ketersediaan rumah layak huni Kabupaten Pesisir Selatan jauh lebih tinggi capaiannya dari Tahun 2020, 2021 dan 2022 dengan jumlah RTLH Tahun 2022 adalah 9.547 Unit.

Faktor Keberhasilan Pencapaian Cakupan Ketersediaan rumah layak huni disebabkan karena Adanya Usaha dari Dinas Perkimtan LH untuk mengajukan alokasi anggaran penanganan Rumah Tidak Layak huni di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dengan bantuan jumlah rumah yang diusulkan sebanyak 1.000 Unit dan terealisasi sebanyak 986 Unit. Badan Amil Zakat juga berkolaborasi dalam hal penanganan Rumah Tidak Layak Huni dengan penanganan RTLH Tahun 2022 sebanyak 117 Unit. Sedangkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tahun 2022 penanganan RTLH sebanyak 181 unit.

Beberapa program pendukung pencapaian indikator kinerja cakupan ketersediaan rumah layak huni yaitu; Program Pengembangan Perumahan, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dan Program Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU), dengan target anggaran Rp. 7.882.238.890 dan terealisasi Rp. 7.342.879.231 atau dengan capaian 93.16 % yang berarti bahwa terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 539.359.659.

Berikut dokumentasi Cakupan ketersediaan rumah layak huni tahun 2022 :



Rumah Tidak Layak Huni (Sebelum di rehabilitasi)



Rumah Layak Huni (Setelah di rehabilitasi)

Sasaran 20 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 20 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 2.124 berikut ini:

Tabel 2.124
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 20

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	tanpa satuan	56.93	53,39	93,78
2.	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	Nagari	Pratama (182) Madya (0) Utama (0)	Pratama (47) Madya (0) Utama (0)	25,82
Rata-rata Capaian					59,80

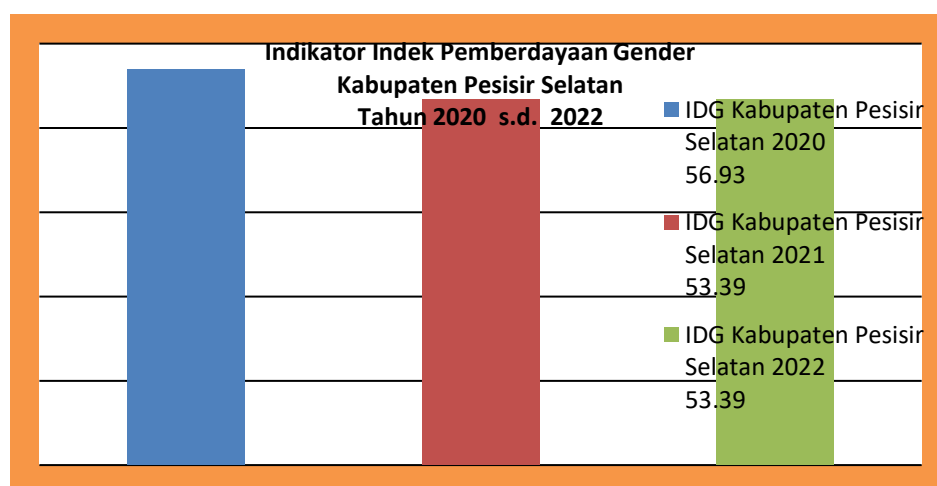
Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis 20 sebesar 59,80%. Pencapaian sasaran strategis 20 termasuk predikat *Cukup*.

1. Indek Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melalui Program

Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan berupaya percepatan peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan yang diukur melalui beberapa indikator, diantaranya, angka harapan hidup, angka melek huruf, angka sumbangan pendapatan perempuan dan laki-laki maupun beberapa pengukuran lainnya.

IDG dititik beratkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang partisipasi politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi. IDG terdiri tiga dimensi yakni keterwakilan di parlemen dengan indikator persentase anggota parlemen laki-laki dan perempuan, pengambilan keputusan dengan indikator persentase pejabat tinggi, manajer, pekerja profesional dan teknisi, distribusi pendapatan dengan indikator persentase upah buruh non pertanian disesuaikan antara laki-laki dan perempuan. Berikut diagram perkembangan Indek Peberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan selama 3 tahun:



Sumber Data : Dinas PPPA tahun 2022

Gambar 2.23. Perkembangan Indikator Indek Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 s.d. 2022

Berikut target dan realisasi indikator kinerja Indek Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.125
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indek Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	tanpa satuan	56.93	53.39	93,78%

Indikator kinerja Indek Pemberdayaan Gender tahun 2022, ditargetkan 56,93% dan terealisasi 53,39% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 93,78%.

Berdasarkan klasifikasi penilaian indikator kinerja ini termasuk *Sangat berhasil* dengan kategori penilaian *Sangat baik*.

Adapun upaya yang sudah dilakukan dalam meningkatkan pemberdayaan gender di Kabupaten Pesisir Selatan, karena IDG ini merupakan nilai komposit yang dihasilkan dari survey BPS, maka kontribusi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada pada fasilitasi kelembagaan organisasi perempuan.

Indikator ini didukung oleh program:

1. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan target anggaran Rp. 636.221.230,- dan realisasi sebesar Rp. 627.132.466,- atau capaian 98,57 %.
2. Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan target anggaran Rp. 44.582.330,- dan realisasi sebesar Rp. 44.121.330,- atau capaian 99,97 %.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 dalam menunjang Indikator Indeks pemberdayaan gender (IDG) terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.9.549.764,- atau 1,40 %.

2. Jumlah Nagari Tangguh Bencana

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menargetkan jumlah nagari tangguh bencana sebanyak 182 Nagari dan terealisasi sebanyak 47 Nagari atau sekitar 25,82%. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pencapaian target indikator tersebut antara lain yaitu adanya indikator tangguh bencana yang menjadi pedoman dalam menetapkan nagari tersebut dikategorikan sebagai nagari tangguh bencana.

Sesuai dengan PERKA BNPB No 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana, disebutkan Bahwasanya Nagari/Desa Tangguh Bencana mempunyai 20 indikator yaitu :

- a. Adanya kebijakan/peraturan Desa (Nagari)/kelurahan tentang Penanggulangan Bencana (PB) atau Pengurangan Risiko Bencana (PRB)
- b. Adanya Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Aksi Komunitas (RAK) dan Rencana Kontijensi (RENKON)
- c. Terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB)
- d. Terbentuknya Relawan Penanggulangan Bencana (Kelompok Siaga Bencana/KSB)
- e. Adanya Kerjasama antar pelaku dan wilayah
- f. Tersedianya Dana Khusus untuk Tanggap Darurat
- g. Tersedianya Dana untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB)
- h. Diberikannya Pelatihan untuk perangkat Desa/Nagari
- i. Diberikannya Pelatihan untuk Tim Relawan
- j. Diberikannya Pelatihan untuk Masyarakat Desa/Nagari
- k. Dilibatkannya Masyarakat Desa/Nagari Secara Aktif
- l. Dilibatkannya Perempuan dalam tim relawan
- m. Adanya Peta dan Jalur Evakuasi serta tempat untuk mengungsi

- n. Adanya Sistem Peringatan Dini (Early warning system)
- o. Dilaksanakannya Mitigasi Struktural (fisik)
- p. Terbentuknya pola ketahanan ekonomi masyarakat untuk mengurangi kerentanan mereka dalam menghadapi bencana
- q. Adanya perlindungan kesehatan kepada kelompok masyarakat yang rentan
- r. Adanya pelaksanaan dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) untuk mengurangi Risiko Bencana
- s. Adanya perlindungan terhadap Aset Produktif Utama pada masyarakat

Berdasarkan indikator tersebut di atas, hanya ada 3 (tiga) indikator yang baru terpenuhi. Hal ini sangat mempengaruhi capaian target indikator nagari tangguh bencana yang sudah di targetkan. Sehingga pada tahun 2022 hanya baru 47 Nagari yang memenuhi syarat menjadi nagari tangguh bencana.

Berikut target dan realisasi indikator kinerja Jumlah Nagari tangguh Bencana Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.126
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Nagari
Tangguh Bencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	Nagari	Pratama (182) Madya (0) Utama (0)	Pratama (47) Madya (0) Utama (0)	25,82

Berikut perkembangan realisasi indikator kinerja jumlah nagari tangguh bencana selama 3 tahun terakhir.

Tabel 2.127
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
3 Tahun terakhir (2020 s.d 2022)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	Nagari	Pratama (17) Madya (0) Utama(0)	Pratama(27) Madya (0) Utama (0)	Pratama (47) Madya (0) Utama(0)	Pratama (17) Madya (0) Utama (0)	Pratama (27) Madya (0) Utama(0)	Pratama (47) Madya(0) Utama(0)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi jumlah nagari tangguh bencana kurun waktu 3 tahun terakhir (2020 s.d 2022) mengalami peningkatan walaupun secara realisasi masih di kategorikan *Gagal*.

Indikator kinerja Jumlah Nagari Tangguh Bencana tahun 2022, ditargetkan 182 Nagari dan terealisasi 47 nagari dengan tingkat capaian kinerja sebesar 25,82%. Berdasarkan klasifikasi penilaian indikator kinerja ini termasuk *Gagal* dengan kategori penilaian *kurang berhasil*.

Adapun Faktor Peningkatan capaian kinerja indikator Kinerja Jumlah Nagari tangguh Bencana setiap tahunnya diantaranya :

- a. Pendekatan Langsung Ke Nagari-Nagari Untuk Pembinaan KSB
- b. Menyediakan Dana Sosialisasi Tentang Nagari Tangguh dari APBD
- c. Pendekatan Dengan OPD Terkait dan Penyaluran Program Mitigasi Bencana
- d. Menggandeng Swasta Untuk Dapat Berpartisipasi Dalam Mitigasi Bencana di Nagari

Beberapa Program /Kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja jumlah nagari tangguh bencana adalah Program Penanggulangan Bencana Dengan Target Anggaran Rp.4.126.911.404,- dan Realisasi Sebesar Rp. 863.916.085,- Atau Capaian 21% Berdasarkan Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.262.995.319 Atau 21%.

2.3.1 Akuntabilitas Keuangan

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 20 (dua puluh) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, tercantum pada tabel 3.126 dibawah ini:

Tabel 2.218
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang
Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	816.364.294	726.757.364	89,02
2	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	8.027.885.874	7.775.414.463	96,86
3	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	4.677.075.574	4.526.071.595	96,77
4	Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat	60.445.311.225	52.724.309.512	87,23
5	Meningkatnya Perlindungan Kesehatan Masyarakat	3.494.773.716	2.867.111.625	82,04
6	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	162.437.980	161.788.175	99,60
7	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	7.924.231.350	7.780.670.620	98,19
8	Meningkatnya investasi PMA dan PMDN	415.374.936	312.047.846	75,12

9	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	55.980.356.822	53.686.964.618	95,90
10	Menurunnya Pengangguran	110.042.180	109.338.120	99,36
11	Meningkatnya kualitas infrastruktur	160.645.677.740	155.108.110.717	96,55
12	Terjaminnya Kelestarian Lingkungan	396.646.545	360.948.796	91,00
13	Pesisir Selatan Menjadi Daerah Tujuan Wisata Favorit di Pantai Barat Indonesia	1.062.074.358	952.115.310	89,65
14	Berkembangnya Ekonomi Kreatif	808.535.050	807.525.050	99,93
15	Meningkatnya Akses Layanan Bidang Pendidikan	131.234.914.229	127.993.092.969	97,53
16	Meningkatnya daya saing pendidikan	1.126.341.090	1.119.061.210	99,35
17	Meningkatnya pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	10.700.000.000	8.076.989.471,00	75,49
18	Meningkatnya SDM kreatif dan berdaya saing	9.917.644.210	9.652.075.590	97,32
19	Terwujudnya Keluarga Bahagia	8.187.578.360	7.581.023.171	92,59
20	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	4.807.714.964	1.535.169.881	31,93
JUMLAH		470.940.980.497	443.857.061.053	94,25

Sumber : Laporan Perkembangan Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat sebagai berikut:

- Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 untuk menunjang pencapaian 20 (dua puluh) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 sebesar 443.857.061.053,- terealisasi sebesar 443.857.061.053,- atau 90,50%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 20 (dua puluh) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar 27.083.919.444,- atau 5,75%.
- Sisa anggaran sebesar 27.083.919.444,- atau 5,75%, mencerminkan kurang akuratnya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Seharusnya sisa anggaran ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.



BAB 3

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

LPPD

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2022**

BAB III

CAPAIA KINERJA

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2022 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan Provinsi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar **Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)** dan Direktorat Jenderal Prasarana Sarana Pertanian sebesar **Rp. 2.776.155.000,00 (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)** dengan total alokasi anggaran sebesar **Rp. 2.896.155.000,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)** dan realisasi **Rp. 2.893.529.000,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta (99,90%)**.

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan Provinsi, dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Provinsi Tahun 2022

NO	SATUAN KERJA	OPD PELAKSANA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA BARAT	DINAS PERTANIAN KAB. PESISIR SELATAN	2.896.155.000,00	2.893.529.000,00	99,90
Total			2.896.155.000,00	2.893.529.000,00	99,90

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Pesisir Selatan

3.1.1 Permasalahan Tugas Pembantuan

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan provinsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022, dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Seringnya dilakukan revisi DIPA dan POK sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah dibuat;

3.1.2 Upaya Penyelesaian

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Jika revisi DIPA dan POK telah di sahkan, sesegera mungkin didistribusikan ke Kabupaten/Kota;

3.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan di Bawahnya

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2022 tidak melaksanakan pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan dibawahnya.



BAB 4

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

LPPD

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2022**

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pesisir Selatan terhadap urusan wajib terkait pelayanan dasar disajikan berupa target indikator SPM, realisasi dan pencapaian SPM serta analisis pencapaiannya yang dikelompokkan berdasarkan SPM urusan wajib terkait pelayanan dasar.

4.1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah secara jelas mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, pemerintah daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar

secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

SPM Pendidikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar pendidikan sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak. SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

SPM Pendidikan daerah Kabupaten/Kota mencakup 3 (tiga) jenis pelayanan dasar:

1. Pendidikan Anak Usia Dini
Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Pendidikan Dasar
Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (limabelas) tahun. Pendidikan Dasar terdiri atas: Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
3. Pendidikan Kesetaraan
Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapanbelas) tahun.

4.1.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM oleh Daerah

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pemenuhan SPM Pendidikan. Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai SPM Pendidikan selama kurun waktu tertentu bisa dilihat pada Tabel berikut:

NO	Kelompok Usia	Capaian (%)	Target (%)	
		2021	2022	2023
1	4 tahun			
2	5-6 tahun	93,51%	100%	100%
3	7-12 tahun	89,49%	100%	100%
4	13-15 Tahun	91,32%	100%	100%

Sumber : <https://dss.datadik.kemendikbud.go.id/>

4.1.3 Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bersumber dari APBD, APBN dan sumber lain yang sah tahun 2022 yaitu pemberian Beasiswa bagi peserta didik miskin yaitu:

1. Beasiswa PIP SD sebesar Rp. 11.790.450.000,- bersumber dari APBN.
2. Beasiswa PIP SMP sebesar Rp 5.347.500.000,- bersumber dari APBN.
3. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SD Sebesar Rp. 4.002.289.966,- bersumber dari APBD.
4. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMP Sebesar Rp 1.003.415.036,- bersumber dari APBD.

4.1.4 Dukungan Personil

Personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM ini terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan penyelenggaraan tugas perbantuan, pejabat dan staf di Bidang PAUDNI, Pembinaan SD, Pembinaan SMP, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

4.1.5 Hasil Capaian

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan:

- 1) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini dilakukan dengan cara:

- Menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - Menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini; dan
 - Menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- 2) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah dasar dilakukan dengan cara:
- Menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas);
 - Menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar; dan
 - Menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- 3) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah menengah pertama dilakukan dengan cara:
- Menghitung jumlah anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
 - Menghitung jumlah anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama; dan
 - Menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- 4) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan dilakukan dengan cara:
- Menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas);
 - Menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan; dan
 - Menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam Huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

No	Kelompok Usia	Jumlah Anak	Sedang Bersekolah							Capaian
			TK/RA/ Sederajat	SD/MI/ Sederajat	SMP/ MTs/ Sederajat	SMA/SMK /MA/ Sederajat	SLB	Kesetaraan	Jumlah	
1	4 Tahun	9.306	1.954	-	-				1.954	
2	5-6 Tahun	18.870	11.105	6.541	-				17.646	93,51%
3	7-12 Tahun	57.961	212	49.969	1.689				51.870	89,49%
4	13-15 Tahun	28.222	-	1.509	24.264				25.773	91,32%
5	16-18 Tahun	25.353	-	57	1.352				1.409	
	Capaian	139.712	13.271	58.076	27.305	-	-	-	98.652	

Sumber : <https://datadik.kemendikbud.go.id/>

Pendidikan Usia Dini

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
-1	-2	-3			-4	-5
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PRATAMA			75.06 %	
1.	Pendidikan Dasar Usia Dini				68.79 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	52.92 %	
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	18.543	12.266	6.277	66.15 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /		
		Jasa Yang Dibutuhkan	Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia		
	1. Buku gambar	12.266	12.266	-	100.00 %	
	2. Alat mewarnai	12.266	12.266	-	100.00 %	
	3. Penyediaan biaya personil Peserta Didik	12.266	12.266	-	100.00 %	
	4. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	366	206	160	56.28 %	
	5. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1.271	516	755	40.60 %	

Pendidikan Dasar

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
-1	-2	-3			-4
2.	Pendidikan Dasar				96.26 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	77.44 %
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	88.182	85.358	2.824	96.80 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				18.82 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	94.11 %
		Jasa Yang Dibutuhkan	Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	
	1. Buku teks pelajaran	85.358	85.358	-	100.00 %
	2. Perlengkapan belajar	85.358	85.358	-	100.00 %
	3. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	485	485	-	100.00 %
	4. Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	96	66	30	68.75 %
	5. Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	3.627	3.627	-	100.00 %
	6. Penyediaan biaya personil peserta didik	38.681	37.570	1.111	97.13 %
	7. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	3.112	2.765	347	88.85 %
	8. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	550	540	10	98.18 %

Pendidikan Kesetaraan

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
-1	-2	-3			-4	-5
3.	Pendidikan Kesetaraan				60.14 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	41.45 %	
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	8.290	4.295	3.995	51.81 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				18.69 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	93.45 %	
		Jasa Yang Dibutuhkan	Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia		
	1. Modul belajar	4.295	4.295	-	100.00 %	
	2. Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	214	214	-	100.00 %	
	3. Penyediaan biaya personil peserta didik	5.463.600.000	5.463.600.000	-	100.00 %	
	4. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	135	135	-	100.00 %	
	5. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	21	21	-	100.00 %	
	6. Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	3	3	-	100.00 %	
	7. Perlengkapan belajar	3.208	3.208	-	100.00 %	
	8. PKBM Terakreditasi minimal C	21	10	11	47.62 %	

4.1.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ada dalam upaya pencapaian SPM Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah belum maksimalnya alokasi anggaran dalam upaya penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan. Hal ini dikarenakan SPM Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ditetapkan pada tahun 2018, sementara Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan pada tahun 2021. Solusinya adalah pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan sebagai prioritas belanja daerah ditetapkan dalam Renstra yang baru pada tahun 2021-2026.

4.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Kabupaten/Kota mencakup 12 (dua belas) jenis pelayanan dasar, yaitu:

a. Pelayanan Kesehatan ibu hamil

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan Kesehatan ibu hamil kepada semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu kehamilan.

Standar pelayanan ibu hamil terdiri dari 2 yaitu standar kualitas dan standar kuantitas. Standar kualitas adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal 4 (empat) kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan Kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Standar kuantitas adalah pelayanan yang meliputi 10 T yaitu: Pengukuran BB, Pengukuran TB, Pengukuran LILA, Pengukuran TFU, Penentuan DJJ, Pemberian Imunisasi, Pemberian Tablet FE, Tes Laboratorium, Tatalaksana kasus dan temu wicara.

b. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin



Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin kepada semua ibu bersalin di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh minimal 2 orang yaitu: Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan Kesehatan Pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi. Fasilitas pelayanan Kesehatan meliputi Puskesmas, Rumah Sakit pemerintah maupun swasta, dan Klinik bersalin. Pustu dan Poskesri dapat dikatakan standar jika pemerintah dapat menjamin ketersediaan alat sesuai standar.

c. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir kepada semua bayi di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Standar pelayanan bayi baru lahir meliputi Standar kuantitas, yaitu kunjungan neonatal 1 (KN1) 6-48 Jam, Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3-7 hari, dan Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8-28 hari.

Sedangkan standar kualitas meliputi:

- Pelayanan Neonatal 0-6 jam
 - a. Pemotongan tali pusat
 - b. IMD
 - c. Vit K1
 - d. Pemberian salep mata
 - e. Injeksi HB0
 - Pelayanan Neonatal 6 jam-28 hari
 - a. Konseling perawatan BBL dan ASI eksklusif
 - b. MTBM
 - c. Vit K bagi yang belum
 - d. Imunisasi HB0 untuk usia < 24 jam
 - e. Penanganan rujukan bagi kasus neonatal dan komplikasi
- d. Pelayanan Kesehatan balita



Setiap balita mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan Kesehatan anak balita kepada semua balita di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada anak usia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang diberikan di fasilitas Kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM.

Pelayanan Kesehatan meliputi:

- Pelayanan Kesehatan 0-11 bulan :
 - a. Penimbangan minimal 8 x setahun.
 - b. Pengukuran TB minimal 2 x setahun.
 - c. Pemantauan perkembangan minimal 2 x setahun.
 - d. Pemberian kapsul Vit A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun.
 - e. IDL.
- Pelayanan Kesehatan 12-23 bulan :
 - a. Penimbangan minimal 8 x setahun.
 - b. Pengukuran TB minimal 2 x setahun.
 - c. Pemantauan perkembangan minimal 2 x setahun.
 - d. Pemberian kapsul Vit A dalam 2 x setahun.
 - e. Pemberian IDL lanjutan.
- Pelayanan Kesehatan balita usia 24-59 bulan :
 - a. Penimbangan minimal 8 x setahun.
 - b. Pengukuran TB 2 x setahun.
 - c. Pemantauan perkembangan minimal 2 x setahun.
 - d. Pemberian kapsul Vit A sebanyak 2 x setahun.
- Pemantauan perkembangan balita
- Pemantauan kapsul Vit A
- IDL
- Imunisasi lanjutan
- Pengukuran BB dan TB
- Edukasi dan informasi
- e. Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar.
 Setiap anak pada usia Pendidikan dasar mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan penjangkaran Kesehatan kepada anak usia Pendidikan dasar di wilayah Kabupaten/Kota tersebut pada usia 7 s.d 15 Tahun yang dilakukan oleh Puskesmas.
 Standar pelayanan Kesehatan meliputi:
 - a. Pengukuran TB, BB dan lingkar perut
 - b. Pemeriksaan TD
 - c. Pemeriksaan gula darah
 - d. Anamnesa perilaku beresiko



- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif.
Setiap warga negara Indonesia usia 15-59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining Kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan skrining Kesehatan usia 15-59 tahun, meliputi:

- e. Pengukuran TB, BB dan lingkar perut
 - f. Pengukuran TD
 - g. Pemeriksaan gula darah
 - h. Anamnesa perilaku beresiko
- g. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut

Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining Kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan skrining Kesehatan minimal dilakukan sekali setahun. Skrining kesehatan sesuai standar meliputi:

- i. Pengukuran TB, BB, dan lingkar perut
 - j. Pengukuran TD
 - k. Pemeriksaan gula darah
 - l. Pemeriksaan gangguan mental
 - m. Pemeriksaan gangguan kognitif
 - n. Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
 - o. Anamnesa perilaku beresiko
- h. Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya. Sasaran adalah penduduk usia 15 tahun ke atas. Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan Kesehatan sesuai standar; dan upaya promosi Kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Penderita hipertensi tanpa komplikasi (Jantung, Stroke, Diabetes Mellitus dan Gagal ginjal kronis) perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi untuk menangani komplikasi.

Pelayanan Kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi:

- p. Pengukuran TD dilakukan minimal 1 kali sebulan di fasyankes
- q. Edukasi perubahan gaya hidup dan kepatuhan minum obat



- r. Rujukan bila diperlukan
- i. Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus
- Setiap penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang diabetes mellitus sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya. Sasaran indikator ini adalah penyandang DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotive dan preventif di FKTP. Penduduk yang ditemukan penderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas Kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya. Pelayanan Kesehatan diberikan kepada penyandang DM di FKTP sesuai standar meliputi:
- s. Pengukuran gula darah
 - t. Edukasi
 - u. Terapi farmakologi
- j. Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
- Setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pelayanan Kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah:
- a. Pelayanan promotive preventif yang bertujuan meningkatkan Kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan.
 - b. Pelayanan Kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter puskesmas di wilayah kerjanya.
- Pelayanan Kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi:
- a. Pemeriksaan status mental
 - b. Wawancara
- k. Pelayanan Kesehatan pada orang dengan TB
- Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan TB sebagai upaya pencegahan di wilayah kerjanya. Pelayanan Tuberkulosis sesuai standar adalah pelayanan Kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta. Pelayanan yang diberikan sesuai Pedoman Penanggulangan TB yang berlaku antara lain:
- a) Penegakan diagnosis TB dilakukan secara bakteriologis dan klinis serta dapat di dukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya.

- b) Dilakukan pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke 5 dan akhir pengobatan.
- c) Pengobatan dengan menggunakan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dengan panduan OAT standar.

Gejala utama TB adalah batuk selama 2 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam hari tanpa aktivitas fisik dan badan meriang lebih dari satu bulan. Kegiatan promotive dan preventif antara lain penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara aktif, pemberian KIE untuk pencegahan penularan dengan penerapan etika batuk, pengendalian factor risiko dan pemberian obat pencegahan. Prinsip pelayanan TB adalah penemuan orang dengan TB sedini mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau “TOSS TB” (Temukan, Obati sampai sembuh).

Pemeriksaan pelayanan Kesehatan TB sesuai standar meliputi:

- a. Pemeriksaan anamnesia pertama yaitu dari pemeriksaan fisik sampai ke Pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh dokter atau perawat poli di Puskesmas atau dirumah sakit
 - b. Pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan laboratorium menggunakan TCM (Tes Cepat Molekuler) atau menggunakan mikroskopis di Puskesmas dan Rumah sakit
 - c. Pemeriksaan klinis menggunakan rontgent/torax dilakukan di rumah sakit
1. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna Napza, dan warga binaan Lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna Napza, dan warga binaan Lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga Kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika.

Pelayanan Kesehatan meliputi:

- a. Pemberian informasi terkait HIV-AIDS
- b. Pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV dengan menggunakan alat tes sesuai standar nasional yang ditetapkan



- c. Orang dengan hasil pemeriksaan HIV positif harus dirujuk ke fasilitas mampu menangani untuk mendapatkan pengobatan ARV dan konseling tentang HIV dan AIDS bagi orang dengan HIV (ODHA) dan pasangannya.
- d. Orang dengan infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna Napza, dan warga binaan Lembaga permasyarakatan dengan hasil pemeriksaan HIV negative harus dilakukan pemeriksaan ulang minimal setelah 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dari pemeriksaan yang pertama.

4.2.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Capaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintah dalam pelayanan adalah 100 persen (%).

**Tabel
3.1**

Target dan Capaian SPM Kesehatan Tahun 2022						
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah yang harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah Total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase
I	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	679	679	0	100
	1 Vaksin Tetanus Difteri (Td)		956	956	0	100
	2 Tablet Tambah Darah		860400	860400	0	100
	3 Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil		9560	9560	0	100
	*Tes Kehamilan					
	*Pemeriksaan HB					
	*Pemeriksaan Golongan Darah					
	*Pemeriksaan Glukoprotein Urin					
	4 Kartu Ibu/Rekam Medis Ibu		9560	9560	0	100
	5 Buku KIA		9560	9560	0	100
II	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	648	648	0	100
	1 Formulir Photograf		9128	9128	0	100
	2 Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu)		9560	9560	0	100
	3 Buku KIA		9560	9560	0	100
III	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	618	618	0	100
	1 Vaksin Hepatitis B0		8691	8691	0	100
	2 Vitamin K1 Injeksi		8691	8691	0	100
	3 Salep/Tetes Mata Antibiotik		8691	8691	0	100
	4 Formulir Bayi Baru Lahir		8691	8691	0	100
	5 Formulir MTBM		26073	26073	0	100
	6 Buku KIA		9560	9560	0	100
IV	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3036	3036	0	100
	1 Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku		42708	42708	0	100
	2 Formulir DDTK		42708	42708	0	100
	3 Buku KIA		9560	9560	0	100
	4 Vitamin A Biru		17382	17382	0	100
	5 Vitamin A Merah		69026	69026	0	100
	6 Vaksin Imunisasi Dasar:		42708	42708	0	100
	*HB0					
	*BCG					
	*Polio					
	*IPV					
	*DPT-HB-Hib					
	*Campak Rubella					
	7 Vaksin Imunisasi Kanjutan:		42708	42708	0	100
	*DPT-HB-Hib					
	*Campak Rubella					
	8 Jarum Suntik dan BHP		42708	42708	0	100
	9 Peralatan Anafilaktik		21	21	0	100

V	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	6198	6198	0	100
	1 Buku Raport Kesehatan		81280	81280	0	100
	2 Buku Pemantauan Kesehatan		81280	81280	0	100
	3 Kuesioner Skrining Kesehatan		81280	81280	0	100
	4 Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah		81280	81280	0	100
	5 Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah		81280	81280	0	100
VI	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan Layanan Kesehatan	241811	241811	0	100
	1 Pedoman dan Media KIE		292943	292943	0	100
	*Alat Ukur Berat Badan					
	*Alat Ukur Tinggi Badan					
	*Alat Ukur Lingkar Perut					
	*Tensimeter					
	*Glukometer					
	*Tes Strip Gula Darah					
	*Lancet					
	*Kapas Alkohol					
	*KIT IVA Test					
	2 Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistim Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)		20	20	0	100
VII	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	4875	4875	0	100
	1 Strip Uji Pemeriksaan		68574	68574	0	100
	*Gula Darah					
	*Kolesterol					
	2 Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		49994	49994	0	100
	3 Buku Kesehatan Lansia		49994	49994	0	100
VIII	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	82305	82305	0	100
	1 Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE		42	42	0	100
	2 Tensimeter		228	228	0	100
	3 Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistim Informasi PTM		20	20	0	100
IX	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	2058	2058	0	100
	1 *Glukometer		2058	2058	0	100
	*Strip Tes Gula Darah					
	*Kapas Alkohol					
	2 Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistim Informasi PTM		2058	2058	0	100
	3 Pedoman dan Media KIE		42	42	0	100

X	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan Gangguan Jiwa Bera (ODGJ)	1000	1000	0	100
	1 Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa Terbaru (Bila sudah tersedia)		21	21	0	100
	2 Kit Berisi 2 Alat Fiksasi		21	21	0	100
	3 Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan		1000	1000	0	100
	4 Media KIE		42	42	0	100
XI	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Warga Negara Terduga TB yang	5329	5329	0	100
	1 Media KIE (Leaflet, Lembar balik, Poster, Banner)		42	42	0	100
	2 Reagen Zn TB		7339	7339	0	100
	3 Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95		7339	7339	0	100
	4 Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering		7339	7339	0	100
	5 Catridge Tes Cepat Molekuler		7339	7339	0	100
	6 Formulir Pencatatan dan Pelaporan		7339	7339	0	100
	7 Pedoman/SOP		7339	7339	0	100
XII	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan risiko terinfeksi HIV		14595	14595	0	100
	1 Media KIE Berupa Lembar balik. Leaflet, poster, banner		21	21	0	100
	2 Tes cepat HIV (RDT) pertama		13542	13542	0	100
	3 bahan medis habis pakai		13542	13542	0	100
	*Hanscoon					
	*Alkohol swab					
	*Plester					
	*Lancet					
	*Jarum spuit yang sesuai/Vacutainer dan jarum sesuai					
	* Alat tulis					
	* Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK					

4.2.3 Anggaran

Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2022					
No	Indikator	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah Kab/Kota	874.394.097
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah Kab/Kota	519.486.334
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah Kab/Kota	23.450.000
4	Pelayanan Kesehatan Pada Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah Kab/Kota	362.909.016
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah Kab/Kota	465.326.070
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah Kab/Kota	523.058.702
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah Kab/Kota	332.335.420
8	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah Kab/Kota	49.395.000
9	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita DM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita DM	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah Kab/Kota	50.000.000
10	Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah Kab/Kota	321.223.280
11	Pelayanan Kesehatan Terduga TB	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Terduga TB	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah Kab/Kota	38.400.000
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah Kab/Kota	20.991.500



4.2.4 Dukungan Personil

- a. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan ibu hamil meliputi:
 1. Dokter/dokter spesialis kebidanan dan kandungan, atau
 2. Bidan, atau
 3. Perawat
- b. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan ibu bersalin meliputi:
 1. Dokter/dokter spesialis anak, atau
 2. Bidan, atau
 3. Perawat
- c. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir meliputi:
 1. Dokter/dokter spesialis anak, atau
 2. Bidan
 3. Perawat
- d. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan Kesehatan Balita meliputi:
 1. Tenaga Kesehatan:
 - a. Dokter,
 - b. Bidan
 - c. Perawat
 - d. Gizi
 2. Tenaga non Kesehatan:
 - a. Guru Paud
 - b. Kader kesehatan
- e. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar meliputi:
 1. Tenaga Kesehatan
 - a. Dokter/dokter gigi
 - b. Bidan
 - c. Perawat
 - d. Gizi
 - e. Tenaga Kesehatan masyarakat
 2. Tenaga non Kesehatan
 - a. Guru

- b. Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor
- f. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif meliputi:
 - 1. Tenaga Kesehatan
 - a. Dokter,
 - b. Bidan
 - c. Perawat
 - d. Gizi
 - e. Tenaga Kesehatan masyarakat
 - 2. Tenaga non Kesehatan terlatih atau me
 - 3. mempunyai kualifikasi tertentu, kader kesehatan
- g. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif meliputi:
 - 1. Tenaga Kesehatan
 - a. Dokter
 - b. Bidan
 - c. Perawat
 - d. Gizi
 - e. Tenaga Kesehatan masyarakat
 - 2. Tenaga non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu, kader kesehatan
- h. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan Kesehatan Pada penderita hipertensi meliputi:
 - 1. Dokter
 - 2. Bidan
 - 3. Perawat
 - 4. Tenaga Kesehatan masyarakat
- i. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan Kesehatan Pada penderita Diabetes Mellitus meliputi:
 - 1. Dokter
 - 2. Bidan
 - 3. Perawat
 - 4. Tenaga Kesehatan masyarakat
- j. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat meliputi:
 - 1. Dokter, atau

2. Perawat terlatih jiwa
 3. Tenaga Kesehatan lainnya
- k. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Tuberkulosis meliputi:
1. Tenaga Kesehatan
 - a. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru,atau
 - b. Perawat
 - c. Analis Teknik laboratorium medik (ATLM)
 - d. Penata rontgen
 - e. Tenaga Kesehatan masyarakat
 2. Tenaga non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu, kader kesehatan
- l. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency virus + HIV)
1. Tenaga Kesehatan
 - a) Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin
 - b) Perawat
 - c) Bidan
 - d) ATLM
 - e) Tenaga Kesehatan masyarakat
 2. Tenaga non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu:
 - a) Pendamping
 - b) Penjangkauan

4.2.5 Hasil Capaian

Realisasi Target Anggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2022					
No	Indikator	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	874.394.097	607.426.350	69
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	519.486.334	210.272.850	40
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	23.450.000	16.563.900	71
4	Pelayanan Kesehatan Pada Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Balita	362.909.016	247.633.700	68
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	465.326.070	366.071.350	79
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	523.058.702	325.552.500	62
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	332.335.420	74.201.800	22
8	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	49.395.000	41.735.600	84
9	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita DM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita DM	50.000.000	43.695.550	87
10	Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	321.223.280	176.257.699	55
11	Pelayanan Kesehatan Terduga TB	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Terduga TB	38.400.000	37.908.450	99
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	20.991.500	18.428.200	88

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Hal yang menjadi permasalahan pada pelayanan standar ibu hamil adalah:

- Belum optimalnya Kerjasama lintas program dan lintas sector serta kurangnya dukungan wali nigari/Pemerintahan di Kecamatan terkait penyediaan sarana dan prasarana di Poskesri.
- Kurangnya sarana dan prasarana untuk pemeriksaan ibu hamil di pustu dan poskesri sebagaimana yang diatur dalam Permenkes 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.
- Ketersediaan USG di Puskesmas, dari 21 Puskemas yang baru 10 Puskesmas yang memiliki USG.
- Petugas masih banyak yang belum mengikuti Pelatihan Ter UP date tentang kegawatdaruratan Maternal Neonatal.

- e. Pencatatan dan Pelaporan yang belum terinput secara maksimal ke dalam sistim Aplikasi e kohort karena keterbatasan tenaga dan sarana /Laptop / PC di Puskesmas.
Solusi dalam pemecahan masalah diatas adalah:
 - a. Melengkapi sarana prasaran yang dibutuhkan.
 - b. Menambah anggaran untuk pelatihan bagi tenaga Kesehatan.
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Hal yang menjadi permasalahan pada pelayanan standar ibu hamil adalah:
 - a. Belum optimalnya Kerjasama lintas program dan lintas sector serta kurangnya dukungan wali nigari/Pemerintahan di Kecamatan terkait penyediaan sarana dan prasarana di Poskesri.
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pemeriksaan ibu bersalin di pustu dan poskesri sebagaimana yang diatur dalam Permenkes 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.
 - c. Ketersediaan USG di Puskesmas, dari 21 Puskemas yang baru 10 Puskesmas yang memiliki USG.
 - d. Petugas masih banyak yang belum mengikuti Pelatihan Ter UP date tentang kegawatdaruratan Maternal Neonatal.
 - e. Pencatatan dan Pelaporan yang belum terinput secara maksimal ke dalam sistim Aplikasi e kohort karena keterbatasan tenaga dan sarana /Laptop / PC di Puskesmas.
Solusi dalam pemecahan masalah diatas adalah:
 - a. Melengkapi sarana prasaran yang dibutuhkan.
 - b. Menambah anggaran untuk pelatihan bagi tenaga Kesehatan.
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir
Permasalahan tidak tercapainya pelayanan Kesehatan pada bayi baru lahir di Kabupaten Pesisir Selatan adalah:
 - a. Belum optimalnya Kerjasama lintas program dan lintas sector serta kurangnya dukungan wali nigari/Pemerintahan di Kecamatan terkait penyediaan sarana dan prasarana di Poskesri.
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pemeriksaan bayi di Pustu dan Poskesri sebagaimana diatur dalam Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas.
 - c. Petugas masih banyak yang belum mengikuti Pelatihan Ter Up date tentang kegawatdaruratan Maternal Neonatal.
 - d. Pencatatan dan pelaporan yang belum terinput secara maksimal ke dalam aplikasi e kohort karena keterbatasan tenaga dan sarana/laptop/PC di Puskesmas.
Solusi dalam pemecahan masalah diatas diantaranya:
 - a. Melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
 - b. Menambah anggaran untuk pelatihan bagi tenaga Kesehatan.
4. Pelayanan Kesehatan Balita

Permasalahan tidak tercapainya pelayanan Kesehatan pada bayi baru lahir di Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- a. Belum optimalnya Kerjasama lintas program dan lintas sector serta kurangnya dukungan wali nigari/Pemerintahan di Kecamatan terkait penyediaan sarana dan prasarana di Poskesri.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pemeriksaan bayi di Pustu dan Poskesri sebagaimana diatur dalam Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas.
- c. Petugas masih banyak yang belum mengikuti Pelatihan Ter Update tentang kegawatdaruratan Maternal Neonatal.
- d. Pencatatan dan pelaporan yang belum terinput secara maksimal ke dalam aplikasi e kohort karena keterbatasan tenaga dan sarana/laptop/PC di Puskesmas.

Solusi dalam pemecahan masalah diatas diantaranya:

- a. Melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
 - b. Menambah anggaran untuk pelatihan bagi tenaga Kesehatan.
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Permasalahan dalam pencapaian pelayanan standar pada anak usia Pendidikan dasar di Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- a. Keterbatasan anggaran dalam melakukan screening pada anak usia Pendidikan dasar.
- b. Buku rapor Kesehatan tidak memadai untuk seluruh anak sekolah.

Solusi dari pemecahan masalah diatas adalah:

- a. Penambahan anggaran untuk kegiatan pelayanan Kesehatan pada anak usia dasar.
 - b. Penyediaan buku rapor Kesehatan ku.
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Permasalahan pada pelayanan usia lanjut adalah:

- a. Pengadaan logistic berupa strip untuk skrining Lansia sebagai penunjang indicator program lansia tidak ada.
- b. Sering terjadi penggantian tanggungjawab program lansia di Puskesmas sehingga pemahaman tentang indicator program lansia tidak maksimal.

Solusi dari permasalahan diatas adalah:

- a. Menambah anggaran untuk pembelian logistic untuk penunjang program lansia diantaranya strip gula darah, strip kolesterol dan buku Kesehatan lansia.
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Permasalahan :

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produkti hun 2022 sebesar 100% Capaian ini sudah mencapai target namun dalam monitoring dan evaluasi dilapangan didapatkan beberapa kendala yang menjadi permasalahan seperti :



- a. Kegiatan skrining Deteksi Dini yang belum optimal (Usia Produktif, DM, Hipertensi).
- b. Puskesmas lebih fokus pada pelaksanaan vaksin covid (2021).
- c. Belum optimalnya kerjasama lintas program dan lintas sektor serta kurangnya dukungan wali nagari/Pemerintahan di Kecamatan terhadap program penyakit tidak menular dan kegiatan deteksi dini.
- d. Penyediaan Bahan Habis Pakai (BHP) masih terbatas (hanya 30% dari sasaran.
- e. Belum terlaksananya kegiatan Posbindu secara kontiniu dan belum terbentuknya Kader Posbindu PTM di Kecamatan.
- f. Pencatatan dan pelaporan yang belum terinput secara maksimal kedalam sistim Aplikasi karena keterbatasan tenaga dan sarana / laptop/ PC di Puskesmas.

Solusi :

- a. Kolaborasi program dengan melakukan skrining bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan dari program lain misalnya kegiatan vaksinasi.
 - b. Melakukan skrining mobile di setiap instansi pemerintah, tempat ibadah dan tempat umum.
 - c. Pembentukan kader Posbindu PTM di Kecamatan.
 - d. Penambahan BMHP sesuai sasaran dari berbagai sumber dana, misal DAK, dll.
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi tahun 2022 adalah sebesar 100%. Capaian tersebut sudah memuaskan dan sesuai dengan target, tapi dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala seperti :
- a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining kesehatan sehingga banyak orang yang tidak mengetahui jika dirinya menderita hipertensi.
 - b. Hipertensi dianggap sepele sehingga banyak orang dengan hipertensi tidak melakukan pengobatan secara rutin.
 - c. Pengadaan alat media infografis seperti leaflet , banner tidak ada / keterbatasan dana untuk pembuatan media infografis.
 - d. Keterbatasan alat / Posbindu kit dalam melakukan kegiatan deteksi dini seperti alat pengukur tensi yang sudah banyak rusak karena pemakaian.

Solusi :

- a. Penerbitan regulasi yang mengikat dunia usaha, pendidikan, institusi, untuk melakukan skrining di tempat masing masing.
- b. Pemenuhan media promosi kesehatan termasuk media infografis Peningkatan kapasitas pengelola/nakes di Puskesmas secara berkala.

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus

Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus tahun 2022 sebesar 100%. Gejala penyakit diabetes mellitus yang mudah diketahui membuat penderitanya lebih rutin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Sehingga capaian ini dapat mencapai target yang ditetapkan. Meskipun demikian upaya peningkatan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus tetap harus ditingkatkan.

Solusi :

- a. Peningkatan pelayanan dan peningkatan kapasitas pengelola /nakes.
- b. Pemenuhan media promkes termasuk media infografis.

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Capaian Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat tahun 2022 sebesar 100 %. Capaian tersebut sudah sesuai target dari dalam pelaksanaannya berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan ditemukan beberapa kendala seperti :

- a. Pencatatan dan pelaporan dari UKP Tingkat II belum terakomodir dengan baik.

Solusi :

- a. Membuat format pelaporan SPM Kesehatan untuk rumah sakit.
- b. Pemenuhan media promkes termasuk media infografis.

11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- a. Belum optimalnya kegiatan screening/pelacakan TB di masyarakat.
- b. Masih rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat untuk memeriksakan diri apabila ada gejala.
- c. Kurangnya dukungan dari lintas sector di kecamatan/wali nagari terhadap Program TB.
- d. Belum terbentuknya kader dan tidak adanya alokasi anggaran bagi kader yang melakukan pelacakan/temuan kasus TB
- e. Belum optimalnya anggaran untuk alokasi kegiatan Program TB, contohnya : Pembentukan KOPI TB.
- f. Masih adanya anggapan yang salah dari masyarakat/stigma negative untuk penyakit TB.

Strategi pemecahan masalah (Solusi) :

- a. Peningkatan scrining.
- b. Penguatan forum organisasi profesi Kesehatan.
- c. Peningkatan sosialisasi, edukasi, promosi.
- d. Penguatan komitmen pemerintah daerah termasuk dalam

- penganggaran.
- e. Peningkatan pemberdayaan masyarakat/kader.
12. Pelayanan Kesejahteraan Orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)
- Faktor-Faktor yang menjadi kendala pencapaian HIV di Kabupaten Pesisir Selatan adalah:
- a. Belum optimalnya kegiatan screening/pelacakan pada kelompok resiko HIV (LSL, Waria, Penasum).
 - b. Masih rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat untuk memeriksakan diri apabila mengalami gejala.
 - c. Belum terlaksananya integrasi dengan lintas sector secara optimal.
 - d. Belum terbentuknya kader yang ikut dalam pelacakan kasus HIV.
 - e. Anggaran yang kurang memadai dalam pelaksanaan operasional Program HIV.
- Strategi dalam pemecahan masalah pencapaian SPM (solusi) yang dapat dilakukan adalah:
- a. Peningkatan screening pada kelompok resiko terinfeksi HIV
 - b. Meningkatkan koordinasi lintas sector dan pemberdayaan masyarakat untuk screening HIV
 - c. Meningkatkan sosialisasi/edukasi/promosi (penyuluhan dan pengadaan media KIE) Pelatihan konselor bagi petugas puskesmas dan pengusulan penambahan puskesmas PDP.

4.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

Berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018, jenis Standard Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kota yaitu :

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Urusan Jalan

2. Penataan Bangunan Gedung
3. Penataan Bangunan dan lingkungannya
4. Sistem Penyediaan Air Minum
5. Sistem Pengelolaan Air Limbah dan Drainase Lingkungan serta Persampahan
6. Pembinaan Jasa Konstruksi
7. Operasional Kebersihan dan Pertamanan

Sistem Penyediaan Air Minum dan Sistem Pengelolaan Air Limbah merupakan kewajiban Dinas PUTR untuk pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2022.

4.3.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan.

- Target pencapaian SPM pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- Target pencapaian SPM yang ditetapkan untuk penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik sebanyak 500 Rumah.

4.3.3 Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk pencapaian SPM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022 adalah :

- Anggaran untuk pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar Rp. 6.683.129.650,-
- Anggaran untuk penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik sebesar Rp. 3.928.111.142,-

4.3.4 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

Untuk pencapaian target SPM, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung oleh personil pada Bidang Cipta Karya Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

4.3.5 Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerimaan layanan.

Hasil Capaian SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022 sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah baik dari segi anggaran maupun dari penerimaan layanan.

Hasil capaian SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

- Jenis pelayanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, capaian SPM 100 % dengan jumlah penerima layanan 2.854 Sambungan Rumah dan realisasi anggaran 98,63 % sebesar Rp. 6.591.968.513,- (anggaran fisik 100 %);
- Jenis pelayanan pemenuhan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, capaian SPM 100 % dengan jumlah penerimaan layanan 500 Sambungan Rumah dan realisasi anggaran 99,38 % sebesar Rp. 3.903.807.892,- (anggaran fisik 100%)

4.3.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah

- **Permasalahan**

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi masalah eksternal maupun internal.

Adapun masalah dan kendala yang dihadapi adalah :

1. **Masih terbatasnya kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan tercapainya pelayanan dasar di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.**
2. **Keterbatasan ketersediaan data dan informasi pendukung.** Ketersediaan data dan informasi yang cukup terbatas dan kurang valid, sangat berdampak terhadap implementasi capaian target penerapan indikator SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Data dan informasi yang

digunakan akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam penetapan target sasaran dan tujuan dari masing-masing indikator SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang ada.

3. **Keterbatasan alokasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung capaian target penerapan indikator SPM.**

Belum ada alokasi dana yang dianggarkan khusus untuk percepatan SPM, anggaran tersebut masih bersifat menyebar dan tergabung dalam kegiatan lain. Pemerintah daerah masih tergantung dengan bantuan dana APBD Provinsi dan APBN..

4. **Permasalahan lain yang menjadi kendala dalam pencapaian target SPM**

Indikator yang ada tidak sesuai dengan kondisi objektif di daerah, petugas pengampu SPM dari masing-masing SKPD sering berganti-ganti sehingga mengalami kesulitan dalam pemberian pemahaman untuk penerapan dan percepatan SPM.

- **Solusi Permasalahan**

Untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target penerapan indikator SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu :

1. Melengkapi dan menyempurnakan ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam mencapai target penerapan indikator SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Mengusulkan ketersediaan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target penerapan indikator SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan, APBD Propinsi Sumatera Barat, APBN maupun sumber-sumber pendanaan lainnya.
3. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi pencapaian target SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

4.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan uraian Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 dapat kita pahami bahwa standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal untuk bidang perumahan rakyat, yaitu; penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi/kabupaten kota; fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten Kota.

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- 1) Pada saat masa pasca bencana;
- 2) Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
- 3) Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.

4.4.2 Target Pencapaian SPM

Capaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan dengan target capaian kinerja pemerintah dalam pelayanan adalah 100%.

No	Standar Pelayanan		Batas Waktu Pencapaian (tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
	Indikator	Nilai		
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	100 %	2022	Dinas Perkimtan LH

4.4.3 Anggaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Anggaran Tersedia
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp. 320.000.000

4.4.4 Dukungan Personil

Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana

- 1. Aparatur Sipil Negara : 9 Orang
- 2. Tenaga Fasilitator Lapangan : 1 Orang

4.4.5 Hasil Capaian

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PRESENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	3	3		100

4.4.6 Kendala, Permasalahan, Dan Solusi

Penanganan Rehabilitasi Rumah korban bencana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup belum maksimal.Adapun penyebab dari masalah tersebut yakni:

- 1. Keterbatasan ketersediaan data dan informasi pendukung.
Ketersedian data dan informasi yang cukup terbatas dan kurang valid, sangat berdampak terhadap implementasi capaian target penerapan indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat. Data dan informasi yang digunakan akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam penetapan target sasaran dan tujuan dari masing-masing indikator SPM bidang Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan yang ada.
- 2. Keterbatasan alokasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung capaian target penerapan indikator SPM.Anggaran masih terbatas pada pemenuhan rumah layak bagi masyarakat korban bencana dan belum ada alokasi dana yang



dianggarkan khusus untuk percepatan SPM dalam penanganan rumah masyarakat korban relokasi program pemerintan.

Dari permasalahan di atas, maka pada tahun 2023 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan menganggarkan dana khusus untuk pembangunan rumah korban bencana sebesar Rp. 400.000.000 dan rehabilitasi rumah korban bencana Rp. 450.166.829.

4.5 BIDANG URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT. (SATPOL PP DAN DAMKAR)

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM Urusan Ketenteraan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 3 (tiga) Sub Urusan, yaitu:

- a. Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
- b. Sub Urusan Kebakaran; dan
- c. Sub Urusan Bencana Daerah.

Jenis Pelayanan SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, dengan Jenis Pelayanan Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum.

Sedangkan Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Standar operasional prosedur Satpol PP;
- b. Standar sarana prasarana Satpol PP;
- c. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
- d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Penerima Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yaitu warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Perkada.

4.5.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

SPM Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan yaitu mencakup Standar Pelayanan yang Terkena Dampak Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada dengan target pencapaian 100% meliputi:

- a. Pelayanan kerugian materil.

Kerugian materil adalah berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada. Kerugian materil terdiri atas :

- 1) Rusak ringan yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan perda dan perkada yang sedang dilakukan.
- 2) Rusak sedang dan/atau berat yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan perda dan perkada yang sedang dilakukan.

b. Pelayanan pengobatan.

Berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cidera fisik ringan diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/ pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang/berat.

Selanjutnya Jenis layanan yang menjadi SPM adalah Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban umum terhadap jumlah penegakan Perda sesuai mutu, yang mana yang menjadi indikatornya adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada sesuai mutu yang ditargetkan mencapai 85 % pada tahun 2022.

4.5.3 Anggaran

Dalam pelaksanaan SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari 2 Program dan 3 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.855.531.558 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.837.740.358 untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Realisasi Anggaran SPM Trantibum

No	Uraian Program/Kegiatan	Rencana dan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2022				
		Rencana	Realisasi Keuangan	%	Sisa	%
I	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum pada kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	318.757.208	308.516.008	96,7%	10.241.200	3,3 %
1	Sub kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan	282.097.478	277.964.878	98,5 %	4.132.600	1,5 %



	pengawalan					
2	Sub kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	36.659.730	30.551.130	83%	6.108.600	17%
II	Program peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1.536.774.350				
	Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.536.774.350	1.529.224.350	99,5 %	7.550.000	0,5%
	JUMLAH	1.855.531.558	1.837.740.358	99%	17.791.200	1%

4.5.4 Dukungan Personil

Hal-hal yang menyangkut Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja salah satunya adalah dukungan personil. Adapun jumlah personil yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Dukungan Personil SPM Trantibum

No	Uraian	Personil	
		Satpol PP	
		PNS	Non PNS
1	Pejabat Struktural / Fungsional Penyetaraan	12	-
2	Staf PNS	19	-
3	Petugas Piket	-	50
4	Satgas Trantib	-	26
5	Petugas Kebersihan	-	2
6	Staf Administrasi	-	4
7	Pramu Kantor	-	2
8	Supir	-	1
		31	85
Jumlah		116	

4.5.5 Hasil capaian

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Keterangan (permasalahan)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Jumlah penduduk yang berhak mendapat layanan	Jumlah penduduk yang terlayani	Capaian = (4):(3)X100%				
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	1	1	100%	tidak dianggarkan	-	-	-
2	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda dan perkara sesuai mutu..	95.12%	101	99	98,02%	tidak ada masalah	peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan
								peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
								Peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/Kota	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	penyediaan jasa pelayanan umum kantor



4.5.6 Permasalahan Dan Solusi

Walaupun pencapaian SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Tahun 2022 hampir mencapai 100% namun terdapat beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. Adapun beberapa permasalahan adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah Personel dalam melakukan Pelayanan masih dinilai kurang memadai; dan
- b. Keamanan layanan belum sesuai dengan keinginan masyarakat yang memerlukan pelayanan yang optimal.

Adapun solusi atau tindak lanjut yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Diperlukan penambahan personel di Satpol PP yang ditempatkan di masing-masing kecamatan (15 Kecamatan) yang berkompeten; dan
- b. Diperlukan pelatihan/penyegaran Bimtek Pelayanan PRIMA kepada *frontliners*/petugas layanan secara kontinue/berkelanjutan.

(PEMADAM KEBAKARAN)

Salah satu gambaran pemenuhan indikator SPM bidang ketentraman Umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran oleh Satpol PP dan Damkar tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan :
Pada tahun 2021 data dari bidang Trantibum Satpol PP telah terjadi pelanggaran dan pengaduan Trantibum dalam Kabupaten/Kota.
- b. Jumlah Pengaduan yang ditangani dibagi jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk dikali 100% Cakupan Rasio Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten Pesisir Selatan. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 51,11% Hal ini berdasarkan pada luas potensi kebakaran di Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Waktu Tanggap (Respon Time Rate) penanganan kebakaran Dari 45 kejadian, tingkat waktu tanggap mencapai 111,4 menit/kejadian.

A. Dukungan Personil

Jumlah Pegawai Satpol PP Januari s.d bulan Desember 2021 adalah 206 Orang dengan status sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil : 47 Orang
- b. Non Pegawai Negeri Sipil : 159 Orang
- c. PPNS Satuan Polisi Pamong Praja: 1 Orang

Rincian Pegawai Satpol PP dengan tingkat pendidikan:



a. Tingkatan Pendidikan status PNS

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	7 orang
2	S1	15 orang
3	D3	0 orang
4	SLTA	25 orang
5	SLTP	0 orang
Jumlah Keseluruhan		47 orang

b. Kepangkatan/Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	I	0 orang
2	II	24 orang
3	III	18 orang
4	IV	5 orang
Jumlah Keseluruhan		47 orang

c. Jenis Kediklatan

No	Golongan	Jumlah
1	Diklat STRUKTURAL	8 Orang
2	Diklat FUNGSIONAL	-
3	Diklat PEMERINTAHAN	-
4	Diklat TEKNIS	-
5	Diklat Dasar POL. PP	16
Jumlah Keseluruhan		24 Orang

d. Jumlah eselon :

- 1) Eseon II : 1 orang
- 2) Eselon III: 4 orang
- 3) Eselon IV: 11 orang

B. Permasalahan dan Solusi.

a. Permasalahan

- 1) Kurangnya sarana mobilitas yang cukup memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Patroli wilayah se kabupaten Pesisir Selatan.
- 2) Jumlah PPNS dalam lingkup Satpol PP yang minim/kurang memadai.

b. Solusi

- 1) Mengajukan alokasi anggaran berkaitan sarana mobilitas tersebut dengan berkoordinasi dan berkonsultasi pada pihak pemerintah kabupaten Pesisir Selatan maupun pemerintah provinsi/pusat melalui bantuan keuangan/hibah.
- 2) Merencanakan penambahan personil anggota Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengikuti pendidikan PPNS.

(BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan SPM program pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021- 2026 sebagai berikut :

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar sub urusan bencana menurut Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota meliputi :

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana paling sedikit memuat :

- 1) Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB).
- 2) Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana.

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana setidaknya memuat :

- 1) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).
- 2) Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon).
- 3) Pelatihan pencegahan dan mitigasi.
- 4) Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 5) Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 6) Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana paling sedikit memuat :
- 1) Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas.
 - 2) Respon cepat darurat bencana.
 - 3) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana.
 - 4) Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.
 - 5) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

4.5.2 Target Pencapaian SPM

- a. Target Pencapaian SPM Bidang Bencana
Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kapasitas Dalam Menghadapi Bencana	Level Peningkatan Kapasitas Dalam Penanggulangan bencana	Level	5
2	Terwujudnya Penanganan bencana Yang Profesional	Persentase Kejadian Bencana yang bisa ditangani sesuai standar Kapasaitas Bencana	%	75
3	Pulihnya Daerah Terdampak Bencana	1. Persentase terbangunnya Fasilitas Publik Daerah Dampak Bencana.	%	25
		2. Persentase Pulihnya Aktivitas Masyarakat.	%	100

b. Target Pencapaian

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	TARGET KINERJA UTAMA PADA TAHUN						
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Berkurangnya Risiko Bencana.		Indeks Risiko Bencana	190	180	175	170	165	160	155
		1.Meningkatnya Kapasitas Dalam Menghadapi Bencana	Level Peningkatan Kapasitas Dalam Penanggulangan bencana	2	3	3	4	4	5	5
		2.Terwujudnya Penanganan bencana Yang Profesional	Persentase Kejadian Bencana yang bisa ditangani sesuai standar Kapasaitas Bencana	70%	71%	72%	73%	74%	75%	75%
		3.Pulihnya Daerah Terdampak Bencana	1. Persentase terbangunnya Fasilitas Publik Daerah Dampak Bencana.	10%	13%	17%	20%	23%	25%	30%
			2. Persentase Pulihnya Aktivitas Masyarakat.	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%



A. Realisasi

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian
1.	Program Penanggulangan Kebencanaan	Persentase masyarakat yang mengikuti simulasi bencana dan mendapat informasi kebencanaan dan pertolongan	4.126.911.404	2.323.898.754	26%
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/kota	Rp. 43.125.982	Rp. 42.409.550	95%
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/kota	Rp. 66.033.592	Rp. 65.084.350	99%
		Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Rp. 10.595.500	Rp. 10.539.150	99%
		Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota (Dana Hibah/Luncuran tahun 2022)	Rp. 7.035.296.972	Rp. 7.025.680.456	98%
		Pencaraian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencan Kabupaten/Kota	Rp. 1.538.783.279	Rp. 1.527.436.893	99%
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencan Kabupaten/Kota	Rp. 32.834.350	Rp. 32.729.250	99%

4.5.3 Anggaran

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran		Alokasi Anggaran (Rp)
PROGRAM PENANGGULANGAN KEBENCANAAN				
1.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/kota	a.	Tersusunnya Laporan Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana	Rp. 31.090.084
2.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/kota	a.	Terpeliharanya Peralatan Peringatan Dini (EWS)	Rp. 66.033.592
3.	Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	a.	Terwujudnya Guru-Guru yang Tangguh Terhadap Bencana	Rp. 10.569.500
4.	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota (Dana Hibah/Luncuran tahun 2022)	a.	Terwujudnya Rehabilitasi Kerusakan Infrastruktur Akibat Bencana	Rp. 7.484.617.874
5.	Pencaraian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencan Kabupaten/Kota	a.	Terselenggaranya Operasional SAR & Tim Reaksi Cepat (TRC) di Kabupaten Pesisir Selatan	Rp. 1.377.378.850
6.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencan Kabupaten/Kota	b.	Terselenggaranya Operasional Logistik dan Perlengkapan Gudang Logistik	Rp. 30.710.000

4.5.4 Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM sub urusan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh personil sebanyak 92 orang terdiri dari perempuan sebanyak 11 orang (15%), dan laki-laki 81 orang (85%). PNS sebanyak 30 orang dan Pegawai Kontrak 62 orang dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel 1
Komposisi Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Kondisi 31 Desember 2022

NO	GOLONGAN	ESELON			NON ESELON		JUMLAH
		II	III	IV	FUNGSIONAL	STAF	
1	GOLONGAN IV	1	3	0	0	4	8
2	GOLONGAN III	0	1	1	7	10	19
3	GOLONGAN II	0	0	0	1	2	3
4	GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0
5	Non PNS (PHL) Dan Satgas SAR dan TRC	0	0	0	0	0	62
	JUMLAH	1	4	1	8	16	92

Tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh 30 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPBD adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2. Tingkat Pendidikan Formal

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Magister S2	6	20
2	Sarjana S1	18	60
3	Diploma III	3	10
4	SLTA	3	10

Pangkat dan golongan dari 30 orang PNS BPBD adalah sebagai berikut:

- a) Golongan II : 3 orang (10%)
- b) Golongan III : 20 orang (71%)
- c) Golongan VI : 7 orang (19%)

dengan jumlah Pejabat struktural pada BPBD sebanyak 6 orang.

4.6 BIDANG URUSAN SOSIAL

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial memuat tentang ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap penyandang masalah kesejahteraan sosial secara minimal. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa penerima pelayanan dasar merupakan warga Negara dengan ketentuan : penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, korban bencana.

Dalam peraturan menteri tersebut lebih lanjut ditentukan 4 jenis pelayanan dasar bidang sosial serta indikator dan target SPM yang harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti dengan indikator; Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti.
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti dengan indikator; Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti dengan indikator; Jumlah lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis Terlantar di luar Panti dengan indikator; Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana dengan indikator : jumlah korban bencana kabupaten/ kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintahan daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah melalui kementerian terkait. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, pemerintahan daerah wajib memperhatikan prinsip-prinsip SPM, yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mempunyai batas waktu pencapaian. Pencapaian SPM urusan sosial tersebut di ukur melalui

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
----	-----------------------	----------------------	----------------	---------------------

pencapaian indikator di masing-masing jenis layanan, secara nasional indikator SPM sebagaimana terlihat pada tabel berikut :



1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara Lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.	Jumlah Warga Negara Gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap Tahun

4.6.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
I	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	130	2022	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	130	2022	
	2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	130	2022	
	3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	130	2022	
	4.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	130	2022	
	5.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	130	2022	
	6.	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	130	2022	
	7.	Penyediaan Alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	130	2022	
	8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	11	2022	
	9.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	130	2022	

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
	10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	130	2022	
	11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	130	2022	
	12.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	11	2022	
	13.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	130	2022	
	14.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	11	2022	
	15.	Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	11	2022	
II	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak di Luar Panti Sosial		Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	33	2022	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	33	2022	
	2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	2	2022	
	3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	2	2022	



No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
	4.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	2	2022	
	5.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	25	2022	
	6.	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	25	2022	
	7.	Penyediaan Alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	25	2022	
	8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	25	2022	
	9.	Pemberian Bimbingan Fisik, MentalSpiritual & Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	33	2022	
	10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	33	2022	
	11.	Fasilitas Pembuatan Nomor IndukKependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	28	2022	
	12.	Akses ke Layanan Pendidikan &Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	28	2022	
	13.	Pemberian Pelayanan Penelusurankeluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	33	2022	

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
			Kewenangan Kabupaten/Kota			
	14.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	28	2022	
	15.	Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2022	
III	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial		Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	170	2022	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	170	2022	
	2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	1	2022	
	3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	1	2022	
	4.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	1	2022	
	5.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	170	2022	
	6.	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	170	2022	
	7.	Penyediaan Alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan	94	2022	



No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
			Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			
	8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	170	2022	
	9.	Pemberian Bimbingan Fisik, MentalSpiritual & Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	170	2022	
	10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	94	2022	
	11.	Fasilitas Pembuatan Nomor IndukKependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	170	2022	
	12.	Akses ke Layanan Pendidikan &Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2022	
	13.	Pemberian Pelayanan Penelusurankeluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	170	2022	
	14.	Pemberian Pelayanan ReunifikasiKeluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	170	2022	
	15.	Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	2022	
IV	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna SosialKhususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar		Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	57	2022	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	57	2022	
	2.	Penyediaan Layanan KedaruratanBagi Daerah Yang Sudah MemilikiKendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki	5	2022	



No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
			Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti			
	3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	3	2022	
	4.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	3	2022	
	5.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	5	2022	
	6.	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	5	2022	
	7.	Penyediaan Alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	3	2022	
	8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	5	2022	
	9.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	57	2022	
	10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	57	2022	
	11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk	5	2022	

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
		Kelahiran, Surat Nikah, dan/ atau Kartu Identitas Anak	Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota			
	12.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5	2022	
	13.	Pemberian Pelayanan Penelusurankeluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5	2022	
	14.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5	2022	
	15.	Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	2022	
V	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kota		Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kota	25.890	2022	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	25.890	2022	
	2.	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25.890	2022	
	3.	Peyediaan Tempat PenampunganPengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	25.890	2022	
	4.	Penanganan Khusus BagiKelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	25.890	2022	
	5.	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	25.890	2022	

4.6.3 Anggaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Anggaran	
			APBD	APBN
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Rp. 75.625.000,-	-
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Rp. 12.264.110,-	-
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara Lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Rp. 75.625.000,-	-
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.	Jumlah Warga Negara Gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Rp. 12.264.110,-	-
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Rp.74.548.870,-	-

4.6.4 Dukungan Personil

Kondisi Sumber Daya Manusia pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022:

No	Jenis/ Kualifikasi	Jumlah
1.	Eselon	5
	a. IIb	1
	b. IIIa	1
	c. IIIb	2
	d. IVa	1
2.	Jabatan Fungsional	7
	a. Perencana	1
	b. Penyuluh Sosial	6
3.	Unsur Masyarakat	
	a. TSKK	15
	b. Tagana	51
	c. Sakti Peksos	1
	d. PSM	182
	e. Petugas Layanan SLRT	3

4.6.5 Hasil Capaian

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase(%)
I	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar diLuar Panti Sosial		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	130	130	-	100%
	1.	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	130	130	-	100%
	2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial	130	130	-	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase(%)
			Dasar Diluar Panti				
	3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	130	130	-	100%
	4.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	130	130	-	100%
	5.	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	130	130	-	100%
	6.	Penyediaan Alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	130	130	-	100%
	7.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	11	11	-	100%
	9.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	130	130	-	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase(%)
			Kewenangan Kabupaten/Kota				
	10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	130	130	-	100%
	11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	130	130	-	100%
	12.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	11	11	-	100%
	13.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	130	130	-	100%
	14.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	11	11	-	100%
	15.	Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	11	11	-	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase(%)
II	Rehabiltasi Sosial Dasar Anak diLuar Panti Sosial		Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	33	33	-	100%
	1.	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	33	33	-	100%
	2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	2	2	-	100%
	3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	2	2	-	100%
	4.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	2	2	-	100%
	5.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan	25	25	-	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase(%)
			Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				
	6.	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	25	25	-	100%
	7.	Penyediaan Alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	25	25	-	100%
	8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	25	25	-	100%
	9.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	33	33	-	100%
	10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	33	33	-	100%
	11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang	28	28	-	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase(%)
			Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				
	12.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	28	28	-	100%
	13.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	33	33	-	100%
	14.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	28	28	-	100%
	15.	Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	-	100%
III	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial		Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	170	170	-	100%
	1.	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	170	170	-	100%
	2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	1	1	-	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase(%)
	3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	1	1	-	100%
	4.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	1	1	-	100%
	5.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	170	170	-	100%
	6.	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	170	170	-	100%
	7.	Penyediaan Alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	94	94	-	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase(%)
	8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	170	170	-	100%
	9.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	170	170	-	100%
	10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	94	94	-	100%
	11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	170	170	-	100%
	12.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	-	100%
	13.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	170	170	-	100%
	14.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	170	170	-	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase(%)
			Kewenangan Kabupaten/Kota				
	15.	Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	-	100%
IV	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar		Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	57	57	-	100%
	1.	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	57	57	-	100%
	2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	5	5	-	100%
	3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	3	3	-	100%
	4.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial	3	3	-	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase(%)
			Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru				
	5.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5	-	100%
	6.	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5	-	100%
	7.	Penyediaan Alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	3	3	-	100%
	8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5	-	100%
	9.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	57	57	-	100%
	10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	57	57	-	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase(%)
	11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5	-	100%
	12.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5	-	100%
	13.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5	-	100%
	14.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5	-	100%
	15.	Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5	-	100%
V	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kota		Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kota	25.890	25.890	-	100%
	1.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	25.890	25.890	-	100%



No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase(%)
	2.	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25.890	25.890	-	100%
	3.	Peyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	25.890	25.890	-	100%
	4.	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	25.890	25.890	-	100%
	5.	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	25.890	25.890	-	100%

4.6.6 Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan target SPM urusan sosial adalah :

- Belum semua Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dapat menerima bantuan karena masih terbenturnya dengan aturan yang ada. Hal tersebut disebabkan oleh persyaratan penerima bantuan harus masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Adapun solusi terhadap kendala tersebut adalah :

- Calon penerima bantuan yang belum masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di usulkan melalui mekanisme pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.



BAB 5

PENUTUP

LPPD

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2022**

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 sudah menggunakan sistem yang terintegrasi secara online melalui sistem informasi elektronik SILPPD Kemendagri. Metode ini dilihat lebih sederhana jika dibandingkan dengan penyusunan LPPD pada tahun-tahun sebelumnya.

Melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 ini diharapkan dapat dilihat laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, karena di dalamnya juga memuat Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP).

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 ini disusun sebagai dasar evaluasi Pemerintah Pusat untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja guna mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.



**BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
DAN KERJASAMA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



tapem@pesisirselatankab.go.id